

David Efendi

THE DECLINE of BOURGEOISIE

Runtuhnya Kelompok Dagang Pribumi, Kotagede XVII-XX

Research Center for Politics and Government

Jurusan Politik dan Pemerintahan

Universitas Gadjah Mada

2009

David Efendi

THE DECLINE OF BOURGEOISIE

Runtuhnya Kelompok Dagang Pribumi, Kotagede XVII-XX

Penyunting

Utari Parlindungan

Desain Sampul

Umir Lubis

Megatama (*Jogja Global Media*)

Tata Letak

Megatama (*Jogja Global Media*)

Research Centre for Politics and Government

Jurusan Politik dan Pemerintahan

Universitas Gadjah Mada

Jl. Socio Justicia 2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

www.ip.fisipol.ugm.ac.id

Telp. (0274) 503362 ext.212

276 + xxvi halaman

14.5x21 cm

Cetakan Pertama : September 2009

ISBN 979-19186-0-0

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
PENGANTAR PENULIS	xviii
GLOSARIUM	xxii
BAGIAN 1	
Studi Borjuasi: Melacak Asal Usul Kelompok Dagang Jawa di Kotagede	1
A. Pentingnya Studi Borjuasi	18
B. Prospek Pelacakan Borjuasi Jawa	48
BAGIAN 2	
Kotagede: Dari Mataram Islam sampai Zaman Kolonialisme	55
A. Kotagede, dan Perjalanan Sejarahnya	56
B. Revolusi Sosial dimulai dari Kotagede	65
C. Aktivitas Ekonomi Orang-Orang Kotagede	70
D. Kota Perdagangan	76
E. Pertarungan Antar Kekuatan	94
BAGIAN 3	
5 Tahap Perkembangan Borjuasi Kotagede	109
A. Revolusi Pertukangan	116
B. Era Baru Perdagangan	121
C. Industrialisasi Modern	141
D. Revolusi Pendidikan Barat dan Modernisasi	153
E. Politik : Habitat Baru Para Pedagang	164

BAGIAN 4

Profil Borjuasi Pribumi Jawa (terseleksi)	183
A. Genealogis Orang-Orang Kotagede	187
B. Profil Borjuasi Kotagede	193

BAGIAN 5

Masa Depan Politik Indonesia: Kepemimpinan Elit Dagang?	235
--	------------

BAGIAN 6

Epilog: Agenda Riset Lanjutan	261
--------------------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	263
-----------------------	------------

PROFIL SINGKAT PENULIS	275
-------------------------------	------------

KATA PENGANTAR

Achmad Charris Zubair

Di manapun, kapanpun, sutradara maupun aktor utama dinamika sosio-kultural pada umumnya, digerakkan dan dimainkan oleh manusia terdidik yang ter“cerah”kan, kelas menengah, komunitas “borjuis” dan umumnya generasi muda. Karena kelompok itulah yang pada umumnya memiliki idealisme, cita-cita dan harapan. Bahkan telah siap dengan konsep masa depan yang relatif jelas. Serta alasan paling umum, dalam bahasa yang paling sederhana, yakni makan, sandang dan bahkan papan. Karena sudah tercukupi dan tidak menganggap itu sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Sulit menemukan, walaupun tentu ada revolusi sosial yang seolah digerakkan orang-orang tak terdidik, miskin, namun pada umumnya akan melalui proses anarki atau bahkan berujung pada situasi *chaotic*, dan segera akan dimanfaatkan penyelesaiannya oleh orang lain yang sesungguhnya aktor dibelakang layar dari dinamika sosio-kultural tersebut. Gerakan sosial orang miskin pada umumnya digerakkan demi kepentingan tertentu yang seringkali sekedar memanfaatkan wacana orang miskin dan kelompok marginal. Pandangan saya diatas tentu memiliki argumen teoritik maupun faktual, kendatipun demikian terbuka untuk dibantah atau dilengkapi dengan argumen yang lebih memadai.

Tulisan saudara David Efendi yang bertajuk “Formasi Borjuasi dan Politik di Indonesia” dengan mengambil kasus genealogi borjuasi di Kotagede Yogyakarta, menjadi sangat relevan untuk menjelaskan komunitas “*middle up society*” dalam perubahan, dinamika maupun mempengaruhi corak masyarakat. Dalam hal ini saya menjelaskan bahwa manusia bukanlah makhluk yang terisolasi dari lingkungannya. Secara internal pasti dipengaruhi oleh nilai kultural dimana ia lahir, hidup dan berkembang serta dipengaruhi oleh faktor eksternal yang pada dasarnya mengasah latar belakang internal tersebut. Kelompok borjuasi di Kotagede merupakan kelompok yang amat dipengaruhi oleh kondisi manusia yang “beruntung” dalam hidupnya. Penjelasan teoritiknya adalah demikian, dalam kehidupan manusia ada 2 faktor yang menentukan kebebasan manusia tetapi juga sekaligus menunjukkan bagaimana kita harus melakukan pembebasan hidup manusia. *Pertama*, adalah faktor internal, yang merupakan kondisi dalam baik fisik, intelektual, maupun spiritual. Sepenuhnya tidak tertolak, begitu saja diterima manusia, merupakan kondisi niscaya. Asal keturunan, ras, jenis kelamin, kecerdasan merupakan contoh dari kondisi ini. Kelompok borjuasi di Kotagede diuntungkan dengan

kondisi internal ini. Pada gilirannya akan membentuk faktor kemampuan. *Kedua*, adalah faktor eksternal yang merupakan kondisi di luar diri, baik yang berupa tempat maupun suasana, lingkungan kultural, pergaulan, sosialisasi, pendidikan, kesempatan dan lain sebagainya. Faktor internal menjadi semacam fasilitasi yang diberikan oleh alam untuk komunitas borjuasi meraih faktor eksternal-nya. Pada gilirannya akan membentuk faktor kemungkinan yang dapat dikembangkan manusia. Upaya pembebasan pada dasarnya membangun faktor eksternal yang memadai bagi pengembangan optimal faktor internal serta mensenyawakan keduanya menjadi dasar bagi terbentuknya kesadaran dan kesanggupan manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan keputusan tindakannya dan mendinamisasi masyarakat sekitarnya.

Komunitas borjuasi di Kotagede, adalah kelompok yang dapat mengelola kondisi keniscayaan dalam hidupnya dengan nilai, norma, maupun kondisi faktual kulturalnya di Kotagede. Pandangan saya yang lain, tentu terbuka untuk dibantah dengan argumen yang lebih memadai, manusia menjadi tokoh atau pecundang pahlawan atau pengkhianat, pada dasarnya bukan semata-mata ikhtiar dan kekuatan manusia. Namun, karena ia di "*garis*"kan berada pada tempat dan waktu yang tepat atau tempat dan waktu yang salah. Pasti, sebagai titik peristiwa akan terkait dengan mata rantai titik yang lain di masa yang lalu dan akan menentukan titik masa depan. Sehingga tidak ada dalam hidup ini peristiwa yang kebetulan dan peristiwa sekonyong-konyong. Semua peristiwa, setiap lakon, setiap titik kehidupan ada logikanya. Namun sesungguhnya siapa yang sanggup menentukan secara sepenuhnya titik tersebut?

Saya melihat, kalau kita berbicara tentang Kotagede, titik sentral nilai kulturalnya, sesuatu yang memotivasi seluruh dinamika adalah Islam. Kotagede sendiri, yang sejak awal sejarahnya merupakan kawasan Islam. Ketika kota pertama dibangun di bekas tanah perdikan Mentaok ini, maka masjid merupakan bangunan utama kota yang pertama kali didirikan. Raja yang pertama kali pun memakai gelar Islam, Penembahan Senopati ing Alaga Khalifatullah Sayidin Panatagama. Latar belakang kultural Kotagede adalah Islam, sehingga dari faktor historis penanaman nilai-nilai Islam sebenarnya tidak menjadi masalah serius bagi Kotagede dan penduduknya. Kendatipun sebagai kota ibukota kerajaan Mataram, Kotagede tidak lagi berfungsi karena raja memindahkan pusat kerajaan ke Plered, Kerto, kemudian Kartasura, yang kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Warna Islam di Kotagede pada dasarnya tidak pernah luntur, ruh Islam tetap menyalakan denyut jantung kehidupan masyarakat Kotagede.

Kalau Kotagede dirunut secara historis, diawali sejak Mataram berdiri hampir 500 tahun yang lalu, Islam merupakan mainstream nilai dan norma Kotagede. Tapi tentu saja Islam yang teranyam dari subsistem budaya yang lain. Untuk itu ada dua faktor yang perlu diperhatikan: *pertama*, faktor historis yang berupa peristiwa-peristiwa penting di Kotagede yang mempengaruhi dinamika masyarakat Kotagede dan; *kedua*, faktor internal yang muncul dari karakter manusia Kotagede.

Faktor historis yang penting untuk diperhatikan adalah, masa awal Mataram yang periodenya antara masa hidup Panembahan senopati (1540-an) sampai Sultan Agung (1630-an) yang merupakan masa Islam yang teranyam dengan unsur Hindu dan Animisme, Dinamisme. Argumennya cukup jelas. Mataram Kotagede merupakan mata rantai Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram. Sehingga perilaku masyarakat Kotagede dipengaruhi hal-hal tersebut. Arsitektur yang dibangun pada masa itu, seperti masjid, kompleks makam, keraton, benteng dan sebagainya, serta tata kota Kotagede yang masih kita kenal sekarang ini, masih jelas warna Hindunya. Gelar Senopati memang Khalifatullah, itu gelar Islam, namun banyak catatan yang menyebutkan bahwa Senopati dan bahkan juga raja-raja yang hidup sekarang ini, memiliki dan menyimpan pusaka, jimat dan sebagainya yang itu merupakan tradisi animisme dinamisme. Juga melakukan banyak upacara yang dipengaruhi oleh bentuk akulturatif macam-macam latar belakang budaya. Itu wajar-wajar saja, tidak perlu disebut bid'ah, khurafat dan tahayul sebelum paham konteks historisnya. Dinasti Abbasiyah yang sering disebut sebagai masa kejayaan Islam pun mengembangkan arsitektur yang sebenarnya produk budaya kaum Majusi penyembah api di Persia Kuno, seperti kubah dan lengkung yang sekarang menghiasi masjid-masjid di seluruh dunia. Perilaku masyarakat Kotagede pada waktu itu pasti dipengaruhi oleh para penguasa dimana raja, bangsawan dan abdi dalem menduduki posisi elite pada stratifikasi sosial masa itu. *Mainstream*-nya sudah Islam tetapi nilai, norma, perilaku dan produk budaya pada masa itu teranyam dari berbagai unsur. Bahkan kultur Arab tidak nampak pada masa itu. Buktinya di Masjid Gedhe Mataram, tidak satupun ditemukan tulisan Arab, kecuali yang dipasang pada masa-masa terakhir ketika masjid tersebut direnovasi awal abad 20.

Peristiwa penting kedua adalah dipindahkannya ibukota Mataram dari Kotagede ke Kerto kemudian Plered oleh Sultan Agung pada dasawarsa ketiga abad 17. Kotagede ditinggal oleh raja, bangsawan tinggi, yang disisakan abdi dalem setingkat Patuh, Bekel, Lurah yang relatif rendah. Masa ini merupakan *the turning point* dari potensi ekonomi dan budaya manusia Kotagede yang berorientasi keraton ke orientasi pasar yang lebih luas. Di satu sisi Sultan Agung bersama cendekiawan pada zamannya telah berhasil mengharmonikan Islam dengan Jawa,

Islam pada masa Sultan Agung terpahami secara lebih utuh. Karyanya yang monumental “Sastra Gending” adalah karya Jawa yang sangat Islami. Wajah Islam menjadi sangat “kultural” ketika Sultan Agung mengkombinasikan sistem kalender Hijriyah dengan kalender Saka. Ada orang Kotagede yang sangat paham soal ini, sayang sudah wafat sebelum ilmunya terserap oleh generasi Kotagede yang lebih muda, yaitu Bapak Muhammad Hoedan bin Mustadjab. Sesudah periode ini Kotagede mengalami dinamika, lebih berwatak ekonomis dan demokratis, sejak saat itu potensi Kotagede sebagai perniagaan mulai tumbuh.

Peristiwa penting ketiga, adalah pasca perjanjian Giyanti 1755 yang memecah Mataram menjadi dua: Yogyakarta dan Surakarta. Kotagede terkena dampak dari pembagian yang aneh ini. Kotagede Surakarta *enclave* di tengah-tengah wilayah Yogyakarta. Sementara wilayah Kotagede yang masuk Yogyakarta ada sendiri. Bangunan dan pohon beringin dibagi keduanya, hanya masjid dan makam yang tidak dibagi, abdi dalem dipecah dengan baju yang berbeda. Pada masa itu banyak pendatang dari luar daerah seperti Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan menjadi penduduk Kotagede dengan membangun rumah di alun-alun dan ndalem yang tadinya kosong ditinggal raja.

Peristiwa penting keempat, awal abad ke-20 di mana terjadi kebangkitan nasional. Muncul gerakan-gerakan baru yang bersifat Nasionalis, Islamis, bahkan Marxis yang mengindikasikan sebagai awal abad komunikasi dan kebangsaan. Lahirnya Boedi Oetomo, Moehammadijah, Sjarikat Islam yang berkembang menjadi SI Kanan dan Kiri, mempengaruhi Kotagede. Moehammadijah Kotagede bahkan termasuk cabang perintis. Sekolah pertamanya justru di Kotagede tahun 20-an. Penyandang dana cukup besar bagi gerakan awal Moehammadijah adalah orang Kotagede yang bernama H. Moehsin bin H. Moekmin. Pada awal abad ini terjadi pertumbuhan pesat di Kotagede, karena pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi dan hak monopoli terhadap dua kelompok keluarga di Kotagede. Kelompok keluarga Kalang mendapatkan konsesi untuk perdagangan berlian, candu, dan pegadaian. Sementara kelompok “santri” mendapatkan konsesi perdagangan mori, lawe untuk batik serta berlian. Tahun 1999 saya berkunjung ke salah satu keluarga di Laweyan Solo dan mendapatkan catatan dan cerita bagaimana erat hubungan antara Laweyan dan Kotagede. Ledakan ekonomi terjadi di tahun 20-an, ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan mewah di Kotagede dan dikirimnya pemuda-pemuda Kotagede untuk belajar agama maupun umum. Tercatat Zubair dan Jalan belajar di Nederland, Makmur dan Abdul Qohhar mudzakkir belajar di Mesir, Kasmat Bahoewinangoen dan Rasjidi Atmosoedigdo belajar di Perancis. Ledakan ekonomi di Kotagede dinilai ajaib karena karena pada saat itu dunia sedang dalam

keadaan malaise atau krisis di bidang ekonomi. Muncul cerita atas peristiwa yang menyangkut perilaku orang kaya yang banyak uang. Seperti rencana untuk mengganti lantai rumah dengan kepingan mata uang, atau lomba mencari kantong berisi uang di ruang gelap atau bahkan yang ekstrim ada pemuda kaya yang perilakunya nakal, karena suka memanggil pedagang angkringan gulai kambing tidak untuk dimakan tapi untuk dikencingi walaupun toh dibayar juga.

Peristiwa kelima adalah periode 1950-an menjelang 1965, di mana Kotagede menjadi kota buruh miskin. Juragan tidak lagi nampak kaya, sementara para profesional banyak yang memilih tidak tinggal di Kotagede. Kesenian-kesenian rakyat tumbuh berkembang yang karena aktivisnya banyak anggota PKI (LEKRA) maka kethoprak, wayang srandhul identik dengan PKI. Sementara keroncong adalah kesenian orang “abangan”. Secara umum Muhammadiyah terkonsentrasi pada kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan pengajian dan tidak pada kesenian. Hanya pada generasi mudanya NA Kotagede memiliki grup angklung dan Pemuda Muhammadiyah memiliki drumband, yang juga dimiliki oleh pemuda rakyat dan pemuda Marhaenis. Gerakan kesenian yang lainnya adalah munculnya sanggar lukis “Bulus Kuning” dan teater “Iqbal” dimotori oleh anak-anak muda yang tergabung dalam pelajar Islam Indonesia. Pada era 65 sampai dengan 7 Kotagede mencerminkan situasi kondisi pasca Gestapu. Masjid-masjid penuh, orang-orang kelihatan alim, namun kesenian tidak berkembang. Dunia Kotagede nampak agamis tapi kering. Saya mencatat hanya beberapa grup keroncong yang hidup, dan satu kelompok Orkes Melayu yang dimotori oleh Jumanuddin Humam adik dari As’ad Humam almarhum penyusun “IQRO”, kini Jumanuddin aktif di TPA AMM.

Kotagede pernah ditinggalkan oleh penguasa, yakni jaman Sultan Agung di paruh ketiga abad ke tujuh belas, yang memindahkan ibukota Mataram ke Plered. Sebagai kota yang ditinggalkan penguasa, Kotagede berkembang menjadi kota dagang dan wirausaha, dan umumnya penduduk Kotagede masih memiliki ikatan persaudaraan, yang pada dasawarsa kedua dan ketiga abad ke-20 amat disegani. Karena justru pada saat dunia sedang dilanda “malaise” atau kehancuran perekonomian. Kotagede sedang maju ekonominya, bahkan menjadi kota termakmur di wilayah Jawa pada saat itu. Pada masa itulah gerakan modern Islam Muhammadiyah berdiri di Kotagede dengan dipelopori keluarga pedagang kaya di Kotagede.

Harus diakui di Kotagede Muhammadiyah tidak berjalan sendiri. Bahkan harus diakui dengan lapang dada, gerakan Muhammadiyah di Kotagede terkesan agak kurang greget karena kebanyakan terbelenggu pada rutinitas dalam beraktivitas. Kotagede menjadi amat tersohor

dengan adanya gerakan Angkatan Muda Masjid-nya almarhum H. As'ad Humam dengan "Iqro"-nya. Taman Kanak-Kanak, Taman Pendidikan Ta'limul Qur'an-nya menjadi contoh di seluruh Indonesia dan bahkan di berbagai negara di dunia. Mereka dikenal sebagai penyelamat Al Qur'an, sebuah sebutan yang tidak saja membuat bangga perintisnya tetapi juga seluruh umat. Sejak lama Ma'had Islamy yang didirikan oleh almarhum Kyai Amir, Kyai H. Ahmad dan Kyai H. Muhsin mendidik tunas-tunas Kotagede menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan. Ma'had Islamy telah berkembang dan mempunyai lembaga pendidikan sejak Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan 'Aliyah dengan murid dan alumni yang berjumlah ribuan. Bahkan diantaranya telah berhasil menjadi orang terpendang di lingkungannya. Di Kotagede juga telah berdiri pondok pesantren Nurul Ummah dan Nurul Ummahat yang dirintis oleh Kyai H. Asyhari Marzuki (alm.) yang pada masa hidupnya pernah menjadi Rais Syuriah Nahdlatul Ulama dan Kyai H. Abdul Muhaimin. Saya tahu persis banyak mahasiswa di Yogyakarta yang belajar agama di pondok tersebut, dan hasilnya mereka berhasil memberikan wacana religius yang sangat kental di kampus-kampus umum di mana mereka belajar ilmu pengetahuan umum. Masih, di wilayah Kotagede bagian timur terdapat "Markas" Majelis Mujahiddin Indonesia. Kotagede amat dekat dengan Pondok Pesantren Krapyak yang menjadi tempat kader Nahdlatul Ulama, dan juga dengan pondok pesantren Ibn al Qayyim di Jalan Wonosari. Denyut nadi dinamika sosio kultural yang luar biasa, yang lagi-lagi digerakkan oleh komunitas elite, berdidik, tercerahkan dan memiliki modal yang cukup. Belurn lagi gerakan-gerakan organisasi kesenian seperti slawatan, gejogan lesung dan sebagainya.

Untuk melengkapi kata pengantar ini, dalam konteks Yogyakarta kita dapat belajar bagaimana kelompok borjuasi yang elite juga mempengaruhi dinamika sosial. Saya menyebut sebagai "segitiga emas" yang secara historis kultural tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Yogyakarta, di sini pula gerakan-gerakan masyarakat dengan *mainstream* Islam. Lokasi itu meliputi 7 (tujuh) K, yakni: *Pertama*, Kotagede, karena merupakan bekas pusat kerajaan Islam Mataram yang didirikan Panembahan Senopati pada paruh abad 16, Mataram menjadi cikal bakal dari Kesultanan Yogyakarta dan juga Kasunanan Surakarta, di samping Kadipaten Pakualaman Mangkunegaran. Kotagede sekarang masih representatif mewakili kota tradisional Islam-Jawa. Di Kotagede ini terdapat juga gerakan-gerakan Islam baik tradisional maupun modern, lembaga pendidikan pesantren dan umum, lahir tokoh-tokoh gerakan Islam berskala nasional bahkan internasional seperti Kahar Muzakir, Rasjidi. Lahir dan berkembangnya gerakan pendidikan Al Qur'an "Iqro" yang dimotori As'ad Humam yang gemanya di seluruh

Nusantara dan luar negeri, bermula dari Kotagede. Kotagede juga merupakan contoh baik tumbuh berkembangnya semangat *entrepreneurship* di kalangan kaum santri. *Kedua*, adalah Kerta dan atau Plered sebagai tempat kedua ibukota Mataram, pada masa raja ketiga yakni Sultan Agung pada dasawarsa pertama abad ke 17. Sultan Agung merupakan raja besar yang berperang melawan Belanda di Batavia. *Ketiga* adalah Kanggotan dan atau Wanakrama, yang secara tradisional merupakan lokasi tumbuh dan berkembangnya pesantren dan ulama Yogyakarta. *Keempat* adalah Krapyak, lokasi bersejarah dalam konteks, baik Mataram maupun Kesultanan Yogyakarta, di sini pun merupakan pusat gerakan Islam yang berupa Pondok Pesantren dari Nahdlatul Ulama yakni Pesantren Al Munawwir. *Kelima*, adalah Karangajen, sebagai pusat gerakan santri pedagang di samping Kotagede. *Keenam*, adalah Kauman Yogyakarta, yang secara tradisional merupakan tempat tinggal ulama dan penghulu keraton Yogyakarta, dan dari keluarga penghulu keraton lahir Kyai Dahlan sebagai pendiri gerakan Islam modern Muhammadiyah. *Ketujuh*, yang terakhir adalah Keraton Kasultanan Yogyakarta itu sendiri yang kini menjadi pusat gerakan budaya yang tidak boleh dianggap enteng di Yogyakarta dan bahkan Indonesia. Karena dari tempat inilah sumber inspirasi bagi perkembangan budaya dalam arti yang luas.

Sebagai penutup, saya melihat studi yang dilakukan oleh saudara David Efendi dalam tulisan ini, merupakan sumbangsih yang berharga untuk memahami dinamika masyarakat yang digerakkan oleh manusia tertentu. Kasusnya memang amat terbatas, yakni Kotagede, sebagai wilayah kecil di Indonesia. Kelemahan pasti ada, baik dalam konteks pilihan kasus dan lokasi maupun kelemahan dalam analisis akademiknya. Namun upaya semacam ini, dapat diproyeksikan dalam skala ruang yang lebih luas dan rentang waktu yang lebih panjang, dalam memahami dinamika manusia itu sendiri. MANUSIA dalam “huruf” besar sebagai makhluk mulia dan khalifatullah dimuka bumi ini.

Kotagede, 12 November 2008

PENGANTAR PENULIS

“...modernisasi harus kita ciptakan sendiri bukan karena kolonialisme yang memaksa kita melakukan perubahan.”

- David Efendi -

Buku ini tentunya sedikit banyak memberikan kontribusi atas perdebatan mengenai formasi elit, kelas menengah (*middle class*) atau yang penulis sebut borjuasi di kalangan kelompok pribumi Jawa, kelompok intelektual pada zaman-zaman berikutnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, luasnya kajian yang penulis lakukan dalam rangka pembuatan karya tulis ini. *Kedua*, penulis berusaha melakukan pembacaan terhadap realitas historis yang menjangkau lebih dari dua abad yaitu semenjak Mataram Islam sampai pasca kolonial/ kemerdekaan. Hal ini tentunya mengalami beberapa peninggalan sejarah yang dilakukan oleh penulis sendiri. Saya berusaha membeberkan banyak data dengan analisa yang bisa dikatakan “terbatas” dan “sederhana”. Kesederhanaan inilah yang penulis maksudkan untuk menciptakan ruang diskusi, dan saling memberikan koreksi dan masukan untuk perbaikan karya di masa yang akan datang. Lengkap sudah penulis mendeskripsikan karya dari bab satu sampai bab enam yang memproyeksikan beberapa atau komunitas dagang Jawa di Kotagede abad 18-an. Atas saran pembimbing pula saya membuat proyeksi kepemimpinan elit bangsa yang bias belajar dari Kotagede. Satu hal bahwa kepemimpinan kelompok dagang bias runtuh akibat kegagalan mewariskan sistem ekonomi yang orientasi kekeluargaan menghadapi globalisme dan pergolakan politik baik lokal, nasional, maupun internasional.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan karya ini terselesaikan. Ibarat melahirkan, terasa berat akan tetapi menyenangkan dan lega pada *ending*-nya. Akhirnya ungkapan bangga dan rasa syukur sebagai alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM karena banyak hal yang, saya dapatkan selama belajar disini. Ada ruang yang terbuka luhur, ada space apresiasi yang ditradisikan di JIP terhadap karya mahasiswa.

Akhirnya terima kasih kepada Mas Cony (Cornelis Lav, MA), yang membimbing saya dengan sabar dan menyediakan banyak *literature* yang relevan akan karya saya ini, terima kasih

telah meminjamkan perpustakaan pribadinya yang membuat penulis geleng-geleng betapa banyak hal yang belum penulis baca. Terima kasih tak terhingga kepada Prof. Dr. Pratikno dan Ari Dwipayana yang memberikan inspirasi untuk menulis tema "borjuasi". Kepada Pak Pratik yang banyak memberikan motivasi belajar, Mas Nanang yang berkontribusi atas tema dan naskah karya ini tentu sangat menyita banyak waktunya. Terima kasih kepada JIP (Jurusan Ilmu Pemerintahan), Mas Wawan, Pak Sarjono, Bung Utan mengurus penerbitan dan segenap civitas akademik JIP. *Thanks* berat kepada KOMAP tempat saya belajar menulis, juga kepada penerbit JIP, Bung Utan yang sangat apresiatif dan sabar menunggu naskah selesai saya edit. *Unforgettable*, teman-teman PP IPM yang menjadi teman diskusi yang hangat: Mudzakkir, Ridho, Moelyadi, Mas Danan, Mbak Karni, dkk. Kepada komunitas Agus Salim 64, Mas Sayuti, Mas Amir, Mbah Aish, Mas Adim atas rekomendasi bacaan dan *key persons*-nya. Dan terima kasih saya kepada kontributor diskusi dan bahan yang sangat penting Ahmad Muntaha, M.Si dan Ibu Triasetiawati, M.Si, Bu Wardana, Bu Nilawati dan Dr. Khoiruddin Bashori, dan beberapa nama yang tidak saya sebutkan, terima kasih semua atas bantuannya. Untuk anak saya, Derrida Hafiz Hanafi dan istri saya, Rifatul Anwiyah kalian kini menjadi sumber inspirasi dan energi baru untuk terus berkarya.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada masyarakat Kotagede yang sangat membantu penulis dalam upaya menggali sumber informasi, terutama kepada Bapak Charis Zubair yang meluangkan waktu untuk diwawancarai dan juga memberikan informasi penting serta berkenan menuliskan kata pengantar untuk buku ini. Semoga diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah SWT, Amien.

Semoga mahasiswa dan dosen Fisipol UGM tetap menjaga idealisme, menjaga integritas intelektualnya di jalur yang benar, tetap kritis sebagai paradigma yang selama ini dijunjung tinggi. Semua kontribusi karya sedikit banyak memberikan inspirasi kepada pemimpin bangsa bahwa jabatan adalah amanah, bahwa akumulasi modal hanya dibenarkan untuk menjaga keadilan, agar bangsa dan rakyat ini tidak terdzalimi dari keserakahan segelintir kelompok borjuasi yang anti terhadap itikad bahwa kesejahteraan untuk semua. Diskusi lebih lanjut pasti sangat penulis harapkan.

Selamat mengkritisi.

Lereng Merapi, Sleman, Jogjakarta,

24 Agustus 2009

Penulis

GLOSARIUM

Abangan	: Kelompok yang dianggap tidak taat terhadap ajaran Islam
Agama Jawa	: Agama “campuran” Islam dan Hindu
AMM	: Angkatan Muda Masjid
AMM	: Angkatan Muda Muhammadiyah
Andhong	: Salah satu nama alat transportasi masyarakat dengan kereta kuda
Abdi Dalem	: Pelayan keraton, abdi raja
Alun-alun	: Lapangan di depan keraton di Jawa
Aisyiyah	: Organisasi perempuan Muhammadiyah
Bakul	: Penjual/ distribusi barang dagangan (pedagang kecil)
Bangsawan	: Orang yang berbangsa, keturunan raja
Bani	: Anak, keturunan/silsilah
Birokrasi	: Organisasi pemerintahan yang diatur oleh pegawai
Bisnis	: Aktivitas untuk mencari keuntungan
Borjuasi	: Mengenai golongan beruang/kaya
Borjuis	: Golongan beruang, pedagang kaya
BMT	: Baitul Mall wa Tamwil
Da’wah	: Penyampaian misi ajaran tertentu (Islam)
Elit	: Kelompok yang jumlahnya terbatas dan berpengaruh
Etos	: Semangat, jiwa, karakteristik khas suatu bangsa

Feodal	: Penguasa tanah, karakteristik hidup masyarakat bercorak kebangsawanan
Feodalisme	: Paham atas penguasaan tanah, daerah
Formasi	: Pembentukan suatu struktur
Genealogi	: Asal-usul atau keturunan baik gen atau etos
Gestapu	: Gerakan PKI merebut kekuasaan atau Gerakan September Tiga Puluh
Giyanti	: Nama perjanjian yang dibuat kolonial untuk memecah Mataram
Hukum warisan	: Peraturan dalam agama Islam untuk mengatur pembagian harta keluarga
Haji	: Sebutan orang muslim yang sudah berangkat ke Mekkah/Madinah
Juru kunci	: Penjaga pesarean/makam
Joglo	: Rumah khas Jawa-Jogja
Kapitalisme	: Aliran/paham yang mendukung akumulasi modal
	Kapitalisme-feodal : Kekuatan kelompok raja yang bersekongkol dengan kolonial
Kalang	: Anggota masyarakat yang mempunyai ciri khas sendiri di Kotagede baik secara profesi maupun perilaku keagamaan
Kalangan	: Sendiri/terbatas
Kalang Obong	: Jenis upacara Wong Kalang
Katib	: Pengurus urusan agama di keraton semacam penghulu atau takmir masjid
KKK (3K)	: Kauman Kotagede Karangajen
Langgar	: Tempat mengaji/bersembahyang untuk orang Islam
Madrasah	: Tempat menuntut ilmu agama Islam
Ma'had	: Mazhab/aliran
Masjid Gedhe	: Masjid agung/besar

Masjid perak	: Masjid besar kedua selain masjid besar
Masyumi	: Partai politik Islam terbesar pada pemilu 1955
Menthaok	: Nama alas cikal bakal daerah Mataram/ Kotagede
Muhammadiyah	: Organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh KH Dahlan di Kauman Yogyakarta
Mori	: Kain putih, sejenis kain yang menjadi kebutuhan masyarakat
Modern	: Orang yang berhaluan modern
Modernisasi	: Gerakan untuk merombak cara-cara lama menuju cara-cara yang baru dalam kehidupan sehari-hari
Monopoli	: Penguasaan terhadap jenis komoditas perdagangan
Mubaligh	: Juru dakwah dalam Islam
Muammalah	: Hubungan antar manusia/perdagangan/ekonomi
NU	: Nahdlatul Ulama
Pasar legi	: Pasar besar hari legi/kalender Jawa
Pesareyan	: Kuburan/tempat pemakaman
Paguyuban	: Perkumpulan anggota masyarakat
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pribumi	: Penduduk asli/lokal
Proletariat	: Kelompok terpinggirkan/tertindas
Pusdok	: Pusat Dokumentasi adalah nama yayasan budaya di Kotagede
Ortom	: Organisasi otonom di bawah Muhammadiyah
Santri	: Kaum yang taat agama (Islam)
Sargedede	: Pasar Gedhe/pasar besar
Selamatan	: Upacara tasakuran/ritual dalam Islam

Syawalan	: Acara berkumpul keluarga pada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal
Sodagar	: Pedagang besar, biasanya tinggal di Kauman, kompleks masjid
Tarikat	: Aliran kepercayaan dalam Islam
Tra	: Silsilah keluarga berdasarkan garis nenek moyangnya
Transformasi	: Perubahan bentuk
UII	: Universitas Islam Indonesia
Warong/warung	: Tempat jualan biasanya di pinggir jalan
Wali songo	: Ulama yang diagungkan masyarakat
Wakaf	: Memberikan hak kepada orang lain/lembaga
Wong Masjidan	: Santri yang taat beragama
Wong cilik	: Orang kebanyakan yang selalu menjadi korban kebijakan pemerintah

BAGIAN 1

Studi Borjuasi: Melacak Asal Usul Kelompok Dagang Jawa di Kotagede

*“No bourgeoisie, no democracy”*¹

(Barrington Moore, 1966, hlm.67)

Kata “borjuis” merupakan adopsi dari bahasa Perancis yaitu bourgeoisie. Kata tersebut awalnya dimaksudkan untuk menyebut orang-orang yang hidup dekat burgus yaitu benteng dan keraton. Mereka hidup dari perdagangan dan industri dan dibedakan baik dari kaum bangsawan maupun kaum petani. Mereka hidup di pusat kota². Kaum *boergois*, yang hampir sama dengan kelas menengah, mengadakan banyak revolusi sosial misalnya tahun 1789 di Perancis, 1917 di Kerenski-Rusia, tahun 1848 dan 1918 di Jerman. Para borjuis ini ikut berpengaruh dalam panggung politik negara dan kekuasaan, akan tetapi di Asia Tenggara terdapat kecenderungan golongan borjuis sebagai kekuatan kelompok sosial yang, memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan melupakan kepentingan orang banyak.³

¹ Demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi. Inilah argumen Barrington Moore, seorang Sosiolog Politik Amerika Serikat dalam bukunya *Social Origin of Dictatorship and Democracy* (1966), Hal ini bisa dibaca juga dalam serpihan artikel Mewaspada Peran Ganda Pengusaha-pejabat dalam <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/periskop/mewaspada-peran-ganda-pengusaha-pejabat.html>

² Bisa dibaca di www.wikipedia.com. Dalam Ensiklopedia Encarta juga dituliskan mengenai asal muasal borjuasi. *“Bourgeoisie, originally, the free residents of European town during the Middle Ages. The bourgeoisie later became synonymous with the middle class”*. Lebih jelas penulis kutipkan beberapa kalimat berikut : *“The term was first applied to those inhabitants of medieval towns in France who occupied a position somewhere between the peasant and the landowning nobility; soon it was extended to the middle class of other nations. These people were usually merchants, tradespeople, and artisans and later bankers and entrepreneurs. With the development of medieval cities as centers of commerce, the bourgeoisie began to emerge as an important socio-economic class. Frequently they banded together into corporations or guilds to protect their mutual interests from the more powerful landed gentry.* Sumber: Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.

³ Borjuasi sebagai golongan masyarakat yang penghasilannya melebihi penghasilan rata-rata rakyat biasa; golongan menengah ke atas. Borjuasi juga diartikan sebagai sistem sosial yang dikuasai golongan menengah, Lalu borjuasi ia pahami sebagai suatu golongan masyarakat yang telah lama berjuang untuk menentukan kedudukannya dalam sejarah melawan ikatan-ikatan sosial dan kultural lama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan aspirasi -aspirasi baru baik kemasyarakatan ataupun kebudayaan. “Borjuasi” disini dimaknai sebagai kelompok kelas menengah yang terdiri dari pedagang, pengusaha kaya, dan kaum terdidik. B.N. Marbun, Kamus Polik. (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm, 75-79. Sementara Kuntowijoyo melihat borjuasi sebagai kekuatan sosial yang cukup memberikan kontribusi dalam transformasi.

Radhar Panca Dahana (2007), menyebut borjuasi sebagai salah satu kenyataan sosial yang lahir dari rahim masyarakat modern yang industrialis-kapitalis. Borjuasi (*bourgeoisie*) merupakan sebuah masyarakat kelas menengah yang dibentuk dari kelas pengrajin (artisan) pada abad pertengahan Eropa, yang lewat gilda-gildanya menanjak menjadi kelas yang menentukan. Kelas yang menentukan ini jika jumlahnya tidak banyak maka akan dengan otomatis kita mengatakan mereka adalah *elit* di dalam masyarakatnya⁴.

Di Perancis, kelas borjuis sangat kuat sehingga Raja Perancis banyak memberikan gelar kehormatan kepada mereka pada abad ke-14, dan giliran berikutnya mereka melakukan konspirasi untuk menciptakan sistem feodal. Konon terinspirasi oleh revolusi Perancis dan Amerika pada abad ke-17 dan ke-18. Kelas tersebut selalu menduduki tempat penting dalam struktur kekuasaan di berbagai negara industrialis (*industrialized nation-state*) atau pada akhir abad ke-19 menjadi masyarakat kapitalis.

Ketika kehidupan masih sangat sederhana dan terutama tergantung kepada pekerjaan tangan dan pertanian, pendeknya di zaman feodal, seorang mempunyai darah ningrat, biarpun tingkat pendidikan keahliannya rendah, “*boleh menaiki singgasana dengan pertolongan pendeta dan bangsawan*”, menguasai hajat hidup ratusan juta manusia. Kelas “borjuasi” menguasai perekonomian pasar (kapitalisme) yang menuntut hak-hak politik dalam negara dengan mendesak pemerintah untuk menerapkan sistem politik yang demokratis-parlementarisme. Mereka menuntut penghapusan sekaligus hak-hak feodal dan juga menuntut penetapan sistem penghasilan dan pembagian (distribusi yang kapitalistis).⁵ Tatkala raja dan para penderitanya tetap mempertahankan hak-haknya hancurlah mereka dalam “Revolusi borjuasi” tahun 1789 sebagai buah pertentangan yang tak mengenal lelah antara feodalisme dengan kapitalisme menjadikan Perancis sebagai pelopor revolusi di seluruh Eropa.⁶

Penulis tidak membedakan borjuasi dengan kelas menengah, bahkan penulis berpendapat bahwa borjuasi dalam konteks Indonesia adalah kelas menengah dengan basis materialnya atau kelompok elit ekonomi. Hal ini mengacu pada Sosiologi Marxian Ortodoks yang tidak menemukan adanya kelas menengah sebab menurut konsepsinya yang berdasarkan

⁴ Radhar Panca Dahana, *Borjuasi Indonesia*, Kompas, 14 Juli 2007, hlm.8.

⁵ Tan Malaka, *Aksi Massa*, <http://listserv.cddc.vt.edu/marxis/indonesia/indones/AksiMassa/bab1.htm>

⁶ Cita-cita revolusioner berjalan terus tanpa mengindahkan adanya pukulan, peluru dan siksaan penguasa. Kerajaan, gereja, dan duma (parlemen di Rusia) dalam waktu yang singkat habis disapu oleh gelombang revolusioner yang tak terbandung. Dalam revolusi buruh bulan November 1917 kelihatan bahwa kelas buruh mempunyai kekuatan dan kemauan yang melebihi borjuasi.

kepemilikan alat produksi maka yang ada hanyalah kelas borjuasi (pemilik alat-alat produksi) dan kelas proletary (penyedia tenaga kerja).⁷

*“Di Inggris banyak dipergunakan istilah middle class daripada borjuasi, barangkali karena kekhususannya bagi pertumbuhan golongan apa yang di Perancis disebut borjuasi di Inggris tidak ada, setidaknya secara nyata. Dalam pengertian kelas menengah tercampur pengertian ‘kelas’ dan ‘status’, yaitu antara penggolongan berdasarkan kesempatan ekonomi dengan penggolongan berdasarkan kehormatan di muka masyarakat karena nilai-nilai kultural. Sedangkan borjuasi kita pakai dalam pengertian Weber tentang kelas”.*⁸

Mungkin menyebut satu kelompok di Indonesia sebagai borjuasi bisa jadi menurut sebagian kalangan kurang tepat sebab borjuasi itu terdapat pada masa masyarakat kapitalis sejati. Akan tetapi, tentu ada banyak kenyataan-kenyataan sosial yang akan saya sampaikan pada bab-bab berikutnya. Selain itu, kategori borjuasi adalah kategori yang berparadigma Marxisme yang masih sulit diterima oleh ilmuwan sosial Indonesia sendiri. Sedangkan di Indonesia sendiri dianggap kapitalisme yang ada hanyalah kapitalisme semu yang tidak mandiri dari negara.⁹

Kalau kita melihat masyarakat dengan kaca mata Marx maka yang terlihat hanyalah bahwa masyarakat itu homogen dalam dikotomi kelas yaitu kelas atas dan bawah. Hal ini pernah dikemukakan dalam tulisan Dawam Raharjo (1999) :

*“Karena melihat susunan masyarakat dari sudut yang menindas dan yang tertindas, maka kelas-kelas dalam masyarakatnya hanya terdiri dari dua kelas saja. Dalam masyarakat perbudakan, terdapat kelas penguasa dan budak. Dalam masyarakat foodal ditemukan kelas tuan tanah dan petani penggarap. Dan dalam masyarakat kapitalis industrial muncul kelas buruh dan kelas majikan atau pemilik modal. Yang terakhir sering juga disebut dengan istilah “kapitalis” atau borjuasi”.*¹⁰

⁷ Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara, Sebuah persoalan*, (Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2004), hlm. 91.

⁸ Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi Dalam Transformasi Eropa* (Yogyakarta : Ombak, 2005) hlm. 39

⁹ Hal ini menunjukkan bahwa antara borjuasi dan kelas menengah sebenarnya agak sulit dibedakan secara substantif sehingga penanaman borjuasi yang lazim di Perancis tidak terlalu penting untuk dipaksakan penggunaannya di Inggris. Sedangkan Weber melihat masyarakat adalah sangat pluralis yang tidak hanya terdiri dari kelas dua kelas atas dan bawah saja.

¹⁰ Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES. 1999), hlm. 264

Jadi, seperti halnya yang dikemukakan Jery (1991), bahwa *bourgeoisie* merupakan terminologi yang berkaitan dengan kelas kapitalis sebagaimana teori yang berkembang dari pemikiran Marx. Sementara itu Muchtar Lubis mencoba menjelaskan identitas kelas menengah di Indonesia sebagai berikut:

“Yang dikatakan kelas menengah ini juga amat lemah solidaritas sosialnya.

Hanya kalau diundang oleh pembesar negara, dan disuruh untuk menyumbang

dana untuk membantu berbagai kegiatan sosial seperti membantu korban

bencana alam, upaya membantu orang miskin, orang cacat, dsb, barulah

mereka mas mengeluarkan uang mereka”.¹¹

Kelas borjuasi merupakan salah satu tema kajian yang sering mendapat perhatian para ilmuwan akhir akhir ini. Banyak ilmuwan sosial tertarik membahas fenomena borjuasi atau kapitalisme di negara “sedang berkembang”. Aristoteles mempunyai pandangan bahwa di setiap negara terdapat pelapisan masyarakat yang terdiri dari lapisan yang sangat kaya, lapisan masyarakat yang sangat miskin, dan lapisan yang berada diantaranya.¹² Umumnya perbincangan kelas menengah selalu dikaitkan dengan konteks demokratisasi meski masih dalam perdebatan.¹³ Meski sebagian besar meyakini bahwa keberadaan borjuasi adalah prasyarat utama tegaknya demokrasi. Ilmuwan politik seperti Seymour Martin Lipset, Samuel Huntington, dan Adam Przeworski, misalnya meyakini proposisi itu.

Jamie Mackie (1983) berpendapat bahwa borjuasi dalam konteks Eropa tidak terdapat di Indonesia, karena kapitalisme murni dengan semangat kompetisi tidak dihargai. Kelas menengah tidak bisa lahir dan berkembang kokoh serta berpengaruh seperti kelas borjuis di Eropa di dalam negara “birokrasi patrimonial” Indonesia yang punya sifat sangat berbeda dengan sistem pemerintahan borjuis-kapitalis. Borjuasi di Eropa, dalam pandangan Jamie

¹¹ Baca lebih lengkap dalam buku “*Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*”, karya Munafrizal Manan, hlm. 401.

¹² Baca Haryanto, *Kekuasaan Elit*, Suatu Bahasan Pengantar, (Yogyakarta, PLOD-JIP UGM, 2005), hlm. 113.

¹³ Baca Arbi Sanit dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UNISIA No. 34/XIX/II/1997 dengan judul tulisan *Demokratisasi: Politik Golongan Menengah Indonesia*, Hlm. 14-15. Dalam pandangannya disebutkan bahwa keraguan akan peranan kelas menengah ini disebabkan bahwa keberadaan kelas ini menjadi bagian dari elit dan kepanjangan tangan penguasa karena kelas menengah telah mendapatkan fasilitas dari sang penguasa. Namun, sebenarnya secara lebih detail melihat kondisi sekarang kelas menengah dapat terlihat dari pengamatan terhadap hasil interaksi antara elit dengan massa melalui program dan kemitraan dagang atau kelembagaan sosial dan ekonomi.

Mackie merupakan borjuis tradisional, yang doktrin utamanya adalah pengakuan hak milik perseorangan, individualisme, persaingan bebas, dan *rule of the law*.

Dalam perkembangan berikutnya, terdapat model kelas menengah lama dan baru dalam konteks universal. Manufrizal Manan (1997) mencatat bahwa kelas menengah lama adalah penghasil barang-barang modal (makanan, manufaktur) dan penjualan. Untuk kasus Indonesia, kemunculan kelas menengah baru umumnya merupakan kombinasi dari kelas menengah lama. Adapun kemunculan mereka dapat diidentifikasi ke dalam tiga kategorisasi. *Pertama*, borjuasi yang lahir karena keturunan. *Kedua*, borjuasi yang lahir karena kolusi dengan birokrasi atau negara. *Ketiga*, mereka yang menjadi borjuis karena tingkat pendidikan yang ditempuh dan kemampuan merespons perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

Penulis memberanikan diri untuk membuat kategori kelompok borjuasi yang olah dari berbagai sumber untuk menegaskan kelompok tertentu masuk dalam borjuasi lama atau borjuasi yang baru.¹⁵ Kelas borjuis lama terdiri atas; pengusaha, pedagang, petani pemilik, majikan pemilik, saham mayoritas yang jumlah pekerjanya 25 orang. Sedangkan borjuis baru terdiri atas; pegawai negeri/BUMN/swasta, manajer, mandor /supervisor, karyawan lepas berprofesi, pegawai negeri golongan 3A ke atas, pegawai BUMN/swasta sebagai kepala bagian, staf asisten manajer/presiden direktur, orang yang dalam pekerjaannya dan dituntut keahlian khusus, memiliki otoritas dalam pekerjaannya dan memiliki anak buah atau bawahan.

Borjuasi bisa menjadi pisau bermata dua, di satu sisi dapat membuka lapangan pekerjaan dan proteksi terhadap ekspansi ekonomis kelompok di luar komunitas. Akan tetapi disisi lainnya adalah eksploitatif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat industrialis,

Borjuasi sebagai elit memang, ada di tengah masyarakat baik secara alamiah maupun rekayasa sosial. Pengelompokan dalam masyarakat berdasarkan kategori tertentu memang telah

¹⁴ Ibid., hlm. 406

¹⁵ Sumber: Laporan survey, Gaya Hidup dan Sikap Politik Kelas Menengah, Pusat penelitian Kompas, Jakarta 1996. Hlm.11 Sumber aslinya adalah kategorisasi penentuan kelas menengah di Indonesia. akan tetapi penulis ganti menjadi borjuasi karena kedua terminologi ini saling menggantikan sementara kelas menengah justru dalam perdebatan apakah terminologi kelas menengah tepat memberikan penggambaran bagi struktur kelas di Indonesia. Sementara, borjuasi sangat mudah dibenarkan dalam konteks masyarakat kapitalis/industri.

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konstruksi pikiran masyarakat. Dan sebenarnya dalam banyak hal elit merupakan borjuasi sehingga untuk mengatakan elit ekonomi maka sebutan yang paling cocok di negara perdagangan dan industri adalah borjuasi sebagai pemilik modal.

T.B. Bottomore (1966) mengutip dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh ilmuwan mengenai elit:

“...beberapa kelompok elit penting telah digolongkan dalam penelitian tentang industrialisasi baru-baru ini. Penelitian tersebut mengungkapkan barua ada lima tipe ideal elit yang biasanya dan dengan berbagai cara mengambil kepemimpinan proses industrialisasi yaitu (1) elit dinasti; (2) elit kelas menengah; (3) intelektual revolusioner; (4) administrator kolonial; (5) pemimpin nasionalis.”¹⁶

Di Indonesia masa lampau (yang sangat mungkin masih membekas hingga sekarang), misalnya pernah dikaji oleh Abd. Kappi (1988) yang kemudian melakukan kategorisasi kelompok elit ke dalam beberapa macam antara lain; *Pertama*, elit bangsawan. Istilah bangsawan menggambarkan sekelompok manusia yang memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat feodal di masa lalu. Status ini di peroleh secara turun-temurun/ keturunan bangsawan akan menyandang gelar bangsawan. ¹⁷Gelar yang diperoleh demikian disebut *ascribed* status atau status natural (alamiah).¹⁸ Posisi bangsawan dalam sejarah juga sangat erat dengan posisinya sebagai priyayi dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan.¹⁹*Kedua*, kelompok elit agama, yaitu sekelompok orang yang karena peranannya dalam bidang agama dan kemasyarakatan mendapatkan posisi yang tinggi dalam masyarakat, misalnya di Aceh, ulama menduduki strata sosial yang paling atas. *Ketiga*, elit birokrasi yang karena jabatan dalam pekerjaannya yang berkaitan dengan birokrasi kekuasaan.²⁰Mereka melakukan pekerjaan administrasi pemerintahan atau tugas yang berkaitan dengan itu yang sifatnya sangat hierarkis dan rumit.²¹

¹⁶ Batomnone, op cit., hlm 119,. yang la kutip dari Clark Kerr, Jhon T Dunlop, Frederick H. Harbison dan Charles A. Meyers, *Industrialism and Industrial Man*, bab.3. *'The Industrializing Elits and Theirs Strategies'*, hlm. 50

¹⁷ Abd. Kappi dalam M. Masyhur Amin, dkk, *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, (Jakarta: Pustaka Grafika Kita dan YIIS, 1988), hlm. 70-71.

¹⁸ Mayor Polak, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Jakarta : Balal Buku Ikhtiar, 1971, hlm, 156.

¹⁹ Priyayi diartikan sebagai orang penting, orang berpangkat, dan bukan orang kebanyakan. Mengenal literatur ini dapat dibaca dalam buku *Priyayi Abangan*, karya Sapardi Joko Damono, hlm. 302.

²⁰ *Op Cit.*, M. Masyhur Amin, hlm. 70.

²¹ Hal sesuai dengan karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Weber yaitu hierarkis, impersonal, dan tidak ada mekanisme voice and exit.

Sejarah kapitalisme tak bisa dipisahkan dari kemampuan masyarakat membangun organisasi skala besar yang efisien dan modern. Jepang misalnya mendapat julukan *a nation of organization* dengan banyak dan majunya *kaisha* (perusahaan). Pemerintah pendudukan Jepang juga menerapkan banyak kebijakan untuk memobilisasi massa dalam pencapaian tujuan bersama, pendek kata Jepang mengorganisir modal sosial dalam masyarakat Indonesia yang solider.

Dalam hal ini patut dijelaskan bagaimana borjuasi menggunakan kekuatan modal sosial untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mengabadikan kekayaan dan kejayaannya. Fakta yang terlihat adalah “kegagalan” borjuasi memberikan proteksi terhadap kekayaan dan melanjutkan kiprah dalam dunia perdagangan karena hanya mengandalkan relasi sosial yang hubungannya sangat personal dan tidak mampu diwariskan kepada generasi berikutnya. Modal yang bersifat kekeluargaan juga kadang menemui paradoks misalnya masyarakat bisa gotong royong akan tetapi kehidupan sangat timpang dan tidak membawa kesejahteraan, selain itu juga terdapat paradoks dalam masyarakat yang sedang dirasuki kapitalis, misalnya di Kotagede pengusaha itu jauh lebih terbuka kepada pengusaha asing dari luar dari pada kepada pengusaha yang berada di lingkungannya yang seringkali mempunyai hubungan kekerabatan.

Dari berbagai kajian ekonomi kolonial selalu membuat penandaan atau pembedaan dalam masyarakat sebagai dampak dari kolonialisasi misalnya golongan Eropa menduduki posisi tertinggi, kemudian Cina dan Arab baru pribumi yang dianggap pemalas. Di Kotagede juga terkenal dengan istilah kerajaan sebagai boneka Belanda, borjuis Belanda (sebutan untuk golongan yang dekat dengan Belanda dan meraup keuntungan ekonomi), dan pedagang Jawa-Pribumi (para keluarga haji yang kegiatan utamanya berdagang dan menggunakan Islam sebagai strategi mengembangkan perdagangannya), dan di luar Kotagede terdapat pedagang Arab, dan komunitas Cina yang banyak berkembang di Surakarta-Solo karena di Kotagede Cina dilarang keras melakukan aktivitas bisnis.

Paling tidak ada tujuh istilah konseptual yang perlu dijelaskan secara lebih jauh: *pertama*, kata “Formasi”. Formasi dimaknai sebagai proses pembentukan, kelahiran, atau kemunculan golongan atau kelas tertentu dalam masyarakat. Kelahiran kelas elit atau borjuasi sangat terkait dengan proses penguasaan sumber ekonomi dan politik yang ada dalam masyarakat. Selain itu formasi kelas juga dipengaruhi oleh rezim penguasa, baik Kolonial (pra kemerdekaan), kerajaan maupun pemerintahan pribumi (pasca Kemerdekaan). *Kedua*, Kata

genealogi.²² Mengikuti studi-studi Antropologi tradisional dan Sejarah, “genealogi” bisa didefinisikan sebagai studi mengenai evolusi dan jaringan dari sekelompok orang sepanjang beberapa generasi.²³ Studi ini dapat digunakan untuk pelacakan perkembangan dan dinamika sosial yang dimotori oleh segelintir orang yang cukup berpengaruh.

Tidak semua kata genealogi dalam tulisan pada bab berikutnya dimaknai sebagai genealogi dalam artian sebagai sebuah metode bahkan sebagian besar diartikan sebagai pengganti kata asal-usul dan hubungan keturunan. Metode genealogi memang akan membantu proses kajian pemikiran dalam bidang sosiologi politik dan sejarah.²⁴ Karena menurut Foucault, bahwa sejarah tidak hanya melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau, tetapi yang lebih penting adalah mendiagnosis situasi sekarang serta menawarkan kritik dan preskripsi penyakit di masa kini dengan menengok di masa lampau.²⁵

Penting kiranya kita membatasi arti terminologi genealogi tersebut untuk menghindari pemaknaan meluas dan membutuhkan analisa yang sangat luas pula. Secara sederhana genealogi berasal dari kata *genea* berarti asal-usul, *logia* berarti ilmu yang mempelajari asal-usul. Karena kerumitan metode tersebut, penulis tidak terlalu panjang membahas perdebatan metodologi sehingga penulis membatasi bahwa kata “genealogi” yang ada dalam buku ini untuk mewakili dua pertanyaan utama: *Pertama*, bagaimana asal-usul kaum borjuasi atau kelompok pedagang kaya di Kotagede. *Kedua*, Bagaimana dinamika internal dan cara mempertahankan status sosial dan identitas sebagai kelompok yang menduduki kelas terhormat di mata masyarakat. Serta yang *ketiga*, faktor-faktor apa yang mempengaruhi transformasi tersebut dan

²² Genealogi sebenarnya terminologi yang kompleks dan sangat rumit. Dalam tradisi Foucauldian, genealogi mempunyai dimensi dan relasi pemaknaan yang sangat rumit dan luas seperti jejaring dalam sebuah relasi sosial yang sangat kompleks. Micheal Foucault mengartikan genealogi sebagai metode atau konsep yang menjelaskan tentang relasi khusus wacana, yaitu relasi antara berbagai praktik sosial (politik, ekonomi, hukum, moral, dan kultural), pengetahuan di baliknya, dan relasi kekuasaan yang membangunnya. Ini adalah satu metode yang cukup kompleks untuk menganalisis sebuah relasi kuasa. Relasi ini kemudian coba digunakan untuk menganalisis proses evolusi dan dinamika kelompok atau komunitas tertentu. Dalam penelitian ini berarti untuk menguraikan asal-usul kelompok dagang di Kotagede dan segala relasinya yang terjadi sampai pada transformasi yang terjadi dalam internal kelompok atau bani dan perubahan yang terjadi dalam konteks yang lebih luas.

²³ Latif, dalam bukunya, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, Mizan, 2005, hlm. 7.

²⁴ Dengan an metode tersebut dapat juga digunakan untuk memetakan corak, formasi sosial, elit, dan aktor pro-demokrasi di Indonesia dalam rentang waktu tertentu, Selain itu, metode genealogis berusaha memperhatikan gerak perkembangan diakronik dan rantai golongan "borjuasi" antar-generasi di wilayah Kotagede. Tujuan metode genealogis adalah mencatat kekhasan (*singularity*) peristiwa-peristiwa di luar maklumat yang itu-itu saja (*monotonousfinality*). Di samping kuasa. Penulis juga merasa perlu untuk menengok wilayah ekonomi-politik karena wilayah ini merupakan ruang kontestasi kekuasaan dan sumber legitimasi yang paling berharga dalam percaturan politik kontemporer. Sementara praktik wacana mentransmisikan dan memproduksi kuasa yang akan diekspresikan dalam arena publik. *Ibid*, hlm. 8-9,

²⁵ Yudi Latiel, op.cit. hlm. 11.

bagaimana masa depan kelompok dagang *survive* di tengah arus kapitalisme global yang semakin menguat.²⁶

Ketiga, Borjuasi. Borjuasi dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dalam rangka komparasi antara konsepsi borjuasi dari Eropa dengan fakta lokalitas yang spesifik sehingga dapat ditemukan benang merah antara teoritis dan praktis.

Dalam kenyataan sosial memang borjuasi adalah kelompok elit yang mempunyai kekuatan basis material yang sangat kuat dengan beberapa kategorisasi tentunya. Karen borjuasi dari beberapa studi pustaka merupakan kata yang cukup tua digunakan di Nusantara atau di Jawa sebagai salah satu dampak kolonisasi bangsa Eropa atas Jawa sejak paruh kedua abad ke-15 sampai abad ke-18.

Masyarakat Amerika sebagai contoh, setelah mengalami revolusi Amerika dengan diikuti meningkatnya kelompok intelektual di pertengahan abad ke-20 memunculkan struktur elit baru yang juga dihuni oleh golongan intelektual ini. Hal ini berdampak terhadap struktur kekuasaan (desentralisasi) dan kelompok elit yang berkuasa. Pada periode ini di Amerika banyak berkembang kelompok pedagang kecil dan petani modern dan tidak ada kelompok yang paling dominan mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Sistem *laissez-Faire* dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan alamiah, di luar kontrol yang sadar dari siapa pun²⁷.

Mill (1990) mengemukakan bahwa kelompok yang menduduki posisi teratas adalah golongan yang mempunyai asal usul dan pandangan hidup yang sama, dan kecenderungan yang seragam adalah bahwa kelompok ini mempunyai hasrat untuk menjadi sangat kaya. Kekayaan mereka mungkin berasal dari warisan atau hasil investasi atau karena kedudukan sebagai eksekutif dalam perusahaan dagang raksasa.²⁸ Selain itu, banyak dari mereka yang menduduki posisi tinggi dan berasal dari keluarga tradisional yang memiliki status tinggi, kawin mawin kalangan keluarga sendiri, atau hasil koneksi dengan kelompok-kelompok tertentu.

Di atas adalah deskripsi kemunculan elit di negara lain. Sedangkan *elit* kita didefinisikan sebagai masyarakat yang jumlahnya terbatas, yang mempunyai pengaruh besar terhadap berbagai kebijakan yang ada dalam masyarakat, Ragam elit sangat ditentukan oleh kondisi

²⁶ Borjuasi dalam artian yang luas berarti di dalamnya terdapat kelompok elit, dan kelas menengah yang sangat beragam mulai dari pedagang kaya, saudagar, elit agama, pengusaha, pemimpin partai, pegawai negeri, militer, dan kelompok profesional lainnya

²⁷ Baca Doyle, *Ibid.*, hlm. 175-176

²⁸ *Ibid.*, hlm 177-178.

sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut. Elit yang terdapat dalam masyarakat dalam masyarakat tradisional dengan homogenitas yang tinggi akan berbeda dengan masyarakat industri atau perkotaan yang relatif heterogen atau dalam bahasa yang populer masyarakat multikultural. Oleh karena itu, elit terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada elit politik, elit ekonomi atau disebut juga elit bisnis, elit agama, elit budaya, dan sebagainya.

Dalam *Dictionary of Sociology*, David Jary dan Julia Jary menjelaskan bahwa:

*Elit is literally the "best" or most talented members of society (e.g. educational elit), however in sociology the term most usually refers to political elite. Here, the assumption of elite theory has been that a division between elites and masses is an inevitable feature of any complex modern society, and that aspirations of radical democrats that the people as whole could rule is mistaken*²⁹.

Hal yang serupa juga pernah dilacak T.B. Bottomore, telah digunakan pada abad ke-17 untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas sempurna. Penggunaan itu kemudian diperluas untuk merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau bangsawan yang tinggi. Oxford English Dictionary (1823), kemudian memasukkan entri "elit" merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok sosial.³⁰ Sementara Soerjono Soekanto membatasi pengertian elit sebagai:

*"kelompok orang-orang yang dalam situasi sosial tertentu menduduki posisi tertinggi, dianggap mempunyai kekuasaan besar dan hak istimewa. Kadang-kadang diartikan sebagai golongan aristokrat yang berkuasa karena faktor keturunan. Sering kali juga diartikan sebagai posisi-posisi dalam struktur sosial yang relatif tinggi sehingga mereka yang menduduki posisi tersebut juga mempunyai kedudukan yang tinggi".*³¹

Dalam melihat elit ataupun borjuasi setidaknya-tidaknya ada dua perspektif penting yang akan digunakan; *pertama* dari perspektif pluralis dan *kedua* dari perspektif Marxian.³² Kaum pluralis, baik yang diklasifikasikan sebagai pluralis klasik seperti Laswell, Truman dan Dahl, maupun neo-pluralis seperti C.Wright, Mills dan G. William Domhoff menganggap bahwa di

²⁹ David Jery dan Julia Jery, *Collins dictionary of Sociology* (British :harper Collins Publisher, 1991), hlm 188.

³⁰ T.B. Bottomore, *Elit dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006), hml. Iii.

³¹ *Kumpulan Istilah-Istilah Sosiologi*, Jakarta : Universitas Indonesia, Fakultas ilmu-ilmu Sosial, 1977, hlm. 51

³² Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 14

setiap masyarakat keputusan-keputusan penting dilakukan oleh kelompok kecil, yang disebut kaum elit. Elit dalam identifikasi Laswell adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Kelompok yang memiliki dan mendapatkan lebih ini dalam pandangan Pareto ada yang memegang kekuasaan (*governing elit*) dan ada yang berdiri tegak di luar kekuasaan (*non-governing elit*).

Dalam pandangan kaum Pluralis, elit merupakan kelompok kepentingan kelas sosial ekonomi (borjuasi). Elit menjadi kelompok kepentingan yang, bersatu atas dasar kesamaan kultural dan tidak ada hubungannya dengan perjuangan kelas. Kekuasaan yang dihasilkan oleh elit sebagai akibat dari tawar-menawar antar kelompok kepentingan yang lain seperti organisasi pengusaha, pedagang, kelompok etnis, partai, ormas dan sebagainya. Sementara kubu Marxian menolak kalau elit hanya dilihat dari pembagian kelompok kepentingan karena pengelompokan dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hubungan produksi. Dalam masyarakat senantiasa terdiri dari dan berhadapan antara pemilik atau penguasa produksi dan yang tidak mempunyai alat produksi. Dalam pandangan Marxian, perjuangan kelas akan dimenangkan oleh kaum proletar kelas yang tidak menguasai alat produksi, setelah mengalahkan kelas borjuasi, sebagai pemodal atau yang menguasai produksi

Kaum elit biasanya terpolarisasi, terbagi menjadi banyak kategori seperti elit intelektual, elit ekonomi (borjuis), elit agama, elit birokrasi, elit militer, dan sebagainya. Elit juga mengalami perubahan bentuk dan karakter dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari golongan tersebut. Eksistensi demokrasi membuat kompetisi antar polar elit itu bisa terjadi dan bisa melibatkan rakyat kebanyakan. Dengan atau tanpa demokrasi, kaum elit-lah yang tetap menentukan. Itu kira-kira pandangan teori elit yang digagas oleh Pareto, Mosca, Michel atau Mill. Intinya, elit yang minoritas jumlahnya menentukan mayoritas keputusan.

Perjalanan panjang sebuah negara hampir dibayangi oleh sistem demokrasi yang cukup berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kekuatan borjuasi dianggap mampu mendistribusikan kekuatan-kekuatan atau akses kekuasaan kepada masyarakat. Ini terbukti di Eropa dan akan dibuktikan dalam penelitian tersebut bahwa kemunculan borjuasi cukup memberikan kontribusi terhadap mudahnya monopoli ekonomi, kekuasaan negara (baik negara kerajaan, kolonial, maupun Indonesia). Tentu saja demokrasi mempunyai syarat untuk dikatakan sebagai sebuah sistem yang "ideal". Dalam konteks negara yang sedang memasuki transisi, prinsip demokratis memang mengharuskan negara menata ulang (reformasi) dan

melakukan apa yang disebut *sharing of power* (pembagian kekuasaan) dan atau *sharing of responsibility* (pembagian tanggungjawab) antara lembaga-lembaga negara. Pembagian tanggung jawab tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan atau dalam rangka menjalankan fungsi *check and balance* yang menghendaki partisipasi sebagai syarat utama berjalannya sistem demokrasi³³.

Istilah demokrasi borjuis tidak dibedakan dengan demokrasi kapitalis sebagaimana telah didefinisikan dalam kamus politik yang saya kutip sebagaimana berikut, bahwa:

*“Demokrasi borjuis atau demokrasi kapitalis diterapkan dalam masyarakat dimana kaum kapitalis secara langsung ataupun tidak menguasai negara (negara borjuis). Demokrasi ala borjuis ini diterapkan di bawah syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi perkembangannya. Kebebasan politik yang luas seringkali diterapkan dalam negara borjuis dengan adanya kebebasan organisasi, berdemonstrasi, dll. Tetapi demokrasi semacam ini senantiasa disekap dalam bingkai sempit penghisapan kapitalisme; oleh karena itu pada hakekatnya selalu merupakan demokrasi untuk minoritas kaum borjuis hanya untuk kelas-kelas bermilik; hanya untuk kaum kaya”.*³⁴

Pandangan yang sinis perihal demokrasi pernah dikemukakan secara lantang oleh Lenin dalam Negara dan Revolusi, V.I. Dia mengatakan:

“Demokrasi untuk minoritas yang sangat kecil, demokrasi untuk kaum kaya itulah demokratisme masyarakat kapitalis. Jika kita perhatikan lebih teliti lagi mekanisme demokrasi kapitalis, maka akan kita lihat di mana saja, baik dalam hal-hal “kecil” seolah-olah kecil dari hak pilih dalam teknik lembaga-lembaga perwakilan, dalam rintangan-rintangan yang nyata terhadap hak berkumpul maupun dalam pengorganisiran pers harian yang sepenuhnya secara kapitalis, akan kita lihat pembatasan demi pembatasan terhadap demokratisme. Dari publikasi dan politikus borjuis, tetapi jika dijumlahkan semuanya, pembatasan-

³³ Tim Imparsial dalam buku *Menuju TNI profesional, tidak berbisnis dan tidak berpolitik*, (Jakarta: Imparsial & LSPP, 2005), hlm 6.

³⁴ Diakses dari

http://www.prdonline.or.id/pbb/index.php?option=com_glossary&func=display&letter=K&Itemid=53&catid=14&page1

*pembatasan ini mengucilkan dan mengusir kaum miskin dari politik, dari keikutsertaan yang aktif dalam demokrasi”.*³⁵

A. Pentingnya Studi Borjuasi

Masalah semangat dagang kaum muslim telah menjadi topik diskusi yang hangat sejak masa kolonial. Di satu pihak ada kecenderungan untuk menjelaskan bahwa “kegagalan” pribumi di bidang ekonomi disebabkan oleh sifat-sifat organisasi ekonomi yang tidak rasional, yang oleh Geertz disebut lebih bersifat sosial daripada bersifat bisnis. Di lain pihak, kegagalan pribumi lebih disebabkan oleh pengaruh struktural yang sedikit sekali memberi peluang kepada pedagang pribumi, sejak masa kolonial hingga sekarang ini.³⁶

Selain harus berhadapan dengan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang melemahkan posisi mereka, pedagang pribumi harus pula bersaing dengan pedagang Cina yang memiliki kekuatan modal dan posisi yang lebih baik dalam suatu struktur politik dan ekonomi. Pada peralihan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan pemerintah Indonesia pada tahun 1949, pribumi bukan merupakan kelompok yang tangguh sehingga mereka tidak dapat mengambil alih kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi dari pedagang Cina. Meskipun pedagang pribumi dapat bertahan, skala usaha mereka terbatas dan tidak mampu bersaing dengan kekuatan modal pedagang Cina. Hanya di beberapa daerah seperti yang terjadi di Jatinom--pribumi dapat menggantikan posisi ekonomi Cina pada saat mereka diharuskan untuk meninggalkan desa-desa dan kota-kota kecamatan. Perkembangan seperti ini merupakan fenomena yang menarik untuk diperjelas; *mengapa pedagang-pedagang di Jatinom dapat menggantikan posisi pedagang Cina dan dapat menjadi pedagang yang berhasil hingga saat ini?*³⁷

Penulis mencoba memberikan argumentasi terkait dengan urgensi dan relevansi kajian atas tema elit (selanjutnya akan disebut borjuasi)³⁸ dan dinamika demokrasi di Indonesia dengan beberapa pendekatan penting untuk memperdalam dan memperluas kajian mengenai *elit* atau

³⁵ *Ibid.*, hlm. 3

³⁶ Irwan Abdulah, *Pengusaha Muslim di Jatinom: Reformasi Agama dan Modernisasi Ekonomi di sebuah Kota di Jawa Tengah*, 1994.

³⁷ Irwan, penelitian Geertz (1963) yang dilakukan di Mojokuto, penelitian Castles (1967) di Kudus, dan penelitian de Jonge (1989) yang dilakukan di Madura, yang menunjukkan pentingnya hubungan Islam dan perdagangan.

³⁸ Kata borjuasi kemudian dikenal di Indonesia akibat pergaulan internasional dan juga akibat faktor penjajahan Hindia Belanda oleh bangsa Eropa. Pembicaraan mengenai borjuasi akan selalu berkelindan dengan pembentukan elit, perputaran dan dinamika internal yang terjadi. Borjuasi sendiri adalah bagian dan kelompok elit yang mapan atau menguasai perekonomian suatu masyarakat.

“segelintir orang yang menentukan?”. Di dunia akademis Barat, khususnya di Amerika Serikat, studi tentang elit sudah berkembang cukup pesat dan jauh meninggalkan kita sebagai bangsa yang besar, majemuk, plural dan terbagi menjadi daerah-daerah yang sangat banyak yang memungkinkan keberadaan beragam elit yang bersifat lokal. Alfian mencatat dari buku Glenn D.Peige, *The Scientific Study of Political Leadership* (1977), ada sekitar 250 judul disertasi di Universitas terkemuka Amerika Serikat yang mengkaji tema elit dari berbagai sudut pandang.³⁹

Kajian mengenai ekonomi pasca kolonial tidak bisa dipisahkan dari situasi dan kontestasi yang terjadi sebelumnya, dimana semangat kolonialisme yang didukung oleh berbagai kekuatan baik yang bersifat spiritual maupun sifat ekspansionisme seperti Etika Protestan, Etos Cina, etos dagang orang Jawa,⁴⁰ spirit Islam atau semangat ingin menguasai dunia dengan menguasai sektor ekonomi sebagai kekuatan yang mutlak dibutuhkan. Hal ini diungkapkan Akira Nagazumi⁴¹:

“Menjelang paruh kedua abad ke-19, persaingan antara kekuatan-kekuatan di dunia menghebat di Asia Tenggara sebagaimana terjadi di negara berkembang lainnya, di seluruh dunia. Inggris memperkuat kedudukannya di Singapura, Semenanjung Malaya, Burma. Perancis menancapkan dominasinya di Kamboja dan Laos, menyebabkan Muangthai menjadi negara yang merdeka. Perang Spanyol-Amerika memerdekakan Filipina dari cengkeraman Spanyol. Pendek kata Asia Tenggara mengalami penataan kembali oleh kekuatan asing yang sangat kuat.”

Hal ini sangat berdampak pada peta ekonomi dan politik di Indonesia di bawah kolonialisme Belanda. Kontestasi yang terjadi sangat berkaitan dengan apa yang disebut proses kapitalisasi: negara yang menguasai ekonomi, dialah yang menang. Dalam hal ini Onghokham berpendapat bahwa menengok sejarah kapitalisme Asia Tenggara sangat berbeda dengan Eropa. Menurutnya, proses kapitalisme yang ada di wilayah ini adalah kapitalisme malu-malu kucing⁴²

³⁹ Alfian dalam pengantar kumpulan tulisan, *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. (Jakarta: Pustaka Grafika, 1988), hlm. 1.

⁴⁰ Etos menegaskan bahwa sikap itu merupakan sikap yang sudah mantap dan atau menjadi kebiasaan, suatu hal yang nyata-nyata mempengaruhi, dan menentukan bagaimana seseorang atau suatu komunitas mendekati atau melakukan sesuatu. Lihat Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 120., atau juga lihat Daryono, *Etos Dagang Orang Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3.

⁴¹ Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*. Budi Utama 1908-1915, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 26-27.

⁴² Onghoktham, *Kapital dan Politik*, dalam pengantar buku *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*, hlm. vii

termasuk di dalamnya Indonesia yang bermaksud melakukan upaya revolusi industri yang ketinggalan sehingga hanya memunculkan konglomerat negara yang mengambil keuntungan dari proses distribusi produk industri negara maju ke negara Indonesia. Perusahaan negara juga memberikan kontribusi atas persoalan kesenjangan sosial dan terbentuknya bos-bos yang tidak mandiri dari negara. Kelompok pengusaha Indonesia ini mengetahui globalisasi perdagangan namun untuk kepentingan kelas mereka sendiri dan bagi sebagian besar masyarakat awam hanya menjadi lahan untuk meraih keuntungan dalam perdagangan bebas. Indonesia berada dalam jejaring kapitalisme global dan hanya kaum pemodal yang mendapat keuntungan atas sistem politik dan ekonomi yang diterapkan oleh rezim, dalam hal ini Soeharto, yang membuka kran kapitalis bebas keluar masuk Indonesia. Tentu saja, dengan konsekuensi yang cukup besar.

Fukuyama (2005) dalam bukunya *The End of History* Membuat satu kesimpulan bahwa sejarah telah berakhir dan ideologi dimenangkan oleh Demokrasi Liberal; yang dalam persoalan ekonom negara tidak terlalu campur tangan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar.⁴³ Akan tetapi dalam buku *Memperkuat Negara* ia berargumen bahwa negara tetap harus mempunyai power untuk membuat proteksi terhadap rakyatnya dari kejahatan pasar.⁴⁴ Negara dapat mengambil beberapa peran strategis untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang akan menjamin kelangsungan roda ekonomi dan perdagangan.

Posisi negara semakin kuat berdiri dari kekuatan modal dan pasar serta para pengusaha. Pasar sebagai arena pertemuan antar berbagai kepentingan, bermacam macam ideologi. Di pasar tidak hanya barang ekonomi terpenuhi akan tetapi juga tawar-menawar politik dan budaya pun menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Hal ini kemudian memancing elit negara untuk terjun mengambil bagian dalam pasar yang tidak hanya menjadi pengatur atau pembuat regulasi akan tetapi juga melakukan ekspansi dalam kepemilikan modal dengan berbagai cara untuk akumulasi kapital.⁴⁵

⁴³ Francis Fukuyama. *The End Of History and The Last Man*, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. (Yogyakarta: Calam, 2004).

⁴⁴ Francis Fukuyama. *Memperkuat Negara*, (terj), (Jakarta : Gramedia, 2006)., hlm. 54

⁴⁵ Konsep kepemilikan negara dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama* perspektif *state-centered* yang berarti negara ikut bermain dalam percaturan politik yang berarti negara ikut bermain dalam percaturan politik *vis-à-vis* kepentingan rakyat termasuk juga dalam hal kepemilikan negara atas faktor produksi disamping kepemilikan swasta dan koperasi. *Kedua*, perspektif negara *society-centered* yang memandang bahwa negara sebagai *society-centered* yang memandang bahwa negara sebagai arena bermain yang netral dan tidak otonom dari kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. Negara hanya menguasai faktor produksi akan tetapi tidak memiliki. Pada awalnya jumlah BUMN mencapai puluhan akan tetapi lambat laun berkurang seiring dengan kebijakan privatisasi atau liberalisasi yang berusaha mengurangi peranan negara dengan menyerahkannya kepada pihak swasta dalam negeri maupun asing. Secara substansial sebenarnya hanya strategi pemerintah yang melarikan diri dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Lalu rakyat kini disuruh berhadapan dengan kapital asing yang tumbuh

Konflik-konflik yang terjadi karena kesenjangan dan kesewenangan antara pemilik kapital semakin nyata dan revolusi industri sendiri menimbulkan perubahan-perubahan sosial di Indonesia. Banyak gerakan tumbuh dan melawan kekuasaan negara yang hegemonik, Dengan sendirinya, perkembangan industri dan perdagangan, kapitalis dan pembangunan pada umumnya tidak hanya menghasilkan kelas borjuasi akan tetapi juga menghasilkan kelas proletary.⁴⁶

Perjalanan dan dinamika pedagang di Nusantara menjadi penting untuk melacak keberadaan borjuasi yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20, Kelompok borjuis ini lahir dan bermunculan di beberapa daerah (borjuasi etnis) yang kemudian bertemu dalam perdagangan Nusantara sebagai akibat dari perkembangan perdagangan dari pelayaran.⁴⁷ Pelacakan kelas borjuasi ini juga dapat diawali dengan pembacaan terhadap kategorisasi Clifford Geertz yang memilah tiga kelompok dalam masyarakat; yaitu golongan Abangan sebagai penduduk desa, kaum Santri sebagai kaum pedagang, dan Priyayi sebagai keturunan bangsawan atau birokrat.⁴⁸

Di Indonesia, akademisi paling ‘alfa’ untuk mengkaji tema elit dan proses formasi kelas borjuis yang terjadi dalam kurun waktu yang lama sehingga tema elit merupakan tema kajian yang sangat menantang untuk terus menerus diteliti dan dijadikan agenda riset yang berkesinambungan.⁴⁹ Di Nusantara ini dengan kondisi yang majemuk, plural, yang mengandung keanekaragaman suku, adat, agama, ras, golongan, bahasa daerah, partai politik, dengan geografi yang terpisah-pisah maka kajian elit akan menjadi sangat menarik terutama upaya pemetaan elit akan memunculkan kajian elit lokal yang sangat beragam dan luas. Inilah yang menjadi sangat menarik dan menantang meski tidak mudah menemukan metodologi yang tepat untuk menuntaskan kajian bertemakan elit.⁵⁰

Studi yang serius mengenai elit bisa dikategorikan sebagai tema kajian yang masih “langka” dalam tradisi akademis di Indonesia, jika tidak dikatakan sangat sedikit literatur yang

pesat dengan berbagai korporasi dagang (Revrison Baswir, *Pembangunan Tanpa Perasaan*, (Yogyakarta: Idea Pustaka Pelajar, 1999), hlm 203.

⁴⁶ Ibid., hlm. xi-xii

⁴⁷ Borjuasi atau kaum pedagang yang tumbuh dari daerah dengan identitas yang asli misalnya pedagang Batik dari Jawa, pedagang Sunda, Bugis, Minangkabau, dan Aceh.

⁴⁸ Lihat Denny Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 84-85.

⁴⁹ Cornelis Lay (2007), dalam bedah buku *Elit dan Masyarakat* (terj) karya T.B Bottomore yang diselenggarakan oleh PLOD-UGM bekerja sama dengan Akbar Tanjung Institute Jakarta

⁵⁰ Baswedan menuliskan bahwa *ruling elite* Indonesia kedepan sangat dipengaruhi oleh tren pasar yang mana disana berada kaum borjuasi yang mempunyai kemandirian ekonomi untuk mengelola politik Selama ini *ruling elite* didominasi oleh kalangan militer, aktivis, untuk kelompok intelektual serta dipengaruhi oleh tren pasar. Baca artikel Anies Baswedan *Siapakah “Ruling Elite” Indonesia?*, Kompas, Selasa, 31 Oktober 2006.

dapat ditemukan di lingkungan universitas. Dari yang sedikit atau terbatas (referensi) itu didominasi oleh sumbangan dari peneliti asing. Di antaranya adalah buku *Robert van Neil, The Emergence of the Modern Indonesia Elit* (1960). Yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah karya Donald K. Emerson, *Indonesia's Elit: Political Cultural and Cultural Politics* (1976). Sementara dari akademisi Indonesia masih terbatas pada tulisan-tulisan yang sporadis alias kumpulan tulisan yang tersebar; seperti artikel Sulaiman Sumardi dalam “*Some Aspect of the Social Origins of the Indonesia Political Decision Makers*” (1960), dan juga kumpulan tulisan yang berjudul *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan* (1988).

Banyak pengamat mencermati formasi elit di negeri ini. *The rulling elite* sekarang didominasi oleh aktivis pergerakan baik pada tahun 1970-an dan aktivis 1998. Akan tetapi kita tidak menutup mata bahwa kaum borjuis juga sudah mempunyai kedudukan yang cukup mapan. Banyak keluarga pedagang telah menduduki jabatan politik dari tingkat lokal maupun nasional.

Sudah mafhum bahwa sejarah politik adalah sejarah kekuasaan, sejarah kekuasaan adalah sejarah kelompok masyarakat yang jumlahnya sedikit yang kemudian disebut elit yang berkuasa. Begitu juga sejarah kekuasaan, di sisi lain adalah sejarah borjuasi,⁵¹ dalam pandangan Marxian ketika dihubungkan dalam bingkai masyarakat industri-kapitalis.⁵² Hal ini disebabkan karena konstruksi pengertian elit secara meluas sering diartikan sebagai “orang-orang yang menentukan” baik dalam bidang ekonomi atau kekuasaan lainnya. Elit yang jumlahnya sedikit dipahami sebagai kelompok pengambil keputusan yang menentukan dalam masyarakat; atau dalam arti ekstrim bisa jadi keputusan yang diambil para elit itu “mematikan”. Thomas Carlyle menuliskan bahwa sejarah adalah “riwayat hidup para pembesar”, maka bisa dikatakan para elit itulah penentu sejarah. Sepanjang sejarah peradaban sedikit saja nama orang yang kita kenal. Dalam sejarah Islam dikenal perjuangan Muhammad, sejarah Katolik dikenal elit gereja di Roma-Italia.⁵³ Dalam negara dagang sangat mungkin paradigma kekuasaan dimaknai dalam perspektif berbeda. Kaum borjuis adalah kelompok yang gemar mencari keuntungan. Bagi mereka adalah *Vox populi, vox argentum* yang artinya suara rakyat, suara gemerincing uang!

⁵¹ Kata *bourgeoisie* yang selanjutnya ditulis borjuasi. Dan *bourgeois* ditulis borjuis.

⁵² Dalam pandangan Weber ada tiga tahapan masyarakat yaitu, masyarakat tradisional, pra industrialis dan masyarakat industri-kapitalis. Masyarakat industri kapitalis dicirikan dengan pola pikir rasional, individualis, kuasa modal, dan kompetisi.

⁵³ Lebih lanjut misalnya, dalam konstelasi politik internasional. kita mengenal dua individu yang paling kontradiktif yaitu George W. Bush dan Saddam Hussain sebagai dua aktor yang menyebabkan meletusnya perang maut yang berakibat terpuruknya perekonomian dunia dan terlepasnya jutaan nyawa manusia. Seolah dua orang itu saja yang menentukan dengan cara apa pembantaian massal dipraktikkan. Inilah yang disebut sejarah perang, damai, kekuasaan adalah sejarah segelintir elit.

Borjuasi sebagai sebuah terminologi memang tidak lahir di Nusantara akan tetapi sangat masuk akal apabila kepentingan borjuis ini dirasakan oleh Sebagian rakyat di negara berkembang akibat kolonialisme dan imperialisme yang menyerbu dengan berbagai cara. Nusantara mengalami proses kolonialisasi lebih dari 3,5 abad. Perdagangan berkembang pesat dengan akibat kesengsaraan yang melanda Nusantara. Pada zaman kolonial kita mengenal borjuis Belanda, borjuis Cina dan borjuis Pribumi.⁵⁴

Kuntowijoyo (2005) menuliskan asal muasal borjuasi yang lahir akibat revolusi industri di Inggris kemudian berlanjut revolusi sosial di Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Transformasi menuju Eropa Modern sangat terlihat.⁵⁵ Hal ini pula yang mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menaikkan hasrat ekspansionisme bagi negara yang sudah mempunyai cukup instrumen untuk melakukan penaklukan dan penjajahan bagi negara dunia lain. Perdagangan internasional berkembang pesat, di sisi lain kemiskinan dan kesengsaraan rakyat meluas di hampir seluruh penjuru dunia.

Formasi kelas borjuasi di sini mempunyai karakteristik yang sebenarnya dapat dikategorikan dari mana asal usul elit (genealogi) Kemunculan elit dan borjuasi dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu: elit atau borjuasi nasional, dan elit atau borjuasi nasional, dan elit atau borjuasi lokal (bos lokal, *juragan*). *Pertama*, borjuasi dilahirkan dan dibesarkan di negara. Negara dengan dengan berbagai kebijakan dan proyeknya berusaha melindungi dan mengayomi kehidupan segelintir orang dengan harapan kelompok ini juga akan berpihak pada negara. Pada masa awal kemerdekaan atau masa demokrasi bergerak (terpimpin) mempunyai kebijakan ekonomi protektif terhadap pengusaha lokal dengan program ekonomi benteng, Ali Baba sebagai respon atas kekalahan pengusaha pribumi oleh kelompok dagang Cina dan keturunan.

Kedua, borjuasi yang tumbuh dari masyarakat lokal, Di berbagai ranah yang di sana terdapat struktur kekuasaan mempunyai potensi memunculkan sekelompok elit yang menguasai sebagian besar sumber daya alam, sosial, dan politik. Kelompok elit yang dapat disebut bos lokal itu hampir terdapat di setiap masyarakat seperti Blitar dan kyai di Madura, Jawara di Banten, pedagang Bugis di Makasar, Pengusaha Kerajinan di Kotagede, Kelompok Teuku di Aceh. Dalam konteks yang lebih sempit seperti di kampung, “nigari”, atau pedukuhan juga

⁵⁴ Didapatkan dari berbagai sumber. Van Mook, sebagai penulis tentang Kota tua di Jawa yaitu Kuta Gede pernah menyebut Borjuasi Cina sebagai kekuatan ekonomi penting di Jawa.

⁵⁵ Kuntowjoyo, *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*, 2005.

lazim ditemukan yang namanya orang yang berpengaruh, baik dihormati karena pengetahuan dan kesalihannya atau karena keturunannya,

Kelompok ini kemudian yang tumbuh berkembang dan mengalami mobilitas sosial; baik secara struktural kekuasaan atau karena pengembangan jaringan bisnis. Bisnis bisa tumbuh akibat intervensi negara atau akibat kekuatan *marketing* yang didukung *finansial* kuat. Kelompok borjuasi misalnya keluarga Kalla (Kalla Group) di Kabupaten Bone, dan imperium bisnis keluarga Bakrie (PT. Bakrie & Brother).⁵⁶ Sementara Arifin Panigoro muncul akibat kesuksesan setelah berkompetisi dengan pengusaha asing ketika mengambil proyek negara yang berskala besar. Negara mempunyai peranan besar dalam pertumbuhan borjuasi meski hal ini menuntut pelacakan lebih jauh ke belakang sejarah ekonomi politik Nusantara dari zaman kerajaan, kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan sampai sekarang.

Karya ini berusaha mencari titik temu antara kelompok borjuis dengan perkembangan politik dan demokrasi dalam konteks negara di Kotagede, Dalam konteks Eropa sudah banyak kajian mengenai peranan borjuasi terhadap transformasi sosial dan politik menuju Eropa modern.⁵⁷ Kehidupan negara modern sering dikaitkan dengan kehidupan sistem demokrasi. Sementara demokrasi dipahami beragam oleh banyak ilmuwan; ibarat buku dengan banyak halaman dan warna. Demokrasi sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana ungkapan Abraham Lincoln. Sementara bagi Hanry Kissinger, demokrasi berangkat dari pandangan bahwa melalui adu gagasan pada akhirnya orang akan mendapatkan sesuatu yang sangat dekat dengan kenyataan. Banyak juga pendapat bahwa demokrasi adalah jalan menuju tercapainya kesejahteraan dan keadilan.

Thomas Jefferson berpendapat bahwa demokrasi sesungguhnya tidak lain dari aturan kerumunan ketika 51 persen suara bisa mengambil alih hal 49 persen lainnya.⁵⁸ Demokrasi bukan berarti memilih yang terbaik untuk berkuasa dan menjalankan politik yang terbaik, tetapi demokrasi adalah kesempatan untuk meninggalkan pertumpahan darah dalam perebutan

⁵⁶ Ir. H. Aburizal Bakrie, lahir di Jakarta, 15 November 1946, seorang pengusaha Indonesia yang merupakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.

⁵⁷ Transformasi disini dimaknai sebagaimana yang pernah ditulis Kuntowijoyo (2003) bahwa perubahan atau transformasi merupakan proses perubahan yang bukan karena suatu kesengajaan, tetapi karena faktor di luar kesengajaan misalnya hasil dan interaksi atau faktor eksternal. Lebih lanjut baca buku *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*.

⁵⁸ Thomas Jefferson adalah konseptor utama deklarator kemerdekaan pada tahun 1776 di Amerika Serikat. (Majalah Tempo, edisi khusus 17 Agustus 2007, hlm 31).

kekuasaan (Karl Popper). Sebagai slogan, kata-kata Lincoln tampak menarik dan menyihir. Kenyataannya, kekuasaan itu tidak identik dengan rakyat kebanyakan, tetapi hanya milik segelintir borjuasi yang mempunyai keamanan ekonomi dan ingin mempertahankan atau mengabadikannya.⁵⁹

Dalam konteks politik kontemporer di Indonesia, kajian mengenai ekonomi politik, kuasa modal, dan elit yang membawa nama “demokrasi” adalah hal yang paling laris di media, baik lokal maupun nasional sebagai bahan perdebatan yang tidak pernah padam. Namun secara kuantitatif jumlah kajian dengan tema tersebut memang belumlah sebanyak sebagaimana yang ada di Universitas di Eropa atau Amerika.

Perjalanan demokrasi di dunia menemui perbedaan yang beragam yang sangat dipengaruhi konteks, dan kondisi sosial-politik suatu negara atau daerah. Sebuah kisah klasik revolusi demokratis dari Eropa Barat dan Amerika Utara, yang terbentang dari abad ke-17 sampai abad ke-19, mengungkapkan:

“...kebangkitan kaum borjuis dapat menggerakkan rakyat yang tertindas di atas nama seluruh negara untuk melawan bangsawan feodal kuno dan penguasa-penguasa kolonial. Akan tetapi di negara-negara negara itu (negara-negara dengan pembangunan kapitalis yang terlambat), yang mana timbulnya kaum kapitalis yang baru, yang harus menghadapi pasaran dunia yang sudah dikuasai terlebih dahulu oleh penguasa-penguasa kapitalis yang lebih dahulu, dan kaum buruh pribumi yang mana kekuasaan sosial dan organisasi politik menandingi malah mungkin melebihi perkembangan mereka sendiri, maka kaum borjuis merasa adanya kepentingan untuk membatasi atau menggugurkan cara pemerintahan yang demokratis untuk menyokong cara-cara militer atau fasis. Seperti yang terjadi di Italia, Jerman. Spanyol dan Jepang di masa inter-war dari tahun 1920 dan 1930.”⁶⁰

Berakhirnya rezim Soeharto pada pertengahan tahun 1998 setelah menjalankan praktik otoritarianisme selama 32 tahun sering dirayakan publik sebagai masa “kebebasan” atau “pembebasan”. Pasca Orde Baru menjadikan banyak orang berharap dan sekaligus cemas mengenai masa depan kehidupan bangsa. Bagi perjuangan kelas buruh juga menemukan nafas

⁵⁹ Kaum elit adalah bagian dari rakyat yang mengontrol akses pada sumber daya ekonomi dan politik, seperti finansial, informasi, pendidikan, status sosial, dan agama

⁶⁰ Baca artikel dengan judul, Kelas-kelas sosial yang manakah akan mendukung perjuangan untuk demokrasi Indonesia?, (<https://wsws.org.news/1998/intrm22.shtml>).

baru dan semakin vokal meneriakan gagasan keadilan dan kemanusiaan bagi para pekerja yang selama bertahun-tahun menjadi objek eksploitatif golongan borjuis.

Periode “transisi” ini bagi kalangan akademisi mempunyai dampak yang signifikan secara politis, ekonomis dan sosiologis. Pengalaman negara lain, ketika terjadi keruntuhan sebuah rezim, akan terjadi lompatan sejarah yang cukup dahsyat dari periode otoritarian menuju periode kebebasan dan demokrasi. Namun, seringkali yang terjadi pada fase “transisi” adalah kondisi tidak menentu dan akan dihantui oleh involusi politik.⁶¹ Hal ini bisa dilihat dari mandeknya upaya *law enforcement*, perjuangan HAM, pemberantasan korupsi dan demokratisasi yang sering hanya berhenti pada demokrasi prosedural yang dirayakan melalui “pesta rakyat” dari pemilu ke pemilu dan hanya sebatas pergantian penguasa tanpa menyentuh substansi kepemimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.⁶²

Transisi politik dari otoritarianisme tidak selalu berarti menuju era kejayaan demokrasi substantif. Bisa jadi transisi menuju suatu kondisi yang menyerupai otoritarianisme atau suatu masa yang tidak ‘berpeta’.⁶³ Afan Gaffar (1998), di tengah pesimisme menaruh harapan yang cerah akan masa depan kehidupan politik pasca Orde Baru. Beliau berpendapat:

*“Masa pemerintahan Habibie adalah masa transisi menuju kehidupan politik yang demokratik di Indonesia masa depan. Namun demikian, hal itu sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dan bangsa Indonesia mampu mengelola politik transisi dengan tidak menimbulkan akses yang berlebihan yang kemudian mengantarkan kembali keadaan yang tidak menentu, bahkan munculnya anarkisme politik”.*⁶⁴

⁶¹ Kata "Involusi" yang dimaksud disini adalah keadaan yang stagnan dan tidak adanya solusi untuk mengatasi persoalan kebangsaan yang mendesak untuk diselesaikan. Hal ini pernah diungkapkan oleh Cornelis Lay dalam bukunya yang berjudul *Involusi Politik, Esai-esai Transisi Politik di Indonesia*, PLOD- JIP, 2005.

⁶² Istilah asingnya “*procedural democracy*” dan “*substantive democracy*”, Selebihnya bisa dibaca hasil riset Tim penulis Demos, *Menjadikan Demokrasi Bermakna*, Demos, 2005, hal.1.

⁶³ Setidaknya itulah proposisi umum yang disampaikan ilmuwan politik Vedi R.Hadiz dalam menganalisis politik Indonesia pasca Orde Baru (Orba) dalam buku *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. Dalam buku itu, dikatakan, walaupun Orba runtuh pada 1998, sifat dan relasi kekuasaan yang menopang rezim lama tidak banyak mengalami perubahan fundamental.

⁶⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 307

M.C. Ricklefs (2005) mempunyai catatan sosial politik di Indonesia mulai dari zaman pra kolonial sampai pasca Pemilu presiden 2004 yang dimenangkan oleh kelompok pemodal. Ini merupakan salah satu catatan Ricklefs pasca tumbangnya Rezim Soeharto :

*“Indonesia dan konteks internasional berubah drastis sejak akhir 1980-an. Berakhirnya Perang dingin dan keruntuhan serta pecahnya Uni Soviet mengartikan bahwa pemerintah demokrasi Barat tidak lagi melihat perlunya kerja sama dengan rezim-rezim Negara Dunia ketiga. Pada saat yang sama, perkembangan-perkembangan itu mengarahkan pemerintah Indonesia dan militer untuk meningkatkan kekerasan, karena mereka khawatir Indonesia dengan segala potensi kekerasan etnisnya juga akan runtuh seperti Uni Soviet. Rezim Soeharto melakukan hal ini ketika kelas menengah Indonesia mulai tidak begitu toleran terhadap penyimpangan-penyimpangan rezim, dan ketika peningkatan rasa keislaman telah menuntut keadilan dan adanya moralitas yang lebih besar. Dalam kondisi penuh tantangan ini keluarga Soeharto dan klik penguasa semakin menggila dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan mereka. Kemudian, krisis keuangan Asia menceburkan Indonesia ke dalam bencana ekonomi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mendukung pemerintahan. Pada tahun 1998, rezim Soeharto runtuh di tengah suasana yang mirip dengan suasana kelahirannya pada tahun 1965-1966, yaitu di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan dan pertumpahan darah di jalan-jalan.”*⁶⁵

Pasca keruntuhan Orde Baru tersebut, kita menyaksikan tubuh demokrasi yang telah berjalan dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, hingga saat ini. Apakah demokrasi telah ditemukan dari sistem Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila sampai Demokrasi Perwakilan? Yang tampak jelas hanyalah hantu transisi demokrasi yang sangat sulit diterka, apakah ini akan menuju demokrasi yang sejati atau justru pembajakan demokrasi oleh segelintir elit yang berkuasa. Bisa jadi demokrasi pasca otoritarianisme malah menuju fase otoritarianisme berikutnya. Kekhawatiran ini muncul akibat liberalisasi ekonomi yang sangat cepat merenggut korban dari rakyat jelata. Paradoks yang terjadi adalah kelompok elit yang berkuasa menyuarakan demokrasi politik dan desentralisasi kebijakan kepada pasar bebas.⁶⁶

⁶⁵ M.C. Ricklefs, “Tantangan, Krisis, dan Keruntuhan Orde Baru” 1989-1988, dalam *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. (Jakarta : Serambi, 2005), hlm. 824.

⁶⁶ Sebagai akibat kapitalisme ini adalah kemiskinan dan kelaparan yang selama ini tersembunyi/disembunyikan. Fenomena ini meledak dengan sangat kuat ketika program pemerintah pada

Sesuai dengan credo kaum borjuis yaitu credo liberalism dalam politik dan persaingan bebas (*laissez faire*) dalam ekonomi. Dunia borjuis adalah dunia bisnis dan pasar yang lebih menyukai cara berpikir numerikal dan mekanistik.⁶⁷

Demokrasi harus dipahami bukan sekadar suksesi kepemimpinan melalui *event* demokrasi prosedural, akan tetapi harus menyentuh dimensi substansial.⁶⁸ Demokrasi yang sejati harusnya ditopang oleh kekuatan borjuasi yang kuat, sebagaimana tesis Moore, bahwa demokrasi di Eropa berkembang karena peranan borjuasi dalam mengawal perubahan dan demokratisasi. Hal serupa dikemukakan oleh Kuntowijoyo, bahwa kelas menengah atau borjuasi memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi sosial dan politik dengan memunculkan kelompok intelektual.⁶⁹

Setidaknya terdapat empat kategori borjuasi dalam masyarakat **Pertama, borjuasi pedagang**. Ada banyak istilah untuk menyebut kelompok ini yang berasal kultur Jawa; seperti Juragan, saudagar, atau pengusaha (*entrepreneur*) dalam terminologi modern. Kelompok pedagang bermunculan pada era kolonial atau tradisional, sedangkan pengusaha (*entrepreneur*) adalah terma yang biasa digunakan untuk menyebut kelompok pemodal di tengah masyarakat kapitalis, sebagaimana kata borjuasi yang merupakan pemisahan status sosial dengan kelompok proletar. Akhir-akhir ini kata saudagar menjadi pilihan media untuk menyebut kelompok pemilik kapital yang awalnya lazim disebut pengusaha. **Kedua, kelompok agama borjuis**. Agama borjuis merupakan satu kondisi di mana elit agama menjadi sekelompok yang sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan akhirnya membuat dikotomi tokoh agama menjadi santri dan rakyat kebanyakan sebagai abangan. **Ketiga, borjuasi intelektual**. Kelompok intelektual sering disebut sebagai kelompok yang mewakili kelas menengah dalam negara demokrasi. Kelompok ini juga mengalami berbagai macam dinamika yang tidak selalu berada dalam kelompok kritis atau oposan. Banyak tulisan yang membuat argumentasi

tahun 2005 dengan tajuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Angka kemiskinan di daerah pun meningkat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

⁶⁷ David Brooks, *Bobos in Paradise, Surga Para Borjuis Bohemian*, (Yogyakarta: Ikon, 2002), hlm 61.

⁶⁸ Demokrasi yang bersifat prosedural tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena ia hanya terikat pada aturan-aturan formal yang berlaku. Bahkan demokrasi prosedural dapat menjadi alat penindasan kaum mayoritas otoriter yang berwatak sektarianisme seperti yang dilakukan Hitler dan Nazinya atau kaum kapitalis liberal atau demokrasi liberal yang menindas negara-negara sedang berkembang, negara berkembang, negara pinggiran, atau negara *peri-peri*.

⁶⁹ Kelompok intelektual merupakan kelompok terdidik di Eropa yang menggagas perubahan sosial dan politik yaitu, transformasi. Meskipun dalam perkembangannya kelompok ini bukanlah kelompok yang *free value* akan tetapi juga membawa kepentingan yang kerap kali berbenturan dengan kepentingan lainnya yang memunculkan *discourse* "pengkhianatan kaum intelektual".

mengenai pengkhianatan intelektual.⁷⁰ Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, kelompok intelektual dikenal sebagai kelompok terpelajar, terdidik, cerdas, pandai yang mempunyai rasa nasionalisme cukup kuat. Kelompok ini kemudian dalam kajian berikutnya disebut sebagai “kelompok intelektual” (Daniel Dhakidae, 1999) atau “intelegensia” (Yudi Latif, 2005).

Dan keempat, adalah perilaku borjuis yang menjangkiti masyarakat Indonesia. Perilaku borjuis ini bisa merasuki setiap individu, komunitas dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, gejala ini terlihat di masyarakat yang paling sederhana sekalipun, yaitu perilaku konsumtivisme terhadap produk-produk teknologi canggih. Pendapatan tidak terlalu tinggi akan tetapi ditunjukkan dalam perilaku *privilege* yang ketat. Banyak mantan profesional yang awalnya bergaji tinggi tetap menampilkan sikap borjuis yang elitis, Negara juga demikian, sikap gengsi ini ditunjukkan dengan belanja negara yang sangat besar pada sektor yang tidak produktif; seperti pembuatan bangunan megah, perkantoran, dan fasilitas yang high cost.⁷¹

Mengapa dalam kajian ini yang dipilih adalah Kotagede?⁷² Menjadi konteks yang menarik karena beberapa alasan. *Pertama*, konteks sejarah Nusantara. Kotagede sebagai sebuah unit geografis yang bersejarah, kota Jawa, sebagai peninggalan bekas ibukota kerajaan Mataram Islam abad ke-17. Kota yang kita kenal sebagai kota yang sangat tua (*the old city*) tentu merupakan sebuah realitas empirik yang cukup unik; baik secara sosiologis, ekonomis, antropologis maupun politis, Kotagede juga merupakan pusat perdagangan dan pengrajin perak sejak abad ke-16, tepatnya tahun 1586 M.⁷³

Kotagede sangat mewarnai khasanah kebudayaan Jawa.⁷⁴ Kotagede dihuni oleh berbagai corak masyarakat yang beragam baik asal usul maupun profesi. Sebagian besar penduduknya hidup sebagai pengrajin perak untuk menopang kehidupan keluarga.⁷⁵ Selama ini

⁷⁰ Meminjam bahasa Julian T. Benda dalam buku *Pengkhianatan Kaum Intelektual* (terj.), (Jakarta: Gramedia, 2005).

⁷¹ Kita bisa membaca betapa besarnya biaya untuk teleconference Presiden SBY dan JK juga pada saat menyambut Presiden Amerika Serikat George W. Bush di Bogor pada tahun 2007.

⁷² H. J. Van Mook menulis buku Kuta Gede yang menjadi referensi dalam melihat Kotagede. Diterbitkan dalam bahasa Indonesia ejaan lama oleh Bhatara, Jakarta, 1972. Dalam buku *Awal Berdirinya Mataram*, karangan sejarawan Belanda De Craaf, Kotagede disebut Kuthagede, Mataram disebut Matrem (memakai e) dan Pasar Gedhe disebut Sargedde. Baca di SKH Pikiran Rakyat, 11 April, 2006.

⁷³ Kotagede sebagai ibu kota kerajaan Mataram, pada masa pemerintahan Panembahan Senopati merupakan pusat pengrajin keris dan perhiasan yang diperuntukkan bagi keluarga Keraton. Seiring dengan berkembangnya waktu, Kotagede saat ini lelah menjadi sentra perdagangan perak dan salah satu objek yang potensial di Kota Yogyakarta.

⁷⁴ Bambang Purwanto, *Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada saat transisi: Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial dan awal Kemerdekaan*, (Makalah), 2004.

⁷⁵ Laporan penelitian siswa SMP Muhammadiyah 7 Kotagede tentang kerajinan perak, tahun 2007 yang menyimpulkan bahwa apabila Kerajinan perak mati maka pendidikan anak Kotagede akan terancam (baca

banyak orang Kotagede yang menggantungkan nasib hidupnya dari bisnis kerajinan perak. Namun, pemerintah tampaknya tidak cukup peduli untuk ikut memecahkan problem dasar jatuh-bangunnya bisnis perak, sehingga dikhawatirkan apabila bisnis perak mati pendidikan anak-anak di Kotagede akan terancam.⁷⁶ Mungkin tidak hanya pendidikan, tapi juga menyangkut hajat hidup ribuan orang Kotagede yang bekerja sebagai buruh.

Selain sebagai pengrajin, warga Kotagede juga menjadi pemilik toko kerajinan sebagai distributor maupun sebagai *supplier* bagi kemasan perak yang siap dipasarkan ke daerah lainnya. Para pengrajin perak itu memulai usahanya dari skala kecil atau *home industry*, hingga akhirnya mampu berkembang dengan pesat dan membawa Kotagede sebagai kota “mapan” secara ekonomi⁷⁷.

Kedua, konteks ekonomi-politik. Perpindahan pusat kerajaan Mataram dari Kotagede telah menjadikan kota itu tidak hanya berubah identitas menjadi kota para abdi dalem akan tetapi juga memicu perubahan di bidang lainnya seperti pola perdagangan dan komposisi penduduk.⁷⁸ Kemudian terjadi beberapa transformasi lainnya. Hal ini juga dipicu oleh kebijakan politik kolonial dengan hadirnya Perjanjian Giyanti tahun 1775 yang membagi wilayah Kotagede/Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.⁷⁹

Ketiga, perspektif sosiologis. Arti penting karya Geertz dalam *The Religion of Java* adalah sumbangannya kepada khasanah pengetahuan kita mengenai sistem simbol, yang kemudian melahirkan konsep trikotomi dalam masyarakat Jawa; yaitu Abangan, Santri, dan Priyayi.⁸⁰ Hasil penelitian Geertz mengundang banyak perhatian dari kaum intelektual untuk menguji kebenaran teori trikotomi tersebut.⁸¹

selengkapnya di Harian Kedaulatan Rakyat bulan November Kotagede 2007 atau diakses di <http://www.kr.co.id/article.php?sid=103850>).

⁷⁶ Lutfiana, siswi SMP Muhammadiyah VII Kotagede Yogyakarta yang memberikan komentar di Kedaulatan Rakyat mengenai karya ilmiah yang ia tulis dengan tema kerajinan perak Kotagede yang dipresentasikan di Washington, Amerika pertengahan bulan Juli 2007.

⁷⁷ Mapan diartikan sebagai produk dari *image* yang terbentuk diluar bahwa banyak orang kaya di Kotagede namun realitas kesenangan dan sebagainya mungkin akan ditemukan dalam penelitian berikutnya.

⁷⁸ Para *Abdi dalem* tersebut semakin lama peranannya semakin hilang. Kini hanya terbatas untuk tugas menjaga dan mengurus makam atau masjid peninggalan kerajaan.

⁷⁹ Purwanto, 2004, hlm. 2.

⁸⁰ Parsudi Supartan, dalam Pengantar buka Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. vii

⁸¹ Baca: Naskah wawancara tim Islamlib dengan Dawam Raharja, Geertz geser dikotomi jadi trikotomi, dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1168>

Atas bantuan Geertz pula kita dapat melihat peta sosial dengan lebih jelas. Misalnya, perubahan yang ditemui dalam masyarakat kapitalis atau industrialis yang membagi masyarakat (di kota) ke dalam beberapa kelas yang berbeda dengan kategori tertentu. Umpamanya didasarkan atas kepemilikan tanah, status sosial, antara pekerja, buruh, borjuasi atau pemilik modal dan majikan. Dengan demikian Kotagede bisa dikatakan sebagai masyarakat terbuka (*open society*) yang sangat heterogen yang tidak hanya menganut trikotomi; abangan, santri dari priyayi saja melainkan terbagi menjadi kelompok yang beragam seperti Islam santri, Islam abangan, Komunis, Muhammadiyah, NU, kelompok profesional, pedagang, juragan, Pegawai Negeri Sipil, dan sebagainya.

Kotagede sebagai daerah yang sangat kental dengan tradisi Hindu dan *Kejawen* (agama Jawa) yang berimplikasi pada Kotagede sebagai basis abangan pada awalnya kemudian “santri” pedagang yang berdatangan ke Kotagede untuk menjalankan aktivitas perdagangan. Dalam perkembangan berikutnya kelompok abangan semakin tersudut dengan menempati posisi sebagai kelas pekerja, tukang, dan buruh.⁸²

Pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku ini adalah, apakah borjuasi di Kotagede benar-benar mandiri dari penguasa sebagai bentuk dari teologi santri, yang mempunyai etos kerja yang tinggi, dengan kesalehan sosial menanamkan spirit Islam sebagaimana Etika Protestan mampu melahirkan borjuasi Eropa yang memberikan kontribusi dalam transformasi sosial-politik ke arah yang “lebih baik”, seperti terjadi di Inggris dan Perancis?

Membicarakan relasi antara borjuasi (kelas menengah) dengan politik adalah hal yang menarik dan menjadi intisari dari buku ini. Hal ini dimaksudkan untuk melacak genealogi borjuasi di Kotagede sehingga memberikan kontribusi teoritis: bahwa kelas menengah di Kotagede sama atau berbeda dengan kelahiran kelas kapitalis di Asia tenggara yang disebut Yoshihara Kunio (1989) sebagai *the ersatz capitalism*.⁸³ Dikatakan *ersatz* atau semu karena

⁸² Hal ini dapat dilihat dalam kisah *Orang-orang Kotagede* karya Darwis Khudhon yang diterbitkan oleh Benteng-Yogyakarta. Santri dan abangan disini diartikan sebagai golongan sosial-religius dan sekaligus sebagai kelompok kekuatan sosial-politik. Kaum abangan tidak semua menjadi, buruh hanya kebanyakan dari mereka adalah kaum pekerja kasar akan tetapi kalau dilihat dari cara peribadatan sebenarnya komunitas wong Kalang yang kaya itu sangat abangan.

⁸³ Baca Yoshihara Kunio dalam *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (terj), (Jakarta: LP3ES), Bab IV, *Pemburu Rente dan Spekulator*, hlm. 93-109. Baca juga modul Tim Penyusun, *bahan kuliah Sistem Sosial Indonesia*, (Fisipol UGM: 1994), hlm. 78.

kapitalisme di Asia Tenggara belum mampu menjadi pendorong dan pelopor perkembangan ekonomi secara kuat.⁸⁴

Dari argumentasi di atas kemudian penulis mengajukan dua pertanyaan pokok, yaitu: Bagaimana asal-usul (*genealogi*) borjuasi sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat di Kotagede? Dan Bagaimana golongan borjuis mempertahankan eksistensinya di tengah zaman yang terus bergerak?

Dalam kajian antropologi dikenal beberapa madzhab; yaitu perspektif fungsionalisme struktural, perspektif antropologi simbolik-interpretatif, perspektif strukturalisme, dan yang terakhir adalah perspektif evolusionisme.⁸⁵ Perspektif yang terakhir ini yang akan penulis gunakan untuk mengkaji genealogi atau perubahan sosial dalam masyarakat tanpa mengesampingkan perspektif-perspektif lainnya. Dalam pandangan evolusionisme masyarakat atau kebudayaan selalu berkembang lambat tapi pasti mengarah pada suatu perubahan. Kalau perspektif fungsional struktural menyatakan bahwa kebudayaan merupakan proses keterkaitan pengaruh satu subsistem atas subsistem lainnya. Misalnya bagaimana religi mempengaruhi terhadap kehidupan sosial manusia. Maka, dalam pandangan evolusionisme perubahan kebudayaan itu dari sebuah sistem yang tradisional ke modern.⁸⁶

Untuk mengkerangkai tulisan ini penulis memasukkan perdebatan perspektif sebagai landasan menganalisa persoalan yang sedang dikaji. Paling tidak terdapat 3 perspektif yang paling sering digunakan sebagai basis analisis terhadap kelas sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana cara pandang terhadap kelompok borjuasi. Ketiga perspektif tersebut adalah pertama, Perspektif Marxian. Kedua, Perspektif Weberian. Dan ketiga adalah perspektif Modernis.

1. Perspektif Marxian

Sosiologi Marxian beranggapan bahwa di dalam masyarakat hanya terdapat dua kelas yaitu kelas borjuis dan proletar. Hal ini diilhami oleh pemikiran yang berkiblat pada hubungan industrialis antara pemilik alat produksi dan buruh sebagai pekerja. Hal ini nyata ditemui dalam masyarakat industrialis.⁸⁷ Konsep ini melihat masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial sehingga

⁸⁴ Ibid., hlm.78.

⁸⁵ Baca dengan lebih teliti lagi, Nur Syam dalam bukunya *Madzhab-madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKis dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), hlm. 15.

⁸⁶ Ibid., hlm, 29.

⁸⁷ Disarikan dari artikel "*Di Tengah-tengah Kelas Menengah*", dalam buku Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan* (Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2004). hlm.91-92.

penyelesaian konflik hanya dapat dilakukan dengan penaklukan kelas tertentu oleh kelas lainnya atau kelas proletariat mengalahkan borjuasi.⁸⁸

Kesadaran kelas pada hakikatnya baru kita kenal melalui literatur sosialis pada abad ke-19, meskipun jauh sebelum itu bahkan zaman Yunani dan Romawi dikenal perjuangan antara berbagai golongan masyarakat. Namun, baru ketika Marx mengecam keras golongan borjuasi dan membuat sadar golongan buruh sebagai status kelas, pengkotakan masyarakat dalam kelas mulai ramai dikenal. Sebelum itu pembagian kelas tidak menunjuk pada persinggungan kepentingan tetapi lebih merupakan pembagian tugas berdasarkan tempatnya masing-masing.

Kelas sosial dan strata sosial merupakan suatu kondisi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat; baik masyarakat tradisional (pedesaan dengan sifat homogen) maupun modern (perkotaan dengan karakter heterogenitas dan inklusif). Meski kehadiran dua konsep tersebut tidak selalu bersamaan. Masyarakat mengalami stratifikasi sosial dengan berbagai kategorisasi.⁸⁹ Mereka terbagi dalam kelompok, kelas-kelas sosial tertentu; ada kelompok masyarakat yang menempati kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas sosial tersebut terdapat pada semua bidang kehidupan, seperti dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.⁹⁰ Mereka yang berada dalam kelas atas ini adalah kelompok yang paling menentukan yaitu kelompok borjuasi. Mereka memainkan peranan signifikan dalam bidang politik dan ekonomi, bahkan kadang-kadang cenderung memonopoli. Kelas⁹¹ dalam masyarakat dibedakan atas dasar posisi sosial ekonomi yang ditentukan oleh sistem produksi; oleh relasi mereka dengan alat-alat produksi; oleh peran mereka dalam organisasi kerja secara sosial.⁹² Soekanto (1977) mendefinisikan kelas paralel dengan pengertian lapisan tanpa membedakan apakah dasar lapisan itu berupa uang, tanah, kekuasaan, atau dasar lainnya. Kelas sosial didefinisikan sebagai

⁸⁸ Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi Dalam Transformasi Eropa*, Hlm. 15.

⁸⁹ Stratifikasi sosial adalah proses atau struktur masyarakat yang dibedakan ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat. Baca, Soeriano Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 484.

⁹⁰ Kadar, dalam buku *Pembelaan Al-Quran kepada kaum tertindas*. (Jakarta : PT Bina Aksara, 1983), hlm. V.

⁹¹ Di dalam sebuah sistem produksi, kelas-kelas menempati posisi yang berbeda dan cenderung konfrontatif. Hubungan ini oleh Marx dianggap sebagai hubungan yang eksploitatif.
http://www.prdonline.or.id/pbb/index.php?option=com_glossary&tunc=display&letter=K&Itemid=53&catid=14&page=1.

⁹² Contoh pembagian kelas yang pernah muncul adalah pemilik budak dengan budak, tuan feodal/bangsawan pemilik tanah dengan kaum hamba tani pembayar upeti serta kaum borjuis dengan kaum proletar.

suatu kelompok sosial yang anggotanya mempunyai persamaan kedudukan ekonomi, prestise, kedudukan, pekerjaan, kekuasaan, orientasi nilai, dan ditandai dengan adanya interaksi serta kesadaran kelas. Sementara Bruce J. Cohen melihat kelas sosial sebagai unit masyarakat yang berbeda dari masyarakat lainnya dalam hal nilai, prestise, kegiatan, kekayaan, dan milik-milik pribadi lainnya serta etika pergaulan mereka.⁹³

Kita harus mengakui bahwa Marx mengenalkan tentang pengakuan akan adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran, dan berbagai pengaruh dari kelompok kelas sosial dalam menimbulkan perubahan struktur sosial,⁹⁴ yang kiranya hal ini sangat penting dalam melihat realitas objektif masyarakat kota.

Banyak ilmuwan meyakini bahwa perubahan struktur sosial disebabkan oleh banyak faktor yang akan mengubah masyarakat ke dalam bentuk dan struktur baru atau akan mengalami dinamika yang terus menerus (*changing continuity*). Karena revolusi industri tergantung pada kemajuan teknologi, sebagai implikasinya adalah bahwa kemajuan teknologi (perubahan kebudayaan material) merupakan kunci untuk memahami perubahan sosial. Dampak kemajuan teknologi dan perkembangan industrialisasi akan merangsang perubahan sosial ini diimani oleh ahli-ahli teori klasik seperti; Comte, Marx, Durkheim, Weber, Tonnies, dan lain-lain yang mengembangkan teorinya dengan background Revolusi Industri.⁹⁵

Kelas pemilik modal mempunyai kedudukan istimewa, bahkan sangat kuat dalam setiap rezim kekuasaan. Sifat individu digerakkan oleh kapitalisme. Marx menulis, naluri untuk memperkaya diri, yang dalam seorang yang miskin adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai, dalam seorang kapitalis adalah kesan mekanisme sosial, di mana dia hanyalah salah satu daripada roda.⁹⁶ Pandangan ini ditolak oleh kaum fungsionalis karena bagi penganut fungsionalis justru kemiskinan yang menggerakkan pemodal untuk mengakumulasikan keuntungannya dengan tersedianya buruh murah.

Perasaan teralienasi kelas pemerintah senantiasa akan didesak untuk mempertahankan sistem yang mewujudkan alienasi mereka dengan otoritas kekuasaannya. Pihak borjuasi tidak

⁹³ Cohen, Bruce J. (alih bahasa oleh : Sahat Simamora), *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1983, hm. 243. dalam Kadar, pembelaan Al Qur'an kepada kaum tertindas hlm. 11.

⁹⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm 163.

⁹⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm.111.

⁹⁶ K. Marx, dipetik dari G. Lukacs, Seperti nota 2, muka surat 133.

dapat menyadari karakter kapitalisme tanpa menghadapi peranan mereka sebagai penindas dan penyokong sistem kapitalis. Kaum Borjuis-kapitalis tidak menyadari hubungan-hubungan sosial di bawah bayang-bayang masyarakat kapitalis. Perjuangan kelas bermakna bahwa para pekerja tidak lagi melihat diri mereka sebagai individu akan tetapi mereka sadar posisi kelasnya dan berupaya mengubah masyarakat secara revolusioner.

2. Perspektif Weberian

Sosiologi Liberal yang banyak diilhami oleh Weber yang melihat masyarakat lebih pluralis, tidak hanya terdiri dari dua kelas akan tetapi memungkinkan memunculkan kelas menengah yang dinamis, mampu melakukan perubahan sosial karena mempunyai *interest* dan modal. Hal ini bisa dilihat dalam masyarakat yang sederhana, agraris dan masyarakat pedagang yang belum mengalami revolusi industri yang mapan.⁹⁷ Paham Weberian melihat masyarakat tidak selalu dalam kelas-kelas sosial akan tetapi bisa jadi terdiri dari strata atau stratifikasi sosial yang tidak melulu berhadap-hadapan satu sama lainnya.

Borjuasi sebagai suatu golongan dalam masyarakat yang telah lama berjuang untuk menentukan kedudukan dalam sejarah melawan ikatan sosial dan kultural lama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan aspirasi-aspirasi baru baik kemasyarakatan maupun kebudayaan. Dalam mempelajari struktur masyarakat yang telah lampau seperti pada abad ke-17 dan ke-18, kesulitan yang dihadapi manakala masyarakat sudah terfragmentasi pada beberapa kelas sosial yang sangat kompleks.

Pergolakan kelas membuat kristalisasi hingga kekuatan-kekuatan sosial yang dapat kita pandang sebagai kelas-kelas dengan kepentingan yang sama saling menggabungkan diri dalam satu pihak. Max Weber berpendapat bahwa kelas, seperti juga status dan partai adalah gejala dari pembagian kekuatan dalam masyarakat. Faktor yang membentuk kelas ialah kepentingan ekonomi dan masalah pemasaran. Borjuasi mula-mula menunjukkan diri sebagai kelas dengan kepentingan ekonomi.⁹⁸ Namun, ternyata bahwa sebagai *logical consequence* dari kepentingan-kepentingan ekonomi seluruh susunan masyarakat dan peradaban pada umumnya terbawa.

Mula-mula borjuasi hanya merupakan bagian dari semua penduduk, kemudian dapat menguasai seluruh kegiatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam pengertian kelas menengah yang sering dipertukarkan dengan kata borjuasi tercampur pengertian antara kelas

⁹⁷ Ibid., him.92.

⁹⁸ Kuntowijoyo, op.cit. hlm.,17.

dengan status, yaitu antara penggolongan berdasar kesempatan ekonomi dengan penggolongan berdasarkan kehormatan di muka masyarakat karena nilai-nilai kultural.

Analisa Weber yang diadopsi oleh Dick tentang kelas konsumsi yang dihubungkan dengan fenomenologi dengan prestise sosial mempunyai sejumlah kelemahan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan membedakan kelas menengah baru dengan kelas borjuasi kapitalis karena dalam banyak hal kedua kelompok ini mempunyai kesamaan terutama masalah konsumsi.⁹⁹

3. Perspektif Modernis

Dalam pandangan ini masyarakat terbelah menjadi beberapa stratifikasi sosial yang cenderung plural. Kelas borjuasi baru sebagai produk dari kegiatan tata usaha baru sering disebut dengan kelas menengah baru. Dalam masyarakat kapitalis industrialis, kelompok ini diidentikkan dengan kelompok terpelajar, profesional, manajer dan ahli-ahli atau tokoh cendekiawan. Kehadiran kelas borjuis ini sering dihubungkan dengan kemungkinan perubahan sosial sebagaimana yang terjadi di Eropa pada abad ke-11

Keberhasilan kaum borjuasi di Eropa pada abad ke-11, banyak mempengaruhi ilmuwan politik mutakhir dalam upaya mencari penjelasan tentang hubungan kehadiran kelas borjuasi dengan demokrasi Tidak aneh bila tulisan-tulisan ilmuwan politik seperti Barrington Moore¹⁰⁰ penuh dengan gagasan yang berpangkal pada postulat pertumbuhan demokrasi akan mustahil terjadi tanpa kehadiran kaum borjuasi. Bahkan dengan sedikit berlebihan, John Stuart Mill menyebut *kelas borjuasi sebagai kelas yang secara universal dianggap bagian yang paling bijaksana dan paling arif dalam masyarakat.*¹⁰¹

Analisis kelas modern maupun tradisional keduanya bersumber dari pemikiran Karl Marx dan Max Weber yang tertarik dengan kehadiran kelas-kelas baru dalam masyarakat kapitalis-industri. Perbedaan kedua pemikir ini adalah pada pembelahan kelompok dalam masyarakat. Marx memandang masyarakat hanya terdiri dari dua kelas yang tidak pernah akur yaitu kelas atas dan bawah, kelas penindas dan tertindas, atau borjuis dan proletar.¹⁰² Sementara

⁹⁹ AAGN Ari Dwipayana, *Kelas dan Kasta*, (Yogyakarta: Lentera, 2001), hlm.6.

¹⁰⁰ Barrington Moore, *Social Origin of Dictatorship and Democracy*. Boston, Beacon, 1996. Dalam karyanya Barrington Moore menyatakan bahwa revolusi kaum borjuis akan menghasilkan demokrasi.

¹⁰¹ Ulf Sudhansen, *Demokrasi dan Kelas Menengah, Refleksi Mengenai Pembangunan Politik*, Prisma 2,1992

¹⁰² Struktur kelas yang terdiri dari kelas atas dan kelas bawah dipakai dalam analisis Marxisme, dan dalam analisis ini tidak dikenal kelas menengah. Dalam perspektif ini, *mode of production* yang terjadi hanya memberikan ruang

Weber berpendapat masyarakat terbagi dalam kelas-kelas yang plural dengan kategori tertentu. Teori ini juga yang dijadikan pijakan tentang asal muasal teori elit dalam masyarakat.¹⁰³

Tentang peran kelompok burjuasi di Indonesia masih cukup kontroversi bagi sebagian ilmuwan. Ada yang pesimis dan sebagian lagi optimis dengan berbagai prasyarat yang menyertainya. Demokrasi dalam pandangan Syafii Ma'arif disebut ideologi politik yang terbaik dari yang terburuk memang sering menunjukkan karakter yang penuh kontroversi dalam sejarah. Di satu sisi demokrasi menjanjikan perbaikan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan atas yang lemah. Namun, disisi lain demokrasi juga menimbulkan anarkisme politik, keserakahan ekonomi dan kesenjangan sosial. Hal ini pula yang menjadikan Soekarno menolak demokrasi yang kebarat-baratan yang kebablasan dengan mengenalkan demokrasi ketimuran yaitu demokrasi parlementer (1959-1960) sebagai koreksi atas demokrasi parlementer atau demokrasi liberal (1950-1959). Setelah Orde lama runtuh lalu Soeharto menerapkan demokrasi Pancasila (1967-1998).¹⁰⁴

Keseharian demokrasi kita merupakan demokrasi elitis, demokrasi borjuis. Para pemodal yang menjadi pengendali utama setiap proses politik sementara kelompok borjuis ini lahir dari rahim negara, bersandingan satu sama lain sebagai pemilik lisensi, aset-aset ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu proses politik dan ekonomi selalu diwarnai dengan pergulatan antara orang alit dengan elit kapital yang berujung pada tindakan kekerasan, ancaman, dan penghilangan paksa. Negara melahirkan kekuatan borjuasi yang pro penguasa untuk mengelola mekanisme pasar demi menjaga stabilitas ekonomi para elit atau para raja dagang.

B. Prospek Pelacakan Borjuasi Jawa

terhadap kelas borjuis sebagai pemilik modal dan kelas proletar sebagai buruh. Bagian yang bisa disebut kelas menengah adalah "Kaum borjuis kecil" yang secara esensial tidak berbeda kepentingan dengan kepentingan pemilik modal.

¹⁰³ Makalah kuliah Sosiologi Politik. 2006, JIP Fisipol UGM, AAGN Ari Dwipayana dan Haryanto yang menjelaskan kemunculan kelas menengah baru atau kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat akibat Industrialisasi atau akibat rezim kekuasaan.

¹⁰⁴ Pandangan Soekarno yang dapat dikutip dari tulisannya adalah mengenal demokrasi kebaratan. Ia menulis: "...di semua negeri modern itu kapitalisme subur dan merajalela! Di semua negeri modern kaum proletar ditindas hidupnya. Di hidup milyunan penganggur, upah dan nasib kaum buruh adalah upah dan nasib kokoro, di semua negeri modern itu rakyat tidak selamat, bahkan sengsara-sengsaranya. Inilah hasilnya "demokrasi yang dikeramatkan orang". (Soekarno, di bawah bendera revolusi, 1965. hlm. 172-173) Dikutip dari Budiman Tanuredjo, *Mencari Demokrasi*, Opini, Kompas, tanggal 29 November 2007, hlm 33.

Perkembangan kapitalisme di daerah Kotagede sejak zaman Mataram dan pengaruh kolonialisme menunjukkan wajahnya yang ganjil. Tidak sebagaimana gagasan Marx, di Yogyakarta khususnya, kemunculan kapitalisme di wilayah ini terjadi bukan melalui fase penghancuran terhadap feodalisme. Kapitalisme justru mendapat lahannya yang paling subur di atas bangunan feodalisme. Dalam teori Marxist, gambaran tentang kehancuran feodalisme, yang beriringan dengan menjelangnya ufuk kapitalisme, dilukiskan oleh Marx dalam Bruimare XVII Louis Bonaparte. Terbentuknya masyarakat borjuis modern, menurut Marx, selalu dimulai dengan kehancuran feodalisme tradisional.¹⁰⁵

Pada periode sebelum 1918 (Tanam Paksa di Yogyakarta), tanah merupakan hak milik raja. Hal ini dikenal dengan sebutan kapitalisme feodalisme.¹⁰⁶ Ketika kekuasaan kolonial makin menguat dan turut campur dalam pengaturan masalah pertanahan, pemerintah kolonial Belanda melarang segala bentuk penyewaan tanah. Pada waktu itu, penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. *Pertama*, tanah keprabon atau tanah yang dimiliki secara langsung oleh Raja. Dan *kedua*, tanah *apanage* yang berfungsi sebagai lungguh untuk memenuhi kebutuhan dan gaji bagi para pegawai kerajaan, para keluarga dan kerabat kesultanan (para priyayi). Tanah *apanage* ini biasanya di dalamnya terkandung juga hak-hak khusus yang berupa pelayanan dari rakyat yang tinggal di atas tanah *apanage* tersebut. Rakyat yang tinggal di atas tanah *apanage* biasanya wajib memberikan pajak atau persembahan hasil bumi kepada para bangsawan yang memiliki tanah *apanage* itu.¹⁰⁷

Dalam perjalanan sejarahnya, terjadi perubahan-perubahan kekuasaan ekonomi di dalam koalisi Kasunanan, Belanda, Priyayi dan Cina. Pada masa revolusi kekuatan-kekuatan tersebut menghilang dan kekuatan masyarakat yang paling penting kemudian adalah santri dan PKI di dalam suatu struktur pemerintahan yang baru. Namun demikian, PKI juga menghilang pada tahun 1965 sehingga tinggal santri yang menjadi kelompok dominan dalam menggerakkan masyarakat. Pergeseran-pergeseran ini memiliki pengaruh penting di dalam perkembangan

¹⁰⁵ <http://dyanuardy.wordpress.com/2008/01/16/kapitalisme-feodal-di-yogyakarta/>

¹⁰⁶ Feodalisme merupakan suatu modus produksi dimana penguasaan tanah yang luas yang dimiliki oleh kelompok aristokrat maupun bangsawan dengan suatu jenis modus produksi kapitalisme yang dijalankan di sekitar keluarga dan para priyayi (para yayi: keluarga kerajaan). Kapitalisme berkolaborasi dengan feodalisme yang berupaya untuk memperkuat posisinya melalui Undang-Undang Keistimewaan.

¹⁰⁷ Di Kotagede sebagai bekas Kerajaan Mataram yang terletak di Yogyakarta, politik pertanahan semacam itu, tampak sejak masa kolonial. Di daerah-daerah yang kehidupan sosialnya sangat dipengaruhi oleh sistem kerajaan, pada umumnya raja dianggap sebagai orang yang memiliki secara mutlak segala hal apa yang ada dalam wilayah kekuasaan kerajaan, "sangisorning langit, salumahing bumi" Kekuasaan raja atas tanah adalah mutlak, tak dapat diganggu gugat.

ekonomi dan juga memberikan kesempatan kepada pertumbuhan kelompok pedagang santri. Dalam bab tiga buku ini dipaparkan mengenai ciri-ciri sosial ekonomi Jatinom dan sekitarnya. Untuk itu saya memulai dengan menunjukkan keadaan Klaten sebagai daerah yang cukup subur dan daerah yang secara mendasar telah dipengaruhi oleh proses komersialisasi sejak masa kolonial. Meskipun pabrik gula dan perkebunan tebu di Jatinom tidak bertahan lama, terutama karena aksi bumi hangus pada tahun 1948/1949, struktur ekonomi telah mengalami diversifikasi dengan munculnya berbagai sektor kegiatan ekonomi, seperti industri-industri kecil dan perdagangan.

Ada beberapa karya tulis yang pernah membahas seputar teori elit, peranan kelompok borjuasi dalam transformasi sosial yang penulis anggap relevan untuk dijadikan kerangka teori dan bahan acuan untuk penulisan tema yang sama meski dalam konteks yang lebih luas atau lebih spesifik. *Pertama*, literatur yang cukup klasik karya T.B. Bottomore yaitu *Elites and Society* yang melacak dinamika elit di Eropa pada abad ke-19 yang cukup gamblang dalam deskripsinya. Bottomore memaparkan dengan sangat lihai bagaimana aktor-aktor yang tergabung dalam elit melakukan upaya penguatan dan ekspansi kekuasaan seperti yang dipraktikkan oleh kelompok elit birokrat, intelektual, dan manajer. Dan yang terpenting adalah dia membuat tesis yang provokatif dalam konteks Eropa “*No bourgeoisie, no democracy.*” Bagaimana dengan Indonesia? Mungkinkah? Selain itu Bottomore juga mengelaborasi teori-teori yang dilakukan oleh pendahulunya: Pareto, Mosca, Mill. *Kedua*, karya seorang peneliti asing, Robert Van Neil dengan judul *The Emergence of Modern Indonesia Elit* (1960). Van Neil menggunakan perspektif elit untuk melihat struktur dan dinamika sosial dalam konteks Indonesia. Van Neil menjelaskan juga bagaimana kelahiran elit modern yang “menggusur” elit tradisional di Indonesia terkait kebijakan politik kolonial.

Ketiga, buku *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa* yang ditulis oleh Kuntowijoyo. Buku ini dianggap dapat menghindari pertentangan teoritis tentang hubungan sebab-akibat dalam penafsiran berbagai gejala sejarah di Eropa. Dalam judulnya sengaja ditempatkan suatu golongan penduduk, yakni borjuasi, sebagai landasan bagi transformasi masyarakat dan kebudayaan Eropa pada ke-17 hingga ke-18 menuju Eropa modern. Pembahasan cukup kaya referensi mengenai kemunculan kekuatan sosial baru, yakni golongan borjuasi terkait

pandangan dunia, persoalan kaum borjuasi, tujuan hidup, dan kepentingan mereka, melahirkan sistem baru yang mampu mentransformasikan kehidupan sosial dan politik.¹⁰⁸

Keempat, pencatatan yang dilakukan oleh Van Mook di Kotagede pada tahun 1926 dan dibukukan dengan judul “Kuto Gedhe” sangat penting sebagai salah satu titik sejarah perkembangan Kotagede. Van Mook lebih menekankan pada aspek kuantitatif mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian, profesi, persebaran penduduk dari pendatang dan sebagainya. Peneliti berikutnya adalah Mitsuo Nakamura yang hasilnya telah dibukukan dengan judul terjemahan *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin* yang diterbitkan oleh *Gajah Mada University press*. Dalam buku tersebut Nakamura memfokuskan pada peranan kelas menengah muslim dalam wilayah yang lebih luas, menyangkut masalah politik dan pengelompokan golongan.¹⁰⁹ Selain itu, Bambang Purwanto juga melakukan penelusuran sejarah sosial yang cukup signifikan untuk membaca Kotagede dari aspek historis yaitu sejarah kekerasan komunal.¹¹⁰

Kelima, penelitian Arif Akhyat¹¹¹ *Santri dan Bisnis: Perilaku Sosial Ekonomi Kelas Pengusaha Muslim di Kotagede Yogyakarta 1970-1990* yang memaparkan bahwa penelitian tersebut menganalisis sifat-sifat kualitatif dari tingkah laku ekonomis kelas pengusaha muslim di Kotagede. Dalam kesimpulan riset ia menyatakan bahwa perilaku kehidupan bisnis pengusaha muslim masih mempertahankan sistem bisnis tradisional, individual, meskipun sudah terpengaruh sistem bisnis modern. Peneliti menuliskan bahwa terdapat kontradiksi antara kehidupan bisnis dan dagang dengan etos kehidupan sosial budaya.¹¹² Selain itu adalah terjadinya pola yang cukup berbeda dengan daerah lain yaitu sinergisitas antara modernisasi

¹⁰⁸ AAGN Ari Dwipayana dalam bukunya *Kelas Kasta, Pergulatan Kelas Menengah Bali*. Sumbangan dari karya ini cukup signifikan untuk membaca perkembangan masyarakat fase kapitalisme industri yang diidentifikasi sebagai kaum terpelajar kota bergelar, bekerja sebagai profesional, manajer, dan ahli-ahli atau tokoh-tokoh intelektual yang tidak terikat dalam suatu lembaga formal atau lembaga yang *profit oriented*

¹⁰⁹ Arif Akhyat, *Santri dan Bisnis: Perilaku Sosial Ekonomi Kelas Pengusaha Muslim di Kotagede Yogyakarta 1970-1990*, hal. 3

¹¹⁰ Hasil penelitian itu kini dibukukan dalam kumpulan tulisan yang diterbitkan Penerbit Ombak dengan judul: *Kota Lama, Kota Baru, Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Bambang menjelaskan tentang sejarah sosial mengenai kekerasan dan kriminalitas di Kotagede pada saat transisi di akhir masa kolonial dan awal kemerdekaan. Tulisan tersebut memuat data-data yang relevan mengenai kondisi Kotagede, potret sosial dan ekonomi pada saat itu yang cukup dinamis. Ia mencontohkan terdapat perlawanan buruh terhadap majikan pabrik.

¹¹¹ Op.cit,

¹¹² Arif Akhyat op.cit. hlm. 56

dan tradisionalisme yang termanifestasikan dengan berkembangnya dua kelompok keagamaan yang berbeda karakteristik yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.¹¹³

Keenam, penelitian yang cukup spesifik dilakukan oleh Mutiah Amini yang menyimpulkan bahwa keterlibatan politik kelompok buruh perak di Kotagede disebabkan oleh himpitan ekonomi dan ketertarikan akan janji kelompok propaganda Partai Komunis Indonesia akan menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan janji akan membagikan tanah.¹¹⁴ Dan terakhir adalah karya Irwan Abdullah yang meneliti di Klaten yaitu di Jatinom dengan judul: *Pengusaha Muslim di Jatinom: Reformasi Agama dan Modernisasi Ekonomi di sebuah Kota di Jawa Tengah*. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kelompok muslim dalam kegiatan perdagangan di Jatinom, sebuah kota kecil di kabupaten Klaten. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan agama dan perdagangan di dalam konteks perubahan sosial-ekonomi dan sosial-politik.

Dari penelitian yang pernah dilakukan di Kotagede, penulis belum menemukan penelitian khusus yang mengkaji bagaimana pola regenerasi kelompok borjuasi di Kotagede dan bagaimana mereka membangun basis kekuatan sosial, ekonomi dan politik untuk mempertahankan eksistensi kelompoknya juga kekuasaannya. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pola pewarisan kekayaan, nilai, respon borjuasi terhadap kondisi sosial politik, transformasi kelas yang disebabkan oleh perubahan ekonomi-politik dalam rentang waktu tertentu.¹¹⁵

¹¹³ Penulis memberikan catatan pada apa yang disebut Kuntowijoyo tentang arti simbolik masjid dan pasar yang merupakan dua aspek antara ritualisme dan kapitalisme dapat berjalan bersama-sama.

¹¹⁴ Dalam laporan penelitian ini, juga menceritakan bagaimana kontestasi ideologis antara kelompok santri yang tergabung dalam Masyumi dan kelompok abangan atau komunitas yang tergabung dalam organisasi PKI atau SOBSI. Baca Mutiah Amni, *Buruh Perak dan Politik di Kotagede tahun 1960-1965*, skripsi, tidak diterbitkan. Fakultas Sastra, UGM tahun 1994.

¹¹⁵ Penulis tidak menyebutkan kurun waktunya akan tetapi berusaha menarik kronologis mulai akhir periode Mataram Islam dengan melihat konteks yang relevan. Hal ini disebabkan kesulitan akan studi genealogis yang membutuhkan waktu yang cukup lama apabila metode genealogi benar-benar diterapkan. Kedepan agenda riset ini tetap menjadi hal yang *urgent* untuk dikembangkan sebagai riset sosiologi politik yang komprehensif.

BAGIAN 2

Kotagede: Dari Mataram Islam sampai Zaman Kolonialisme

Sebagai penjelasan konteks penelitian, bab ini berusaha memberikan pemaparan yang spesifik dan khas mengenai potret Kotagede yang berubah dalam perkembangannya (kejayaan dan kemundurannya).¹¹⁶ Untuk membuat sistematis maka pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bagian, yang menunjukkan fase perjalanan sejarah dari kerajaan, kolonialisme/awal kemerdekaan dan pasca kemerdekaan dengan ekspansi kapitalisme yang makin menguat. Perubahan basis dan kekuatan ekonomi menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari penulisan bagian ini.

Babad maupun sumber sejarah Belanda, membuka dinasti Mataram dimulai dari Ki Gede Pemanahan moyang keluarga Mataram yang mempunyai asal usul Jawa Asli. Munculnya tokoh ini mengawal berakhirnya bandul politik dari Pantai Utara Jawa ke Pedalaman, yang membawa akibat sangat penting untuk peradaban Jawa abad ke-18 hingga ke-19 di keraton-keraton raja dinasti Mataram, dan berlanjut sampai abad ke-20 dan ke-21 diikuti sesudah kemerdekaan Indonesia tahun 1945.¹¹⁷ Penggambaran mengenai sejarah lokal Kotagede lebih detailnya dapat dibaca dalam pembahasan berikut:

A. Kotagede, dan Perjalanan Sejarahnya

Kita ketahui, bahwa Kotagede dulunya adalah hutan yang disebut Alas Mentaok yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan oleh Sultan Hadiwijaya, raja Kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan Hindu di Jawa Timur pada tahun 1575. Alasan pemberian ini dikarenakan Ki Ageng Pemanahan berjasa telah membantu Kerajaan Pajang menaklukkan Aryo Penangsang dan Kadipaten Jipang Panolan. Alas tersebut berhasil diubah menjadi sebuah desa yang makmur yang lama-kelamaan menjadi kerajaan kecil yang siap bersaing dengan Kerajaan Pajang sebagai atasannya. Dari sepetak tanah itu lalu terbentuklah Kerajaan Mataram Islam Kotagede. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal pada tahun 1583, kerajaan diteruskan oleh

¹¹⁶ Data yang disajikan dalam bagian ini sebagai data dinamis yang selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga tidak menutup kemungkinan data-data dipenggal dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan perkembangan atau perubahan komposisi masyarakat.

¹¹⁷ Heru Basuki, *Dakwah Dinasti Mataram, dalam Perang Diponegoro, Kyai Mojo, dan Perang Sabil Sentot Ali Basah*. (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007). hlm. 318.

putranya, Danang Sutawijaya, yang juga sering disebut Panembahan Senopati atau *Pangeran Ngabehi Loring Pasar*.

Di masa kepemimpinan itulah Panembahan Senopati membangun sebuah pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakatnya. Pasar tersebut kemudian diberi nama Pasar Gede. Di pasar inilah para penduduk setiap hari saling bertemu dan melakukan kegiatan jual beli kebutuhan hidup. Maka tak aneh pula bila pada awalnya Kota Gede lebih dikenal dengan sebutan Pasar Gede atau Sargedede.

Setelah Panembahan Senopati wafat (1601), Mataram dipimpin oleh putranya, Mas Jolang (1601-1613). Mas Jolang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Seda Krapyak. Pada masa pemerintahannya, dibangun taman Danalaya di sebelah barat keraton. Panembahan Seda Krapyak hanya memerintah selama 12 tahun, beliau meninggal ketika sedang berburu di Hutan Krapyak

Selanjutnya bertahtalah Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645). Pada masa Hanyakrakusuma ibukota kerajaan Mataram, Kotagede dipindahkan ke Keraton Kerta di Plered. Di bawah pemerintahannya Mataram mengalami kejayaan. Sejak saat itu Kotagede tidak lagi menjadi ibukota kerajaan Mataram. Itulah sejarah singkat perkembangan Mataram di Kotagede. Singkat cerita, kemudian Pemanahan memperkuat penduduknya, membekali dengan berbagai keterampilan dan Teknik berperang dan di kemudian hari melakukan kudeta terhadap pemerintah Pajang dan mampu memperluas daerah kekuasaan sampai ada sumber yang mengatakan sampai ke Palembang.

Pada masa Sultan Agung pula Masjid Gede Mataram dibangun. Hanya saja, karena penggarapannya dilakukan bersama-sama masyarakat yang kebanyakan memeluk agama Hindu dan Budha, maka arsitekturnya pun banyak mengadopsi corak khas arsitektur Hindu dan Budha.¹¹⁸

¹¹⁸ Salah satunya adalah gapura masjid yang berukuran mirip wihara. Ukiran-ukiran kayu yang menghiasi hampir setiap sudut masjid juga bercorak gaya Hindu dan Budha. Disebut dalam kisah berdirinya kerajaan Mataram Islam, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari nama Ki Ageng Pemanahan (Ki Ageng Mataram). Nama Mataram sendiri merupakan nama yang diberikan oleh Sultan Hadwijaya, penguasa kerajaan Pajang sebagai jasa yang berhasil membunuh Arya Penangsang tahun 1527 M di Jipang Panolan. Tidak lama kemudian Pemanahan menempati daerah "Alas Mentaok" tersebut dengan mendirikan padepokan sebagai cikal bakal Kotagede. Lambat laun daerah ini makin ramai dengan penduduknya dan akhirnya pada tahun 1540 daerah ini disebut Mataram atau Kotagede. Ki Ageng Pemanahan menuju "Kotagede" bersama dengan putra Sultan, Hangabehi Loring Pasar, Tumenggung Mayang, serta Nyi Ageng Nis, dan juga Ki Ageng Jurumartani. Sumber referensi, Masjid Mataram Kotagede, dalam *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*, (Bandung: Gemainsari, 1999), hlm. 183-184.

Kotagede sebagai Kawasan Kerajaan non-Maritim. Hal ini pernah dikatakan oleh Sultan Agung Mataram (1613-1645) ketika menerima utusan VOC, Ricklof van Goens. Sultan itu mengatakan bahwa bukan seorang pedagang sebagaimana Sultan Banten. Disini jelas ada perbedaan nilai antara kerajaan agariA yang penghasilannya didasarkan atas pertanian dan hasil hutan, dengan kerajaan pesisir yang sebagian besar penghasilannya tergantung pada perdagangan dan pelayaran. Meskipun kita tidak mempunyai cukup bukti mengenai semua negeri-negeri pesisir untuk membuat generalisasi, dari sumber-sumber yang tersedia kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada umumnya raja-raja negeri pesisir tidak saja menarik keuntungan dari pajak perdagangan dan pelayaran di bandar-bandarnya, tetapi mereka secara pribadi turut mengambil bagian dalam perdagangan dan pelayaran ini.¹¹⁹

Apa yang dikatakan Sultan Agung Mataram bisa jadi satu ejekan kepada raja-raja Nusantara, seperti Raja Aceh dan Sultan Banten, yang mengambil keuntungan pribadi sangat besar dari perkembangan perdagangan. Dari hikayat dan laporan seorang Perancis dikatakan bahwa harta raja-raja sangat melimpah ruah misalnya harta Alaudin Syah mencapai 140 kwintal emas, Mansur Syah mencapai 120 kwintal emas (Pires). Selain itu dikisahkan bahwa pakaian raja terdiri dari serawal beranteles dengan air-mas, berumbaikan mutiara, permata merah.¹²⁰

Satu catatan ketika penulis turun ke lapangan dan bermaksud mewawancarai warga Kotagede. Beberapa kali bertemu dengan warga Kotagede dan menyampaikan maksud penelitian, yaitu ingin melacak jejak orang-orang kaya Kotagede dari masa ke masa, beberapa orang menanggapi balik dengan bertanya: siapakah orang kaya yang dimaksud? Penulis bingung menjawab, dan mereka dengan senang memberikan penjelasan bahwa memang dahulu zaman keemasan Kotagede lahir banyak orang kaya dan cerdas pandai. Orang kaya itu biasa disebut raja dagang yang secara sosiologis berasal dari kalangan santri dan abangan. Kalangan santri diwakili dari keluarga Haji Mukmin dan keturunannya; sementara orang kaya kubu abangan direpresentasikan oleh komunitas kalang yang eksklusif (tentang kedua kelompok ini akan dibahas lebih detail di bab selanjutnya).

Oleh karena itu perlu kiranya penulis sampaikan pengertian sederhana tentang orang kaya. "Orang kaya" adalah golongan yang mempunyai hak-hak istimewa.¹²¹ Bangsa Eropa

¹¹⁹ Uka Tjandrassmita (ed), *Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975). hlm. 35

¹²⁰ Op.cit, hlm. 36

¹²¹ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh, Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636* (Jakarta: Gramedia-Forum Jakarta-Paris, 2006), Hlm. 88

menulis kata itu: “orancaya”, " orancaye", atau menerjemahkannya dengan “*gentilzhommes*” (Fr. Martin), nobleman (Davis). Istilah melayu kaya sama dengan “kaya” sekarang tetapi sebagaimana dikemukakan oleh L.C. Damais, akar kata itu sama dengan daya dan raya, maka mungkin maksud aslinya adalah “mulia”, “kuasa”. Oleh karena padanannya dalam bahasa Perancis seperti “*grands*”, “*notables*”, “*aristocrats*” mempunyai ruangan semantic yang sudah dengan sendirinya berlainan.¹²² Penulis sepakat bahwa kekayaan ini menjadi modal utama untuk meraih derajat kemuliaan dan kekuasaan dalam masyarakat, terlebih masyarakat kapitalis dalam perdagangan.¹²³

Kotagede sebagai kota besar di masa lalu tidak cukup hanya disebut sebagai kota perak, tetapi kota tua, the old capital city,¹²⁴ yang merupakan pusat kekuasaan, ibukota perdagangan dan ekonomi yang pernah mengalami kejayaan di masa lalu¹²⁵ melahirkan banyak cerita tentang kejayaan orang-orang kaya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dapat dikatakan Kotagede menjadi salah satu titik penting perkembangan kelas borjuasi yang ditandai dengan proses kapitalisasi masyarakatnya. Sistem perdagangan dan manufaktur berkembang dan akumulasi modal menjadi penting sebagai karakteristik massa yang menggantikan kepemilikan tanah sebagai pertanda manusia berkelas atas dan menengah atau kelas paling bawah.

Dari banyak penelitian, teori Clifford Geertz menjadi sangat relevan adalah temuannya yang mengungkapkan bahwa pedagang Jawa adalah para pengusaha yang tidak memiliki perusahaan (Penjajah dan Raja, 1977:29).¹²⁶

Dari pembacaan beberapa penelitian juga bahwa dapat dibenarkan memang ada persoalan serius mengenai karakteristik perdagangan di Jawa pada umumnya dan di Kotagede. Masalah tersebut adalah kewirausahaan yang tidak diwadahi dalam bentuk-bentuk organisasi modern yang efisien dalam menggerakkan perdagangan dan akumulasi modal. Bukan mental semangat *entrepreneurship* yang rendah atau tidak ada. Sebagaimana kesaksian Geerts, bahwa pedagang-pedagang Jawa adalah pekerja keras dan rajin membangun hubungan-hubungan sosial. Namun, kerja keras dan relasi sosial tersebut tidak dapat diterjemahkan menjadi menjadi

¹²² Ibid., hlm. 89

¹²³ Keberanian saya menuliskan terminologi politik perdagangan dilandasi atas studi literatur yang cukup luas mengingat banyaknya peranan kaum dagang atau borjuasi di Nusantara yang terlihat dari kehidupan ekonomi dan perdagangan di kerajaan-kerajaan Nusantara.

¹²⁴ Achmad Charris Zubair, *Budayawan Kotagede*

¹²⁵ Trias Setiawati, *Biografi Abdul Kahar Mudzakkir*, UII Press, 2007, hlm. 13

¹²⁶ Dikutip juga oleh Hendrawan Supratikno dalam *Pengusaha Tanpa Perusahaan*, Opini Kompas, edisi 18 November 2006, hlm. 6

keunggulan yang lestari (*sustainable*), karena kelemahan-kelemahan sistemik yang dihadapinya.¹²⁷

Dengan pesatnya perkembangan industri di Kotagede yang menggantikan industri gula di Yogyakarta banyak bermunculan kelas menengah dan pedagang kaya. Pada awalnya industri di Kotagede bukan hanya terdapat juga industri batik, pedagang kain mori yang mempunyai jaringan perdagangan sangat luas.

Sebagai konsekuensi logis industri maka kemunculan kelas borjuasi selalu diikuti dengan kelahiran kelas proletar yang jumlahnya ribuan. Borjuasi yang direpresentasikan oleh puluhan bos, pedagang kaya, dan *saudagar* atau *juragan* di Kotagede kemudian mempekerjakan kelas buruh yang jumlahnya ribuan. Hal ini sangat wajar, dan kemudian berdampak pada perubahan struktur ekonomi dan kelas sosial di Kotagede.

Kotagede terkenal sebagai pusat kerajinan perak, hal ini juga merupakan budaya peninggalan dari Kerajaan Mataram. Menurut sejarahnya, kerajinan ini merupakan warisan turun-temurun dari para abdi dalem yang pandai membuat berbagai barang kebutuhan istana pada zaman dulu. Awalnya tidak hanya membuat barang-barang dari perak saja tetapi juga barang-barang yang terbuat emas dan tembaga. Ketika ibukota pindah ke Plered, para pengrajin tidak ikut pindah ke daerah itu. Tapi pada perkembangannya, kerajinan dari perak lebih banyak diminati hingga saat ini.

Kalau pada awal peng-islam-an pedagang adalah pelaut yang membawa teknik-teknik dan cita-cita bersama muatannya, sekarang kedua fungsi itu sudah lama terpisah. Kota modern tidak lagi hanya merupakan pelabuhan dan pasar dan tempat hasil panen pedalaman diperdagangkan dengan barang impor. Kota itu adalah tempat istimewa yang harta kekayaannya berupa modal bergerak dapat dilipatkan terutama melalui riba, serta ditanam dalam serangkaian usaha. Sejumlah keluarga besar melayu, Sunda, atau Jawa yang sudah lama diislamkan telah menjawab tantangan ekonomi orang Cina dan Belanda dengan turut “berbisnis”. Mereka merupakan inti dari yang dinamakan golongan “santri kota” yang pada dasarnya dapat dinamakan dengan borjuis sebagaimana dikenal dalam rumusan konseptual Barat.¹²⁸

¹²⁷ Ibid., hlm. 6

¹²⁸ Denny Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya, Jaringan Asia*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 101.

Namun konsep “golongan borjuis Muslim Indonesia” hendaknya dipakai dengan hati-hati sekali, sebab keadaan di sini sangat berbeda dengan keadaan di Eropa Barat pada ambang masa modern, ketika muncul kota-kota bebas yang pertama, ataupun pada akhir abad ke-19, ketika ekonomi, politik, kebudayaan, dan pengetahuan berhasil dikuasai sekaligus oleh golongan yang sama. Menurut pandangan peneliti sejarah bahwa di Eropa Barat terlalu menekankan peranan borjuis, dengan menguraikan secara panjang lebar asal usulnya, kekuasaan, dan kemenangan-kemenangannya, sedangkan di lain pihak sedikit sekali jumlah kajian sejarah yang membicarakan golongan-golongan sosial yang di Asia kiranya telah menjalankan fungsi serupa. Kenyataan bahwa mereka tidak mencapai kejayaan yang sama, tidak berarti golongan itu tidak ada.¹²⁹

Banyak peristiwa dari sejarah baru Indonesia menjadi jelas kalau dengan memperhitungkan kembali pengaruh golongan-golongan usahawan besar itu: pertama-tama perjuangan melawan kolonialisme, dan terutama melawan cengkeraman ekonomi Barat, perjuangan melawan pesaing-pesaing keturunan Cina yang untuk selanjutnya disebut “orang asing” ; perjuangan melawan komunisme (yang sampai tiga kali dipatahkan, pada tahun 1927, 1948, dan 1966); perjuangan melawan suatu birokrat yang dalam tradisi kerajaan-kerajaan Jawa agaknya sering berkecenderungan mengutamakan peran negara dengan meremehkan perusahaan-perusahaan swasta; dan akhirnya seakan-akan untuk mengutamakan semua perlawanan itu, naiknya nasionalisme dan “bangkit”-nya Islam.

Hendaknya dicatat bahwa tampilnya kembali golongan-golongan usahawan itu tidak terjadi secara seragam di semua tempat. Terjadinya terutama di tempat-tempat perniagaan besar yang masih dikenang dan di tempat dimana praktik-praktik usaha masih ada, yaitu tempat di mana dahulu telah bangkit selera petualangan serta naluri perusahaan dan di tempat-tempat yang paling banyak disentuh Cina, Arab dan Eropa. Maka ada dua daerah yang secara khas terlibat: bagian utara Pulau Sumatra di satu pihak, dan Pulau Jawa di pihak lain.¹³⁰

Pada akhir kolonialisme kontestasi perdagangan antara golongan pribumi dan asing hampir terjadi di berbagai belahan Nusantara. Di Kotagede orang Cina dilarang masuk dengan

¹²⁹ Kalangan-kalangan pengusaha Indonesia, pewaris jauh kalangan usaha zaman kesultanan, memiliki tiga kesamaan unsur dengan kalangan borjuis Barat: a). Mereka mengutamakan modal bergerak (meskipun tidak meremehkan penggunaan modal tidak bergerak) ; b) Mereka kebanyakan tinggal di kota dan mengembangkan apa yang dianggap suatu kebudayaan kota yang khas, yang berbeda dengan kebudayaan keraton, maupun kebudayaan rakyat. c). Mereka merupakan wahana suatu ideologi “nasional” yang sekaligus melawan kerajaan jenis tradisional dan segala persaingan ekonomi, dari manapun datangnya. Lihat Denny Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya, Jaringan Asia*, (Yogyakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 158.

¹³⁰ Ibid., hlm.102

alasan sebagai benteng proteksi perekonomian pribumi-Jawa.¹³¹ Para pedagang Kotagede memilih berhubungan dengan Cina di luar Kotagede. Sampai kini belum ada kejelasan hukum apa yang melarang orang Cina di Kotagede akan tetapi berkembang di Solo yang notabene sama-sama pecahan Mataram, di Aceh, daerah yang melahirkan banyak kapitalis terjadi pengusiran golongan Cina dan sikap yang keras ini dipraktikkan tahun 1966 untuk menyingkirkan Cina asing.¹³²

Semenjak pemerintahan Kolonial Belanda mengalami gonjang-ganjing di dunia internasional setelah kekalahan Belanda oleh Jerman kondisi di Tanah air semakin tidak menentu dan Jepang mulai melakukan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dengan menggandeng beberapa unsur Islam sebagai kekuatan propaganda.

Propaganda Pan-Asia mulai disebarluaskan oleh Jepang semenjak tahun 1939, bersamaan dengan peresmian Masjid Kobe yang disaksikan oleh perwakilan umat Islam dari Asia. Indonesia sendiri mengirim lima tokoh; di antaranya adalah dua orang tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Kotagede, yaitu Abdul Kahar Mudzakkir dan Faried Maruf¹³³. Dan mulai tahun 1940 Jepang terang-terangan melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa Barat di daerah Asia.¹³⁴ Sementara dinamika kelompok aliran di Kotagede muncul nama Kyai Amir dan seorang pedagang kaya yaitu Kyai Masyhudi¹³⁵ sebagai pendiri *Syarikatul Muhtadi* (1910) yang merupakan cikal bakal lahirnya Muhammadiyah cabang Kotagede¹³⁶

¹³¹ Wawancara dengan Charis Zubair, Bu Hazid, dan Bahrudin

¹³² Pergeseran pusat perdagangan dan Aceh ke Medan cukup berdampak pada kemunduran ekonomi Aceh yang pada awalnya melahirkan banyak elit kapitalis. Hal ini terjadi setelah perang Aceh yang membawa dampak yang besar. Perdagangan batubara dan persinggahan kapal dagang berada di pelabuhan kecil-kecil yang terletak di daerah perbatasan Medan dengan Aceh. Ibid., hlm 102-103.

¹³³ Sumber: Dokumen Muhammadiyah, pidato iftihat ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah tahun 1940 di Yogyakarta

¹³⁴ H. Rosihan Anwar, op.cit, hlm. 56 dst.

¹³⁵ Kakak ipar, dari keluarga pedagang kaya di Kotagede (baca buku *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, karya Nakamura).

¹³⁶ *Syarikatul Muhtadi* artinya perkumpulan dasar atau perkumpulan dasar yang bertujuan meningkatkan pencaharian yang lebih baik tentang agama Islam dengan pendidikan dasar-dasar agama, mengaji Al Quran dan Hadits dan kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung. Pada tahun 1918, *Syarikatul Muhtadi* bergabung dengan Muhammadiyah Kotagede dan berkembang pesat sejak saat itu. Muhammadiyah kemudian memprakarsai perubahan di dalam kepercayaan dan praktik keagamaan. Banyak orang meyakini pembaruan Islam sangat terasa karena peranan Muhammadiyah. Sampai pertengahan 1920-an, Muhammadiyah banyak mendapat dukungan dan kalangan borjuis Kotagede (pedagang besar, keluarga Haji). Sebaliknya, pengaruh komunisme didukung oleh kalangan bawah, ialah para pedagang kecil dan pengrajin kecil atau tukang yang bekerja untuk majikan; umumnya diorganisasikan di cabang lokal dengan organisasi *Sarekat Rakyat*.

B. Revolusi Sosial dimulai dari Kotagede

Revolusi industri di Eropa ditandai dengan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin; namun tetap membutuhkan pekerja/buruh yang menjadi tenaga operasional justru dengan hadirnya teknologi ini akan menyedot banyak keringat dan buruh, tetapi juga menghasilkan surplus berupa nilai produksi yang eksploitatif.

Sementara di Kotagede “industri” masih berbasis manufaktur atau kerajinan tangan (*hand made*). Evolusi aktivitas ekonomi inilah yang akan menandakan evolusi borjuasi yang terkadang juga bisa dikatakan terjadi akselerasi sosial menuju tatanan sosial yang baru mulai dari periode pertukangan, perdagangan, industrialisasi dan sampai pada kehidupan yang multi profesi.¹³⁷ Di Eropa, agama dianggap turut membesarkan kapitalisme dengan Spirit Etika Protestan, dan di Kotagede menunjukkan satu karakteristik yang agak khas yaitu kemunculan kelas menengah santri yang ditopang oleh dunia perdagangan yang luas. Kelas menengah ini memanfaatkan jaringan agama sebagai pangsa pasar yang melewati batas geografis.

Purwanto (2004) menuliskan bahwa pada dekade ketiga abad ke-19, beberapa perubahan mulai terjadi di dalam masyarakat Kotagede. Selain para *abdi dalem* sangat dihormati karena fungsi kulturalnya, lapisan kota ini mulai diisi oleh para *entrepreneur* dari luar yang masuk ke Kotagede. Secara perlahan mulai berkembang kelompok pengrajin dan pedagang di Kotagede, yang secara sosio-kultural seperti juga para *abdi dalem* memiliki ikatan yang kuat dengan keraton.¹³⁸ Lebih lanjut ia membeberkan fakta berikut:

“...Adanya perubahan itu dapat dilihat pada komposisi demografis kota ini pada awal dekade ketiga abad ke-20. Menurut data yang berasal dari tahun 1922, dari 1073 pemilik rumah di Kotagede, 19,7% merupakan pedagang beserta pengrajin kaya dan 63,1% adalah pengrajin dan pedagang eceran. Sementara itu abdi dalem bersama-sama pegawai pemerintah hanya berjumlah 8,5%, sedangkan sisa 8,7% terdiri dari para buruh dan petani. Para saudagar dan pemilik perusahaan

¹³⁷ Semakin menguatnya kedudukan kelas borjuasi yang berada diluar kelas penguasa atau bangsawan telah mengubah sosiologi politik Kotagede. Hal ini bisa dilihat dari semakin meluasnya kekuasaan kelompok dagang yang membuat budaya tanding terhadap keraton. Hal ini pernah dikaji oleh Kuntowijoyo mengenai bagaimana dampak kelahiran pendidikan modern terhadap sosiologi politik Islam di Indonesia dalam *Konvergensi dan Politik Baru Islam* yang dituliskan sebagai pengantar buku Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Santri* (Yogyakarta: Cipres, 1994), hlm. x.

¹³⁸ www.google.co.id/search?hl=id&q=santri+kota+gede&btnG=telusuri&met=

kerajinan mulai mengambil alih kedudukan sosial dan ekonomi para abdi dalem, terutama ketika permintaan terhadap produk tekstil dan kerajinan, seperti permata dan barang-barang terbuat dari emas dan perak meningkat tajam pada awal abad ke-20."¹³⁹

Meskipun demikian, sebagian besar orang kaya/ borjuasi Kotagede itu tetap mempertahankan hubungan khusus mereka secara ekonomis dengan penguasa keraton, yang tetap menjadi salah satu konsumen reguler bagi berbagai jenis produk yang dihasilkan Kotagede. Seperti dikatakan oleh Selo Soemardjan dan Mitsuo Nakamura, pedagang dan pemilik perusahaan kerajinan di Kotagede memiliki kontak dagang yang rutin dengan para istri pejabat keraton Kasultanan Yogyakarta. Keadaan itu mengakibatkan sektor non-pertanian di Kotagede berkembang sangat cepat pada awal abad ke-20. Kotagede berkembang menjadi pusat industri yang dikuasai oleh para *entrepreneur* bumiputera.¹⁴⁰

Detik-detik keruntuhan kolonial Belanda direkam oleh beberapa sejarawan Indonesia yang menuliskan :¹⁴¹

“Penetrasi ekonomi Jepang dimulai sejak Indonesia dilanda malaise pada tahun 1930an dengan memasukkan exportnya dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan barang pasaran... Jepang juga melakukan penanaman modal di bidang pertanian, kehutanan dan penerbangan serta misi spionase terhadap Belanda di beberapa tempat strategis...”

Peristiwa krisis dunia pada tahun 1930 atau *malaise* ini sangat memukul pedagang di daerah Kauman dan Kotagede, karena kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan bahan pakaian. Ini mengakibatkan beberapa pedagang *kolaps* dan mengalami kemunduran yang cukup serius. Anak-anak pedagang, atau golongan menengah kemudian kesulitan membayar biaya sekolah di luar negeri, dan kemudian banyak yang terlibat dalam pergerakan semacam SDI, SI, Masyumi, dan persekutuan lain-lainnya.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁴⁰ Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1993), hlm. xx

¹⁴¹ Pada saat Kobayashi datang ke Indonesia untuk memimpin misi perdagang tahun 1940 dan dilanjutkan dengan misi perdagangan kedua pada tahun 1941 yang oleh penguasa Jepang untuk memasukkan Intelejen yang mempunyai tugas untuk merongrong kekuasaan Hindia Belanda, salah satunya adalah kolonel Laut Maeda. Baca lebih lanjut H. Rosihan Anwar, *Musim berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 57.

Kemudian tahun 1960-1966 terjadi ledakan buruh yang sangat besar di Yogyakarta juga Kotagede. Hal ini dipicu oleh masa revolusi yang ditandai dengan kerusuhan-kerusuhan di berbagai tempat terkait dengan Komunisme di Kotagede juga menjadi markas Komunisme sekaligus basis santri di Kotagede. Ledakan buruh ini juga dipicu oleh kebijakan liberalisasi ekonomi yang dimenangkan oleh kekuatan modal. Banyak masyarakat kemudian beralih pekerjaan menjadi buruh akibat tidak mempunyai modal yang cukup bersaing di tengah-tengah pasar.

Kotagede memasuki zaman modern. Kondisi Kotagede dalam bidang industri dapat dijelaskan bahwa sebagian besar kaum pengusaha ini masih bertahan dengan usaha lama yang secara turun temurun tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peta perekonomian masyarakat Kotagede ketika krisis ekonomi-politik tahun 1997-1999 atau kondisi beberapa tahun terakhir ini. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perusahaan Menengah dan Besar di Kotagede

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pekerja
1	Anono Silver/Onik Silver	31
2	Bintang HN	25
3	Budi Makmur Jaya Murni, PT	537
4	Budi Manunggal, PT	543
5	HS Silver 800-925, CV	107
6	Logam Jaya (kerajinan souvenir)	34
7	Mardian Art (kerajinan kayu)	26
8	Paradise Bordir (jilbab bordir)	55
9	Narti Silver (perhiasan perak)	102
10	Salim Widarjo Silver	66
11	Tom-s Silver	91

Sumber: Data diolah dari BPS Prop. DIY 2001

Dari tabel tersebut merupakan sebagian dari daftar perusahaan menengah dan besar di Kotagede. Sebagai keterangan, perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari 100 orang adalah tergolong perusahaan besar. Sementara perusahaan atau industri yang mempunyai karyawan atau buruh antara 20-100 orang tergolong sebagai industri atau perusahaan menengah. Adapun perusahaan yang kecil, yang berbasis keluarga akan kami sampaikan dalam

pembahasan pada bab berikutnya sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas dalam konteks yang spesifik yaitu pola dagang dan wirausaha orang-orang Kotagede.

C. **Aktivitas Ekonomi Orang-Orang Kota**

Sebagai landasan kajian yang penulisan tema borjuasi maka pelacakan terhadap aktivitas ekonomi adalah sebuah keniscayaan sejarah. Tidak mungkin dapat mengungkapkan sejarah sosial borjuasi tanpa diketahui aktivitas dalam akumulasi modal baik harta maupun uang. Hal ini menjadi prasyarat utama dalam upaya survive di tengah masyarakat yang berubah dengan iklim revolusi yang sangat keras dan mematikan. Tidak hanya dipengaruhi oleh situasi lokal, nasional akan tetapi di setiap perdagangan selalu berada dalam lingkaran setan kapitalisme global meski dalam bentuk yang sangat sederhana. Dahulu orang Eropa mencari rempah-rempah harus datang sebagai pedagang atau penjajah, kini mekanisme perdagangan bebas sudah sangat modern.

Untuk pelacakan jejak aktivitas ekonomi borjuasi¹⁴² Kotagede maka dalam hal ini penulis mencoba menjadikan dua kelompok utama orang Kotagede sebagai representasi kelahiran dan perjalanan borjuasi pribumi. Kelompok tersebut adalah Orang Kalang dan Pedagang Santri Kota.

Pertama, Komunitas Kalang. Di atas sudah disebutkan mengenai asal-usul orang kalang sehingga dalam bagian ini hanya akan membahas aktivitas ekonomi orang kalang, dan beberapa karakteristik dalam perdagangan yang mereka lakukan.

Pada awal abad 20, Keraton Surakarta memberikan lisensi kepada Orang Kalang untuk membuka rumah-rumah gadai. Salah satu usaha awal orang Kalang adalah membeli tanah di Kotagede yang termasuk daerah Surakarta untuk membuka cabang usaha rumah gadai.¹⁴³ Hal ini menjadikan pangsa pasar pegadaian yang luas bagi Kalang yang berasal dari Surakarta.

¹⁴² Kelompok borjuasi di Kotagede dapat dikategorikan sebagai berikut; *Pertama*, pengrajin. Pada awalnya kelompok ini menjadi kelompok yang sangat mapan secara ekonomi karena keahliannya membuat barang untuk keperluan kerajaan-istana. *Kedua*, elit pedagang yang juga menjadi elit agama. Elit ini terdiri atas Majelis Mujahidin Indonesia, PKS, dan Pemimpin Pondok Pesantren. *Ketiga*, kelompok profesional. *Keempat*, kelompok politisi yang terdiri atas; ketua partai, ketua/anggota DPRD. *Kelima*, kelompok pengusaha. *Keenam*, kaum terpelajar atau kelompok intelektual. Kelompok ini juga erat dengan kelompok budayawan. Kelompok borjuis memang mengalami beberapa fase perubahan mulai dari kelompok haji atau pedagang kaya, pengusaha perak, emas, pemodal/pemilik saham industri, tokoh agama (pemodal sosial), tokoh politik (modal legitimasi politik). Selain kategori tersebut juga dimasukkan keturunan orang kalang yang kaya sebagai bagian dari dinamika borjuasi sangat penting.

¹⁴³ Mutia Amini, Laporan Penelitian. *Dari Poro Hingga Paketik Aktivitas Ekonomi Orang-orang Kalang di Tegalendu Kotagede Yogyakarta*, UGM, 2004. hlm. 22

Sementara Kalang dari Yogyakarta lebih memilih usaha transportasi dengan kuda, dan beberapa profesi lainnya.

Ada pendapat bahwa aktivitas ekonomi orang-orang Kalang di Tegalgendu Kotagede sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi orang Kotagede pada umumnya. Jika masyarakat Kotagede melakukan aktivitas pertukangan, kerajinan atau perdagangan, orang Kalang lebih memilih untuk aktif dalam kegiatan pegadaian (*Paketik*) dan jual beli emas atau permata (*poro*).¹⁴⁴ Kegiatan ekonomi tersebut memang apabila dikalkulasikan sangat besar keuntungan yang didapatkan bila dibandingkan dengan kerajinan atau perdagangan lainnya. Keuntungan yang berlimpah inilah yang menjadikan orang Kalang tertarik melakukan aktivitas ekonomi. Sementara dalam pandangan masyarakat waktu itu usaha tersebut dinilai kontroversi terutama oleh kalangan pedagang santri.

Sebagai tahanan keraton, setelah ditinggal Sultan Agung pada tahun 1700-an, Kalang menjadi kaya raya karena pekerjaan mereka ini.¹⁴⁵ Mereka membangun rumah mewah dengan arsitektur Hindu Jawa. Pada masa berikutnya, sekitar tahun 1800 hingga 1900-an, muncullah Joglo Jawa (arsitektur tradisional Jawa), dengan musholla, dan ornamen-ornamen Arab.

Sebuah perubahan penting terjadi selama tahun 1930-an, ketika Kalang yang dimonopoli oleh Belanda (Pemerintah Kolonial) untuk menangani perdagangan emas, pegadaian dan perdagangan berlian dan opium. Pada masa ini, Kalang membangun rumah-rumah mewah dengan arsitektur Barok Eropa. Rumah keluarga Pawiro Sentiko di Jalan Kemasan, sebagai contoh, merupakan salah satu bangunan yang megah itu. Pawiro Sentiko adalah pengusaha sukses pada saat itu yang memiliki 13 pegadaian di Yogyakarta.

Dari jasa pegadaian dan jual beli emas dapat diketahui bagaimana orang-orang Kalang mampu menunjukkan kemampuan kewirausahaan meskipun di tengah-tengah kondisi depresi ekonomi sekalipun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa orang Kalang adalah kelompok yang sangat adaptif secara ekonomi dalam memilih pekerjaan. *Kedua*, mereka sangat ulet atau tekun dalam menjalankan aktivitas ekonomi. *Ketiga*, mereka mempunyai gaya hidup

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm 22

¹⁴⁵ Salah seorang informan menceritakan bahwa Orang Kalang yang ada di Tegalgendu adalah *abdi dalem* yang diasingkan oleh Sultan agung karena berselingkuh dengan selir sehingga dibuang ke Tegalgendu. Tegalgendu adalah daerah di luar pagar Keraton Ibu Kota Mataram.

hemat. *Keempat*, mereka mempunyai sistem perkawinan yang protektif terhadap harta kekayaan keluarga yaitu sistem endogami.¹⁴⁶

Aktivitas orang-orang Kalang dalam dunia pegadaian dan jual beli emas atau permata baru berakhir pada masa revolusi fisik tahun 1945-1949.¹⁴⁷ Sebuah kekacauan sosial dan politik yang memaksa orang-orang Kalang untuk menghentikan usahanya. Bahkan tidak hanya itu, karena kepemilikan kekayaan yang banyak, mereka menjadi target sasaran oleh beberapa kelompok massa.

Hal ini terjadi dan beberapa cerita masyarakat juga membenarkan. Kemunculan kelompok orang kaya baru pasca perampokan di rumah Kalang menjadi sangat aneh. Pelarian harta orang Kalang konon sampai ke daerah Wonosari yang *notabene* banyak tinggal orang Kotagede.

Sumber lain mengatakan bahwa para leluhur orang Kalang pada abad 18-19 mempunyai aktivitas ekonomi sebagai tukang kayu dan juru angkut. Lalu seiring perkembangan zaman, komunitas yang dikenal sangat adaptif terhadap perubahan sosial ini beralih menjadi tukang gadai dan jual beli emas, kemudian beralih pada generasi yang terakhir yaitu pengusaha jasa perhotelan dan transportasi (angkutan seperti para leluhur mereka hanya lebih modern).¹⁴⁸

Keberhasilan aktivitas ekonomi Orang Kalang ini yang mempunyai daya tahan dan survival di tengah zaman depresi bisa dilihat dari beberapa faktor penyebab. *Pertama*, dari segi pendidikan. Bagi mereka anak-anak Kalang, pendidikan tinggi saat itu kurang penting, yang perlu adalah penguasaan membaca, menulis dan berhitung. Selain itu belajar bahasa Jawa, Bahasa Belanda kemudian diajarkan dalam kegiatan praktis yaitu terlibat dalam kegiatan di rumah gadai atau berdagang. Bagi anak-anak yang dewasa akan diberikan modal untuk usaha dan apabila gagal akan diberikan lagi bantuan modal dan seterusnya sampai berhasil atau gagal sudah tidak dapat ditolong lagi. Ada juga pendapat apabila sering gagal maka dia dianggap kurang rajin dan disingkirkan dari golongan Kalang.¹⁴⁹

Pada tahun 1960-1990-an terdapat banyak usaha yang digeluti misalnya usaha jual beli emas, simpan pinjam uang, dan transportasi dan hotel. Ada pun profesi dalam bidang angkutan

¹⁴⁶ Endogami berarti perkawinan hanya dilakukan oleh sesama anggota keluarga atau sesama anggota komunitas Kalang. Ibid., Mutiah Amini., hlm. 22

¹⁴⁷ Mutiah Amini., op.cit., hlm, 2

¹⁴⁸ Claude Guillot, "*Orang Kalang di Pulau Jawa*", dalam buku *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denny Lombard*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm 333-334

¹⁴⁹ Guillot, *Orang Kalang di Jawa* hlm. 334

sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh nenek moyang Kalang selain sebagai tukang kayu atau penebang pohon. Angkutan yang sangat terkenal adalah bis Sargedede yang menyediakan jasa angkutan sampai luar kota dan jumlahnya sangat besar. Belum ada data pasti, mengapa usaha ini kemudian menghilang begitu saja. Selain itu adalah usaha perhotelan yang kini masih ada adalah wisma Sargedede.

Adapun aktivitas ekonomi keturunan Kalang sekarang belum betul-betul terdeteksi meski beberapa informasi ada yang mengatakan persebaran orang Kalang sampai Eropa dan berbagai wilayah daerah di Indonesia. Untuk yang di Yogyakarta ada informasi yang kuat bahwa keturunan Kalang memiliki Hotel Mutiara yang terletak di Jalan Malioboro, ada BPR yang berada di Kotagede dan pengusaha agen minyak tanah di Jalan Kaliurang. Ada beberapa profesi yang memang sama dengan jenis usaha yang ditekuni orang China.

*Kedua, Pedagang Santri Kota.*¹⁵⁰ Para pedagang yang datang ke Kotagede ketika Sultan Agung meninggalkan Plered merupakan orang-orang yang berasal dari pedesaan di daerah Bantul dan sekitarnya. Mereka kebanyakan laki-laki yang pernah mendalami agama Islam di pesantren tradisional, pesantren yang dirintis oleh sunan atau para wali yang dibawah dari daerah pesisir menuju pedalaman. Ada sumber yang mengatakan bahwa Islam di Pedalaman Jawa Tengah Selatan abad 18 dalam tahap infant, masih dalam awal pengenalan oleh ulama dari pesisir Demak mengikuti perkembangan politik, berkembang melalui keraton-keraton antara lain Pajang yang kemudian banyak berdatangan ke daerah selatan termasuk ke Bantul dan juga Kotagede.¹⁵¹

Mereka datang ke Kotagede dengan motif perdagangan sebagai aktivitas utama. Mereka harus berkompetisi dengan pedagang lainnya. Pedagang yang ada di Kotagede sangat bermacam-macam mulai dari pedagang kecil sampai saudagar yang dikenal di berbagai daerah. Para pedagang ini mendapatkan posisi atau derajat yang tinggi dimata masyarakat dan mereka

¹⁵⁰ Santri diartikan sebagai komunitas yang melakukan perdagangan dan juga aktivitas ekonomi sebagai pedagang dan memanfaatkan pemahaman agama untuk kelancaran perdagangan. Selain itu juga terdapat pendapat bahwa spirit kelompok dagang santri adalah spirit Islam. Yaitu didorong oleh kekuatan bahwa menjadi seorang Muslim yang baik harus kaya dengan kekayaan ajaran Islam dapat dilaksanakan secara sempurna.

¹⁵¹ Berkembangnya kelompok santri di wilayah Mataram Yogyakarta dan Solo dipengaruhi oleh dinasti Mataram meski Ki Gede Pemanahan merupakan pemimpin masyarakat agraris atau pertanian. Lihat, Heru Basuki., op.cit, hlm.vi

mengembangkan keturunan anak dengan membekalinya dengan jiwa bisnis. Mengenai keluarga kaya atau borjuis akan dibahas dalam bab 3 yaitu profil borjuasi terseleksi.

Pedagang Santri ini memanfaatkan agama dan jaringan aliran kepercayaan untuk memperluas bisnisnya sehingga dapat diterima di berbagai masyarakat. Hal ini terlihat dari genealogi pedagang yang berasal dari keturunan yang sama yaitu pedagang kaya yang ada di Kauman, Karangajen dan Kotagede. Artinya borjuasi ini merupakan genealogis yang dikembangkan secara turun.

Keberhasilan dalam perdagangan ini kemudian memunculkan kelompok Haji yang sangat kuat secara ekonomi dengan dukungan Belanda sebagai pemberi hak monopoli komoditas ekonomi tertentu. Akira Nagazumi (1978) mencatat pada tahun 1926-1927 jumlah jamaah haji yang berasal dari Indonesia yang pada waktu itu masih disebut Hindia Belanda mencapai jumlah yang terbesar yaitu 52.412 orang atau 42,6% dari seluruh jamaah tahun itu.¹⁵² Mereka yang Haji adalah dari kelas borjuis di Belanda yang mempunyai latar belakang ekonomi yang mapan dan berpendidikan pesantren Jawa. Dari beberapa sumber motivasi orang Jawa kaya ke Mekkah adalah menjalankan Ibadah atau belajar ajaran Islam dan jika ke Mesir adalah bisa belajar agama sekaligus politik.¹⁵³

Hal ini akan sangat nampak terjadi bagaimana keluarga kaya di Kauman, Karangajen dan Kotagede sepulang dari Mekkah atau dari Mesir akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gerakan sosial atau politik. Dan kerap kali melakukan aktivitas dagang baik membawa barang dari Jawa atau membawa barang dari Timur Tengah. Kehadiran keluarga Haji menjadi semacam dinasti dalam kegiatan ekonomi yang sangat monopolistik.

Sebenarnya profesi dagang merupakan profesi yang paling banyak ditekuni oleh warga Kotagede. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian yang sempit dan berdagang adalah usaha yang praktis, tidak dibutuhkan perusahaan yang besar atau modal yang harus besar. Berdagang yang terpenting adalah adanya jaringan dan kepercayaan yang kuat. Kenapa para haji menjadi sangat berkembang dalam perdagangan salah satu penyebabnya adalah julukan haji atau kyai di image kan dengan orang-orang yang dapat dipercaya atau jujur dalam perdagangan.

¹⁵² Diterjemahkan dari Akira Nagazumi, *The Abortive Uprisings of the Indonesian Communist Party and its influence on The Pilgrims to Mecca: 1926- 1927* yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, dengan judul *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*, 1986, hlm, 211

¹⁵³ Akira Nagazumi, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, (1986), hlm. 223

D. Kota Perdagangan

Kotagede sendiri merupakan salah satu kota yang didirikan dan berkembang menurut adat pribumi, yaitu dalam hal ini menurut adat Jawa. Tentulah kemudian kota ini tidak sama sekali luput dari pengaruh kekuasaan asing sehingga di Kotagede pun terjadi perubahan-perubahan sebagai akibat perluasan unsur-unsur kebudayaan yang baru, kebudayaan Hindia-Belanda.¹⁵⁴

Kotagede kini mengalami dinamika kesejarahan yang cukup dinamis dan genealogis sehingga dalam bagian ini akan dijelaskan dua periode penting bahwa Kotagede sebagai Kota lama, Kota kerajaan dan perdagangan dan Kotagede sebagai Kota baru, Kota Bisnis yang modern. *Pertama*, sebagai Kota Lama dapat dideskripsikan sebagai artefak kerajaan Mataram maupun Mataram Islam. Sebagai Kota Baru, atau lebih pas Kota Bisnis, Kotagede yang secara fisik dipenuhi dengan toko-toko yang menjual aneka ragam busana, dan juga took perak yang berderet-deret sepanjang pusat kota. Kesan yang nampak adalah kota yang sepanjang jalan adalah kegiatan perdagangan.

Perkembangan kota-kota kolonial atau kota-kota Indies pada 1900-1940-an meningkat, sejalan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian pada sektor-sektor tertentu, misalnya pertambangan, perkebunan, perdagangan dan perindustrian. Perkembangan kota yang terjadi pada masa itu, memiliki ciri khas yaitu menjadi basis kelahiran kaum urban baru, yang terdiri dari kaum terpelajar, birokrat atau priyayi, kaum profesional, kaum pengusaha dan pedagang dari kalangan Bumiputera atau Pribumi, di luar kelas menengah yang berasal dari kalangan orang asing Timur, yaitu Orang Cina. Mereka itu pada hakikatnya menjadi embrio kelahiran "orang Indonesia" pada awal abad ke-20. Di kalangan mereka inilah sesungguhnya kesadaran akan bangsa dan identitas muncul, yaitu identitas "orang Indonesia". Selain Kota Jakarta (Batavia), Kota Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya berkembang menjadi kota besar yang berperan sebagai pusat modernisasi. Hal yang sama juga berlaku untuk Kota Semarang, Medan dan Makassar.¹⁵⁵

Sebagai Kota perdagangan hal terpenting yang tidak bisa dilupakan adalah keberadaan Pasar Gede sebagai pusat jual beli yang sangat ramai bahkan paling ramai di daerah Jawa

¹⁵⁴ H.J. Van Mook, op.cit., hlm. 6

¹⁵⁵ Dinamika Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta, tahun 1900-1990

Tengah Pedalaman. Berbagai transaksi mulai dari yang kecil sampai dalam bentuk yang sangat besar dilakukan yaitu antara komoditi pedalaman dan pesisir.

Pasar Gede juga menjadi karakteristik khas Kotagede yang menjadi ibu kota pasar dari berbagai lokasi di Kotagede yang menjadi pasar, arena perdagangan dari berbagai kelompok sosial. Dimana-mana ada orang berjualan, menawarkan barang dan membeli barang baik dari orang Kotagede atau daerah lain. Hal ini berlangsung sejak lama sampai sekarang. Lihat saja Kotagede itu benar-benar Kota Pasar yang ramai. Kotagede juga menjadi tempat wisata yang penting di Kotagede sebagai satu kesatuan dengan Keraton, Masjid Mataram, dan alun-alun.¹⁵⁶

Pasar Kotagede menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi sebagian besar penduduk Kotagede dan sekitarnya. Selain itu juga menjadi pusat kegiatan sosial dan politik bagi yang mempunyai kepentingan. Pasar tradisional ini selain menjadi paket wisata juga berfungsi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.¹⁵⁷

Pasar Kotagede menjadi tempat pelestarian produk lokal yang berupa makanan. Kotagede memang selain Kota perak juga kota makanan tradisional yang sangat beragam dengan ciri khasnya. Dalam perspektif pariwisata, unsur ini menjadi sangat diminati sebab mampu menyediakan jenis makanan yang sekian lama dipertahankan oleh warga Kotagede. Pasar adalah ibu kota kecamatan Kotagede.

Kecenderungan pada akhir abad ke-19 atau awal abad 20 banyak kemunduran kelompok dagang terjadi di Indonesia, tidak terkecuali Kotagede. Hal ini ternyata sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia pendidikan dan pergeseran kelas sosial yang cukup kuat. Banyak industri di Kotagede yang kemudian ditutup karena tidak ada yang melanjutkan.

Pada periode kerajaan Surakarta-Yogyakarta, Kotagede menjadi wilayah bersama. Kehidupan Kotagede kurang berkembang hingga hadirnya para pengusaha dan pengrajin. Industri kerajinan dan niaga mencapai keemasannya sejak sekitar 1900-an. Pada saat itu tumbuh perhatian khusus dari kedua kerajaan tersebut terhadap karya kesenian dan kerajinan Kotagede yang didukung oleh kemampuan niaga para juragan kerajinan dan pedagang. Produk periode ini adalah munculnya predikat “kota perak” bagi Kotagede. Industri perak (berkembang)

¹⁵⁶ Titi Surti Nastiti, *Pasar Di Jawa, Masa Mataram Kuno, Abad VIII-XI Masehi*, (Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2003), hlm. 48

¹⁵⁷ Theresia Widiyati, (2003). *Kontribusi Wisata Kotagede Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta di Era Otonomi Daerah*, Skripsi (tidak diterbitkan), Universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pembahasan mengenai PAD hampir di semua bab terutama Bab IV yang menganalisa obyek Wisata Kotagede sebagai kontributor PAD pemerintah Kota Yogyakarta

menjadi yang terbesar. Pengrajin batik dan cap di tiga kelurahan, Prenggan, Basen dan Sayangan atau Alun-alun, berkembang pesat dan hasilnya lebih baik daripada batik¹⁵⁸. Pada saat itu juga muncul gerakan keagamaan Islam di Kotagede. Dimulai dengan pendirian *Syarekatul Mubtadi* dan Kridha Mataram oleh seorang pedagang sekaligus ulama setempat, Haji Masyhudi. Selanjutnya kedua organisasi kemudian bergabung menjadi Muhammadiyah (Cabang Kotagede).¹⁵⁹

Kondisi ekonomi penduduk Kotagede juga tidak luput dari pengaruh resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada saat itu banyak pedagang dan pengrajin Kotagede mengalami kebangkrutan, karena sebagian besar pembeli potensial produk mereka juga mengalami krisis yang sama. Akan tetapi hal itu tidak mengubah Kotagede secara besar-besaran. Walaupun kemakmuran Sebagian besar penduduk kota ini mengalami penurunan, tidak terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang struktural. Bukti yang ada menunjukkan tidak terjadi keresahan dan kekacauan sosial di kota ini pada saat itu. Bahkan sebuah penelitian awal menunjukkan bahwa ekonomi Kotagede didukung oleh berkembangnya bisnis baru yang berkaitan dengan daur ulang alat-alat yang terbuat dari perak, tembaga, kuningan, dan perunggu segera setelah masa tersulit dari krisis telah dilewati.

Kotagede sebagai sentra kerajinan Jawa, Makanan tradisional dan pusat kesenian. Istana Mataram pada zaman dahulu menggunakan kerajinan emas dan perak, sedangkan saat kerajinan dikonsumsi oleh turis dan menjadi komoditi yang tumbuh dan berkembang, Makanan tradisional Jawa di Kotagede sangat lezat. Seni tradisional Jawa terdapat dalam masyarakat atau kampung seni bukan merupakan “seni tinggi” atau ningrat. Kerajinan tradisional/seni kampung dan makanan adalah identitas Kotagede sebagai kota di Jawa.

Sasaran perekonomian merupakan salah satu bagian cukup signifikan dalam skripsi ini, karena penelitian dilakukan untuk melihat kontribusi yang diberikan kawasan wisata Kotagede terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta, kegiatan perekonomian jelas sangat berkaitan erat dengan sektor pariwisata apalagi banyak sekali kegiatan perekonomian yang terjadi sebagai efek samping dari kegiatan wisata.

¹⁵⁸ Lihat Tedjo Soesilo, *Perkembangan Perusahaan Perak di Kotagede*, Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1970, Terutama pada Kesimpulan, hlm 78

¹⁵⁹ Organisasi ini merupakan gerakan Islam paling berpengaruh pada masyarakat Jawa tahun 1910-an Lihat Todjo Soesilo, *Perkembangan Perusahaan Perak di Kotagede*, Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1970. Terutama pada Kesimpulan, hlm. 78

Sasaran perekonomian yang ada Kotagede antara lain dapat ditunjukkan dalam tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Sarana Perekonomian di Kecamatan Kotagede

No	Jenis Sarana Perekonomian	Jumlah (Buah)
1	Koperasi simpan pinjam	23
2	Pasar permanen	1
3	Pasar tidak permanen	1
4	Kios	175
5	Warung	310
6	Bank	2
Jumlah		427

Sumber : Data Monografi Kecamatan Kotagede, 2007 semester 1

Selain itu, usaha dapat digolongkan ke dalam jenis usaha yang bergerak di bidang industri, yaitu : Industri besar sebanyak tiga buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1,507 orang. Industri sedang 23 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 345 orang. Industri kecil 274 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 822 orang Industri rumah tangga 338 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 676 rang. Di Kotagede juga terdapat lima buah hotel di kawasan Kotagede dengan tenaga kerja berjumlah 34 orang. Warung makan berjumlah 48 buah dengan 147 orang tenaga kerja. Pedagang berjumlah dengan 2.579 tenaga kerja. Serta 16 buah angkutan dengan 78 orang tenaga kerja.¹⁶⁰

Pasar juga dapat difungsikan sebagai tempat bertemunya berbagai kepentingan individu atau kelompok di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus kita temukan kampanye politik menjelang pemilu banyak politisi atau kandidat berdatangan ke pasar tradisional. Pasar Kotagede sebagai pasar tua yang tradisional sampai sekarang juga tak lepas dari perhatian politik dalam artian target untuk sebuah kegiatan politik yang bernama pemilu atau pilkada. Banyak selebaran dan poster atau baliho dapat kita saksikan terpajang di sekitar kawasan Pasar Kotagede.

Dalam pemahaman yang lebih luas, Kota Kotagede sendiri merupakan sebuah arena yang heterogen dan bahkan terkesan seisi kota itu terlihat seperti pasar. Hal ini dapat dilihat bahwa tokoh atau kios berderet hampir di semua ruas jalan dan berpusat di pasar tradisional.

¹⁶⁰ Sumber Data: BPS Kota Yogyakarta tahun 2002

Berbagai kepentingan menyatu dalam pasar. Pada zaman Mataram pasar juga sebagai sumber pendapatan warga dan pemerintah. Tidak jauh beda dengan sekarang pasar tradisional Kotagede tetap memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta.

Perjalanan panjang kelompok pedagang, pengusaha di Kotagede sebenarnya dapat dilacak dari beberapa catatan yang menunjukkan dinamika kelompok ini dan dampaknya terhadap masyarakat luas terkait lapangan pekerjaan. Tabel berikut berusaha menjelaskannya,

Tabel 4.2. Industri Perak di Kotagede (1935-1971)¹⁶¹

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Buruh	Produksi/tahun (Kg)
1935-1938	70	1.400	25.000
1945	50	250	4.500
1946	70	350	6.500
1947	80	40	14.500
1948	90	500	16.000
1949	30	150	2.700
1950	50	300	4.500
1951	100	1.000	18.000
1952	80	7.000	12.000
1955	164	-	-
1956	165	-	-
1957	194	-	-
1958	199	-	-
1959	197	-	-
1960	202	-	-
1961	202	-	-
1962	179	-	-
1963	178	-	-
1964	161	-	-
1965	147	-	-

¹⁶¹ Nakamure, op.cit, hlm.135

1966	147	-	-
1967	123	-	-
1968	137	-	-
1971	117	-	-

Sumber: 1935-1952 Republik Indonesia XII:721, 1955-1971 Tejo 1970: Apendik II dan Laporan KP3Y Kotagede

Dari tabel di atas ada beberapa yang dapat dijelaskan. *Pertama*, industri di Kotagede mengalami pasang surut dan perbedaan yang mencolok dalam waktu yang singkat. Hal ini dimungkinkan ada faktor yang sangat mempengaruhi yaitu keberlangsungan keturunan yang mau menggeluti dunia perak, selain itu tersedia ragam profesi lain yang lebih diminati. *Kedua*, catatan Nakamura menyatakan bahwa KP3Y menyatakan pada tahun 1955 hanya ada 10% dari jumlah perusahaan yang beroperasi. Kurang begitu jelas apakah ini akibat hiruk pikuk politik pra dan pasca pemilu tahun 1955.

Kemunduran kelompok dagang ini juga dirasakan oleh organisasi Muhammadiyah yang mempunyai basis massa yang militan di Kotagede, yang pada awalnya banyak di sokong oleh pedagang kaya yang mempunyai semangat filantropi yang besar dalam membangun masyarakat. Kelompok yang beraliran Islam modernis inilah yang banyak mendominasi borjuasi di Kotagede meski sekarang sudah banyak berubah. Kini pedagang kaya sebagian besar tidak secara nyata bergabung dalam organisasi sosial, maupun politik. Namun secara sembunyi-sembunyi juga terlibat dalam dunia politik.

Berdasarkan data KP3Y tahun 2000, sedikitnya 2.000 orang terlibat langsung dalam mata rantai industri perak di Kotagede. Pengrajinnya pun tidak hanya dari masyarakat Kotagede, namun sudah meluas. Orang-orang dari Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul banyak datang dan bermukim di Kotagede untuk menjadi pengrajin perak.¹⁶²

Adapun gambaran industri yang berkembang di Kotagede bisa kami sampaikan dari penggalan beberapa tahun yang mencoba dijadikan data untuk analisis mengenai kemajuan dan kemunduran industri dan perdagangan di Kecamatan Kotagede.

¹⁶² Menelusuri Jejak Perak Kotagede, Kompas, Kamis, 24 Februari 2005

Tabel 6. Industri Di Wilayah Kecamatan Kotagede

Jenis Industri	Jumlah				
	1988	1989	1990	1991	1992
Mie	1	-	-	-	-
Yangko	10	10	10	10	10
Tempe/tahu	8	8	10	9	9
Krupuk	8	8	15	8	9
Emping	33	34	33	33	35
Jamu tradisional	2	4	4	3	2
Batik	7	7	5	9	9
Border	7	7	7	9	10
Kulit	3	3	3	7	4
Perak/imitasi	44	52	52	33	68
Kuningan	80	103	104	84	84
Kayu	14	13	5	7	7
Timbangan	1	1	1	1	1
Kompor	2	2	2	2	2
Kue-kue	3	6	8	13	15

Sumber : Monografi Kecamatan Kotagede, 1993

b. Komposisi Penduduk

Kotagede sebagai daerah yang berciri kota tentu saja tidak berbeda dengan karakter dan ciri kota di daerah lain dengan kepadatan penduduk yang cukup besar. Kotagede kepadatan penduduk pada tahun 2007 semester pertama mencapai 10.762 jiwa dengan persebaran yang tidak merata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Table 2.1. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kotagede Tahun 2007

Jenis Kelamin	Jumlah	
	Orang (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	16.654	50,64

Perempuan	16.395	49,36
Jumlah	33.049	100

Sumber: Data Monografi Kecamatan Kotagede, 2007, semester 1

Sedangkan untuk melihat komposisi penduduk Kotagede dapat dilihat pada table berikutnya di bawah ini.

Tabel 2.2. Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kecamatan Kotagede:

Umur	Jumlah	
	Orang (Jiwa)	Presentase (%)
0 – 5	5.514	8
6 – 16	11.143	17
17 – 25	6.355	16
26 – 55	8.142	40
>56	1.915	19
Jumlah	33.049	100

Sumber: Data monografi Kecamatan Kotagede, 2007, semester 1

Dari tabel 2.2 menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kotagede di semester pertama tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah usia produktif cukup tinggi (8.142 jiwa), selisihnya cukup kecil dengan komposisi penduduk yang lainnya yaitu anak dan remaja. Namun secara keseluruhan menunjukkan komposisi yang seimbang apabila diukur berdasarkan usia produktif dan yang menjadi tanggungan (usia anak dan lansia).

Kedudukan Kota Yogyakarta sejak kemerdekaan hingga masa kini ialah menjadi bagian dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dipimpin oleh Gubernur, dan sekarang dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono X. Selain itu kota Yogyakarta pada masa kini juga menjadi Ibu Kota Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Walikota Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta terbagi atas 14 wilayah Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 Rukun Warga dan 2.532 Rukun Tetangga.¹⁶³ Pembagian wilayah dan luas wilayah kota tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁶³ Buku Saku Kotamadya Yogyakarta, 1998

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%	Kelurahan	RW	RT
1	Mantrajeron	2,61	8,03	3	55	230
2	Keraton	1,40	4,31	3	43	175
3	Mergangsan	2,31	7,11	3	60	210
4	Umbulharjo	8,12	24,98	7	80	318
5	Kotagede	3,01	9,41	3	40	161
6	Gondokusuman	3,99	12,28	5	65	276
7	Danurejan	1,10	3,38	3	43	160
8	Pakualaman	0,63	1,94	2	49	84
9	Gondomanan	1,12	3,45	2	31	110
10	Ngampilan	0,82	2,52	2	21	120
11	Wirobrajan	1,76	5,42	3	34	165
12	Gedongtengen	0,96	2,95	2	44	163
13	Jetis	1,70	5,23	3	36	168
14	Tegalrejo	2,91	8,96	4	46	183

Sumber: Buku saku Kota Yogyakarta, 1999

Secara historis kota Yogyakarta berawal dari sebuah Kota Istana atau Kota Keraton bernama Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak di daerah agraris pedalaman Jawa, dibangun pada 1756 oleh Sultan Hamengku Buwono I (Pangeran Mangkubumi). Kota didirikan pasca peristiwa Palihan Nagari atau Pembagian Dua Kerajaan (Surakarta-Yogyakarta) pada 1755 sebagai hasil Perjanjian Giyanti (Sunan Paku Buwono II dan Sultan Mangkubumi).¹⁶⁴

Ada petunjuk bahwa pendirian kota Yogyakarta itu telah dirancang secara seksama oleh Pangeran Mangkubumi sebagai pendirinya, yang diduga berbakat arsitek. Hal ini dapat ditelusuri terutama dari segi proses pemilihan lokasi (hutan Beringin), tahap-tahap pendirian bangunan keraton, konstruksi tata ruang, konsep tata-ruang, dan bangunan arsitektural istana yang penuh simbolisme pandangan dunia kebudayaan Jawa. Pendirian kota yang dirancang sebagai kota istana kerajaan atau *Kuthanegara* atau *Negari* itu benar-benar dilakukan melalui

¹⁶⁴ Literatur lain menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta dibangun tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan waktu itu.

kerangka pemikiran konseptual tradisi Jawa, yaitu mendirikan pusat permukiman dengan konsep “Babad Alas”.¹⁶⁵

Disebutkan bahwa selain mendirikan bangunan keraton beserta dua alun-alun di bagian utara dan selatan keraton, ia juga membangun tembok benteng yang mengitari istana, bangunan Taman Sari dan sebuah Tugu yang didirikan di bagian utara keraton yang jaraknya kurang lebih 2,5 km dari pusat keraton.¹⁶⁶ Professor Otto Sumarwoto (2003), yang mengkaji penyusunan tata ruang kota Yogyakarta berpendapat bahwa sumbu lokasi bangunan yang menghubungkan Parangkusumo - Kraton - Tugu dan Gunung Merapi berada dalam satu garis lurus atau poros yang membujur dari Selatan ke Utara sebagai Simbolik-Filosofis Selatan-Utara.¹⁶⁷

Dinamika perkembangan kota Yogyakarta berlangsung mengikuti gerak dan dinamika politik dari masa kolonial, pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan sampai pada Era Reformasi sekarang ini. Demikian pula dinamika perkembangan penduduk Kota Yogyakarta berlangsung sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung dari masa yang panjang tersebut.¹⁶⁸

Upaya memberikan gambaran yang sempurna tentang sebuah kota dan dinamika selalu menemui persoalan tentang aktualitas data. Dalam hal ini penulis juga ingin mendeskripsikan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kotagede yang cukup dinamis. Ada satu gambaran mengenai kondisi sosial di Kotagede yang diekspresikan melalui sebuah syair demikian :¹⁶⁹

“Kotagede gudangnya orang sholeh/Kotagede gudangnya orang kaya dan dermawan/Kotagede gudangnya dadi uwong/Kotagede gudangnya orang sukses/Dengan kesalehan sosial orang Kotagede/Mari kota bangun kembali

¹⁶⁵ Istilah yang sering digunakan dalam ekspansi wilayah kerajaan yang berarti membuka wilayah baru dengan menebang pohon, atau membuka alas/hutan. Di atas lahan terbuka tersebut rupanya kemudian pendiri kota itu membangun istana sebagai kota kerajaan sekaligus pusat permukiman warga kota kerajaan di sekitarnya. Pembukaan kota istana semacam itu pada hakekatnya mengikuti tradisi para pendahulunya, seperti yang dilakukan oleh Senapati ketika mendirikan Kota Gede menjadi pusat kota Kerajaan Mataram Islam pertama sekitar akhir abad ke 16.

¹⁶⁶ Selain itu juga dibangun sebuah bangunan panggung untuk berburu di desa Krapyak di bagian selatan keraton ke arah Parangkusumo di Pesisir Laut Selatan. Di luar bangunan pusat keraton itu pada masa berikutnya berkembang menjadi pusat permukiman penduduk warga keraton yang sekaligus menjadi kota Yogyakarta pada masa awal.

¹⁶⁷ Atau disebut juga dengan “Poros Imaginer” dan dunia kebudayaannya. Simbolisme filosofi pandangan dunia keraton Yogyakarta

¹⁶⁸ Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2006

¹⁶⁹ Nilawati, *Pendidikan di Kotagede Pasca Gempa*, dimuat dalam Majalah Brosur edisi Idul Adha tahun 2006.

Kotagede/Kotagede yang cerdas/Kotagede yang bermutu/Kotagede yang santri”.
(Nilawati, Guru di Kotagede)

Dari syair tersebut di atas sebenarnya telah memberikan suatu gambaran bahwa Kotagede memang pernah mengalami kejayaan dan juga kemunduran. Penulis juga mengakui tidak bisa memutuskan apakah kalimat yang berbentuk syair itu masih relevan dengan Kotagede dalam konteks kekinian. Mungkin gambaran berikut bisa membantu memperjelas persoalan ini.

Kondisi dan mata pencaharian penduduk menjadi data yang cukup penting untuk melihat dinamika sosial masyarakat yang memang penulis sepakat bahwa tidak ada satu masyarakat yang memang benar-benar statis. Perkembangan Kota dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk yaitu tahun 1983 sebanyak 8700 orang, tahun 2002 berjumlah 30.409 orang, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 15,235 orang dan jumlah penduduk perempuan 15.174 orang.¹⁷⁰

Perlu juga untuk melihat keunikan asal usul penduduk Kotagede yang banyak terdapat pendatang, karena inklusifitasnya sebagai kota perdagangan, Akan tetapi keunikan lainnya adalah larangan orang, China atau keturunan tinggal di Kotagede yang oleh beberapa informan/ responden penelitian hal ini disebabkan oleh proteksi elite Kotagede untuk melindungi perekonomian penduduknya.¹⁷¹

Sebagai kota besar, sangatlah wajar apabila mata pencaharian penduduk Kotagede relatif beragam, antara lain dapat ditunjukkan dengan tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Kotagede Tahun 1990

No	Mata Pencaharian	Jumlah	
		Orang (Jiwa)	Presentase (%)
1	Petani		
	a. Petani pemilik tanah	48	0,56
	b. Petani penggarap tanah	69	0,81

¹⁷⁰ Data resmi pemerintahan tahun 1983, 1999, 2004.

¹⁷¹ Terdengar juga cerita bahwa dahulu Kotagede banyak dihuni bangsa China atau keturunan Eropa yang lambat laun penduduk asing itu menyingkir ke daerah lain lalu membuat kompleks pecinan yang tersebar di beberapa kota besar di Surakarta dan Yogyakarta

	c. Buruh tani	47	0,55
2	Peternak	33	0,39
3	Industri/Pertambangan	126	1,47
4	Kerajinan tangan	362	4,23
5	Pedagang	1591	18,60
6	Tukang kayu	38	0,44
7	Tukang batu	34	0,40
8	Bengkel	34	0,40
9	Pegawai negeri	1259	14,72
10	ABRI	76	0,89
11	Guru	267	3,12
12	Dokter	20	0,23
13	Mantri kesehatan	5	0,05
14	Bidan	6	0,06
15	Perawat	5	0,05
16	Dukun bayi	13	0,15
17	Pensiunan/purnawirawan	302	3,54
18	Buruh perusahaan	3309	38,69
19	Tukang pijat	11	0,13
20	Salon/cukur rambut	33	0,39
21	Tukang jahit	128	1,50
22	Tukang foto	7	0,08
23	Lain-lain	697	8,15
	Jumlah	8520	100,00

Sumber: Data Monografi Kecamatan Kotagede, 1992

Sementara dalam perkembangan pada tahun 2002 yang wilayah Kecamatan Kotagede sebagaimana sumber yang diperoleh dari kecamatan menunjukkan data sebagaimana dalam table di bawah ini:

Tabel 5. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kotagede

No	Mata Pencaharian	Jumlah	
		Orang (Jiwa)	Presentase (%)

1	Petani		
	a. Petani pemilik tanah	91	1,02
	b. Petani penggarap tanah	120	1,35
	c. Buruh tani	120	1,35
2	Pengrajin	498	5,60
3	Pengusaha besar	35	0,39
4	Pedagang	2590	29,15
5	PNS	1812	20,39
6	Buruh industri	3004	33,81
8	TNI/POLRI	86	0,97
9	Pensiunan PNS/TNI	529	5,95
		8885	100,00

Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta tahun 2002¹⁷²

Dari ketiga tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kotagede merupakan sebuah kota yang dihuni oleh beragam manusia dengan berbagai macam profesi, mata pencaharian. Berikutnya, Kotagede merupakan kota perdagangan yang mempunyai karakter wilayah bisnis yang cukup kuat. Hal ini dapat ditunjukkan dari ragam keahlian dan profesi tersebut. Pada rentang tahun 1990 sampai pada tahun 2007 mata pencaharian penduduk didominasi oleh kaum buruh, lalu disusul oleh pedagang dan pegawai negeri.

E. Pertarungan Antar Kekuatan

Pertarungan antar kekuatan ini menjadi titik berpijak dari penulisan sejarah lokal dimanapun berada kekuatan yang disebut kekuatan kultural yang direpresentasikan oleh keluarga ningrat, kerabat raja dan *abdi dalem* yang pada mulanya menduduki posisi teratas dalam stratifikasi sosial.

1. Kontestasi Kultural dengan Modernitas

Datangnya kolonialisme ke daerah Yogyakarta mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat penting dan juga mengakibatkan kontestasi atau pertarungan antar kekuatan semakin tajam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain. Pertama, pemerintahan kolonial melemahkan dominasi keraton dengan memunculkan kelompok dagang dari kubu

¹⁷² Sumber data: BPS Kota Yogyakarta tahun 2002

santri dan abangan menjadi kekuatan yang sangat penting dalam perekonomian. Kedua kelompok ini sangat berbeda karakteristiknya dan diberikan hak istimewa oleh Belanda dalam aktivitas ekonomi.

Kontestasi yang sangat kentara adalah tentang bagaimana tata cara menjalankan agama antara yang dilakukan oleh abdi dalem dengan markas di kompleks Makam raja Mataram-Kotagede.

2. Kolonialisme : Musuh tapi Akrab

Belanda menggunakan taktik politik pecah belah yaitu dengan Perjanjian Giyanti yang memecah Mataram menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta; kemudian dipecah lagi menjadi Pakualaman dan Mangkunegaran. Ini sangat radikal dalam perubahan peta kekuasaan politik. Hal ini memecah status kepemilikan tanah *apanage* menjadi kecil dan kemunduran kelompok abdi dalem sangat terasa. Pada masa Perang Diponegoro di dekade ke tiga abad ke-19, beberapa perubahan mulai terjadi di dalam masyarakat Kotagede. Selain para abdi dalem yang sangat dihormati karena fungsi kulturalnya, lapisan atas kota ini mulai diisi oleh para *entrepreneur* dari luar yang masuk ke Kotagede. Secara perlahan mulai berkembang kelompok pengrajin dan pedagang di Kotagede, yang secara sosio-kultural seperti juga para *abdi dalem* memiliki ikatan yang kuat dengan keraton. Walaupun begitu, perkembangan kelompok pedagang dan pengrajin itu belum berdampak besar terhadap posisi sosial dan ekonomi para abdi dalem. Perubahan besar terjadi setelah reorganisasi Praja Kejawen tahun 1910-an. Penghapusan tanah *apanage* yang mengiringi reorganisasi itu mengakibatkan para abdi dalem kehilangan sumber ekonomi sehingga mereka tidak mampu lagi bersaing dengan para keluarga kaya di Kotagede.¹⁷³

3. Pedagang vs Abdi Dalem

Dalam waktu yang tidak lama, kemampuan ekonomi sebagian besar para abdi dalem itu jatuh ke dalam level kelompok para buruh harian dan petani. Walaupun para abdi dalem itu masih menikmati penghormatan karena posisi mereka sebagai penjaga tempat-tempat suci, dalam kenyataannya proses pergeseran loyalitas dari ikatan patronase ke hubungan ekonomi yang lebih rasional mulai terjadi di Kotagede. Para abdi dalem mulai lebih dianggap hanya sebagai simbol budaya dalam hubungan antara Kotagede dengan keraton daripada status sosial yang tinggi di dalam masyarakatnya sendiri. Adanya perubahan itu dapat dilihat pada komposisi demografis kota ini pada awal dekade ketiga abad ke-20. Menurut data yang berasal

¹⁷³ Bambang Purwanto, *Ibid*, hlm.179

dari tahun 1922, dari 1073 pemilik rumah di Kotagede 19,7% merupakan pedagang beserta pengrajin kaya dan 63,1% adalah pengrajin dan pedagang eceran. Sementara itu, abdi dalem bersama-sama pegawai pemerintah hanya berjumlah 8,5%, sedangkan sisa 8,7% terdiri para buruh dan petani.¹⁷⁴

Setelah itu, para saudagar dan pemilik perusahaan kerajinan mulai mengambil alih kedudukan sosial dan ekonomi para abdi dalem, terutama ketika permintaan terhadap produk tekstil dan kerajinan, seperti permata dan barang-barang terbuat dari emas dan perak meningkat tajam pada awal abad ke-20.¹⁷⁵

Banyak pedagang, beberapa dari mereka adalah perempuan dari Kotagede melakukan perjalanan bisnis secara rutin ke Surakarta, Magelang, Semarang, Surabaya dan bahkan Jakarta untuk menjual produk mereka dan kemudian membawa pulang berbagai barang impor. Walaupun begitu, sebagian besar orang kaya dari Kotagede itu tetap mempertahankan hubungan khusus mereka secara ekonomis dengan keraton, yang tetap menjadi salah satu konsumen reguler bagi berbagai jenis produk yang dihasilkan Kotagede. Seperti dikatakan oleh Selo Soemardjan dan Mitsuo Nakamura, pedagang dan pemilik perusahaan kerajinan di Kotagede memiliki kontak dagang yang rutin dengan para istri pejabat keraton Kasultanan Yogyakarta.

Keadaan itu mengakibatkan sektor non-pertanian seperti kerajinan dan perdagangan di Kotagede berkembang sangat cepat pada awal abad ke-20. Kotagede berkembang menjadi pusat industri yang dikuasai oleh para *entrepreneur* bumiputera. Seperti dikatakan oleh Mitsuo Nakamura, "*Kotagede sedang berubah dari kota para pengrajin kerajaan menjadi pusat industri dan perdagangan bumiputera untuk mendukung para petani di daerah sekitarnya*"¹⁷⁶ Walaupun tidak ada data kuantitatif yang memadai, secara pasti dapat dikatakan bahwa jumlah buruh yang dipekerjakan di Kotagede bertambah secara signifikan sejak dekade pertama abad ke-20. Para saudagar dan pemilik perusahaan kerajinan mempekerjakan ribuan orang, baik penduduk lokal maupun pekerja yang datang dari luar Kotagede. Paling tidak terdapat juragan

¹⁷⁴ Komposisi pekerjaan itu sekaligus dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan adanya ciri perkotaan yang sangat jelas pada Kotagede dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang masih dikategorikan sebagai pedesaan pada awal abad ke-20.

¹⁷⁵ Beberapa bukti menunjukkan bahwa para saudagar kaya itu juga menjalankan bisnis gadai dan peminjaman uang, walaupun belum ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan bisnis tentang bisnis yang kedua. Bersama-sama pedagang kaya dari Kotagede, para saudagar dan pengrajin memberi sumbangan yang sangat besar bagi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Mereka sangat dikenal baik oleh pedagang lokal maupun pedagang Cina di Pasar Besar Beringharjo di kota Yogyakarta dan pasar-pasar lain di Pulau Jawa

¹⁷⁶ Lebih lengkap bisa dibaca pada buku Nakamura *Matahari Muncul dari Balik Pohon Beringin* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983)

yang masing-masing mempekerjakan 50 sampai 100 pekerja, akan tetapi sebagian besar hanya memiliki sepuluh sampai dua puluh pekerja.¹⁷⁷

Kontestasi juga melanda antara Keraton Yogyakarta dan Surakarta termasuk posisi orang Kalang juga menjadi terbelah, sebagian ikut Surakarta dengan kepemilikan rumah gadai dan sebagian ikut Yogyakarta yang menjadi korban peristiwa revolusi fisik pada tahun 1945-1949.

HJ. van Mook paling tidak melihat bahwa status kramat daerah Kotagede sebagai sesuatu yang mampu menyelamatkan Kotagede dari ekspansi kapitalis, ketika sebagian besar tanah kejawaan menjadi plandan seiring dengan perluasan perkebunan perusahaan swasta Eropa sejak abad ke-19.

Kontestasi lainnya adalah tentang praktik keagamaan antara kelompok pedagang santri di Kotagede dengan ritual keturunan Mataram yang sangat kental akan ajaran Hindu atau Islam Jawa. Keberadaan masjid perak adalah bukti bahwa pertarungan antar kekuatan ini sangat jelas. Masjid perak adalah pusat kegiatan agama Islam tandingan setelah masjid besar Mataram yang dikuasai oleh Keraton.

Dalam kondisi seperti itu, para pekerja dan pemilik modal memiliki peran yang penting dalam transformasi perbedaan ideologi di Kotagede sejak tahun 1920-an. Pembentukan kelompok di Kotagede yang didasarkan atas perbedaan kelas sosial dan ideologi (Islam, santri, abangan). Kegiatan keislaman mempunyai kecenderungan berlawanan dengan komunisme yang mendapat dukungan yang kuat dari penduduk lokal di Kotagede. Akibatnya, sebuah konfrontasi terbuka terjadi antara kedua kelompok pada tahun 1924.

Kekuatan Keraton juga membangun ingatan public dengan beraneka peninggalan untuk menjaga eksistensi sejarah kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan aneka peninggalan barang budaya. Kotagede kemudian dicitrakan dengan tradisional Jawa dengan segala gaya arsitek dan kultur Hindunya. Sedikitnya 4 hal yang dapat membantu kita memahami konteks, yaitu : *Pertama*, faktor historis. Kotagede adalah bekas ibukota Kerajaan Mataram Islam yang berkembang sejak abad XVI M dengan Panembahan Senopati sebagai raja pertamanya. Kotagede memiliki pusat kekuasaan tradisi Jawa, seperti adanya makam para leluhur Kerajaan Mataram. Adanya beberapa peninggalan arkeologi misalnya, altar yang dimakamkan Hastarengga, Masjid Besar, seliran (kamar tidur para istri raja).

¹⁷⁷ Ibid., hlm 6

Kedua, aspek Kepercayaan dan Mitologi. Pohon *banyan* atau beringin dipercaya sebagai simbol kehidupan bagi lingkungan Kotagede. Beberapa yang tumbuh memiliki makna khusus dalam tradisi Jawa. Tumbuhan yang ditemukan di kompleks makam Raja Mataram Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu juga terdapat pohon sawo kecil, pohon kelapa gading (kelapa kuning), dan pohon kanthil, atau jeruk yang dipercaya sebagai simbol keberuntungan.

Kotagede dibangun berdasarkan kosmologi Jawa yang dimaksudkan pada mempunyai harmoni dan keseimbangan antara mikrokosmos dalam lingkungan makrokosmos pada umumnya. Masyarakat Jawa selalu berusaha membuat penyesuaian antara mikrokosmos dan makrokosmos dalam kehidupan mereka, termasuk tata kota, arsitektur, dan semua pendukung kehidupan.

Raja dan istana adalah pusat dalam lingkaran konsentris yang mempunyai kekuatan untuk menyatukan mikrokosmos dan makrokosmos. Sampai saat itu istana menjadi sebuah model dari aktivitas manusia dan menjadi orientasi lengkap dari keputusan perilaku sosial.

Ketiga, Faktor Sosio-Demografis. Secara etnis, dari faktor sosio-demografis, Kotagede merupakan kota tua Jawa yang asli. Berdasarkan sensus tahun 1930, penduduk yang mendiami wilayah Kotagede sekitar 9.862 orang. Penduduk yang merupakan orang Jawa asli sebesar 99,49 % dan jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar kedua dengan penduduk pribumi Jawa. Urutan pertama diduduki Kota Kawedungan di Jawa Timur yang memiliki penduduk asli Jawa sebesar 99,60%. Saat ini penduduk Kotagede berjumlah sekitar 30.409 orang.¹⁷⁸

Keempat, faktor ekonomi dan politik. Kedua faktor ini sulit dipisahkan dalam konteks sejarah Kotagede. Banyak pedagang atau saudagar kaya di Kotagede mempunyai hubungan yang erat dan intim dengan pihak penguasa keraton Yogyakarta. Banyak cerita yang penulis dengar bahwa keraton bahkan mempunyai hutang kepada pedagang kaya Kotagede yang dikenal orang kalang yang karakteristiknya menyerupai orang Cina dalam hal berdagang dan berwirausaha.

Kotagede merupakan ibu kota kerajaan Mataram yang Islam yang pertama, sebagai pusat kekuasaan tradisi, politik, dan kebudayaan. Sebagai kota kerajaan yang muncul pada akhir abad XVI Kotagede mempunyai berbagai komponen kota sesuai dengan kebutuhan dalam konteks zaman kala itu. Sebagian artefak sejarah tersebut masih terdapat jejak dalam bentuk

¹⁷⁸ Sumber Data dan Kecamatan Kotagede pada tahun 2002

pusaka budaya bendawi, seperti bangunan, dan pusaka budaya non bendawi, seperti toponim dan juga akar budaya tradisi yang kuat.

Di dalam sejarah diketahui bahwa Kotagede sejak masa pemerintahan Sunan Amangkurat I tidak lagi berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Namun karena di situ terdapat makam para pendiri kerajaan, Kotagede tetap dianggap tempat yang sakral. Dengan demikian kehidupan di Kotagede tetap semarak, bahkan akhir-akhir ini makin berkembang adanya. Oleh karena itu ada pula tinggalan-tinggalan di Kota Gede yang berasal dari masa pra Perang Dunia II, seperti rumah-rumah masyarakat Kalang, dan rumah-rumah dengan arsitektur Jawa yang khas.¹⁷⁹

Tata kota kerajaan Islam pun terlihat di Kotagede yang lazim yaitu keraton yang terletak di sebelah selatan, Masjid Agung terletak di barat Alun-alun, dan pasar di sisi utara Keraton. Di luar pusat kota terdapat pemukiman penduduk kota, taman, pemakaman kerajaan, atau komponen lainnya.¹⁸⁰

Kelima, Faktor Historis. Bagi yang percaya bahwa sejarah sosial atau politik merupakan sejarah borjuasi maka peninggalan bersejarah merupakan salah satu bukti untuk mengenang sekelompok elite yang berkuasa dan berpengaruh. Untuk membuat ingatan kolektif yang luas maka kalangan elite ini dengan berbagai cara akan meninggalkan warisan bersejarah dalam pembangunan atau mewujudkannya kerap mengorbankan *wong cilik*. Tidak hanya di Kotagede atau Indonesia akan tetapi di seluruh penjuru Dunia. Misalnya di Rusia banyak patung dibuat, juga di Indonesia, membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan secara kerja paksa adalah rakyat Indonesia akan tetapi Daendels-lah yang diabadikan sebagai nama jalan di pantai itu.

4. Mataram Tinggalkan Kejayaan

Beberapa pusaka atau cagar budaya yang berwujud benda bersejarah atau tempat peninggalan yang kini menjadi tempat wisata di Kotagede antara lain¹⁸¹ (1). Masjid Besar Mataram. Masjid yang berdiri di selatan pasar Kotagede¹⁸² Kedua, Pasareyan Hastana Kithi

¹⁷⁹ Diakses dari <http://www.tastesofjogja.com/web/ida/detailbud.asp?idbud=335>

¹⁸⁰ Pada perkembangannya, Keraton Yogyakarta juga membangun tata ruang yang sama yaitu sebuah Keraton, Masjid Gede, dan Pasar Beringharjo yang terletak di kawasan Malioboro

¹⁸¹ Yang tersebut dibawah ini hanyalah sebagian dari sekian peninggalan budaya yang ditancapkan oleh elit atau masyarakat Mataram.

¹⁸² Di halaman luar ada sepasang bangsal hertuka, dan beringin tua yang rindang. Di kanan kiri jalan masuk berderet rumah para abdi dalem, dan di ujung jalan itu berdiri sebuah gapura berbentuk paduraksa. Di belakang gapura tersebut berdiri sebuah kelir. Beberapa bangunan termasuk benteng yang mengelilingi masjid runtuh pasca terjadinya gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 lalu. Arsitektur masjid terdiri dari atap tumpang yang bersusun tiga, mempunyai serambi dan masih ada parit yang mengelilingi masjid. Di dalam ruang utama terbagi

Ageng.¹⁸³(2). Toponim. Merupakan nama tempat yang menggambarkan masyarakat penghuni Kotagede , baik dari sisi profesinya, asal-usul, maupun kelompok sosialnya.¹⁸⁴ (3). Rumah Kalang. Salah satu rumah kuno yang dibangun oleh almarhum Pawiro Suwarno pada 1920-an, yang waktu itu seorang pengusaha kaya di Kotagede adalah bangunan tua yang terkenal dengan sebutan Rumah Kalang.¹⁸⁵ Orang Kalang merupakan pendatang yang diundang oleh Raja untuk menjadi tukang ukir perhiasan kerajaan. ¹⁸⁶

ruang pengimaman, mimbar kayu berukir. Dahulu masjid berfungsi untuk penyebaran agama Islam dan dikelola oleh abdi dalem kerajaan dan kini dikelola Yayasan Masjid Besar Mataram sehingga ada semacam dualisme dalam kepemimpinan pengelolaan Masjid.

¹⁸³ 183 Merupakan pemakaman keluarga, terletak di sebelah barat Masjid Agung Mataram, dan dibangun tahun 1511 Saka= 1589 M, dibangun dinasti Mataram-Islam pertama yaitu dilaksanakan atas perintah Panembahan Senapati bahkan sesudah Panembahan Senapati meninggal pun masih terus dilanjutkan. Pemakaman ini dikelola Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta secara bersama-sama. Hari ziarah adalah hari Senin dan Jumat. Tempat ini terdiri dari dua unsur yaitu makam dan sendang (kolam) di sebelah barat daya. Pada halaman ini terdapat sebuah bangsal tempat para abdi dalem berjaga dan mengurus administrasi peziarah. Halaman ini bersifat profan, terbuka sehingga peziarah dapat mengenakan pakaian sehari-hari sementara di halaman kedua, bersifat semi profan, karena peziarah harus melepas alas kaki. Halaman ketiga merupakan halaman paling sakral, karena di dalamnya terdapat makam para raja dan kerabat, pembentuk dinasti Mataram Islam. Pembesar kerajaan yang dimakamkan dalam cungkup: Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Martani, Nyi Ageng Nis, Panembahan Senapati, Panembahan Seda ing Krapyak, Sri Sultan Hamengku Buwono II, dan empat Adipati Paku Alam. Sementara makam ki Ageng Mangir diletakkan separuh di dalam cungkup, separuh berada di luar cungkup karena Mangir merupakan musuh sekaligus menantu Panembahan Senapati. Di dalam kompleks pemakaman ada papan bertuliskan "Kelompok Usaha Bersma Abdi Dalem Jurukunci Pasarean Kuthogedhe Mataram Ngayogyakarta-Suarakarta.

¹⁸⁴ Pandeyan (tempat para pandai besi), Sayangan (pembuat kerajinan emas, tembaga perak), Samakan (pengrajin kulit), Trunojayan (kampung yang pernah disinggahi Pangeran Trunojoyo), Saudagaran (tempat para pedagang), Jagalan (tempat para jagal), Mranggen (tempat para pembuat sarung keris); sedang yang menggambarkan status sosial diantaranya : Jayapranan (tempat tinggal Jayaprana), Singasaren (tempat tinggal Pg. Singasari), Mandarakan (tempat tinggal Adipati Mandaraka), Tegalgendhu (tempat tinggal komunitas orang Kalang, lokasi dulu dianggap diluar Kotagede untuk pengasingan orang. Baca Ensiklopedia Kotagede, bagian Toponim

¹⁸⁵ Rumah tradisional Kotagede dibedakan menjadi dua macam berdasarkan gaya arsitekturnya. Pertama, rumah kalang. Rumah Kalang adalah rumah yang didirikan oleh para saudagar kelompok kalang yang kaya-raya makanya bangunan ini disebut juga sudagaran. Ciri-ciri rumah orang Kalang antara lain : tiang bergaya Corinthia-Romawi, ada hiasan berbentuk kaca patri yang berwarna-warni, banyak menggunakan tegel bermotif baik untuk lantai maupun penutup dinding bagian bawah, pintu dan jendela banyak serta berukuran besar. Contoh rumah Sudagaran adalah : Proyodranan, dan Ansor Silver. Kedua, rumah Joglo, yaitu rumah Kopingan. Halaman rumah-rumah lama di Kotagede biasanya dibatasi dengan tembok yang tinggi dengan satu regol utama, sehingga jalan-jalan di perkampungan diapit oleh pagar tersebut.

¹⁸⁶ Keunikan Rumah Kalang ini adalah adanya perpaduan unsur Jawa Eropa,yaitu Joglo yang dijadikan rumah induk terletak di bagian belakang dan di depan bangunan model Eropa. Bangunan Eropa ini cenderung ke bentuk baroque, berikut corak corinthian dan doriq. Sedang pada bangunan joglonya, khususnya pendopo sudah termodifikasi menjadi tertutup, tidak terbuka seperti pendopo joglo rumah Jawa. Relief-relief dengan warna-warna hijau kuning, menunjukkan bukan lagi warna-warna Jawa lagi. Munculnya kaca-kaca warna-warni yang menjadi mosaik penghubung antar pilar-pilar, menunjukkan joglo ini memang sudah menerima sentuhan lain.

Rumah bergaya campuran Jawa-Eropa ini yang sekarang menjadi milik keluarga Ansor terletak di sekitar 300 meter di utara Pasar Gede. Ansor silver telah menjadi galeri perak terbesar di Kotagede dan juga terdapat sebuah restoran di kompleks rumah besar itu.¹⁸⁷

(5).Upacara Obong. Bila salah seorang keluarga Kalang meninggal, jenazahnya dirawat dan dimakamkan sebagaimana orang Jawa umumnya. Pada hari pertama meninggal diadakan selamatan yang disebut *surtanah*, bersamaan dengan upacara ini biasanya pakaian milik almarhum dibakar. Upacara ini disebut *lepasan*. Selamatan (kenduri) diadakan lagi pada hari ketiga yang disebut *druna*, lalu pada hari yang ketujuh, keempat puluh, keseratus dan terakhir keseribu. Selamatan yang terakhir ini biasanya yang terbesar dan sering disebut *entas-entas*. Upacara entas-entas inilah yang terpenting dalam adat upacara *obong*.¹⁸⁸(8). Warisan Tata ruang. Tata kota wilayah Kotagede memiliki karakteristik khusus sebagai peninggalan kerajaan Jawa. Terdapat istana, alun-alun, bangunan tradisional, dan jalan yang membelah satu dengan yang lain. Kesemuanya itu menjadi bentuk persegi.¹⁸⁹

Rumah di Kotagede memiliki perbedaan karakter dari tempat lain, karena konsep arsitektur tradisional menjadi bagian dari sistem kebudayaan yang terpusat di kawasan istana. Arsitektur Jawa tradisional membangun image psikis dari Kotagede sebagai wilayah yang penuh karakter Jawa. Struktur paling sederhana sederhana seperti *Panggung kampung*, *limaesan*, sampai pada yang kompleks seperti rumah *joglo*¹⁹⁰.

¹⁸⁷ <http://www.yogyes.com/id/yogyakarta-tourism-object/places-of-interest/kotagede>

¹⁸⁸ Untuk menyelenggarakan upacara entas-entas diperlukan biaya yang besar menjadi tradisi yang eksklusif. Pelaksanaan bisa dilakukan secara kolektif atau bergabung keluarga yang mampu, hal seperti ini biasa disebut "bela". Orang yang peranan paling penting dalam penyelenggaraan upacara obong ini adalah *dhukun* sebagai pemimpin jalannya upacara. Dhukun obong haruslah seorang wanita, meski tidak semua dhukun tahu persis asal-usul upacara obong, namun mereka menjalankan ritual ini secara turun-temurun.

¹⁸⁹ Ada banyak perubahan fungsi arsitektur rumah saat ini, seperti : alun-alun yang sekarang penuh dengan bangunan rumah, bangunan istana dan makam dengan rumah-rumah sekitarnya, pusat kota bukan lagi istana, melainkan pasar. Pasar tersebut tetap menjadi pusat kota sampai saat ini. Hal itu merupakan salah satu elemen Catur Tunggal dan tata kota dalam konsep tradisi Jawa. Istana, alun-alun, masjid, dan pasar masih dengan susunan tetap. Meskipun saat ini ada banyak perubahan fungsi arsitektur, secara umum tata kota Wilayah Kotagede tetap mencerminkan struktur awal saat dibangunnya. Tembok yang mengelilingi istana masih bisa ditemukan.

¹⁹⁰ Data pada tahun 1985 menunjukkan 170 bangunan berbentuk joglo di Kotagede. Sebagian besar joglo tersebut berada di Kelurahan Jagalan, Alun-alun, Prenggan, Basen, Purbayan yang secara historis ada di istana Mataram. Umumnya joglo dibangun di pertengahan abad 19, meskipun beberapa diantaranya ada yang dibangun lebih awal, Bangunan Rumah yang paling tua di Kotagede adalah rumah Bahoewinangun di kampung Citran. Dibangun pada tahun 1750. Yang terakhir masih memiliki interior tradisional adalah rumah Ngudirahardja di kampung Basen yang dibangun pada 1942. Saat ini rumah joglo semakin berkurang dan tidak terawat dengan baik keberadaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, tidak mampu membiayai perawatan rumah. *Kedua*, Kebutuhan akan interior telah mengubah beberapa bangunan menjadi lebih modern, seperti misalnya Dalem Ahmad Mustahal di Prenggan dan Dalem Kanjeng Martalaya di Citran yang telah berubah serta Dalem Sopingan yang telah dijual. *Ketiga*, adalah akibat Gempa Bumi yang mengguncang Yogyakarta pada

Selain itu terdapat peninggalan kebudayaan lama yang masih menjadi bagian yang penting dalam pencatatan sejarah Kotagede yaitu Benteng dan Jagang. Salah satu komponen penting Kotagede adalah benteng dan jagangnya yang berfungsi sebagai prasarana pertahanan-keamanan. Ada dua benteng di Kotagede. Benteng pertama adalah benteng dalam (cepuri) yang mengelilingi keraton, sedang benteng kedua adalah benteng luar (baluwarti) yang mengelilingi wilayah kota seluas ±200 ha. Sedangkan Jagang merupakan parit pertahanan selebar 15-25 m. Sebagian besar benteng dan jagang tersebut dalam keadaan rusak berat karena kurangnya perawatan dan lebih-lebih akibat bencana alam.

Yang terakhir adalah prasasti Watu Gilang dan Watu Gatheng yang terletak di selatan Masjid Agung Mataram. Watu Gilang dipercaya sebagai tahta raja-raja Mataram-Islam. Watu Cantheng adalah benda yang terdiri atas tiga batu bulat masif seperti bola yang berwarna kekuning-kuningan.¹⁹¹

Kotagede memang benar-benar “Gede”.¹⁹² Bukti kebesarannya adalah sebagaimana Mitsua Nakamura (1983) menyebutkan bahwa setelah perjanjian Giyanti 1755 yang memecah kerajaan Mataram menjadi dua, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dan dipecah lagi menjadi dua kadipaten: Kadipaten Puro Paku Alaman dan Kadipaten Mangkunegaran.¹⁹³

Keenam, Kotagede awal dan pasca Kemerdekaan.¹⁹⁴ Kemunculan Ormas di Kotagede dan berbagai kota di Indonesia tidak luput dari suasana konfrontasi yang terjadi antara rakyat Indonesia dan Belanda, Jepang pada masa pergolakan, dan perang ideologi pada tahun 1950-

tanggal 27 Mei 2006 yang lalu yang cukup meluluhlantakkan sebagian besar bangunan Joglo dan beberapa situs sejarah Kotagede

¹⁹¹ Berupa papan batu berwarna hitam legam. Pada sisi atas batu itu terdapat prasasti dalam berbagai bahasa. Menurut cerita benda itu adalah alat permainan Pangeran Rangga, putera Panembahan Senapati. Tidak diketahui secara pasti apa kegunaan benda itu. Ada referensi bahwa pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram dibuat meniam berukuran besar yang dinamai Pancawura yang bentuknya serupa dengan Watu Cantheng.

¹⁹² Ibid., dalam keterangan yang diperoleh pada awal kemerdekaan Kotagede merupakan basis Partai Masyumi sekaligus Basis Partai Komunis Indonesia (PKI). Baca juga Skripsi Mutia Amini, *Buruh Perak dan Perkembangan Politik tahun 1960-1965*

¹⁹³ Heru Basuki, Ibid., hlm. 359

¹⁹⁴ Dalam konteks modern ada beberapa instansi pemerintahan dan lembaga lainnya yang terdapat di Kecamatan Kotagede. *Pertama*, instansi vertikal meliputi : Koramil, Polrestabes, Puskesmas, KUA, KB, dan Statistik. *Kedua*, instansi otonom meliputi : Dinas Pertanian dan Kehewan, DKP Sektor Kotagede, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. *Ketiga*, Instansi BUMN/BUMD meliputi : Kantor Pos , BRI, BPD, BUKP, Pegadaian, dan PDAM. *Keempat*, instansi swasta meliputi : ekolah, Pondok Pesantren, PKU, dan Masjid, Bimbingan Haj, Koperasi, BMT, LSM. Termasuk dalam hal ini adalah Organisasi kemasyarakatan dan media massa. *Kelima*, Partai Politik. Sebagaimana basis sosial Kotagede yang ter-trikotomi menjadi santri, abangan, priyayi dan abangan namun dalam afiliasi partai cukup tersebar di beberapa partai antara lain: PPP, GOLKAR, PDIP, PAN, PKS

1960-an yang ditandai dengan kelahiran berbagai organisasi yang berbasis kerakyatan dan aliran.

Sebagaimana image yang terbangun bahwa Kotagede merupakan kota santri yang memang tidak sepenuhnya itu benar karena dalam masyarakat Kotagede cukup beragam paham keagamaan bahkan apa yang pernah ditulis oleh Geertz dalam trikotominya itu juga melekat dalam masyarakat Kotagede. Organisasi sosial keagamaan yang ada di Kotagede meliputi, Nahdlatul Ulama, Mujahidin Indonesia, dan juga Jamaah Tabligh. Selain itu juga berkembang jumlah lembaga kajian atau lembaga swadaya masyarakat dan ormas kepemudaan di Kotagede. Di antaranya adalah Yayasan Pusdok, Yayasan Kanthil, Komunitas 15, Komunitas Kunir Asem, Yayasan AMM, Pemuda Muhammadiyah, Falsafatuna yang bergerak dibidang kajian Agama, FKUB, Yakkum yang dikelola oleh lembaga Kristiani yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, IOF, pondok pesantren yaitu Nurul Ummah (Nahdlatul Ulama) dan Pondok Pesantren Fauzul Muslimin (Muhammadiyah).¹⁹⁵

Perkembangan terakhir Kotagede dapat dilihat dari aset-asetnya sebagaimana berikut: Pimpinan Cabang Muhammadiyah mempunyai 13 Pimpinan ranting yang tersebar di tiga kelurahan di Kotagede, memiliki 2 Sekolah Dasar, 1 SMP, 1 SMA, 1 rumah sakit PKU, dan Puluhan Masjid yang tersebar di beberapa perkampungan.¹⁹⁶

Dalam jagat politik, Kotagede cukup mempunyai alasan untuk menjadi referensi dalam penulisan sejarah sosial dan politik karena alasan, *pertama*, Kotagede merupakan bekas pusat kekuasaan Mataram Islam yang di sana terjadi banyak pergolakan dan intrik politik. *Kedua*, zaman revolusi (1945-1965), Kotagede adalah pusat berbagai macam gerakan ideologis yaitu pusat trainingnya PKI dan juga tumbuh kembangnya gerakan Islam.¹⁹⁷

Begitu juga dalam politik kontemporer. Kotagede banyak tumbuh lembaga Partai Politik yang beragam, tidak hanya Partai Islam yang berbasis Islam atau Masyumi seperti PAN, PBB, PPP, PK/PKS melainkan partai-partai Nasionalis seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan

¹⁹⁵ Muhammadiyah sendiri sebenarnya menjadi kajian yang cukup luas di Kotagede sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Mitsuo Nakamura yang mengkaji bagaimana perkembangan gerakan Muhammadiyah di Kotagede. Pertanyaan yang telah berhasil dijawab oleh Nakamura adalah bagaimana Muhammadiyah diterima di Kotagede.

¹⁹⁶ Sumber: *Profil Muhammadiyah tahun 2005*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah

¹⁹⁷ Wawancara dengan Bahruddin, 29 September 2007, dan juga diperkuat oleh literature yang saling mendukung.

beberapa partai Politik lainnya yang mempunyai konstituen di Kotagede meski tidak sampai memenuhi kuota perolehan kursi di DPRD atau DPR-RI.¹⁹⁸

BAGIAN 3

5 Tahap Perkembangan Borjuasi Kotagede

Seperti disebut dalam bagian pertama, studi ini diarahkan pada pelacakan atas sejarah kelas borjuasi di Kotagede yang mempunyai ciri dan karakter khas. Kekhasan sebagai daerah bekas kerajaan Mataram, negara boneka Belanda yang sebagian besar penduduknya mengalami tahapan perubahan dalam profesi yang sangat panjang; yaitu sebagai tukang, pedagang, pengrajin, juru gadai, dan profesi yang dilahirkan dari pendidikan modern pada fase berikutnya. Tentu saja karakter kelas borjuasi di Kotagede berbeda dengan borjuasi dalam kerajaan maritim yang mempunyai kontak dagang dengan negara belahan bumi lain di Nusantara semenjak abad ke-7 sampai sekarang. Meski demikian, orang Kotagede tidak kurang pergaulan, daerah ini menjadi pusat perdagangan terbesar di kawasan selatan Pulau Jawa, sebagai daerah kerajaan agraris yang mata pencahariannya hanya dari hasil pertanian dan hutan. Pada perkembangan berikutnya Pasar Gede menjadi pusat dagang Jawa Tengah dan Yogyakarta yang sangat ramai dikunjungi para pedagang dari pesisir sekalipun.

Kotagede memang menyimpan sejarah panjang. Sejarah Kotagede dapat dipandang menurut periodisasi umum yang berlaku nasional, maupun khusus yang berlaku setempat,¹⁹⁹ Secara umum, dapat dipilah atas tiga periode: Keraton Mataram Islam, Surakarta-Yogyakarta

¹⁹⁸ Data selengkapnya bisa dilihat dalam lampiran : Daftar perolehan suara Partai Kotagede pada pemilihan Umum Legislatif tahun 1999, 2004

¹⁹⁹ *Ensiklopedi Kotagede*. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005, hlm.113.

yang bersamaan dengan masa kolonialisme Belanda sampai Jepang, dan Kemerdekaan Indonesia.

Kalau pada awal pengislaman pedagang adalah pelaut yang membawa teknik-teknik baru dan cita-cita baru bersama muatannya, sekarang kedua fungsi itu sudah lama terpisah. Kota modern tidak lagi hanya merupakan pelabuhan dan pasar tempat hasil panen pedalaman dipertukarkan dengan barang impor. Kota itu adalah tempat istimewa yang harta kekayaannya berupa modal bergerak dapat dilipatkan - terutama melalui riba - serta ditanam dalam serangkaian usaha. Sejumlah keluarga besar Melayu, Sunda dan Jawa yang sudah lama diislamkan telah menjawab tantangan ekonomi orang Cina dan Belanda dengan turut “berbisnis”. Mereka merupakan inti dari yang telah penulis namakan golongan “santri kota”, yang pada dasarnya dapat disamakan dengan borjuis sebagaimana dikenal dalam rumusan konseptual dalam teori-teori politik Barat.

Namun konsep “golongan borjuis Muslim Indonesia” hendaknya dipakai dengan hati-hati sekali, sebab keadaan di sini berbeda sekali dengan keadaan di Eropa Barat pada ambang masa modern, ketika muncul kota-kota “bebas” yang pertama, ataupun pada akhir abad ke-19 ketika ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berhasil dikuasai sekaligus oleh satu golongan sosial yang sama. Para Historiografi Barat tampaknya cenderung menekankan peranan kaum borjuis, dengan menguraikan secara panjang lebar hal ihwal asalnya, muncul kekuasaannya dan kemenangan-kemenangannya sedangkan di lain pihak sedikit sekali jumlah kajian sejarah yang membicarakan golongan-golongan sosial yang di Asia kiranya telah menjalankan fungsi yang serupa. Kenyataan bahwa mereka tidak mencapai tingkat kejayaan yang sama, tidak berarti bahwa golongan itu tidak ada.

Kalangan-kalangan pengusaha Indonesia, pewaris jauh kalangan usaha zaman kesultanan, memiliki paling sedikit tiga unsur kesamaan dengan kalangan borjuis Barat. *Pertama*, mereka mengutamakan dengan sengaja modal bergerak (meskipun tidak meremehkan penanaman modal dalam benda tak bergerak). *Kedua*, mereka kebanyakan tinggal di kota dan mengembangkan usaha yang dapat dianggap sebagai suatu kebudayaan kota yang khas, yang berbeda dari kebudayaan keraton, maupun dari kebudayaan rakyat. *Ketiga*, mereka merupakan wahana suatu ideologi “nasional” yang sekaligus melawan kerajaan jenis tradisional dan segala persaingan ekonomi, dari manapun datangnya. Dalam konteks ini para pedagang Kotagede melakukan resistensi yang sangat kuat terhadap pedagang etnis Cina. Bahkan orang Cina tidak boleh tinggal di Kotagede – sampai sekarang - demi kedaulatan ekonomi penduduk lokal.

Banyak peristiwa dari sejarah baru Indonesia menjadi jelas kalau memperhitungkan kembali pengaruh golongan-golongan usahawan besar itu. Perjuangan melawan kolonialisme, dan terutama melawan cengkeraman ekonomi Barat, perjuangan melawan pesaing-pesaing keturunan Cina yang untuk selanjutnya disebut “orang asing”; perjuangan melawan Komunisme (yang sampai tiga kali dipatahkan, pada tahun 1927, 1948 dan 1966); perjuangan melawan suatu birokratisme yang dalam tradisi kerajaan-kerajaan Jawa agaknya sering berkecenderungan mengutamakan peran negara dengan meremehkan perusahaan-perusahaan swasta; dan akhirnya seakan-akan untuk memadu semua perlawanan itu, naiknya nasionalisme dan bangkitnya Islam.²⁰⁰

Hendaknya dicatat bahwa tampilnya kembali golongan-golongan usahawan itu tidak terjadi secara seragam di semua tempat. Terjadinya terutama di tempat-tempat perniagaan besar yang masih dikenang. Juga di tempat di mana praktek-praktek usaha masih ada - yaitu di tempat-tempat di mana dulu telah bangkit selera petualangan serta naluri perusahaan- dan di tempat-tempat yang paling disentuh oleh pihak Cina, Arab, dan Eropa. Maka ada dua daerah yang secara khas terlibat: bagian utara Pulau Sumatra di satu pihak, dan Pulau Jawa di pihak lain.

Alangkah baiknya apabila kita mempunyai data-data serupa untuk mengikuti perkembangan lingkungan niaga Jawa pada masa berikutnya. Sayangnya, peran Senopati dan Sultan Agung melawan kota-kota pesisir telah menghambat kemajuannya dan sumber-sumber Jawa yang tersedia, yang berasal dari ibukota-ibukota di Selatan, boleh dikatakan bungkam terhadap pedagang-pedagang yang disenangi itu - mirip dengan sumber-sumber resmi Cina yang hanya sedikit menyinggung kaum pedagang.²⁰¹

Di antara kedua monopoli yaitu monopoli Mataram dan monopoli VOC, memang masih ada tempat untuk perniagaan partikelir, bahkan untuk kecurangan. Tentang hal itu ada bukti-bukti tidak langsung di dalam dua berkas yang pelik yang dipercayakan kepada utusan pertama tahun 1648 dan yang tampil di muka lagi kemudian yaitu berkas “orang Cina yang telah melarikan diri” (*dewehegeloopenen Chinesen*) yang meninggalkan Batavia untuk menghindari penagih utang mereka dan mencari perlindungan di pelabuhan-pelabuhan pesisir lainnya di bawah kekuasaan Sunan, dan terutama sekali berkas pedagang-pedagang Mataram yang datang ke perak atas kehendak sendiri untuk mengambil timah, suatu sektor yang keuntungannya

²⁰⁰ Denny Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya, Jaringan Asia*, (Yogyakarta, Gramedia Putaka Utama, 2005), hlm. 158

²⁰¹ Ibid. hlm. 163

hendak dipegang sendiri oleh VOC. Sebagai imbalan untuk Perjanjian Amangkurat mengenai kedua hal itu (ekstradisi pelarian dan larangan dengan ancaman hukuman mati kepada semua regicoles untuk berdagang ke Perak), Belanda berjanji untuk melaksanakan atas biayanya sendiri, beberapa pengangkutan ke bagian barat Lautan Hindia yang tidak lagi ke Mekkah, begitu pula pengiriman sebuah misi “ahli” tiga orang yang ditugaskan untuk pergi ke Parsi guna membeli kuda-kuda untuk istal-istal raja.

Berkat laporan para pegawai Belanda, kita dapat mengikuti pembentukan “modal pribumi” itu dengan cukup baik. Di antara anggota-anggota golongan borjuis baru itu banyak yang menjadi calon peziarah. Hal itu menjelaskan cepatnya kenaikan jumlah haji dan terbentuknya mereka menjadi sebuah kelompok kuat yang berpengaruh. Di sini penulis buka kembali kenang-kenangan Pangeran A. Achmad Djajadiningrat, dan melihat kembali sejarah Haji Muhammad dari Banten, yang sudah kami bicarakan itu, dalam hubungan dengan pembaratan pakaian. Dalam sebuah bab yang berjudul: “Sebuah keluarga pedesaan untuk kemajuan”, pangeran itu menganalisis dengan tajam sekali dan tidak ada humor - suatu hal yang sangat wajar pada seorang priyayi - munculnya orang-orang kaya baru itu.²⁰²

Tidak mengherankan kalau sejumlah pergerakan dan perkumpulan sosial atau politik timbul di berbagai kota Jawa berhubungan dengan luapan semangat sosial itu. Ada yang tidak berhasil, tapi ada juga yang menyebar ke seluruh pulau dan bahkan ke luar Jawa, terutama ke Sumatera yang lahannya, seperti telah kita lihat, luar biasa baik.

Salah satu pergerakan yang paling tua tetapi juga yang paling sedikit dikenal adalah pergerakan “koperasi” di Indonesia pasca Revolusi Industri. Berlainan dengan dunia Barat yang konsumsi, di Indonesia yang muncul adalah koperasi kredit atau produksi yang dimaksud untuk mendukung perusahaan dan memudahkan penyaluran barang mereka. Gagasan koperasi rupanya dilancarkan di daerah Purwokerto pada tahun 1895 atas prakarsa beberapa pegawai Belanda terutama oleh W.P.D de Wolff van Westerrode, yang ingin melipatgandakan koperasi kredit pertanian. Akan tetapi pada tahun 1920 gagasan itu diambil alih oleh Hatta yang menganjurkan koperasi produksi dan yang sejak itu dianggap sebagai “Bapak Koperasi” di Indonesia. PNI pun tertarik lalu Sutomo yang membuatnya menjadi salah satu gagasan utama Parindra pada tahun 1935. Pada tahun itu pula didirikan koperasi pengusaha

²⁰² Ibid. hlm.159

batik yang pertama. Setelah kemerdekaan, perkumpulan produsen bergabung pada tahun 1948 ke dalam GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia.

Dinamika perkembangan masyarakat itu variative sifatnya, tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ada yang berkembang begitu cepat ada yang sangat lambat. Tidak ada fenomena kemasyarakatan yang mutlak statis dan tidak ada yang mutlak dinamis.²⁰³ Oleh karena itu perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat merupakan gejala yang normal. Karena pokok dari segala perubahan dalam masyarakat itu ialah perjuangan manusia untuk hidup dan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik dari yang telah didapat.²⁰⁴ Selain itu, perubahan sosial merupakan variasi dari cara hidup yang sudah diterima, disebabkan oleh perubahan kondisi-kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.²⁰⁵

Berubahnya masyarakat melalui beberapa proses tersebut terjadi karena oleh beberapa faktor pendukung yaitu: pertama, *innovoation* (pembaharuan); kedua, *invention* (penemuan baru); ketiga, *adaptation* (penyesuaian); dan keempat, *adaption* (penggunaan penemuan baru)²⁰⁶.

Salah satu tipologi perubahan berdasarkan waktunya adalah perubahan yang bersifat revolusi dan evolusi. Revolusi sendiri merupakan sebuah transformasi (Gunawan, 2007). Revolusi ditandai dengan sesuatu yang dialami berubah menjadi sesuatu yang dihayati, ketika orang mengartikulasikan apa yang terjadi dengan kata, lambung, mitos. Mereka memberi makna kepada semua itu, dan mendapatkan makna dari sana.²⁰⁷

Revolusi industri boleh terjadi di Eropa. Namun memang tidak menutup kemungkinan revolusi industri di Jawa terjadi di Kotagede. Apabila revolusi industri Inggris mempunyai dampak yang sangat luas di bumi Eropa bahkan ke seluruh dunia, maka revolusi industri di Kotagede mampu mendorong perubahan sosial yang terjadi di Kotagede dan Yogyakarta pada umumnya.

²⁰³ Soenjoto, *Sosiologi Pembangunan dan Industri Sektor Kehutanan* (Yogyakarta: Sospol, UGM., 1974), hlm. 8

²⁰⁴ Moch. Hatta. *Pengantar Kedjalan Ilmu Pengetahuan*, (Djakarta: PT. Pembangunan, 1950), hlm. 10

²⁰⁵ J.B.A.F Mayor Polak, *Sosiologi, Suatu Buku Pengantar Ringkas* (Djakarta: PT. Ichtiar Baru, 1966), hlm. 385 dalam Adaby Darban (2000), *Sejarah Kauman, Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, hlm. 71-72

²⁰⁶ Robert L. Suthler and Julian L. Woodward and A. Maxwell, *Introduction to Sociology*, (Chicago-New York: tanpa penerbit, 1961), hlm.369

²⁰⁷ Gunawan Muhammad, dalam catatan pinggir. *Ada Revolusi di Bulan Agustus 1945*, Majalah Tempo, edisi khusus, 17 Agustus 2007, hlm 24

Perubahan sosial di dalam masyarakat Kotagede dapat dirunut dari berbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakatnya yang plural secara ideologi dan kebudayaan bahkan pendidikan juga memberikan arti tersendiri di Kotagede sebagai bagian dari pengaruh faktor eksternal. Perubahan yang akan diamati meliputi juga relasi antara kelas sosial, peranan kelompok atau komunitas dengan identitas tertentu di tengah masyarakat Kotagede yang terus berubah.

Oleh karena itu di bawah ini akan dipaparkan bagaimana pola dan dinamika perubahan masyarakat terjadi di berbagai bidang. Mulai dari bidang pemikiran dan perilaku keagamaan, bidang pendidikan, struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Untuk melihat lebih detail maka perlu melakukan pembacaan perubahan karakter sosial dan ekonomi politik di Kotagede sehingga mencapai zaman keemasan kelas borjuasi, zaman stagnasi dan zaman kemunduran borjuis (*decline of borjuasi*). Berikut uraian lebih rinci dari lima tahap perkembangan borjuasi khas Kotagede; yaitu Periode Pertukangan, Perdagangan, Industri Modern dan Kemunculan Lembaga Pendidikan Barat dan Panggung Pertarungan Politik. Tahapan ini tidak selalu linear; beberapa fase ada tidak lantas menggantikan fase sebelumnya.

A. Revolusi Pertukangan

1. Para Tukang Keraton

Kotagede terkenal sebagai pusat kerajinan perak, yang merupakan budaya peninggalan Kerajaan Mataram. Para tukang atau pengrajin adalah abdi keraton dan digaji oleh keraton. Menurut sejarah, kerajinan ini merupakan warisan turun-temurun dari para *abdi dalem* yang pandai membuat berbagai barang kebutuhan istana pada zaman dulu. Awalnya tidak hanya membuat barang-barang dari perak, tetapi juga barang-barang yang terbuat dari emas dan tembaga. Ketika ibukota pindah ke Plered, para pengrajin tidak ikut pindah ke daerah itu. Tapi perkembangannya, kerajinan dari perak lebih banyak diminati hingga saat ini.

Orang-orang Kalang berasal dari wilayah Kerajaan Majapahit Hindu yang diminta Kerajaan Mataram Islam untuk memenuhi kebutuhan barang-barang seni di keraton. Orang Kalang pada masa kejayaan Mataram di Kotagede menjadi konglomerat-konglomerat pribumi yang hebat; menjadi borjuis dalam pandangan Van Mook. Tapi karena krisis dunia terjadi pada tahun 1930-an, banyak pengusaha kalang yang gulung tikar dengan usahanya sebagai pengusaha kerajinan perak dan beralih ke profesi lain.

Penghidupan penduduk Kotagede secara turun-temurun bukanlah dari hasil pertanian. Melainkan dari kerajinan tangan dan perdagangan. Bukti, nama-nama kampungnya menunjukkan profesi penduduknya. Mranggen berasal dari *mranggi*, pembuat sarung keris atau sarung tombak dari kayu; Sayangan berasal dari *sayang* alias tukang tembaga; Samakan berasal dari *samak* berarti kulit kerbau atau sapi atau kambing yang diolah; Pandean dari *pande*, berarti tukang besi.²⁰⁸ Kemunculan kelompok tukang misalnya menjadi kekuatan ekonomi di kerajaan karena jumlah permintaan meningkat, lahirnya kelompok dagang di Jawa mampu menaikkan *bargaining position* orang diluar kelompok bangsawan.

Pada masa Perang Diponegoro pada dekade ketiga abad ke-19, beberapa perubahan mulai terjadi; di dalam masyarakat Kotagede. Beberapa perubahan mendasar itu dapat dijelaskan. *Pertama*, para *abdi dalem* yang, sangat dihormati karena fungsi kulturalnya, lapisan atas kota ini mulai diisi oleh para *entrepreneur* dari luar Kotagede, yang masuk untuk meneruskan aktivitas ekonomi mereka sebelumnya, Secara perlahan mulai berkembang kelompok pengrajin dan pedagang di Kotagede, yang secara sosio-kultural seperti juga para *abdi dalem* memiliki ikatan yang kuat dengan keraton. Secara sadar sebenarnya posisi sosial ekonomi *abdi dalem* sedang dalam guncangan yang cukup kuat seiring dengan *trend* zaman yang menghargai kepemilikan kapital seseorang. Namun, kesadaran ini tidak membuahkan banyak tindakan,

2. Kemunduran Borjuasi Tukang

Perubahan besar baru terjadi setelah reorganisasi Praja Kejawen tahun 1910-an. Penghapusan tanah apanage yang mengiringi reorganisasi itu mengakibatkan para *abdi dalem* kehilangan sumber ekonomi sehingga mereka tidak mampu lagi bersaing dengan para keluarga kaya di Kotagede. Dalam waktu yang tidak lama, kemampuan ekonomi sebagian besar *abdi dalem* itu jatuh ke dalam level kelompok para buruh harian dan petani. Walaupun para *abdi dalem* itu masih menikmati penghormatan karena posisi mereka sebagai penjaga tempat-tempat suci, dalam kenyataannya proses pergeseran loyalitas dari ikatan *patronase* ke hubungan ekonomi yang lebih rasional mulai terjadi di Kotagede. Para *abdi dalem* mulai lebih dianggap hanya sebagai simbol budaya dalam hubungan antara Kotagede dengan keraton daripada status

²⁰⁸ Rina Widyawati, *Santri dari Kotagede: Sumbangsih KH Abdul Kahar Mudzakkilr Di Bidang Pendidikan (1945-1973)*. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, hlm. 24.

sosial yang tinggi di dalam masyarakatnya sendiri. Adanya perubahan itu dapat dilihat pada komposisi demografis kota ini pada awal dekade ketiga abad ke-20.

Lokasi pengrajin perak tersebar merata di dua kecamatan yaitu Prenggan dan Purbayan, sementara di kelurahan Rejowinangun merupakan basis utama petani. Selain di Kotagede, industri perak juga terdapat di Jagalan, Bantul yang jaraknya berdekatan dengan Kotagede (tabel industri dapat dilihat dalam lampiran). Industri perak dapat dijumpai di sepanjang kompleks Pasar Kotagede sampai Masjid Agung. Saat ini ada sekitar 60 toko yang menawarkan berbagai produk kerajinan perak. Sedikitnya ada empat jenis tipe produk yang dijual, yakni *filigri* (teksturnya berlubang-lubang), tatah ukir (teksturnya menonjol), *casting* (dibuat dari cetakan), dan jenis *handmade* (lebih banyak ketelitian tangan, seperti cincin dan kalung).

Menurut para pengusaha perak di Kotagede, kerajinan perak yang digeluti sebagian besar masyarakat wilayah itu bersifat turun-temurun. Awalnya, jumlah pengrajin hanya beberapa orang, karena usaha mereka hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan perhiasan atau perlengkapan lainnya bagi raja dan kerabat keraton. Hal senada juga yang dilansir oleh YogYES.com :

*“Kerajinan perak sendiri merupakan budaya turun-temurun. Pada awalnya kerajinan di Kotagede berupa emas, perak dan tembaga. Namun seiring waktu, kerajinan peraklah yang paling diminati. Sehingga para pengrajin lebih banyak memilih untuk mengolah perak hingga sekarang. Saat ini, kerajinan ini sudah diekspor ke mancanegara terutama Eropa. Dan biasanya permintaan akan melonjak setiap akhir tahun.”*²⁰⁹

Sebelum berkembang menjadi sentra kerajinan perak, Kotagede merupakan ibu kota Kerajaan Mataram pertama, dengan raja pertama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati menerima kawasan yang waktu itu masih berupa hutan yang sering disebut “Alas Mentaok” dari Sultan Panjang, Raja Kerajaan Hindu di Jawa Timur. Kotagede menjadi ibu kota hingga tahun 1640, karena raja ketiga Mataram Islam, Sultan Agung, memindahkannya ke Desa Kerto, Plered, Bantul. Menurut ceritanya, pemindahan ini dengan alasan untuk alasan untuk mendapatkan kekuatan dan kejayaan yang lebih besar secara mistis.

²⁰⁹ <http://ww.yogyes.com.id/yogyakarta-tourism-object/places-of-interest/kotagede/>

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, keberadaan pengrajin perak muncul seiring dengan lahirnya Mataram. Perpindahan ibu kota ke Plered itu ternyata tidak membuat para pengrajin ikut pindah. Mereka yang biasanya melayani kebutuhan raja itu tetap mempertahankan usahanya dengan menjualnya ke masyarakat umum. Berarti ada perubahan yang penting bahwa pada awalnya barang-barang yang dihasilkan pengrajin hanya untuk kalangan terbatas (baca:keraton) telah berubah menjadi barang konsumsi publik.

Jadi, kalau ditarik kesimpulan dengan melihat konteks borjuasi Indonesia, para borjuasi yang pada awalnya hidup sangat berkecukupan dengan profesi sebagai tukang kerajaan sangat dipengaruhi kondisi politik yang muncul akibat kedatangan Pemerintah Kolonial dan juga kemunduran kekuasaan Kerajaan Mataram akibat konflik antar kerabat raja. Hal berdampak pada aktivitas ekonomi para tukang yang semakin tidak berfungsi karena tidak ada pesanan sehingga peralihan yang cukup dramatis menjadikan para tukang harus beralih pada kegiatan lain yang sudah banyak dikuasai oleh para pedagang yang datang ke Kotagede. Mereka kehilangan pendapatan tetapnya dan mengalami surut sebagai kelompok yang sangat mapan secara ekonomi.

B. Era Baru Perdagangan

Sebenarnya tidak bisa secara tegas dibedakan antara fase pertukangan dan perdagangan sebab terdapat *overlapping*. Artinya, sebelum masa pertukangan berakhir sudah disambut zaman yang paling gemilang dalam dunia perdagangan. Era di mana ada peralihan kekuasaan atas sumber ekonomi yang awalnya sangat terpusat pada lingkungan keraton menjadi menyebar ke berbagai penjuru. Zaman perdagangan ini banyak dimotori oleh dua kelompok penting dan sangat berpengaruh yaitu Golongan Kalang dan Para Keluarga “Bani Haji”.

Borjuasi di Kotagede disinyalir dimulai dari kemunculan kelas pertukangan yang dilakukan oleh *abdi dalem* maupun kelompok Kalang yang membuat kerajinan untuk keraton, kemudian muncul kelas pedagang pada akhir kekuasaan Mataram dan lahirnya pengusaha yang diidentikkan dengan kemunculan industrialisasi modern.

Selain itu, dan beberapa profesi yang muncul belakangan seiring dengan perkembangan pendidikan modern.²¹⁰ Pedagang di Kotagede mengembangkan jaringan pasarnya ke daerah lain yang sangat luas dan demikian pergaulan orang Kotagede menjadi terbuka; baik dengan sesama pedagang Jawa, Cina maupun Arab. Sudah menjadi tradisi, banyak pedagang kaya dapat bepergian ke Mekkah atau ke Timur Tengah selain untuk berdagang juga menimba ilmu pengetahuan. Barang dagangan biasanya terdiri dari kain batik, lurik, barang kerajinan yang terbuat dari emas, penyu, tembaga perak, dan kulit.²¹¹

Ada satu hal yang penting mengenai karakteristik borjuasi atau pedagang di Kotagede yaitu keterlibatan dalam pergerakan kemerdekaan melalui gerakan keagamaan, ideologi dan kekeluargaan yang cukup kuat. Mereka menggunakan harta untuk memperjuangkan cita-cita kelompok dan pemikiran Islam. Selain pedagang besar tidak melakukan akumulasi modal sebagaimana karakteristik borjuasi di Eropa sehingga masa regenerasi pedagang besar tidak berlangsung lama untuk menghasilkan pedagang besar lagi.

Kelahiran gerakan berbasis agama yang diikuti dengan kemunculan berbagai lembaga keagamaan dan perkumpulan adalah sarana kelompok borjuis untuk tetap eksis di tengah masyarakat yang sedang berubah. Kedudukan sosial keagamaan juga sangat dipengaruhi status sosial dan ekonomi. Borjuasi ekonomi yang paling mudah untuk menguasai lembaga agama dan politik dan itu berarti ekspansi “pemodal” merebut posisi kelas borjuasi di luar kekuasaan ekonomi seperti organisasi sosial atau politik.²¹² Masyarakat sangat mengukur kehormatan dengan ukuran kepemilikan harta kekayaan.

²¹⁰ Untuk membedakan kedua kelompok ini sebenarnya sederhana. Terminologi pedagang disini mengacu pada kegiatan masyarakat Kotagede pada abad 19-awal abad ke- 20 yang mana usaha pedagang adalah mayoritas mata pencaharian masyarakat Kotagede. Sementara kata pengusaha atau *entrepreneurship* sebagai terminologi kelas modern (dalam bab 4 akan dibahas dalam bagian tahap perkembangan borjuasi industrialisasi modern. Perusahaan yang ada sudah mengenal sistem Tripartiat antara Majikan, buruh, dan pemerintah sehingga hal ini sangat terlihat modernis meski bukan berarti modernisasi itu melepaskan buruh dan ketertindasan kelas borjuasi. Akan tetapi perbedaan ini dinilai kurang tepat karena kata usahawan sudah dipakai jauh hari ketika kolonialisme sedang berjaya di negeri Hindia Belanda.

²¹¹ Dan disinilah muncul pedagang yang sangat menonjol atau kaya yang disebut dengan *saudagar* atau *juragan*. Kelihaihan berdagang ini kemudian diabadikan dalam Toponim sebagai nama desa yaitu desa saudagaran (pedagang kaya).

²¹² Lembaga sosial seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LSM, atau lembaga pendidikan agama tradisional (pondok pesantren) di Kotagede menjalankan fungsinya sebagai antara lain. Pertama, memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus Bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat setempat. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Baca, Sukanto (1992), dalam Azhar Arsyad (2003), hlm. 245, *Elit Agama di Sulawesi Selatan*, hlm. 32

1. Pedagang Kotagede

Akibat kemunduran kelompok borjuasi *abdi dalem* tersebut di atas, para saudagar atau pedagang dan pemilik perusahaan kerajinan mulai mengambil alih kedudukan sosial dan ekonomi para *abdi dalem*, terutama ketika permintaan terhadap produk tekstil dan kerajinan, seperti permata dan barang-barang terbuat dari emas dan perak meningkat tajam pada awal abad ke-20. Beberapa bukti menunjukkan bahwa para saudagar kaya itu juga menjalankan bisnis gadai peminjaman uang, walaupun belum ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan tentang bisnis yang kedua. Bersama-sama pedagang kaya dari Kotagede, para saudagar dan pengrajin memberi sumbangan yang sangat besar bagi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Mereka sangat dikenal baik oleh pedagang lokal maupun pedagang Cina di pasar besar Beringharjo di kota Yogyakarta dan pasar-pasar lain di Pulau Jawa.

Lombard (1996) mengungkapkan bahwa ada kelompok-kelompok sosial yang sangat terpengaruh oleh kebudayaan Eropa namun tak mau pindah agama, dan kebanyakan tetap setia kepada agama Islam. Secara umum, setiap daerah besar Indonesia mempunyai “orang-orang besar” yang sedikit atau banyak terpengaruh oleh kebudayaan Barat. Di Pulau Jawa, gejala itu patut diperhatikan dan banyak penjelasan akan kita peroleh jika kita telusuri evolusi lambat dari apa yang disebut “elite” priyayi²¹³, dari abad ke-17 hingga kini.²¹⁴

Pasca Kemerdekaan, bangsawan sebagai kelompok yang ber pranata khusus sebenarnya sudah tidak lagi, gelar ningrat telah dihapuskan. Kendati demikian kita akan bisa membicarakan tentang “elite”²¹⁵ meski kita tidak dapat membicarakan keberadaan bangsawan ketika masa kejayaan bangsawan pada abad 17 dan kasta birokrat pada abad 19. Di Jawa sendiri kebangsawanan tidak selamanya dapat diwariskan dari ayah ke anak, terus menerus tanpa ada akhirnya. Kebangsawanan juga dapat diwariskan melalui keturunan dari wanita (istri), dan di Jawa juga berlaku hukum semakin jauh generasi lahir dari raja yang menurunkannya kadar kebangsawanan itu makin berkurang sampai tingkat rakyat jelata.²¹⁶ Hal ini akan berpengaruh

²¹³ Priyayi atau para yayi secara harfiah artinya adalah “adik” raja dan pada prinsipnya tinggi rendahnya prestige mereka adalah tergantung pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan mereka dengan raja. Golongan priyayi diartikan sama dengan bangsawan, aristokrasi yang mempunyai kedekatan dengan raja-raja Jawa. Keberadaan kelompok ini menjadi perantara dengan rakyatnya. Pasca perang-perang yang beruntun pada pertengahan abad ke-18 dan Perang Jawa pada tahun 1825- 1830 mengakibatkan kaum bangsawan berada dalam posisi yang tidak stabil dan kalut. Lalu Belanda merangkul kelompok ini sebagai pembantu yang setia, menjadi birokrat Belanda dan sebagian menjadi borjuis Belanda.

²¹⁴ Denny Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pemberatan*, (Jakarta:1996), hlm.103

²¹⁵ Suatu konsep sosiolog Barat.

²¹⁶ Ibid. hlm. 104

pada formasi borjuasi di kemudian hari, yang mengalami kontinuitas dalam pewarisan nilai dan profesi (dagang).

Justru sangat terlihat bahwa yang melestarikan bangsawan dan perekonomian (pedagang) secara turun-temurun adalah penjajah Belanda. Raja dan kaum pribumi kala itu tidak terlalu memperhatikan kehidupan bangsawan dan rakyat jelata, sehingga Belanda memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan. Dalam waktu yang bersamaan Belanda membentuk elite baru yang berada di luar keluarga raja yang dekat. Hal ini terlihat dari tulisan Van Den Bosch pada tahun 1883:²¹⁷

“menurut saya, dengan segala cara, kita harus membuat agar para pemimpin pribumi bergantung kepada kita; itulah yang saya coba lakukan, sedapat mungkin dengan selalu menghormati hak-hak mereka yang turun-temurun, dengan memperlakukan sebagaimana kehormatan mereka, bahkan dengan perhatian yang hati-hati, selalu memberi bantuan jika mereka mendapat kesulitan keuangan, dan memberikan atas tanah yang mereka incar-singkatnya berbuat sedemikian rupa sehingga mereka merasa berbahagia berada di bawah pemerintahan kita daripada ketika berada di bawah pemerintahan raja mereka...”

Hal inilah yang menjadi prinsip politik *divide at empera* yang dijalankan di semua lini pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah kolonial juga terlibat dalam pengembangan usaha perdagangan pribumi sebagai upaya untuk merebut simpati dari rakyat, sehingga tercipta satu kondisi yang baru dengan kemunculan kelas pedagang yang independen dan tidak merunduk-runduk di bawah ketiak raja. Sebagai tujuan akhir adalah memunculkan perlawanan rakyat terhadap rajanya dan memecah belah kekuasaan yang bersifat konsentris.

2. Borjuasi Golongan Haji

Menurut data tahun 1922, dari 1073 pemilik rumah di Kotagede, 19,7% merupakan pedagang beserta pengrajin kaya dan 63,1 % adalah pengrajin dan pedagang eceran. Sementara itu *abdi dalem* bersama-sama pegawai pemerintah hanya berjumlah 8,5%, sedangkan sisa 8,7% terdiri dari para buruh dan petani.²¹⁸

²¹⁷ Ibid., hlm.106

²¹⁸ Komposisi pekerjaan itu sekaligus dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan adanya ciri perkotaan yang sangat jelas pada Kotagede dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang masih dikategorikan sebagai pedesaan pada awal abad ke-20.

Menurut catatan H.J. van Mook, Kotagede pada awal abad ke-20 tidak lagi menunjukkan dirinya sebagai sebuah ibukota dari salah satu bekas ibukota Kerajaan Mataram Islam abad ke-17, kecuali nama yang melekat pada wilayah ini, masjid, makam, dan legenda yang terus hidup di dalam masyarakatnya.

Banyak pedagang, beberapa dari mereka adalah perempuan dari Kotagede melakukan perjalanan bisnis secara rutin ke Surakarta, Magelang, Semarang, Surabaya dan bahkan Jakarta untuk menjual produk mereka; dan kemudian membawa pulang berbagai barang impor. Meski demikian, sebagian besar orang kaya Kotagede itu tetap mempertahankan hubungan khusus mereka secara ekonomis dengan keraton, yang tetap menjadi salah satu konsumen reguler bagi berbagai jenis produk yang dihasilkan. Seperti dikatakan oleh Selo Soemardjan dan Mitsuo Nakamura, pedagang dan pemilik perusahaan kerajinan di Kotagede memiliki kontak dagang yang rutin dengan para istri pejabat keraton Kasultanan Yogyakarta.

Keadaan itu mengakibatkan sektor non-pertanian di Kotagede berkembang sangat cepat pada awal abad ke-20, Kotagede berkembang menjadi pusat industri yang dikuasai oleh para *entrepreneur* bumiputera. Dalam bahasa lain, seperti dikatakan oleh Mitsuo Nakamura, “Kotagede sedang berubah dari kota para pengrajin kerajaan menjadi pusat industri dan perdagangan bumiputera untuk mendukung para petani di daerah sekitarnya”.²¹⁹

Walaupun tidak ada data kuantitatif yang memadai, secara pasti dapat dikatakan bahwa jumlah buruh yang dipekerjakan di Kotagede bertambah dalam jumlah yang besar sejak dekade pertama abad ke-20. Para saudagar dan pemilik perusahaan kerajinan mempekerjakan ribuan orang, baik penduduk lokal maupun pekerja yang datang dari luar Kotagede. Paling tidak terdapat juragan yang masing-masing mempekerjakan 50 sampai 100 pekerja, akan tetapi sebagian besar hanya memiliki sepuluh sampai dua puluh pekerja.

Dalam kondisi seperti itu, para pekerja dan pemilik modal memiliki peran yang penting dalam transformasi perbedaan ideologi di Kotagede sejak tahun 1920-an. Masyarakat tidak lagi terbagi menjadi santri dan abangan, tetapi juga antara Islam dan Komunisme. Namun pembagian itu tidak didasarkan pada perbedaan kelas sosial, antara pekerja dan pemilik modal. Melainkan lebih bersifat politis ideologis yang melintasi batas kelas. Selain itu, biarpun secara tradisional dikenal sebagai pusat kegiatan Muhammadiyah, yang memiliki kecenderungan berlawanan dengan Komunisme, kelompok Komunis ternyata juga mampu menggalang

²¹⁹ Lebih lengkap bisa dibaca pada buku Nakamura yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press dengan judul *Matahari Bersinar di antara dua Pohon Beringin*.

dukungan yang kuat dari penduduk lokal di Kotagede. Akibatnya, sebuah konfrontasi terbuka terjadi antara kedua kelompok pada tahun 1924.

Kecenderungan pada akhir abad ke-19 atau awal abad 20 banyak kemunduran kelompok dagang terjadi di Indonesia, tidak terkecuali Kotagede. Hal ini ternyata sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik dan ekonomi nasional. Selain itu juga dunia pendidikan yang mengakibatkan pola baru dalam pergeseran kelas sosial yang cukup kuat. Ada mobilitas sosial yang tidak wajar sehingga muncul fenomena Orang Kaya Baru (OKB) dan Orang Miskin Baru (OMB). Di Kotagede misalnya, banyak industri pengrajin perak mulai berjatuh semenjak tahun 1998, Bom Bali dan gempa. Ada juga beberapa perusahaan ditutup karena tidak ada yang melanjutkan, dan sebagian akibat kekurangan modal.

Seperti penduduk di wilayah lain di Yogyakarta, disini ekonomi penduduk Kotagede juga tidak luput dari pengaruh resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada saat itu banyak pedagang dan pengrajin Kotagede mengalami kebangkrutan, karena sebagian besar pembeli potensial produk mereka juga mengalami krisis yang sama. Akan tetapi hal itu tidak mengubah Kotagede secara besar-besaran. Walaupun kemakmuran sebagian besar penduduk kota ini mengalami penurunan, tidak terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang struktural.

Bukti yang ada menunjukkan tidak terjadi keresahan dan kekacauan sosial di kota ini pada saat itu. Hal ini oleh beberapa sumber disebabkan oleh keberadaan Kotagede sebagai kota genealogis (selain bisnis).²²⁰ Bahkan sebuah penelitian awal menunjukkan bahwa ekonomi Kotagede didukung oleh berkembangnya bisnis baru yang berkaitan dengan daur ulang alat-alat yang terbuat dari perak, tembaga, kuningan, dan perunggu segera setelah masa tersulit dari krisis telah dilewati.

Selain aktivitas ekonomi yang sangat kuat, pada periode ini juga ditandai dengan kegiatan politik dan afiliasi kelompok aliran dalam masyarakat di Kotagede dan Nusantara yang sedang mekar gerakan-gerakan menentang penjajahan.

Menurut kesaksian Nakamura, lahirnya Muhammadiyah cabang Kotagede berawal dari berdirinya organisasi lokal pada tahun 1910-an. Itulah *Syarikatul Mubtadi*, yang diprakarsai oleh Kyai Amir dan Kyai Masyhudi; keduanya kakak ipar dan paman tokoh Abdul

²²⁰ Sesama penduduk baik kaya atau miskin, majikan dan buruh masih mempunyai pertalian saudara atau kerabat. Hal ini pula yang diduga aktivitas partai komunis Indonesia di Kotagede hanya sebatas kesenian rakyat yang berkembang. (Wawancara dengan Charis Zubair, 27 November 2007) dan juga dikuatkan oleh sumber bacaan lainnya.

Kahar Mudzakkir. *Syarikatul Mubtadi* artinya perkumpulan utama atau perkumpulan dasar, yang bertujuan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam dengan pendidikan dasar-dasar agama, mengaji Al Quran dan Hadits dan kalangan bapak- bapak dan ibu-ibu di kampung.²²¹

Peranan borjuasi dalam masyarakat menjadi satu hal yang tak pernah absen. Dalam masyarakat yang tradisional, borjuasi sangat kuat posisinya seperti elite yang berada di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Semakin modern sebuah komunitas atau daerah elite itu semakin tersebar dan cenderung terbagi otoritasnya. Misalnya, elite dalam masyarakat industrialis terdiri dari pengusaha, pemodal, pedagang kaya yang sukses, dan juga terdapat elite agama sebagai sisi lain kehidupan yang tak terpisahkan dalam masyarakat.

Kotagede terdiri dari kelompok masyarakat kota yang heterogen maka sangat wajar apabila kekuatan-kekuatan itu tidak hanya dimiliki oleh satu keluarga. Meski demikian kita dapat melihat beberapa keluarga saja yang maan secara ekonomi dan politik.

Sudah sejak saat pengamatan van Bevervoode (1902), kemakmuran umum Kotagede dan beberapa contoh pengumpulan kekayaan yang banyak sekali di kalangan beberapa pedagang di sarana tercatat dengan baik. Dalam dua dasawarsa berikutnya, beberapa ontok kecil ini tampaknya tumbuh menjadi gejala sosial yang sangat mantap. Sejarah ekonomi Kotagede antara tahun 1902 dan tahun 1922 tampaknya adalah bahwa pengembangan dan penggolongan terus menerus sebagaimana nampak dan hasil survei yang diadakan pada tahun 1922 dan dilaporkan oleh van Mook (1958). Survei itu menggambarkan komposisi pekerjaan dari seluruh jumlah 1073 pemilik tanah bangunan di empat pemerintahan desa yang baru saja dibentuk (Prenggan, Basen, Sayangan Alun-Alun, Mutihan) sebagai berikut:

Tabel III.1 Pekerjaan Para Pemilik Tanah Bangunan di Kotagede

²²¹ Tahun 1918, lanjut Nakamura, Syarikatul Mubtadi bergabung dengan Muhammadiyah menjadi cabang Muhammadiyah Kotagede dan berkembang pesat sejak saat itu. Muhammadiyah kemudian memprakarsai banyak perubahan di dalam kepercayaan dan praktik keagamaan di kota itu. Bagi banyak orang Kotagede, makna Islam telah mengalami perubahan yang besar dan mendasar dibanding makna Islam peninggalan nenek moyang mereka sebelumnya - berkat Muhammadiyah. Sampai pertengahan 1920-an, menurut buku *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, Muhammadiyah banyak mendapat dukungan dari kalangan menengah Kotagede. Sebaliknya, pengaruh Komunisme didukung oleh kalangan bawah, ialah para pedagang dan pengrajin kecil atau tukang yang bekerja untuk majikan; umumnya diorganisasikan di cabang lokal *Sarekat Rakyat*. Kelahiran agama yang diikuti dengan kemunculan berbagai lembaga keagamaan dan perkumpulan tak lain dan tak bukan adalah melahirkan elite-elite baru yang ada di tengah masyarakat. Kedudukan sosial keagamaan juga sangat dipengaruhi status sosial dan ekonomi-politik. Elite ekonomi yang paling mudah untuk menguasai lembaga agama dan politik dan itu berarti ekspansi pemodal merebut posisi kelas borjuasi di luar lembaga ekonomi.

Keterangan	N	%
Abdi Dalem dan Pegawai Pemerintah	91	8,5
Pedagang Besar dan Juragan Pengrajin	211	19,7
Pengrajin dan Pedagang Eceran	678	63,1
Pekerjaan Harian Petani	93	8,7
Jumlah	1.073	100,0

Sumber : Van Mook (1958 : 289)

Statistik van Mook berisi dua informasi yang cukup penting. *Pertama*, terlihat bahwa jumlah pemilik tanah bangunan di dalam kategori kedua “pedagang besar dan pengrajin” adalah sangat besar: 211 orang atau 19,7% dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya menurut table asli van Mook (1958 : 289, 1926 a, 363) dari 211 orang ini, 120 orang atau 11,2% dari jumlah keseluruhan adalah pedagang besar tekstil, batik, dan barang-barang ada hubungannya dengan itu, sedangkan sisanya, 91 orang atau 8,5% dari jumlah keseluruhan, adalah juragan pengrajin termasuk pengusaha²²² dalam pertukangan emas, perak, dan permata. Van Mook mengkategorikan seluruh kelompok ini sebagai “penduduk yang kaya”.²²³

Kedua, lebih dari dua dasawarsa, produksi, dan perdagangan batik dan barang-barang yang ada hubungannya dengan itu terus menduduki posisi utama di dalam ekonomi Kotagede. Para pemilik tanah bangunanyang mengurus “pembuatan batik, pencelupan kain, dan kain printing (pekerjaan cap)”, digolongkan dalam kategori ketiga yaitu “pengrajin dan pedagang eceran” di dalam tabel di atas sebenarnya merupakan satu kelompok pekerjaan paling besar dengan 220 orang atau 20,5% dari jumlah keseluruhan pemilik tanah bangunan.²²⁴ Sebagaimana disebutkan di atas, jumlah pedagang besar di dalam batik dan barang-barang yang ada hubungannya dengan itu telah banyak (120 orang atau 11,2%). Diambil sama-sama, hampir sepertiga (31,7%) dari jumlah keseluruhan pemilik tanah bangunan pada tahun 1922 terlibat di dalam perdagangan atau produksi kain, batik, atau barang-barang yang ada hubungannya dengan itu. Periode itu tentu saja pantas dengan sebutan setempat, jaman batik atau periode batik. Seorang tua kotagede melihat ke belakang pada periode itu dan menyatakan:

"..setiap orang yang mempunyai modal langsung terjun ke dalam pembatikan atau penjualan batik. Tempat-tempat pengerjaan batik berkembang dimana-mana.

²²² Juragan dalam bahasa orang setempat.

²²³ Ibid.,

²²⁴ Ibid.,

Bahkan orang yang tidak mempunyai uang tidak mau ketinggalan. Mereka dengan mudah bisa memperoleh pekerjaan sebagai buruh. Seringkali, mereka tidak mempunyai uang tetapi kuat, rajin, dan bisa dipercaya memperoleh pinjaman kain batik dari pedagang besar kemudian menjajakannya dari pasar ke pasar dari desa ke desa. Beberapa diantara mereka segera menjadi cukup kaya untuk mendirikan usahanya mandiri.”

Jaringan perdagangan batik, tekstil dan sejumlah hasil kerajinan tangan yang berpusat di sekitar Kotagede berkembang luas jauh di luar Jawa Tengah, ke barat sampai Batavia (Jakarta), Cirebon dan Purwokerto, ke utara Pekalongan dan Semarang, dan ke timur Surakarta, Madiun, Kediri dan Surabaya (van Mook 1958 : 288) De Kat Angelino mencatat adanya orang-orang Kotagede di dalam perdagangan batik di Tulungagung (kota di dataran Kediri) sebagai berikut: orang-orang pribumi yang mengusahakan 25 tempat pengerjaan batik dari jumlah keseluruhan 38 yang terdapat di kota itu Tulung Agung dalam tahun 1930 sebagian besar “Wong Mataram” yang berasal dari Kotagede dan Kota Yogyakarta yang datang serta menetap di sana sekitar 25 tahun yang lalu.²²⁵

Ini adalah juga saat ketika empat atau lima pedagang paling kaya di Kotagede diberi nama julukan raja dagang atau ratu dagang oleh orang-orang setempat, Seorang ibu pedagang yang menguasai sebagian besar suplai hasil panen sekunder dari dataran Kediri ke daerah Yogyakarta adalah seorang Ratu Dagang tersebut, Seorang pedagang besar tekstil yang diberi hak monopoli mengimpor bahan untuk pembatikan di daerah Yogyakarta adalah seorang Raja Dagang. Lebih jauh dari hanya sekedar kategori statistik, mereka yang oleh van Mook disebut pedagang-pedagang lebih kaya, membentuk kelompok *in group* yang rapat yang dihubungkan oleh kekerabatan, perkawinan dan partner dagang,

Kotagede sekarang terkenal karena adanya raja dagang di samping *abdi dalem* juru kunci di Makam Raja, dari segi kekayaan, *abdi dalem* juru kunci tidak lagi bisa menyaingi raja dagang itu. Dengan demikian, sebagaimana diamati oleh Van Mook, di Kotagede pada awal abad kedua puluh, “para pegawai pemerintah disana mempunyai pengaruh yang lebih sedikit daripada di tempat mempunyai pengaruh yang lebih sedikit daripada di tempat lain, khususnya apabila mereka tidak kaya. Seringkali sulit dan dalam soal keuangan gawat bagi mereka untuk mengimbang penduduk Kotagede yang kaya itu.”²²⁶ Beberapa pedagang paling kaya di

²²⁵ Ibid., (1930: III, 56-57).

²²⁶ Op.cit. hlm. 287

Kotagede bahkan menjadi pemberi kredit keraton Yogyakarta dan Surakarta atau Rotchshild (bankir kecil) Jawa.”²²⁷

Keunggulan ekonomi pedagang kaya di bertalian erat dengan naiknya status sosial mereka. Walaupun mereka tidak sepenuhnya masuk ke dalam pangkat bangsawan, namun pedagang kaya Kotagede sering dihitung sama di dalam lingkungan sosial bangsawan dan di kalangan pejabat keraton yang berpangkat tinggi. Setidaknya ada satu contoh seorang raja dagang yang diberi puteri dan keraton Yogyakarta sebagai istri bagi anak laki-laknya, sebagaimana akan kita lihat di bawah. Seloemardjan menemukan bahwa sering ada kontak untuk transaksi dagang emas, perak dan permata antara para pedagang kaya Kotagede dan para istri pejabat keraton Yogyakarta yang sebaliknya jarang bercampur dengan orang-orang biasa.²²⁸

Ada beberapa orang di kalangan pedagang kaya yang berusaha mengubah kekayaannya menjadi kekuasaan dan status dalam artian tradisional dengan membeli gelar bangsawan dan jabatan kehormatan di dalam pemerintahan keraton. Meskipun demikian, adalah suatu ironi sejarah bahwa di kala kekayaan memungkinkan seseorang yang berasal dari rakyat biasa memperoleh jabatan di dalam hirarki tradisional masyarakat Yogyakarta, pada saat itu juga struktur tradisional telah melemah dari dalam.

Seorang informan menyatakan pengalaman sebagai berikut:

“Saya mempunyai seorang paman yang ingin menjadi prajurit pengawal istana. Dahulu jabatan prajurit kerajaan adalah turun-temurun serta diwariskan dari ayah ke anak, tetapi lama kelamaan ada kemungkinan untuk membeli jabatan itu. Kamu bisa membayar uang dan menjadi abdi dalem. Itulah cara bagaimana paman tadi menjadi abdi dalem. Saya mempunyai seorang paman yang lain, Namanya Bahuwinangun, ayah Mr. Kasmal (seorang politisi Islam di Yogyakarta yang terkenal). Pak Bahuwinangun adalah seorang abdi dalem di keraton Yogyakarta dan dia sangat bahagia dihormati orang karena dekatnya dia dengan raja. Saya bisa menjadi seorang abdi dalem dengan cara yang sama jika saya ingin, tetapi saya benar-benar tidak ingin. Saya merasa bahwa hal itu hanya gengsi kosong.”

²²⁷ Op.cit. hlm. 288

²²⁸ Seloemardjan, 1962, op.cit, hlm. 119

Mayoritas pedagang kaya tetap agak acuh tak acuh terhadap prestise yang diperoleh dari keraton. Lebih positif lagi, keberhasilan dalam berdagang dan naiknya status sosial memberikan sumbangan perkembangan sebagian besar *Wong Mataram*²²⁹ yang berasal dari Kotagede dan Kota Yogyakarta yang datang serta menetap di sana sekitar 25 tahun yang lalu.²³⁰

Rasa percaya pada diri sendiri dan tidak tertarik oleh cara hidup yang berlebih-lebihan di dalam keraton nampaknya telah menciptakan suatu kondisi umum dimana penyiaran paham pembaharuan Islam akan memperoleh simpatik di kalangan kelompok kelas menengah Kotagede.

Dalam hal ini kita akan melihat faktor yang menopang lahiran borjuasi dalam masyarakat Kotagede. Sebagai masyarakat Kota tentu banyak hal yang menyebabkan orang bisa naik kelas, bisa menggantikan posisi elit dalam kelas menengah (borjuasi). Akan tetapi dalam hal ini kita akan melihat faktor utama yaitu Pertama, Faktor Genealogi. Kedua, Ilmu pengetahuan agama. Ketiga, Faktor kerja keras dan keuletan. Selanjutnya pelacakan ketiga faktor utama ini akan dibahas lebih detail.

Pertama, Faktor genealogis, Dalam masyarakat feodal harta kekayaan dan elit hanya berputar di satu keluarga saja. Akan tetapi di Kotagede layaknya kita berada dalam masyarakat kota yang heterogen maka sangat wajar apabila kekuatan-kekuatan itu tidak hanya dimiliki oleh satu keluarga. Beberapa keluarga kaya kemudian membentuk suatu identitas dengan memperkuat ekonomi keluarga dan posisi mereka di tengah masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya bani yang bermunculan. Sehingga dapat dikategorikan beberapa elit-elit baru yang ada di Kotagede. Pertama, adalah elit pengusaha- pedagang, Kedua, elit politik. Ketiga, elit agama, Keempat, elit birokrasi. Kelima, elit intelektual.

Kedua, faktor penguasaan atas monopoli pengetahuan agama. Banyak terdapat elit di Kotagede mempunyai lebih dari satu monopoli yaitu selain monopoli perdagangan juga terapat semacam otoritas agama yang kuat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tokoh agama di abad 16-17 rata-rata merupakan pedagang yang kaya dan dengan kekayaan ini pula gerakan keagamaan bermunculan seiringan dengan ekemajuan perdagangan. Elit yang mempunyai kekuatan ekonomi dan agama adalah elit yang paling kuat di Kotagede. Elit yang apabila ditopang oleh basis ekonomi yang mapan, usaha yang besar atau menengah maka

²²⁹ Artinya orang Mataram,

²³⁰ Ibid., 1930: III, hlm.56-57

sesungguhnya merekalah kekuatan borjuasi multi sektor yang diharapkan mampu membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan lebih mensejahterakan. Multi sektor ini diartikan bahwa elit politik bisa saja menjadi atau seorang pedagang, pengusaha, majikan atau seorang intelektual.

Untuk elit agama mempunyai kaitan yang erat dengan keberadaan lembaga atau organisasi yang memang dari sinilah akan melahirkan banyak elit baru dengan kekuatan pengetahuan dan keahlian. Elit agama dalam konteks politik lokal sangat dekat dengan kehidupan politik karena elit agama inilah yang paling kuat tarikannya dengan massa. Banyak orang berafiliasi ke pilihan politik tertentu akibat dari tokoh agama yang memberikan sosialisasi.

Kyai atau ulama sebagai pemimpin komunitas beragama yang justru elit agama ini terkadang sangat berpengaruh dan menentukan terlebih elit agama yang menjadi politisi. Elit agama bisa menjadi kekuatan borjuasi yang sangat kuat dalam beberapa hal termasuk menafsirkan agama untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

Faktor ketiga, adalah kerja keras dan jaringan. Baik keluarga Haji atau wong Kalang keduanya mempraktekkan pola kerja keras. Mungkin hanya terdapat beberapa perbedaan orientasi hidup yang sangat mencolok.²³¹ Sementara jaringan telah lama menjadi hal yang paling penting. Masa VOC koneksi dan jejaring adalah inti dari kesuksesan perdagangan. Bagi orang pribumi berdagang adalah menyelamatkan nyawa dengan menyerahkan harta bagi penguasa kolonial seperti VOC, berdagang adalah menyodorkan satu pilihan pada pribumi lokal terhadap komoditas yang mereka miliki²³² pribumi sendiri juga mendirikan serikat dagang (SDI) karena hanya dengan demikian pedagang pribumi meneruskan kehidupan.

Wong kalang yang menjadi borjuis dengan kekayaan yang melimpah ruah dengan gaya hidup yang borjuis dengan simbol keeroapan dengan membangun kerajaan rumah mewah dengan gaya Indies. Sebagai kelompok abangan yang kaya dengan kerja keras dan kegigihanya menjadi kelas borjuis Belanda.²³³ Mereka bangga dengan simbol dan ritual yang membedakan

²³¹ Santri kaya berfikir untuk pengembangan agama dan pendidikan sementara abangan membangun simbol kemegahan bangunan.

²³² Melakukan studi terhadap ekonom kolonial artinya membahas sarikat dagang yang melakukan monopoli atas semua komoditas yang mungkin untuk diperdagangkan. Di Indonesia, mempelajari sejarah ekonomi kolonial artinya mengingat kebesaran VOC. Baca lebih lanjut novel E.S. Ito, *Rahasia Meede, Misteri Harta Karun VOC*. (Bandung: Mizan, 2007) hlm. 33-37

²³³ Dari beberapa wawancara orang kalang yang kaya raya yang namanya Tembong dijuluki Borjuis Belanda. Menjadi agen Belanda untuk membuka Pegadaian Pra Agresi Militer Belanda tahun 1949

dengan kelompok kaya lainnya yang gemar membuang uang untuk membeli tanah, biaya naik haji ke Makkah, atau untuk menyekolahkan anak turunannya. Wong Kalang yang kaya akan puas dengan gayanya dan bermaksud mengabadikan kekayaannya dengan perkawinan endogami (sesama keluarga) yang dimaksudkan untuk mencegah agar harta tidak pindah tangan.

Selain kerja keras, jaringan adalah menjadi faktor yang cukup penting dalam pengembangan jaringan bisnis dan akumulasi kekayaan kedua kelompok tersebut. Kedua kelompok ini membangun jaringan dengan Belanda dan Keraton. Bahkan beberapa sumber mengatakan wong kalang banyak memberikan bantuan harta kepada keraton Yogyakarta atau Surakarta. Jaringan dagang ini apabila dianalisa lebih mendalam banyak dilakukan akibat faktor agama, para haji di berbagai daerah biasa melakukan sistem perdagangan dengan komoditas yang berbeda dan saling melengkapi daerah satu ke daerah lainnya. Orang-orang Kotagede terbiasa melakukan perdagangan sampai keluar Jawa, sebagian perempuan hanya berdagang sampai Jawa Tengah saja. Selain itu kelompok Kalang juga mengembangkan perdagangan sampai jauh bahkan konon ada cukup banyak emas batangan orang Kalang yang disimpan di luar negeri.

Bagi keluarga atau orang yang mampu menguasai bidang agama, pengetahuan dan perdagangan adalah pemenangnya untuk mencapai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi materialisme dan individualisme. Akan tetapi dalam perjalanannya tidak semua kemampuan dapat dicapai kalau dahulu keluarga Haji bisa mendapatkan semuanya akan tetapi bagi generasi berikutnya, generasi ke 3 dan seterusnya kesuksesan hanya diperoleh pada level pencapaian pendidikan barat dan menjadi kelompok menengah dengan basis intelektualitas atau pendidikan profesi.

3. Kegagalan Mengabadikan Kekayaan

Surutnya kelompok dagang dalam masyarakat tidak hanya terjadi di Kotagede yang berbasis Muhammadiyah saja, tapi di beberapa daerah seperti Weleri-Kendal, daerah Kudus, Pekajangan-Pekalongan di Jawa Tengah. Ini menjadi satu kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat yang semakin pragmatis tanpa diikuti oleh etos kerja yang tinggi. Kemunduran aktivitas perdagangan yang besar jelas mempunyai dampak yang serius juga bagi kelangsungan aktivitas pergerakan sosial lainnya. Hajriyanto Tohari (2006) melihat dampak itu terjadi pada pergerakan Muhammadiyah di berbagai daerah termasuk di Kotagede.

Geertz mengungkapkan bahwa kegagalan ini disebabkan oleh kegagalan mengabadikan kekayaan dikarenakan oleh karakter pedagang yang berorientasi paguyuban, kekeluargaan dan tidak membangun basis ekonomi yang mapan seperti halnya di Eropa. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan untuk haji saja dan dari sekian keluarga haji kaya tidak ada yang mempunyai perusahaan.²³⁴ Namun ada problem lain bagi kalangan pedagang Kalang yang mempunyai perusahaan akan tetapi sangat rentan dengan situasi sosial politik karena jaringan yang sangat lemah dan sikapnya yang apolitik.

Kemunduran pedagang terjadi di berbagai kubu baik abangan maupun santri dan kubu nasionalis. Koperasi semakin suram dan tidak diminati penduduk Kotagede.

Sebagai satu kesimpulan yang cukup penting adalah bahwa kelompok santri seperti yang tergabung dalam Muhammadiyah memang mempunyai peran cukup strategis selain sebagai pedagang atau borjuasi yaitu untuk pembaharuan pemikiran dan juga peran ekonomi dengan pirit kapitalisme religiusnya kemudian memperkenalkan sistem perdagangan yang modern sebagaimana pernah diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2002). Kuntowijoyo mengutip Geerts dari bukunya *Pedlers and Princess* (1963), mengatakan bahwa:

“..di Mudjokuto orang-orang Islam reformis (Muhammadiyah) dan simpatisan reformislah yang berperan dalam perubahan ekonomi, dari ekonomi pasar menjadi ekonomi firma (toko, perusahaan). Dalam sebuah interview respondennya mengatakan bahwa dalam hidup ini yang perlu adalah bekerja dan beribadah. Mereka perlu berterima kasih kepada tuhan atas keberuntungan. Baik atau buruk ternyata rasa terima kasih inilah yang membedakan etos kerja mereka dengan etika yang lain, yaitu etos agama.”²³⁵

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Castles (1967) di beberapa perusahaan rokok kretek di Kudus menemukan, bahwa orang-orang Islam di sana kalah dalam usaha dengan orang Tionghoa karena mereka tidak mau berspekulasi dalam dunia perdagangannya. Pengusaha Muhammadiyah menurut Castle di manapun pasti tidak terlepas dari gejala umum tersebut.²³⁶

²³⁴ Clifford Geertz, *Penjajah dan Raja*. Perubahan Sosial dan Modernisasi di Dua Kota (Jakarta: PT. Gramedia, 1977).

²³⁵ Kuntowijoyo, dalam pengantar buku Alwi Shihab, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Misi Kristen di Indonesia* (Bandung, Mizan, 1997), hlm. xxi

²³⁶ Ibid., hlm.xxi

Akibat kemunduran itu, kini Muhammadiyah di Kotagede dan pada umumnya didominasi oleh kelompok pegawai, intelektual sebagai akibat dari sistem pendidikan Barat. Semakin sedikit pedagang besar di tubuh organisasi. Implikasi serius bagi organisasi adalah semakin sulit melakukan terobosan baru sehingga mengalami involusi dalam pergerakan. *Kedua*, kesulitan dalam pembiayaan sebagai akibat back up pedagang yang makin melemah sehingga membutuhkan funding dalam setiap kegiatan artinya tidak mandiri. *Ketiga*, terjadi birokratisasi yang kompleks dalam tubuh organisasi sehingga semakin lamban dalam bergerak dan terseok-seok dalam mengawal perubahan sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara luas.²³⁷

C. Industrialisasi Modern

1. Revolusi Industri di Kotagede

Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dan mengapa revolusi Industri itu terjadi di Kotagede? Ada dua jawaban yang disampaikan masyarakat tentang latar belakang kemunculan industri perak, batik, konveksi di Kotagede. *Pertama*, keberadaan pengrajin perak di Kotagede juga tak luput dari peran *Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* yang masuk Yogyakarta sekitar abad ke-16.²³⁸ Waktu itu, banyak pedagang VOC yang memesan alat-alat rumah tangga dari emas, perak, tembaga, dan kuningan ke penduduk setempat. *Kedua*, keberadaan pengrajin perak muncul seiring dengan lahirnya Mataram.²³⁹ Dalam hal ini kehadiran sosok orang Kalang menjadi penting dalam perintisan industri perak di Kotagede sebagaimana yang disinggung sebuah website berikut.

*“...mereka diduga merupakan penduduk asli Kotagede dan terkenal sebagai seniman. Mereka membuat ukiran kayu dan emas. Mereka berasal dari wilayah kerajaan Mataram Hindu di Jawa Timur dan Bali, yang diminta negara Mataram Islam untuk memenuhi kebutuhan akan seni.”*²⁴⁰

²³⁷ Hajriyanto Tohani, *Robohnya Golongan Pedagang*. Suara Muhammadiyah edisi bulan September 2007.

²³⁸ Wawancara dengan Bapak Sutolo, Ketua II Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y) tanggal 30 Agustus 2007

²³⁹ Wawancara dengan Rifai, pengusaha perak

²⁴⁰ Lihat di <http://www.smilejogja.com/serba-serbi/wisata-jogja/kotagede/>

Dari sinilah kerajinan ukir emas, perak dan kulit muncul dan berkembang pesat- hingga sekarang. Kaum Kalang mampu memberikan kontribusi atas perubahan sosial yang terjadi di Kota Kotagede.²⁴¹

2. Buruh yang Tertindas

Buruh adalah representasi dari kaum marjinal yang sering mengalami penindasan secara ekonomi (miskin, marginal) dan secara politik lemah (*powerlessness*) oleh karena itu buruh ini menempati posisi kelas yang rendah, dengan kehidupan yang *rekoso*.²⁴²

Jumlah buruh di Kotagede pada awal abad ke-20 sangat besar, mencapai ribuan. Sebagai pekerja di industri perak yang pada masa itu, buruh naik daun dengan maraknya permintaan dan naiknya daya beli masyarakat. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa pada tahun 1930-an banyak order atau permintaan dari Temanggung ramai-ramai memesan kerajinan emas.²⁴³

Dalam sejarah, buruh adalah komunitas yang paling sulit naik kelas atau status sosial. Hanya buruh yang beruntung dengan keuletan, ketekunan, tahan banting dan kesungguhan akan *survive* dan mendapatkan kejayaan; ini pun jumlahnya sangat-sangat sedikit bila dibandingkan dengan seluruh populasi. Kondisi yang buruk ini pula yang mengakibatkan buruh terlibat dalam kancah politik baik PKI maupun Masyumi di Kota yang merupakan kontestan yang paling dominan paling berpengaruh dalam sejarah.²⁴⁴

Koperasi dikenalkan dari tradisi Barat yang dimulai dari Inggris untuk memberikan perlindungan kesejahteraan kepada buruh industri pasca Revolusi Industri. Koperasi ini berjaya dan sangat membantu rakyat miskin. Ada pun kajian mengenai *success story* koperasi Indonesia mengalami paradoks. Di antaranya, koperasi hanya menjadi formalitas dari sistem demokrasi ekonomi yang diterapkan semenjak Orde Lama, Orde baru sampai kini. Hanya sedikit orang

²⁴¹ Perubahan sosial radikal itu ditandai dengan (1) dampak perubahan itu sangat luas (2) Perubahan struktur kelas sosial sosial dalam masyarakat seperti yang terjadi pada revolusi industri atau revolusi Prancis. Namun proses evolutif itu juga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat karakteristik perubahan dalam masyarakat.

²⁴² *Rekoso* dalam bahasa Indonesia artinya melarat, menderita, sengsara dan serba kesusahan dalam hidupnya seperti hasil kerja yang tidak cukup memenuhi kebutuhan primer.

²⁴³ Wawancara dengan Penjaga Koperasi Abdi Dalem Keraton Surakarta di kompleks Makam Mataram. Orang-orang Temanggung setelah panen biasa ramai-ramai belanja ke Yogyakarta termasuk Kotagede membeli emas dan perak berupa perabot dapur dan hiasan rumah.

²⁴⁴ Baca lebih lengkap, Mutiah Amini, *Buruh Perak dan Politik di Kotagede* tahun 1960-196, skripsi Fakultas Ilmu Budaya, tidak diterbitkan.

yang dapat mengakses lembaga yang disebut demokrasi *wong cilik* ini. Artinya, koperasi menjauh dari visi kerakyatan dan mendekat kepada sang kapital.

Mohamad Hatta, yang dianggap penggagas koperasi Indonesia, berpendapat bahwa :²⁴⁵

"Koperasi adalah sistem yang memberi jalan kepada pembangunan swadaya dari bawah dengan partisipasi yang luas. Persoalannya bagi kita sekarang, apakah pilihan itu tepat bagi dunia yang sedang berubah. Dalam kenyataannya, sistem ekonomi Indonesia terdiri dari tiga sektor, yaitu swasta, negara, dan koperasi, Tetapi, di antara ketiga sektor itu, Koperasi ternyata merupakan sektor yang paling tertinggal dan terlemah posisinya, Pangsa koperasi dari segala aspeknya tidak lebih dari 10%. Hanya saja, koperasi tidak bisa diabaikan peranannya dalam pencapaian swasembada pangan."

Tentu saja ada beberapa kisah sukses, tetapi terbatas. Kita masih bisa menyebut keberadaan GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia), Bank Bukopin, Koperasi 'Jasa' Pekalongan, Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya, Koperasi 'Jembatan Kesejahteraan' Jakarta, Badan Koordinasi Koperasi Kredit (BK3) Indonesia (semacam *credit union*), beberapa ribu KUD (koperasi unit desa), dan Koperasi BMT (bait al maal wa al tamwil), lembaga kredit mikro yang paling sukses.

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia masih tetap marjinal dan masih "pelengkap penderita" terhadap perekonomian nasional. Itulah sebabnya, sejumlah ekonom mengusulkan dihapuskannya "asas kekeluargaan" sebagai asas perekonomian nasional, dan digantikan dengan sistem "pasar berkeadilan" atau "pasar sosial" walaupun intinya adalah kekeluargaan juga.²⁴⁶

²⁴⁵ Dalam persepsi Bung Hatta, koperasi adalah lembaga perekonomian modern yang berkembang di Eropa Barat. Pada 1926, ia melihat koperasi sebagai jalan tengah kapitalisme dan sosialisme. Tujuan koperasi adalah mengendalikan pasar agar bisa memberikan manfaat bagi orang kecil, seperti buruh, tani, pedagang, dan pengusaha kecil.

²⁴⁶ Agar gerakan koperasi kuat ada beberapa perubahan strategi. Pertama, koperasi harus lebih bersandar pada pasar dengan meningkatkan efisiensi, produk. Kedua, koperasi tidak boleh bergantung pemerintah. Koperasi harus mengandalkan kemampuan menghimpun dana sendiri dari masyarakat, terutama anggotanya. Kemampuan ini sebenarnya sudah ditunjukkan, misainya oleh koperasi BMT. Koperasi harus bisa mengembangkan lembaga keuangan mikro, misalnya lewat koperasi simpan pinjam. Ketiga, koperasi harus mengikuti arus globalisasi, misalnya bermitra dengan koperasi luar negeri atau memasarkan produk anggota-anggotanya ke pasar global.

Sikap simpatik itu antara lain ditunjukkan dengan sambutan terhadap timbulnya gerakan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1908. Sebelumnya, pejabat kolonial Belanda juga telah menunjukkan simpatinya dan membantu timbulnya bank swadaya yang dipelopori oleh Patih Purwokerto, Tirtoadisuryo. Perhatian yang lebih komprehensif dari pemerintah kolonial Hindia Belanda timbul setelah Boeke ditempatkan di kantor perekonomian. Ia mempelajari UU koperasi yang sesuai untuk masyarakat dan budaya Indonesia. Ia sendiri, berdasarkan teori dualisme sosial-ekonomi antara sistem kapitalis dan sistem tradisional, berpendapat bahwa lembaga yang cocok untuk diterapkan pada perekonomian tradisional adalah koperasi. Dari sinilah agaknya asal-usul gagasan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang ditulis oleh Bung Hatta, bahwa “badan usaha bersama yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi”.²⁴⁷

Asas kekeluargaan menurut keterangan Hatta, berasal dari Taman Siswa, yang menunjukkan hubungan guru-murid dan bukannya majikan-buruh dalam sistem kapitalis. Asas kekeluargaan itu dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam lembaga “gotong-royong”. Dalam gotong-royong itu, nilai kolektif dan solidaritas sangat tebal. Tapi, Bung Hatta ingin mentransformasikan lembaga dan nilai tradisional ke dalam lembaga ekonomi modern yang bernama koperasi.

Dalam koperasi tersebut, di samping asas kolektivisme dan solidaritas, terdapat pula nilai individualitas yang lebih rasional. Mengacu kepada teori sosiologi modern, lembaga gotong-royong bekerja berdasarkan nilai solidaritas organik, sedangkan dalam koperasi berlaku nilai solidaritas fungsional.

Di Kotagede, koperasi hanya diakses oleh pemilik modal dan bukan buruh kerajinan perak yang sekarat yang mendapat kucuran dana untuk mengembangkan usaha atau pekerjaannya. Dengan demikian eksploitasi buruh perak menjadi tidak terelakkan. Banyak buruh hidup dalam keadaan sangat miskin; dan tidak pernah ada upaya yang serius dari koperasi yang sangat tua ini. Terlepas dari kepemimpinan koperasi berasal dari kelompok abangan, komunis, atau santri, manfaat koperasi nyaris belum terasa dan kehidupan buruh makin melarat dengan keluarnya Undang-Undang yang mengharuskan PPN 10% untuk pembelian bahan baku perak (yang tidak di ekspor).²⁴⁸ Hanya pengusaha besar yang bebas pajak tersebut karena hanya

²⁴⁷ Dawam Rahardjo, *Ekonomi Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi*, Opini dalam Media Indonesia, Jum'at, 16 Agustus 2002

²⁴⁸ Beberapa sumber wawancara mengatakan demikian, juga pernah dimuat Brosur AMM yang diterbitkan pada 1 Syawal tahun 1427 H atau edisi bulan Oktober 2007

pengusaha dengan modal besar, jaringan kuat, dan dekat dengan pemerintah yang mampu mengeksport. Buruh hanya pekerja yang dibayar murah setiap harinya, meskipun yang dihasilkan sangatlah besar nilai lebihnya. Keringat itu dibayar dengan kepasrahan kepada nasib,

Di awal Kemerdekaan, Kotagede merupakan bagian dari kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul secara teritorial. Akan tetapi ada perlakuan khusus sebagai kawasan wisata yang dikeramatkan. Karena itu status Kotagede tetap menjadi bagian dari Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta-Solo. Sehingga secara administrasi tidak terjadi sengketa hak milik. Sementara itu kejayaan Kotagede sebagai pusat kerajinan perak dan perniagaan cenderung surut. Pada dekade belakangan perhatian masyarakat setempat beralih mengandalkan keterampilan dalam industri kerajinan menjadi mengejar gelar pendidikan.

Kotagede sebagai sentra kerajinan perak telah menjadi *brand image* tersendiri bagi setiap wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Kawasan yang terletak sekitar 10 kilometer tenggara dari Kota Yogyakarta itu menarik wisatawan, khususnya turis mancanegara, karena banyak perhiasan dan aksesoris perak yang ditawarkan di sana. Secara ekonomi, industri-industri yang dimiliki oleh pengusaha perak yang secara turun-temurun ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, baik yang datang dari daerah Yogyakarta maupun dari luar.

Beberapa penelitian dan juga temuan penulis menyimpulkan bahwa dominasi perekonomian orang-orang Kotagede adalah bisnis keluarga yang kemudian penulis sebut sebagai dinasti borjuis, Hal ini terlihat dari beberapa segmen barang perdagangan/produk yang dikomoditaskan antara lain: pertama, bisnis perak. kedua, bisnis swalayan: ketiga, bisnis konveksi, juga yang terakhir adalah bisnis toko kelontong. Berikut ada beberapa pemaparan dan analisisnya.

Pertama, tentang bisnis Perak. Perjalanan historis Kotagede sebagai sentra industri perak memang pernah mengalami masa kejayaan. Namun, saat ini kondisinya tengah terpuruk. Untuk mengembalikan masa kejayaan, sepertinya tidak mudah. Kontribusi dari semua pihak jelas dibutuhkan. Persoalannya, sampai saat ini belum ada langkah konkret untuk menyelamatkan sentra perak tersebut.

Namun, sejak krisis moneter dan maraknya peledakan bom di Indonesia, industri kerajinan perak kian meredup. Bahkan, saat ini ratusan pengrajin perak terpaksa gulung tikar. Dari sekitar 2,000 pengrajin, 30 persen diantaranya beralih ke profesi lain seperti kusir andong, usaha warung dan kuli bangunan.

Pengrajin yang masih bertahan tidak lagi mengandalkan perak sebagai bahan baku kerajinan. Sekitar 40 persen di antaranya memanfaatkan tembaga dan kuningan sebagai bahan baku alternatif. Keterpurukan kerajinan perak di Kotagede itu diperparah oleh semakin minimnya minat generasi muda menggeluti usaha itu. Mereka lebih memilih bekerja di sektor yang dinilai praktis dan menjanjikan secara ekonomi, misalnya bekerja sebagai buruh pabrik ataupun pegawai negeri.

Meski belum sepenuhnya stabil, bisnis kerajinan perak di Kotagede pasca gempa berangsur-angsur membaik. Kunjungan agen pariwisata yang mulai berdatangan selama musim liburan membuat usaha yang sudah digeluti masyarakat selama puluhan tahun tersebut jatuh menggeliat.²⁴⁹

Karena desakan ekonomi, para pegawai itu banyak yang beralih profesi menjadi tukang bangunan karena jasa ini sedang banyak dibutuhkan. Selain itu, karena kebutuhan hidup tidak mampu tercukupi dengan hanya menjadi pengrajin. Adapun pasar mancanegara memang tidak terlalu banyak terpengaruh oleh gempa, karena sejak awal pasar ini memang sulit bersaing dengan produk-produk perak dari negara lain yang harganya jauh lebih murah. Kini pasar internasional mengancam pasar dalam negeri bisnis kerajinan perak murah yang diimpor ke Indonesia. Perak murah dapat dijumpai di Bali atau kawasan wisata lainnya. Padahal problematika pengrajin perak adalah kesulitan modal akibat harga bahan baku yang mahal. Selain itu, penurunan (harga) penjualan perak diakibatkan oleh model desain produk yang cenderung monoton, padahal pasar menghendaki desain yang kontemporer. Harga produk kerajinan perak berkisar antara Rp 12.000-Rp 78,000.000.²⁵⁰ Bisnis kerajinan perak mulai benar-benar anjlok sejak pertengahan tahun 2003. Pada awal 1990-an, hasil penjualan sampai Rp 60 juta per bulan. Tetapi, pendapatan itu menurun ketika ada krisis tahun 1998. Setelah peledakan bom di Bali dan bom Marriott, Jakarta, praktis pendapatan sebulan hanya sekitar Rp 25 juta.²⁵¹

Jumiran, menjadi pengrajin sejak tahun 1970-an, mempekerjakan 30-an pengrajin dengan bahan baku 25 kilogram (kg) perak per bulan pada tahun 1990-an. Tetapi, sejak tahun 2000, dia hanya mempekerjakan 10 pengrajin dan membutuhkan satu kg perak sebulan. Kondisi

²⁴⁹ Lastri, staf pegawai Anzor Sivler menginformasikan bahwa pasca gempa 27 Mei 2006 yang lalu, walaupun penjualannya masih kecil, ia yakin akan terus naik seiring dengan banyaknya wisatawan ke Yogyakarta. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0607/17/jogja/26552.htm>

²⁵⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/1/jateng/865611.htm>

²⁵¹ Wawancara dengan Jumiran, Pemilik Toko Bima Silver Smith

ini dipicu oleh makin berkurangnya kunjungan wisatawan asing yang khawatir dengan situasi keamanan Indonesia. Akibatnya, omzet para pedagang dan pengrajin anjlok hingga 50%, melebihi penurunan penjualan pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka berharap pada Pemilu 2004 akan menghasilkan pemerintahan baru yang bisa menciptakan keamanan sehingga dapat menarik minat wisatawan asing untuk kembali mengunjungi negeri ini.

Selain itu ada faktor yang menjadi kemunduran kerajinan perak di Kotagede juga disebabkan belum berkembangnya desain kerajinan. Ekspor kerajinan perak di Harto Suharjo (HS) Silver, misalnya, turun 20 persen sejak tahun 2002.²⁵² Bagi pengusaha dan pedagang kaya bisa dengan mudah mengadakan promosi produknya ke berbagai instansi, seperti hotel dan tempat wisata untuk tujuan meningkatkan daya beli dari wisatawan lokal. Sementara bagi pengusaha kecil akan sangat sulit melakukan hal tersebut sehingga hanya mengandalkan promosi dari pelanggan ke pelanggan.

3. Kekalahan Borjuasi Lokal atas Pasar Global

Industri Perak dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, faktor *genealogi*. Banyak generasi muda keturunan pengusaha yang tidak berminat untuk melanjutkan usaha orang tuanya. Kalau pun ada sering tidak mempunyai kemampuan managerial bahkan kerap terjadi persoalan internal keluarga. Hal ini mengakibatkan banyak industri perak kecil-menengah, besar yang gulung tikar. Kedua, faktor sosial-politik nasional yaitu peristiwa PKI 1965, krisis moneter tahun 1998 dan Bom Bali yang berdampak luas dan memukul perekonomian di Kotagede terutama bagi

Ketiga, pasar global. Permintaan pasar internasional terhadap kerajinan perak sangatlah mempengaruhi perekonomian industri di Kotagede. Selain itu, pengrajin lokal sulit bersaing dengan pengusaha sejenis yang berada di pasaran nasional seperti di Bali dan Jakarta.

Dalam perkembangan ekonomi dunia akhir abad ke-19, terjadi banyak kemiskinan sehingga menimbulkan keprihatinan bagi kalangan liberal di negeri Belanda. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sendiri melaporkan bahwa pemodal Belanda juga merasa kalah bersaing dengan pengusaha golongan Cina, sementara perkembangan ekonomi kaum pribumi tertinggal jauh dibelakang, Dari situlah lahir politik etis pada 1904 dan sikap simpati kepada ekonomi rakyat atau ekonomi pribumi.

²⁵² Data ini perlu ditacak lebih jauh, jangan-jangan hanya upaya menarik simpati dari publik terutama untuk meredam kerusuhan sosial yang akan bergejolak di Kotagede akibat kesenjangan sosial yang tajam.

Masa kejayaan Kotagede sebagai sentra industri terjadi pada era 1970-1980. Pada saat krisis moneter melanda negeri ini pada tahun 1997-1998 sangat berdampak terhadap pengusaha perak di Kotagede terutama bagi pengrajin yang memang menjadi buruh majikan kaya/pengusaha besar. Selain itu juga dipengaruhi oleh peristiwa Bom Bali pada 11 Oktober 2002 yang menelan banyak korban jiwa warga asing. Bali merupakan pasar kerajinan perak yang penting bagi pengusaha Kotagede. Saat ini di Kotagede terdapat 58 pengrajin perak. Jumlah itu jauh merosot dari 2002 lalu yang jumlahnya 100 pengrajin. Saat ini banyak yang gulung tikar karena kesulitan modal.²⁵³

Kedua, Bisnis Swalayan. Dari keluarga Kotagede yang di masa lalu juga menguasai perdagangan muncul kerajaan dagang baru yang mewujud dalam bentuk swalayan antara lain WS swalayan yang membuka 7 cabang di beberapa penjuru Yogyakarta yang strategis menghadang pembeli. Kalau dirunut asal keluarga ini juga dari keturunan Haji Mukmin. Dan kedua adalah Maga Swalayan yang kelahirannya setelah WS dan berkembang dalam bisnis spesialisasi tertentu misalnya Maga computer dan pakaian.

Satu hal yang penting juga adalah bisnis keluarga Kalang yang masih terdapat di Kota Yogyakarta yaitu beberapa hotel termasuk hotel Mutiara, BPR, yang dikelola keluarga Kalang yang sudah semakin jarang di Yogyakarta dan tersebar hingga keluar negeri. Ada juga yang bisnis minyak tanah yang cukup besar.²⁵⁴

Ketiga, Bisnis beutiquess Terang Bulan²⁵⁵ yang merupakan bisnis yang berkembang dari masa lalu nenek yangnya sebagai importir lurik, kembrik atau yang kini sudah semakin jarang digeluti oleh keturunan di Kotagede, Terang Bulan mempunyai showroom tokoh di Jalan Malioboro yang menjadi pusat perdagangan di Yogyakarta.

Kondisi terakhir, beberapa perusahaan perak Kotagede mulai yang menengah dan besar kini mengalami kemunduran yang cukup besar akibat pola manajemen yang tidak profesional karena sistem keturunan lebih dominan. Sehingga akibat tidak profesional ini maka sangat rentan terjadi persoalan sebab semua dikembalikan kepada pemilik perusahaan. Sisi lain inilah yang memunculkan genealogi borjuasi yang feodal.²⁵⁶

²⁵³ Hal ini disampaikan oleh Sutoyo, ketua Koperasi Pangusaha Perak Kotagete yang dilansir dalam <http://suaramerdeka.com/harian/0410/nas14.htm>

²⁵⁴ Wawancara dengan Pak Bachrudin, Charis Zubair

²⁵⁵ Bahasa Perancis berasal dari beauteque artinya kecantikan. (Encarta)

²⁵⁶ Bacrudin., op.cit.

Ada dua catatan sebagai kesimpulan. Pertama, persoalan serupa sebenarnya juga terjadi di perusahaan lainnya yang terancam bangkrut atau *colaps* akibat faktor internal keluarga yang memperebutkan harta kekayaan. Sebagai prediksi hal ini tidak menutup kemungkinan akan melanda di setiap perusahaan apabila sifat feodalisme menjadi prinsip utama dalam perusahaan, Kedua, adalah pasar global yang sangat interventif terhadap pasar lokal dan tiada ada kebijakan akan perlindungan terhadap kekuatan ekonomi pribumi. Dahulu para borjuis Kotagede bisa melakukan proteksi dengan pelarangan Orang China melakukan aktivitas ekonomi akan tetapi sekarang semua bebas berkontestasi dalam medan perdagangan dan jasa. Salah satu contoh batik bisa diproduksi dimana saja, kerajinan perak yang diproduksi mesin sudah memenuhi pasaran yang awalnya sebagai pangsa pasar kerajinan tangan orang-orang Kotagede. Zaman bergerak dan kemampuan melawan kapitalisme global nyaris tidak ada.

D. Revolusi Pendidikan Barat dan Modernisasi

Pertentangan antar kekuatan di Kotagede salah satunya adalah pembelahan kelompok yang terdiri dari masyarakat tradisional dan modernis yang diwakili oleh kubu Muhammadiyah sebagai kelompok pembaharuan, kemudian kubu tradisional terdapat kelompok Priyayi yang konservatif dan juga Nahdlatul Ulama. Dari kekuatan ini juga memunculkan semangat identitas kekeluargaan yang dibangun di antara mereka yaitu semangat yang disimbolkan dari atribut “bani” yang cukup beragam juga diidentikkan dengan spirit pendidikan yang berbeda. Muhammadiyah lebih terbuka dengan metode pendidikan barat dan timur tengah sementara NU masih berkuat pada model pesantren. Sementara kelompok bangsawan atau priyayi lebih tertinggal di belakang mengenai pendidikan.

Ada tiga manfaat positif dari maraknya industri perak di Kotagede. *Pertama*, menyerap tenaga kerja. *Kedua*, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. *Ketiga*, turut mempertahankan warisan budaya Mataram dengan kerajinan tangan yang terus dipertahankan. *Keempat*, semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kotagede melalui kemajuan pendidikan. Anak-anak orang abangan juga mendapatkan pendidikan yang cukup beragam dan bahkan mulai mengenal pengetahuan yang dulunya hanya dipelajari anak-anak golongan santri misalnya anak-anak abangan atau priyayi sekolah di Muallimin Yogyakarta yang notabene adalah pendidikan Muhammadiyah dan agama.

1. Awal Mula Lembaga Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai muncul ketika politik etis diterapkan. Banyak kelompok priyayi yang mengakses pendidikan kemudian lambat laun pendidikan

terbuka untuk umum terlebih kehadiran sekolah Muhammadiyah, Budi Utama atau Taman Siswa dan juga sekolah-sekolah Kristen yang makin membuka peluang untuk pendidikan.

Bagi golongan Haji yang berkemampuan lebih dari rata-rata penduduk memilih menyekolahkan anaknya ke negeri timur tengah atau Eropa. Hal ini dilakukan oleh keluarga Haji Mukmin, Kasmat Bahuwinangun, dan lainnya atau keluarga kaya di Kauman dan Karangajen juga melakukan hal sama. Hal ini telah membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan sosial. Pendidikan juga menjadi modal untuk terus mengabadikan kehormatan dan kesohoran dari keluarga kaya. Orang Borjuis ini semakin mapan secara sosial dengan pangkat sebagai haji atau lulusan sekolah Timur tengah.

Kemajuan pendidikan kaum borjuis di Kotagede sebenarnya sangat dipengaruhi oleh politik etis yang diterapkan oleh Belanda dan sekolah Muhammadiyah kemudian berkembang sebagaimana sekolah Belanda yang juga mengajarkan pendidikan Barat dengan metode yang sama sekali berbeda dengan model pendidikan pesantren pada awalnya. Para haji yang beraktivitas sebagai pedagang rata-rata mendapatkan pendidikan agama dari pesantren yang berkembang di selatan pulau Jawa.

2. Dampak terhadap Perubahan Sosial

Banyak diantara kita percaya bahwa pendidikan adalah sarana mobilitas sosial secara vertikal yang cukup luas terlebih setelah menjadi revolusi pendidikan yang memberikan akses yang sangat luas kepada masyarakat yang tidak hanya kelompok borjuis atau keluarga priyayi. Meskipun dalam banyak hal politik etis ini dinilai sangat politis dalam rangka mempertahankan kekuasaan kolonial.²⁵⁷

Namun perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak berarti problem kemiskinan atau pemiskinan tidak terjadi di Kotagede bahkan sangat jelas terjadi ketimpangan dan peminggiran terhadap sekelompok masyarakat yang disebut pengrajin atau sekarang layak disebut dengan buruh akibat kehilangan kemandiriannya dalam menjalankan profesi. Mereka mempunyai alat produksi namun seolah telah diserahkan sepenuhnya oleh majikan/pengusaha yang mensuplai bahan mentah untuk kerajinan perak. Akhirnya mereka pun harus mengikuti kebijakan borjuasi besar ini. Buruh tidak mampu menghadapi kekuatan modal.

²⁵⁷ Upah pekerja sangat rendah, dalam catatan keuangan hanya sejumput persentase saja dari jumlah produksi. Pembangunan konstruksi infrastruktur seringkali menggunakan tenaga yang bekerja nyaris seperti budak dan dikenai pajak. Sejumlah kecil kemakmuran negara ditanamkan kembali untuk memperbaiki sumber daya manusia. Hanya terdapat 230 orang Indonesia yang lulus dari kemerdekaannya padahal saat itu sudah terdapat sekitar 80 juta penduduk. Sistem sekolah yang ada hanya sebatas pelatihan tenaga administrasi dan pegawai negeri. Lihat, Max Lane, *Bangsa Yang Belum Selesai, Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto*, (Jakarta: reform institute, 2007), hlm. 30

Dalam bidang pendidikan juga terjadi marginalisasi. Anak-anak pengrajin yang kesulitan dalam pembiayaan juga harus menerima sekolah yang kurang menyediakan fasilitas yang lengkap. Ada juga beberapa anak pengrajin yang kesulitan membiayai di sekolah SMP Muhammadiyah. Sebagian besar anak keluarga miskin ini sekolah di SMP atau SMA Perak yang secara finansial memang lebih terjangkau. Akan tetapi juga banyak siswayang tidak membayar uang SPP meski sudah sangat murah sekitar 15 ribu setiap bulan.²⁵⁸

Sementara sekolah-sekolah yang dimiliki Muhammadiyah atau SMA Negeri adalah cerminan kelompok borjuasi yang elitis. Selain mahal, sekolah ini seolah menjadi milik satu komunitas tertentu yang memang mendapatkan kemudahan dalam pendanaan.

Pada masa Kemerdekaan, Kotagede menjadi bagian dari wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sementara itu kejayaan Kotagede sebagai pusat kerajinan perak dan perniagaan cenderung surut. Pada dekade belakangan perhatian masyarakat setempat beralih dari mengandalkan keterampilan dalam industri kerajinan menjadi mengejar ilmu (pendidikan).

3. Produk Pendidikan Barat VS Timur Tengah

Tidak diragukan lagi pada awal perubahan sosial di Kotagede yang mengarah pada mobilitas sosial sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lembaga pendidikan dan akses pada masa kolonial hanya orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan tinggi dan menjadi pegawai kolonial. Orang-orang kaya atau pengusaha kaya inilah yang mampu menembus batas kolonialisme yang membuat jarak antara orang kaya (*the haves*) dengan orang miskin (*the haves not*).

Kemunculan berbagai lembaga pendidikan, mulai ongko loro, SD, SMP, dan SMA, baik yang dimiliki Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama adalah wujud sumbangsih pedagang kaya yang ada di Kotagede dengan kekuatan filantropi yang berdasarkan pemahaman keagamaan. Disisi lain lembaga-lembaga inilah yang akan melahirkan kelompok borjuis.

Pentingnya pendidikan selalu disuarakan oleh Muhammadiyah di Kotagede melalui berbagai forum salah satunya pernah disampaikan oleh Yusron Asrofi bahwa Orang Islam itu harus meniru meniru sifat lebah. Jadilah lebah yang bermanfaat, tidak merusak, mengeluarkan yang baik, berguna bagi orang lain. Dan belajar tidak hanya kerajinan perak, kalau pasar perak

²⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Bahrudin, Istri Kepala Sekolah SMP Prak pada September 2007, di rumah Kotagede.

hancur bagaimana bisa bertahan hidup? makanya generasi muda harus terus belajar, menuntut ilmu setinggi-tingginya agar bisa bertahan hidup.²⁵⁹

Relasi antara pemilik modal dan pekerja Nampak di Kotagede sebenarnya sudah semenjak lama terdapat ketimpangan. Keluarga borjuis akan melahirkan kelas borjuis baru dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sementara keluarga buruh akan melahirkan kelas buruh yang tidak terdidik secara sangat massif dan dengan pekerjaan yang kurang menguntungkan bahkan hanya dijadikan semacam “takdir” yang mesti diterima karena tidak bisa ditolak.²⁶⁰

Bagi keluarga atau orang yang mampu menguasai bidang agama, pengetahuan dan perdagangan adalah pemenangnya untuk mencapai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi materialisme dan individualisme. Akan tetapi dalam perjalanannya tidak semua kemampuan dapat dicapai kalau dahulu keluarga Haji bisa mendapatkan semuanya akan tetapi bagi generasi berikutnya, generasi ke 3 dan seterusnya kesuksesan hanya diperoleh pada level pencapaian pendidikan barat dan menjadi kelompok menengah dengan basis intelektualitas atau pendidikan profesi.

Ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pertama, munculnya kelompok profesional. Kedua, perubahan dalam sistem birokrasi yang awalnya didominasi oleh keluarga bangsawan menjadi terbuka untuk umum. Selain itu adalah munculnya sistem organisasi yang tergabung dalam ekonomi global dan kesadaran akan pentingnya menjaga ekologis.

Birokrasi selalu identik dengan dunia yang statis, kaku, dan tidak manusiawi dalam batas-batas tertentu. Birokrasi mempunyai irisan politik yang cukup kuat dalam sejarah Orde Baru, birokrasi bisa menjadi mesin politik, pembunuh dan penindasan terhadap masyarakat luas.

Orang-orang Kotagede, memahami birokrasi kolonial dan pemerintah modern. Di masa kolonialisme hanya beberapa orang saja yang bisa menduduki jabatan abdi dalem dengan pangkat tinggi, atau abdi Belanda yang dititipkan di Keraton sebagai pegawai penarik pajak tanah atau kebekelan. Semenjak dahulu birokrasi adalah alat kontrol dan pelanggaran kekuasaan feodal maupun neo-feodal yang masih dianut oleh elit pemerintah sekarang

²⁵⁹ Ceramah Yusron Asrofi, Tokoh Kotagede, pada kuliah subuh Ramadhan 1428 H, di Masjid Besar Mataram, 28 September 2007.

²⁶⁰ Seorang informan yang penulis temui memberikan informasi bahwa dari dulu buruh perak sangat rendah mendapatkan upah dan ini berlangsung turun temurun. Dan memang pekerjaan sampingan lainnya juga tidak menjanjikan karena tidak setiap waktu ada pekerjaan sambilan seperti tukang bangunan dan lainnya.

Terdapat hubungan yang bersifat paradoksal antara demokrasi dan birokrasi. Di satu sisi demokrasi agar efektif memerlukan dukungan birokrasi dalam bentuk kebijakan publik yang partisipatif dan sebagai instrumen untuk menjaga tertib sosial. Birokrasi yang lemah dapat membawa demokrasi ke arah *chaos* yang merusak masa depan demokrasi. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu kuat dapat melumpuhkan peran lembaga-lembaga politik lain, sehingga jalannya mekanisme *checks and balances* tidak berlangsung efektif. Birokrasi yang terlalu kuat akan membuat rakyat terlalu bergantung pada birokrasi, sehingga inisiatif rakyat tidak dapat berkembang.

Paradoks nilai demokrasi dan birokrasi mewujud dalam proses formulasi kebijakan publik.²⁶¹ Pada dasarnya proses formulasi kebijakan publik harus bersinggungan erat dengan nilai-nilai demokrasi. Karena tanpa persinggungan ini, bukan tidak mungkin kebijakan publik justru akan meminggirkan kepentingan public itu sendiri. Kebijakan dengan demikian akan menjadi alat bagi kekuasaan yang ada di sebuah bangsa untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan manipulative untuk kepentingan sedikit orang yang oligarkis. Secara konseptual, menurut Wayne Parsons dalam bukunya *Public Policy* (2005), kebijakan publik yang tidak bersinggungan dengan konsep demokrasi disebutnya dengan istilah *iron cage*.

Budaya adalah aset masyarakat yang mestinya dipertahankan sekuat tenaga oleh masyarakat. Budaya adalah nafas kehidupan. Di Kotagede terkenal dengan kota yang terbuka (sebagaimana kota-kota lainnya) yang mempunyai kebudayaan yang berhadapan dengan kebudayaan yang datang dari luar. Elit dan orang kaya di Kotagede berusaha mempertahankan kebudayaan dengan mewariskan kepada generasi berikutnya, atau membangun prasasti keluarga/dinasti seperti rumah joglo, rumah orang kalang dan situs peninggalan sejarah Mataram sebagai warisan budaya yang butuh dana yang tidak murah dalam mengurusnya.

Peranan borjuasi yang mempunyai perusahaan di Kotagede biasanya dalam skala yang sederhana misalnya membantu mengembangkan dan mempertahankan kebudayaan kotagede yang orisinal dengan memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan kegiatan kesenian di masyarakat. Hal ini nampak terlihat dalam kegiatan malam resepsi anugerah budaya atau PUSDOK Award 2007 yang diselenggarakan tanggal 8 September di pendopo ketua DPRD Kotagede untuk memberikan penghargaan kepada 5 tokoh seniman Kotagede yang dianggap mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap perkembangan kesenian di Kotagede dan Yogyakarta

²⁶¹ Leo Agustino, *Catatan Akhir Tahun tentang Kebijakan Publik Antara Demokrasi & Birokrasi*, Pikiran rakyat, Opini, 6 Desember 2006

di tingkat nasional. Penulis membaca daftar sponsor kegiatan dan menemukan ada beberapa perusahaan perak atau orang kaya yang mendukung kegiatan tersebut meski secara kuantitas tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan banyaknya industri di Kotagede.

Kegiatan ini juga difasilitasi oleh ketua DPRD Kota Yogyakarta berupa tempat pendopo rumah dinas sebagai panggung hiburan rakyat karena disana juga dihadirkan ketoprak lesung dengan tema Raden Paku yang mengkisahkan proses Islamisasi di Jawa.

Dalam hal kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup di Kotagede. Penelitian lembaga Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta dan UGM menemukan potensi ancaman penyakit Minamata di lokasi Kotagede. Penyakit degeneratif tersebut akibat pencemaran logam berat lingkungan.²⁶² Hal ini disebabkan sebagian besar perusahaan perak tidak memiliki pengolahan limbah yang baik dan mereka langsung membuang langsung dibuang melalui *septic tank*. Padahal, *septic tank* di wilayah tersebut tidak kedap air.²⁶³

Limbah perusahaan perak mengandung air raksa dan merkuri. Pihaknya telah meneliti pada 2001 lalu dan hasilnya kandungan air raksa dan merkuri sudah melewati ambang batas. Namun belum ada satu pun perusahaan yang mengelola limbah. Semua dibuang melalui *septic tank* dan rata-rata yang ada di lingkungan itu tidak kedap air, otomatis akan berhubungan dengan sumur-sumur penduduk.

Hasil penelitian sudah dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pengusaha perak, kelurahan, dan kecamatan. Namun, hingga saat ini belum ada respons dari pihak terkait itu. Dia menduga, jika tidak segera ditanggulangi, masalah itu bisa menjadi bom waktu. Dia khawatir kasus Minamata seperti diduga terjadi di Buyat bisa terjadi di Kotagede.

Memang saat ini belum terasa, dampaknya baru akan muncul 10-20 tahun lagi. Dia memperkirakan, pada 2010-2014 dampak itu baru kelihatan. Karena itu, harus segera ada penanganan para pengusaha, sebaiknya membuat semacam penampungan limbah sementara. Jika tidak, kasus itu akan menjadi bom waktu.

Ketua II Koperasi Pengusaha Perak Kota Gede Sutoyo membantah apabila dikatakan para pengrajin menggunakan merkuri. Menurutnya pengolahan perak menggunakan H_2SO_4 dan itu sudah didaur ulang dengan benar. Merkuri dan air raksa hanya digunakan oleh para

²⁶² Laporan Penelitian UGM, *Kotagede Terancam Minamata*. Suara Merdeka, Rabu, 20 Oktober 2004

²⁶³ Laporan Peter Lawua Asal, Kasi Pemulihan, Pengawasan, dan Evaluasi Kantor Penanggulangan Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta tahun 2004

pengusaha penyepuhan emas dan perak. Bila itu memang yang terjadi maka sudah di luar pengawasan koperasi karena bukan merupakan anggota.²⁶⁴

Pedagang santri Kota dan kelompok profesi, birokrat, intelektual adalah kelompok terbatas yang menjadi kelas borjuasi dalam masyarakat Kotagede dalam perjalanan yang cukup lama. Konsekuensi Muhammadiyah sebagai organisasi agama yang modern adalah dihuni sebagian besar adalah yang disebut kelas menengah birokrat, kelompok profesional atau pedagang yang tersebar di berbagai kota di Nusantara. Di Kotagede Muhammadiyah berkembang sangat pesat dengan berbagai kontestasi damai dan negosiasi yang dilakukan kepada masyarakat dan negara.

Muhammadiyah, selain diasosiasikan sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi pemberdayaan (*empowerment*) di satu sisi, juga tidak jarang disebut-sebut sebagai organisasi keagamaan masyarakat kota (*urban society*) dan organisasi kaum kelas menengah (*middle class Muslims*) di sisi lain. Asumsi ini muncul seiring dengan sejarah panjang Muhammadiyah yang dinamis baik dilihat dari keterlibatan para aktivis organisasi ini dalam struktur pemerintahan, latar belakang profesi para aktivisnya, maupun demografi para anggotanya.

Studi yang dilakukan Janine A. Clark terhadap organisasi-organisasi sosial Islam, di beberapa negara Muslim, khususnya, Mesir, Jordan dan Yaman menunjukkan bahwa institusi sosial yang pada mulanya ditujukan untuk membantu kaum miskin, ternyata belakangan “berubah” menjadi aktivisme kelas menengah dan bahkan menjadi jaringan kerja kelas menengah. Dalam konteks kapitalisme global yang mewarnai hampir seluruh relung masyarakat dunia, apakah kondisi yang sama juga dihadapi Muhammadiyah, adalah pertanyaan umum yang cukup mendasar untuk menguji asumsi ini. Termasuk menguji pergeseran misi dan ideologi “PKO” (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang berorientasi sosial voluntari, menjadi “PKU” yang berorientasi profit, mengelaborasi bagaimana konsep karitas diletakkan institusi-institusi profit yang dimiliki Muhammadiyah.²⁶⁵

Untuk merealisasikan visi sosial dan ideologi kesejahteraan dalam konteks pertautan kemiskinan dan kedermawanan, Muhammadiyah mengambil beberapa bidang sosial dalam masyarakat sebagai fokus pergerakannya yaitu: penyantunan, pendidikan, kesehatan. Pemanfaatan harta derma agaknya masih menjadi sumber utama pada saat pengembangan

²⁶⁴ Baca lebih lengkap di: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0410/20/nas14.htm>

²⁶⁵ Hilman Latief, *Pengorganisasian Ideologi Kesejahteraan Muhammadiyah: Beberapa Catatan*, makalah. 2007

institusi sosial Muhammadiyah maupun pendidikannya. Sebagaimana dicatat Nakamura, misalnya, sumber dan lahan dalam proses pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah pada periode awal didapatkan dari harta wakaf maupun zakat.

Menurut M.C. Ricklefs, pada tahun 1925, tepatnya dua tahun setelah Ahmad Dahlan wafat, Muhammadiyah hanya memiliki 4000 anggota, namun sudah memiliki 55 sekolah dengan 4000 siswa, 2 klinik di Yogyakarta dan Surabaya, 1 panti asuhan, dan 1 rumah miskin.²⁶⁶ Baru setelah Muhammadiyah dibawa Haji Rasul ke Minangkabau 1925, dan kemudian bersentuhan dengan gerakan Islam modernis di sana, institusi Muhammadiyah makin dinamis. Pada tahun 1930 memiliki 24.000 anggota, tahun 1935 mengklaim 43.000, dan tahun 1938 mengklaim jumlah fantastis, 250.000 anggota. Pada tahun yang disebut terakhir, Muhammadiyah dikatakan memiliki dan mengelola 834 masjid dan rumah ibadah, 31 perpustakaan umum, dan 1774 sekolah.²⁶⁷

Peranan golongan borjuasi dapat dibagi menjadi peran penting dalam empat ranah yang mencakup persoalan sosial budaya yang ditopang oleh kehadiran pendidikan modern. Kontribusi borjuasi atas perubahan sosial di tengah masyarakat Kotagede tidak dapat dirasakan sebagaimana peranan borjuasi di Eropa meskipun secara simbolis terjadi perubahan struktur ekonomi sosial-politik yaitu dengan munculnya elit baru dengan beragamnya pendidikan dalam masyarakat. Kedua, mengurangi kesenjangan antara kelas atas dan bawah. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun dalam bidang politik dan demokratisasi dirasa masih sangat lemah meski ada aktivitas politik akan tetapi lebih kepada ideologi.²⁶⁸

E. Politik : Habitat Baru Para Pedagang

Kolonialisme melahirkan banyak perlawanan di Indonesia, di daerah-daerah sebagai resistensi terhadap bentuk penindasan. Pada awal abad ke-20 lahirlah berbagai organisasi pergerakan yang menjadi cikal bakal gerakan kesadaran nasional seperti Budi Utomo dan

²⁶⁶ Mitsuo Nakamura, op.cit, hlm.43

²⁶⁷ *Profil Muhammadiyah*, diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005

²⁶⁸ Dalam masyarakat yang dicirikan atas: pemenuhan hak jaminan keamanan, persaingan usaha yang sehat, partisipasi politik. Pada akhir kolonialisme golongan borjuasi cukup berperan di tengah masyarakat Kotagede dengan aktivitas pergerakan dan pembaharuan pemikiran. Pasca Orde Lama atau Orde Baru penulis mengamati terdapat kemunduran melakukan kajian pustaka dan juga melakukan konfrontasi antara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peranan borjuasi dalam bidang politik atau demokrasi formal cukup rendah apabila dilihat dari kuantitatif borjuasi besar yang tidak terlalu jauh mengambil peranan dalam bidang politik misalnya terlibat dalam kepengurusan partai politik, birokrasi, anggota legislatif (DPD, DPRD, DPR) atau eksekutif (menteri, dan pejabat daerah).

beberapa organisasi lainnya yang membuka kran perlawanan terhadap penjajahan. Perkembangan politik selalu dipengaruhi oleh perdagangan dan industrialisasi. Banyak organisasi dagang kemudian berubah menjadi gerakan politik seperti SDI kemudian menjadi SI (putih dan merah) dan masih banyak lagi.

Di Kotagede, buruh mengorganisir diri menjadi pengikut partai politik yang menjanjikan perubahan nasib dan kesejahteraan. Para buruh pada tahun 1960-1965 mengalami dinamika yang cukup penting dalam pergolakan politik. Partai Komunis Indonesia banyak menyerap simpatisan dan anggota dari kaum buruh mengalami kemunduran kesejahteraan dan kehidupan yang makin krisis. Mereka beranggapan bahwa dengan masuk partai mereka akan mendapatkan rasa aman dan janji perubahan ke arah yang lebih baik kesadaran kelas muncul sebagai kelompok pekerja atau proletar yang berhadapan dengan para majikan/juragan yang tidak terlalu peduli terhadap upah pekerja.²⁶⁹

Akan tetapi di Kotagede yang heterogen mengakibatkan afiliasi politik yang heterogen pula. Para borjuis merespon keadaan politik nasional dan lokal dengan berafiliasi dengan partai yang berbasis ideologis yaitu yang paling menonjol adalah Masyumi. Banyak partai ideologi ada di Kotagede mulai yang ideologi Islam yaitu Masyumi dan Partai NU, Komunis yaitu Partai Komunis Indonesia, dan Nasionalis yaitu Partai Nasionalis Indonesia. Untuk partai komunis sebenarnya digagas sebagai partai perjuangan kelas akan tetapi beberapa data menunjukkan partai ini juga terdapat pimpinan yang berasal dari pengusaha Kotagede yang menguasai koperasi pengrajin perak yaitu KP3Y (Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta). Kontestasi ideologi kemudian menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan di masyarakat. Sekali lagi bukan kontestasi yang berlandaskan semangat kelas yang berhadapan antara borjuis dengan pekerja akan tetapi antara kekuatan yang berada dalam pembelahan sosial secara vertikal yaitu abangan, santri, dan priyayi dengan segala simbolisasi yang digunakan. Borjuasi bukan kekuatan politik sendiri yang kuat akan tetapi borjuasi oleh negara juga dianggap sebagai kekuatan ideologi.

Kontestasi ini menjadi sangat negotiable karena borjuasi tidak membuat konfrontasi kelas dengan buruh malah buruh direkrut sebagai anggota dengan basis ideologi bukan kelas sosial dan pilihan agama Islam sebagai alat pemersatu kelas pekerja dengan kelas borjuasi

²⁶⁹ Juragan merupakan orang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan kerja buruh. Hubungan buruh-majikan sangat baik karena kekeluargaan sehingga perbedaan politik antara majikan dan pekerja menjadi dilemma bagi kedua belah pihak namun secara prinsip juragan juga tidak peduli pada ketertibatan buruh dengan politik begitu juga sebaliknya karena prinsipnya tidak ada paksaan dalam pilihan politik. Baca, Mutiah Amini, *Buruh Perak dan Perkembangan Politik Kotagede Tahun 1960-1965*, hlm. 83-86

pedagang yang lebih mapan. Inilah model politik borjuasi yang ideologis di Jawa dengan sistem kekerabatan sebagai penopang utama bekerjanya partai politik dan perdagangan atau kapitalisme.

Bagi kelompok borjuis atau pedagang pilihan bergabung di partai politik adalah strategi untuk mempertahankan usahanya dari berbagai gangguan sehingga dengan bergabung di partai politik ada semacam rasa aman karena dirinya tidak sendiri akan tetapi berada dalam jejaring yang luas. Keikutsertaan di partai politik bagi para pedagang juga ada yang dilandasi oleh semangat perlawanan terhadap kolonialisme seperti yang dilakukan oleh keturunan Haji Mukmin yaitu Abdul Kahar Mudazakir yang bergabung dengan partai Masyumi dan beberapa gerakan sosial lainnya yaitu PII dan Muhammadiyah. Namun bagi penulis, tidak ditemukan semangat berpartai yang berangkat dari tesis bahwa demokrasi yang mampu digerakkan oleh borjuasi yang mempunyai modal, jaringan, dan pengetahuan yang luas.

Meski penulis percaya bahwa modal akan menggerakkan perubahan sosial sebagaimana yang terjadi di Kotagede dan belahan bumi lainnya. Di Kotagede kaum terdidik tradisional (pesantren) dengan basis pedagang kaya dengan modal sosial jaringan, pengetahuan mampu menjadi kekuatan sosial yang diperhitungkan baik pemerintah keraton maupun kolonial. Dalam percaturan politik kontemporer kelompok ini juga yang mampu membeli media, pencitraan dan membangun *image*.

Sementara media dalam masyarakat kapitalis memegang peranan yang sangat penting. Dalam banyak hal media inilah yang menentukan sebuah keputusan politik, preferensi terhadap partai politik, calon politisi, dan sebagainya. Media sebagai pengarah opini publik telah begitu luas daya ubahnya melebihi lembaga-lembaga politik, lembaga pendidikan melakukan internalisasi sebuah nilai.

Indonesia di zaman Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno kondisinya cukup memprihatinkan. Setelah Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 gagal dalam sidangnya menyepakati Dasar Negara Indonesia (1959) dan kemudian kembali ke UUD 1945, kemudian pembubaran Partai Politik Masyumi oleh Pemerintah pada 17 Agustus 1960, berbagai pembatasan dilakukan kepada umat Islam. Selain secara nasional, pembatasan itu juga dilakukan pada tingkat lokal. Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan perintah untuk mengambil tindakan kepada semua bekas anggota Masyumi atau PSI (Partai Syarikat Islam) dengan Pangkat Asisten Wedana ke atas dengan cara memecat dari

kedinasan.²⁷⁰ Pada awalnya kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membumihanguskan kelompok borjuasi di Yogyakarta akan tetapi pada kenyataannya hal ini telah memangkas kelompok kelas menengah pedagang yang cukup besar terutama pengurus Muhammadiyah. Bagi organisasi Muhammadiyah, yang ketika memiliki anggota ratusan ribu, persoalan ini amatlah serius sehingga perlu menyusun langkah antisipatif menyelamatkan anggotanya salah satu strateginya dengan cara pemberian gelar “Mubalig Agung” kepada Presiden Soekarno, Namun rencana itu dibatalkan karena pertimbangan etik keagamaan, kecuali pemberian gelar Doktor Honoris Causa. Pada tanggal 10 April 1965 Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan “Bintang Emas” untuk Presiden. Di satu pihak untuk melindungi anggota Muhammadiyah yang menjadi pegawai negeri; di pihak lain untuk mengurangi tekanan yang berkuasa kepada kegiatan Muhammadiyah.²⁷¹

Sebuah sumber bahkan menyebut sesungguhnya langkah Muhammadiyah sebelumnya telah cukup jauh untuk menyesuaikan diri dengan kemauan Soekarno saat itu. Dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Bandung tahun 1965 utusan daerah Sumatera Selatan menuntut agar Muhammadiyah mengusulkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Akan tetapi tidak dapat disepakati dan kemudian mengambil kebijakan untuk menganugerahkan bintang-emas-sebagai lambang yang paling netral dan tidak melawan prinsip. Bentuk pemberian seperti itu merupakan pendekatan Muhammadiyah terhadap penguasa tanpa harus mengambil resiko lebih jauh, baik secara politis, sosial maupun keagamaan.²⁷²

Banyak tokoh nasional maupun Islam difitnah, dituduh hendak membunuh Presiden Soekarno, ditahan, diperiksa saat itu. Mereka umumnya tokoh Islam yang benar-benar anti-komunis. Tokoh Masyumi Jusuf Wibisono²⁷³, dan tokoh Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka²⁷⁴ dan salah satu dosen (luar biasa) UII Prof. Mr. Kasman Singodimedjo ditahan oleh penguasa Soekarno dengan tuduhan subversi, merongrong kekuasaan dan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Mereka umumnya dituduh melakukan kegiatan subversi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 11/1963 dan yang diundangkan pada 16 Oktober 1963. Jusuf Wibisono baru dibebaskan dari tahanan pertengahan Januari 1966.²⁷⁵

²⁷⁰ MT Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat. Sosial Budaya dan Kependidikan, Surakarta, 1990, hlm. 2

²⁷¹ Ibid

²⁷² Ibid

²⁷³ Subagio IN. Jusuf Wibisono, *Karang di Tengah Gelombang*, Subagio IN, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 299

²⁷⁴ Prof. Dr. Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, penertbit Bulan Bintang, Jakarta.tanpa tahun, hlm.258

²⁷⁵ Subagio IN. Jusuf Wibisono, *ibid*, hlm.29

Sedangkan Hamka dibebaskan setelah tidak terbukti berbagai tuduhan itu setelah ditahan selama dua tahun empat bulan.²⁷⁶

Di Indonesia pengaruh kelas borjuis dalam proses pembuatan kebijakan sangat kental. Aktor-aktor tersebut dapat berasal dari institusi formal, seperti: lembaga legislatif dan/atau eksekutif, ataupun dari non-institusional, seperti kelompok kepentingan dan partai politik. Mereka melakukan sharing power dalam tataran yang paling fundamental tetapi tidak terjadi dalam tataran empiris.

Wright Mills, dalam bukunya *The Power Elite* (1959) mengemukakan bahwa menurut perspektif teori elite, kebijaksanaan (atau bahkan) kebijakan publik dapat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan dari kelas borjuis yang memerintah. Argumentasi pokok dari teori elite ini adalah bukan rakyat yang menentukan kebijakan publik melalui tuntutan-tuntutan dan tindakan mereka, tetapi para pemodal yang memerintah dan dilaksanakan pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintah.²⁷⁷

Oleh karena itu, pilihan terhadap nilai-nilai tertentu sebelum kebijakan diputuskan melalui perspektif lebih sering muncul daripada nilai-nilai tertentu yang dikehendaki oleh publik sebagai pemangku kedaulatan. sehingga yang terjadi, kebijakan-kebijakan publik tidak sensitif “publik”, seperti tambahan tunjangan operasional sebesar Rp 10 juta per bulan bagi anggota dewan, gaji/tunjangan wapres yang bernilai fantastis, kebijakan kenaikan harga BBM yang melilit kehidupan warga, penarikan pajak dan retribusi yang ekstensif, dll.

Pilihan-pilihan itu semua berdasar pada pilihan-pilihan rasional kelompok borjuis yang seringkali bertentangan dengan pilihan-pilihan nilai kebutuhan dan keinginan publik atau rakyat kebanyakan. Bila demikian halnya, maka paradoks kebijakan publik yang

²⁷⁶ Prof. Dr.Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, ibid, hlm.258

²⁷⁷ Proses pembuatan kebijakan oleh aktor-aktor borjuasi tersebut didasarkan pada empat jenis pandangan yang digunakan sebagai preferensi birokrasi dalam memformulasikan suatu kebijakan (Grindle dan Thomas, 1991), yaitu: (1) saran-saran teknis dari teknokrat, ahli Ahi Internasional; (2) implikasi birokratik, berupa sasaran karir individual. posisi kompetisi dalam suatu unit. (3) stabilitas dan dukungan politik, seperti stabilitas dalam sistem politik perhitungan biaya dan manfaat terhadap kelompok kepentingan dan adanya dukungan militer terhadap kelompok oposisi. Aktor-aktor berpengaruh terhadap posisi aktor-aktor kunci dalam pembuatan kebijakan di sini adalah pemimpin-pemimpin politik elite ekonomi dominan, pemimpin militer, dan pemimpin kelompok kepentingan: dan (4) tekanan internasional, mencakup akses pada pendanaan dan perdagangan internasional. Aktor-aktor yang berpengaruh dalam mempengaruhi aktor kunci atau elite kebijakan diantaranya adalah IMF, World Bank, agen-agen multilateral ataupun agen-agen bilateral lainnya.

mempertentangkan kebutuhan akan demokratisasi dan kepentingan birokrasi menjadi catatan buruk negeri ini sepanjang tahun 2005.

Secara pragmatis, kemampuan marketing seorang pengusaha menjadi sebuah keharusan sebagaimana dalam dunia politik juga butuh marketing politik. Tidak cukup hanya mengandalkan barang baik, kemampuan marketing rendah sangat besar kemungkinan barang itu tidak laku di pasaran. Ini dalam hal perdagangan barang. Sama persis dengan perdagangan politisi, balon kepala daerah atau presiden.

Satu pertanyaan mengapa Herry Zudianto unggul di Kotagede dalam pilkada? Analisa membuktikan dengan cermat. Pertama, bahwa pengusaha itu merasa mempunyai kepentingan yang hampir sama dengan usaha lainnya. Dengan demikian memilih politisi yang berlatar belakang pengusaha itu jauh lebih aman dan meyakinkan kalangan borjuis. Ini masih asumsi harus dibuktikan juga dengan pendekatan yang lain. Kedua, faktor *incumbent*, ini banyak yang sudah mengkaji tapi aktor incumbent itu tidak mutlak banyak juga incumbent yang tumbang dalam pilkada secara langsung. Ketiga, faktor genealogis yang mana latar belakang keluarga Herry Zudianto masih terkait dengan pedagang Kotagede. Dan memang *image* ini sengaja dibangun untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Kotagede.²⁷⁸

Relasi kaum borjuis sebagai kelompok yang mempunyai kemampuan secara ekonomi dan sosial cukup bergairah terlibat dalam berbagai kompetisi demokrasi yang bertajuk pilkada atau pemilihan pimpinan partai. Memang borjuasi sebagai kelompok sosial sulit terpisahkan dari keterkaitan dengan jagat politik termasuk juga relasi borjuasi dengan agama yang memunculkan borjuasi agama, relasi dengan pendidikan melahirkan intelektual borjuis. Semuanya itu akan menciptakan tatanan sosial baru kepemimpinan yang didominasi oleh borjuis modern.

Melihat kiprah pedagang di Yogyakarta dalam politik sebenarnya tidak hanya Herry Zudianto sebagai aktor penting dalam peta perpolitikan Yogyakarta sekarang. Terdapat juga orang-orang keturunan pedagang Kotagede yang menunjukkan kiprah yang cukup luas di Yogyakarta seperti Arif Nurhartanto yang merupakan aktivis Partai Amanat Nasional yang kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Sebelum itu juga terdapat tokoh PAN yang senior yaitu Nuruddin Hanim yang juga anggota parlemen yang sebelumnya dari

²⁷⁸ Temuan di lapangan para pedagang memanfaatkan media massa baik cetak maupun elektronik. Sebagian besar pemberitaan adalah seputar bisnis dan usaha. Pertama, penulis menemukan satu rubrik dalam Majalah Adam Air yang menceritakan dunia perusahaan perak yang disebut bisnis kaum santri. Hal serupa juga dipromosikan dalam Majalah Gatra edisi tahun 2005. Kedua, publikasi di koran lokal maupun nasional terkait dinamika bisnis perak. Selain itu juga kelompok pengusaha ini cukup mendapatkan tempat di berbagai website di Yogyakarta sebagai media promosi bisnis.

Partai Persatuan Pembangunan.²⁷⁹ Lahirnya Partai Amanat Nasional pasca keruntuhan Soeharto sangat mempengaruhi konfigurasi politik di Kotagede dengan afiliasi politik kekeluargaan. Kubu Islam modernis semakin terbelah dalam pilihan politik dengan banyaknya partai modernis baik anak cicit Masyumi maupun nasionalis, begitu juga yang terjadi pada kubu tradisional dengan munculnya PKB, dan partai-partai yang dilahirkan yaitu NU maka peta politik kaum Islam tradisional semakin terpecah dan tiada satu partai pun yang menjadi kekuatan sebagai perjuangan kelas. Partai-partai ini masih mengisahkan bahwa politik aliran atau ideologi politik belum berakhir. Dan borjuasi justru memanfaatkan kesempatan ini dengan masuk ke dalam sistem politik; dan lambat laun mulai meninggalkan aktivitas perdagangan sebagai aktivitas utama dan para anak muda Kotagede semakin banyak yang tertarik dalam politik ketimbang meneruskan tradisi nenek moyangnya sebagai pedagang yang ulung.

Sebagai catatan akhir bagian ini adalah ingin mengatakan bahwa Kotagede merupakan Potret yang berubah. Kotagede sudah mengalami fase perubahan yang cukup panjang dan menjalani fase sejarah dalam tiga negara, yaitu negara Mataram, Negara kolonial dan negara Republik Indonesia - dengan dinamika yang cukup beragam. Kotagede sendiri berkembang dari daerah alas, pertanian, perdagangan dan industri.²⁸⁰

Beberapa kesaksian sejarah mengatakan banyak keistimewaan yang berasal dari Kotagede, sayang sekali tulisan-tulisan tersebut dalam bahasa Belanda yang tidak diterbitkan edisi Indonesiannya. Misalnya HJ. Van Mook²⁸¹ memberikan gambaran singkat tentang *Kuta Gede*:

“baik di jalan utara maupun di jalan barat keluar di pasar yang teduh karena pohon beringin besar, dan yang pada hari-hari pasaran dapat ramai sekali. Akan tetapi kalau kita masuki lorong-lorong ketjil kota itu, terdengarlah rajinnya para

²⁷⁹ Diolah dari beberapa sumber yang diwawancarai

²⁸⁰ Batas wilayah kecamatan Kotagede sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Umbulharjo (Kota Yogyakarta), Sebelah Timur berbatasan dengan Banguntapan (Kabupaten Bantul), Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan (Kabupaten Bantul), Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan (Kabupaten Bantul). Sumber: Badan Statistik Yogyakarta, tahun 2004. Secara keseluruhan, Kecamatan Kotagede terbagi menjadi 3 kelurahan yaitu: Kelurahan Prenggan dengan luas daerah 0,99 km, Kelurahan Purbayan dengan luas daerah 0,83 km, Kelurahan Rejowinangun dengan luas daerah 1,25 km. Dari ketiga kelurahan tersebut terdapat 38 Rukun Warga 158 Rukun Tetangga. Dari data monografi kecamatan Kotagede tahun 2007, semester I. Kotagede merupakan salah satu kecamatan yang berada di tenggara Kota Yogyakarta yang memiliki luas sekitar 307,091 Ha dengan ketinggian 113,00 meter di atas permukaan air laut dengan iklim 32 C/21,4 C. Tanah pertanian yang ada di Kecamatan Kotagede seluas 38,7375 Ha sedangkan 261,4012 Ha merupakan wilayah non-pertanian

²⁸¹ Habertus Johannes Van Mook, Seorang Gubernur Jendral Muda Belanda yang lahir di Semarang. Ia menulis buku dengan judul *Koeta Gede* tahun 1926 M. Baca lebih teliti Van Mook, *Kuta Gede*, (Jakarta: Bhratara, 1972), hlm. 11

pengrajin emas, perak, dan tembaga, kuningan, tanduk, penyu, kulit dan kaju, dan terlihatlah di halaman 2, tergantung pada sampaian hasil pekerdjaan tukang biru, tukang batik, dan hasil pabrik tjap.”

Mengenai kehidupan para pembesar kaya di Kotagede ia mencatat :

“Rumah djawa dari pada kaum tinggi dan kaum berada di Kuta Gede, disamping bentuknya jang tradisional, mempunyai tjiri2 jang chas. Halamannya, djuga pada sisi djalan, dipagari tembo keliling setinggi 2 meter; pintu pagar yang ketjil dan rendah (regol); dan menudju ke halaman depan jang pada ramah2 di kota dalam, djarang yang luas. Di tengah2 halaman itu, terlepas daripada gedung induk, terdapatlah pendopo empat segi dengan atap “djoglo” (atap djawa jang menuntjang) jang sangat digemari dan lantai jang dipelester dengan semen sering dicampuri dengan suatu djenis batu jang terdapat di Kulon progo untuk memberi warna merah ungu. Kadang pada salah satu atau kedua pendapa, dibuat los tempat para pekerdjah pada siang hari melakukan keradjinan tangannya... terdapat bangku kerdja untuk memahat atau memotong kayu, kulit, tanduk, dan penju, bingkai-bingkai batik atau djambang untuk membirui”²⁸²

Sementara itu luas wilayah kota Yogyakarta mengalami proses perubahan dari semenjak pendirian kota itu oleh Pangeran Mangkubumi pada 1756 hingga masa sekarang baik perubahan demografis, sosial, ekonomi dan politik. Perubahan demografis dan sosial-ekonomi telah menjadi salah satu faktor penting dalam membawa dinamika tata ruang kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh dorongan dan kebutuhan penggunaan lahan untuk kepentingan warga kota.

Kedua, sebagai Kota Baru. Pesatnya modernisasi, industrialisasi, komersialisasi dan edukasi yang terpusat di kota-kota besar telah menjadi faktor penggerak perubahan dan penarik arus urbanisasi dan migrasi penduduk di daerah Indonesia. Kota menjanjikan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan atau di daerah lain di Indonesia. Selain itu, kemajemukan penduduk yang telah menjadi ciri kota-kota kolonial, pada masa sesudah Perang Dunia II menjadi semakin berkembang dan lebih-lebih pada masa Orde Baru.

Untuk melihat perkembangan borjuasi tersebut maka penting untuk memetakan dinamika kelas sosial dalam masyarakat Kotagede yang selalu terbuka atas perubahan dan

²⁸² Ibid., hlm. 11-12

pengaruh atas kekuatan eksternal meski hal ini juga mempunyai satu proteksi dalam beberapa bidang. Terlepas dari itu terlebih dahulu kita jelaskan bagaimana kelas terbentuk, bertahan, dan faktor yang menjadikan perubahan atas struktur sosial itu dapat dibenarkan

1. Struktur Kelas Sosial Lama (Tradisional)

Kelas sosial lama ini merupakan stratifikasi sosial dalam konteks masyarakat lama yang berbentuk kerajaan Mataram, baik Mataram Hindhu-Budha maupun Mataram Islam. Pembagian kelas sosial pada waktu itu merupakan pembagian yang *taken for granted*. Artinya, seseorang yang lahir dari rahim seorang bangsawan, ningrat sebodoh apapun akan menduduki jabatan yang tinggi sekaligus kelas sosial yang mapan. Sebaliknya bagi yang ditakdirkan lahir dari keluarga *wong cilik*, *abdi dalem* juga akan melahirkan *abdi dalem* yang sama persis dengan orang tuanya posisi sosial dalam komunitas. Jadi, kelas sosial itu sangat ditentukan oleh genealogis dari orang tuanya sehingga ini juga akan berdampak pada kehidupan politik dan ekonomi yang turun-temurun. Bagi yang dilahirkan penguasa atau elite akan menjadi penguasa dan kelompok elite dalam bahasa modern jabatan atau kekuasaan, kesohoran yang diperoleh secara *ascribed status*. Bukan usaha keras untuk mendapatkannya (*achieved status*).

Kelas sosial lama ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan Hindu yang menganut sistem kasta dalam masyarakat. Pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755, sebagaimana yang ditulis oleh Van Mook, bahwa masyarakat Kotagede dapat dikelompokkan menjadi empat golongan utama.²⁸³ Pertama, *abdi dalem* atau golongan hamba raja, terdiri atas beberapa orang pamong pradja dan pegawai-pegawai makam dan masjid. Golongan ini merupakan kelas penguasa yang terdiri dari raja dan keturunannya baik yang berasa Ngayogyakarta maupun Surakarta. Kelas ini yang paling berkuasa atas kehidupan orang banyak. Dalam perjalanannya pengaruh pamong pradja semakin berkurang lebih-lebih apabila menghadapi kelompok “bourgeois” yang kaya. *Abdi dalem* sebagai kelas sosial yang mempunyai kedudukan lebih baik di mata kerajaan dari pada orang di luar *abdi dalem*. *Abdi dalem* mempunyai tugas mengabdikan untuk kepentingan kerajaan, baik urusan dalam rumah tangga kerajaan misalnya menerima tamu, menyiapkan minuman dan sebagainya. Maupun urusan yang terkait perintah ke luar daerah. *Abdi dalem* hidup di tempat yang hanya mempunyai hak pakai. *Status abdi dalem* bisa turun temurun

²⁸³ Van Mook, Kuta Ghede., *ibid.* hlm. 19-20

apabila berkeinginan menurunkannya maka akan didaftarkan untuk magang selama beberapa tahun. Hal ini masih berlaku sampai sekarang di kedua keraton (Solo dan Ngayogyakarta).²⁸⁴

Golongan *kedua*, adalah penduduk yang kaya. Mereka adalah pedagang-pedagang permata dan perhiasan dari emas dan perak. Kotagede pada waktu itu dikatakan sebagai pusat perdagangan intan terbesar di Hindia Belanda. Selain itu juga menjadi pusat perdagangan berbagai kerajinan, batik dan cap dan karya seni lainnya. Golongan merupakan golongan yang layak disebut borjuis, ini banyak dihuni oleh keluarga haji kaya. Perjalanan dagangannya sampai ke seluruh Jawa dan juga ke luar Jawa.

Golongan *ketiga*, terdiri dari tukang dan pedagang kecil makanan serta penjual keperluan hidup sehari-hari lainnya. Dalam golongan ini kebanyakan terdiri dari tukang yang sangat tergantung kepada majikannya. Meskipun hubungan antara majikan dan buruh terlihat ramah, seperti halnya kehidupan buruh di industri Jawa lainnya. Mereka tetap mengalami kehidupan yang sulit apalagi pada krisis kemudian mengikuti gerakan Komunisme sebagai hasrat keinginan untuk melakukan perubahan terhadap nasibnya, nasib keluarga dan keturunannya yang serba tidak kecukupan.

Golongan *keempat*, adalah rakyat jelata yang terdiri dari buruh harian dan petani yang jumlahnya sebenarnya tidak banyak dan minoritas yang hidup di daerah Mutihan (Yogyakarta) dan Singosaren (masuk daerah Surakarta).

Monopoli ekonomi oleh golongan kedua mengakibatkan kehidupan minoritas ini sangat tertekan juga otoritas kaum feodal pemilik tanah pertanian. Kebanyakan buruh ini bukan pemilik tanah karena dalam catatan Van Mook tanah pertanian hanya seluas 75 bau sawah saja.

Namun ada satu catatan yang menjadi perhatian, bahwa di tengah masyarakat yang disana terdapat pusat perdagangan dan pasar tentu saja bermunculan banyak pendatang sehingga munculah banyak ragam orang dan profesi yang mereka mempunyai motif untuk *survive* di Kotagede. Salah satu profesi yang waktu itu menyeruak adalah juru ukir atau pengrajin yang pada akhirnya menjadi profesi yang diakui oleh kerajaan sejak Mataram sampai Ngayogyakarta. Kelompok ini kemudian menjadi satu kelas tersendiri yang mempunyai penghasilan lebih diluar golongan abdi dalem dan rakyat jelata. Kerajaan membutuhkan

²⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Pademo, tanggal 28 September 2007, istri seorang *abdi dalem* Solo yang bertempat di depan Masjid Mataram. Suaminya atau sesepuh keturunan suaminya memang semuanya abdi dalem. Namun beliau menuturkan tidak semua mau menjadi *abdi dalem* generasi sekarang, memilih mencari profesi lainnya karena uang belanja *abdi dalem* sangat kecil hanya 7800 selama satu bulan dari Keraton Solo, Ngayogyakarta lebih kecil lagi hanya 3200 rupiah.

pengrajin ini untuk banyak kepentingan baik untuk menyiapkan barang hadiah atau untuk dipakai keluarga kerajaan.

Mungkin inilah kemunculan dari benih-benih “kelas borjuasi” yang akhirnya mereka mengembangkan perdagangan produksinya tidak hanya untuk kerajaan saja akan tetapi seiring semakin meluasnya keahlian pengrajin yang diturunkan kepada anak-anaknya maka semakin berkembang pula perdagangan.

Posisi kelompok pengrajin yang kemudian juga menjadi pedagang ini adalah kelompok orang yang sangat merdeka, sebagian besar awalnya adalah pendatang di Kotagede namun akhirnya keberadaan mereka diakui oleh kerajaan dan masyarakat yang memang menjadi penengah antara kelas wong cilik dengan kerajaan sebagai elite. Makanya ini tidak salah dikatakan sebagai benih kelas menengah yang memang posisinya di tengah, independen, dan merdeka dan sistem yang mengikat. Lambat laun banyak berkembanglah keturunan mereka di Kotagede dan melakukan ekspansi pemasaran di daerah lain.²⁸⁵

2. Struktur Kelas Sosial Baru (Modern)

Pembagian kelas sosial dalam masyarakat Kotagede dapat ditunjukkan dengan mengklasifikasikan pekerjaannya sebagaimana kategorisasi yang banyak digunakan oleh akademisi dalam penelitian terdahulu. Komposisi pekerjaan ini juga yang akan menuju posisi kelas sosial seseorang di tengah masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk melacak jejak borjuasi elite di Kotagede dalam rentang waktu tertentu.

Untuk pelacakan ini penulis masih mengikuti model kategorisasi lama yang pernah dibuat oleh van Mook (1955), dan Nakamura (1971). Kedua peneliti ini membuat kategorisasi yang lazim disebut kelas sosial dalam masyarakat yang menurut penulis memang sangat berbeda dengan kelas sosial lama di Kotagede. Kisaran waktu kira-kira awal kemerdekaan sampai sekarang ada relevansinya. *Pertama*, pegawai dan tenaga professional. *Kedua*, kelas pengusaha. *Ketiga*, pedagang kecil, tukang dan buruh. *Keempat*, lain-lain seperti pengangguran, orang sakit, cacat, dan jompo.²⁸⁶

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut. Kategori *pertama*, pegawai dan tenaga profesional mencakup pegawai negeri dan pegawai swasta. Pensiunan pegawai juga termasuk dalam kategori ini. Termasuk pula dalam kelas ini adalah pengertian profesional dalam pengertian barat atau Eropa yaitu dokter, pengacara, ahli hukum, dosen dan guru, juru

²⁸⁵ Bambang Purwanto. *ibid.* hlm.78

²⁸⁶ Misuo Nakamura, *op.cit.*, hlm.148

kunci makam raja, seniman, budayawan, atau kelompok hiburan juga masuk dalam golongan ini.

Kategori *kedua*, pengusaha. Kelas ini terdiri dari orang-orang yang disebut Juragan (sebutan Jawa) untuk menyebut pengusaha. Di dalam masyarakat juga sekarang biasa dipanggil majikan atau bos. Selain itu kelas pengusaha juga termasuk di dalamnya kelompok pedagang (saudagar) yang bisa jadi merangkap sebagai pengusaha sekaligus. Juragan atau saudagar ini mempunyai modal untuk mengupah buruh untuk memproduksi barang komoditi seperti kerajinan perak, konveksi dan lain-lain. Pengusaha ini pasarannya tidak hanya di Kotagede akan tetapi ekspansi ke kota lain seperti Kota Yogyakarta, Bali, Jakarta sampai ekspor ke mancanegara. Kalau ditanya keberadaan kelas menengah di Kotagede maka kelompok borjuis tersebut berada dalam kelas ini walau tidak semua sebab pengusaha mempunyai tingkatan yaitu pengusaha besar dan menengah yang berdasarkan skala usaha yang dimiliki.²⁸⁷

Kategori *ketiga*, kelas pekerja yaitu kelompok bakul dan buruh. Yang menjadi patokan dari kelas ini adalah kelompok masyarakat yang mempunyai pekerjaan meskipun mereka tidak memiliki meskipun mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan pekerjaannya. Yang termasuk ke dalam kelas ini antara lain: bakul (pedagang kecil), atau penjual makanan sayur, bungah, kayu bakar. Selain itu juga kelas ini tukang bangunan, tukang kayu, buruh pengrajin, pengrajin. Bakul mempunyai wilayah yang luas bisa di jalan, keliling Kotagede. Bakul ini memang tidak seberapa penghasilannya akan tetapi mereka adalah yang termasuk pekerjaan yang fleksibel dan tidak terlalu dipengaruhi oleh gejolak politik kerusuhan nasional seperti yang dialami pengrajin, pedagang dan pengusaha perak.

Nakamura menambahkan satu kelas sosial yaitu kelompok pengangguran, orang lansia, orang jompo atau cacat, juga pelajar dan mahasiswa yang belum bekerja sebagai suatu kelompok tersendiri yang jumlahnya juga cukup besar. Komposisi pekerjaan yang ditunjukkan dengan tabel di bawah ini mungkin bisa membantu menjelaskan peta kelas sosial di Kotagede.²⁸⁸

Tabel 4.2. Komposisi Pekerjaan kepala Rumah tangga

Kategori	Jumlah Kepala Rumah tangga
----------	----------------------------

²⁸⁷ Lebih detail bisa dilihat dalam tabel perusahaan besar dan menengah di Kotagede halaman yang diolah dari Data Pusat Statistik Yogyakarta

²⁸⁸ Nakamura, op.cit., hlm. 148

	Jumlah	Presentase (%)
Pegawai dan tenaga profesional	236	9,5
Pengusaha/pedagang	184	7,4
Bakul, buruh, tukang	1777	71,7
Lainnya	281	11,4
Jumlah	2478	100,00

Sumber: Buku Daftar Anggota Muhammadiyah Kotagede

Apabila dikategorikan seperti pembagian kelas dalam masyarakat yang didasarkan atas penguasaan sumber ekonomi, maka kelas pengusaha dan pedagang adalah golongan kelas atas atau borjuis, sebagian dari mereka dimasukkan kedalam kelas borjuasi kecil bersama dengan pegawai dan profesional (kelas pertama), sedangkan kelas ketiga dan keempat adalah kelas pekerja (buruh, proletar) yaitu kelompok pedagang kecil atau bakul dan masyarakat di luar itu adalah dimasukkan kedalam kelas bawah.

Namun pengklasifikasian kelas sosial itu sifatnya tidak absolut, untuk menentukan posisi seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh ukuran dan kategori apa yang digunakan yang untuk menentukan status sosial seperti pendidikan, agama, politik, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang memang dapat memproduksi elite dan status sosial.²⁸⁹

BAGIAN 4

Profil Borjuasi Pribumi Jawa (terseleksi)

Borjuasi lokal adalah kelompok yang selalu hadir dalam sebuah komunitas masyarakat terutama masyarakat kota, baik di Jawa maupun luar Jawa. Borjuis ini merupakan raja kecil yang sangat kuat menancapkan pengaruhnya baik ekonomi, sosial atau politik, pengaruh yang

²⁸⁹ Dalam masyarakat ada yang menganggap penguasaan basis ekonomi sebagai ukuran untuk menilai derajat kehormatan seseorang seperti yang disampaikan oleh buruh pengrajin terhadap juragannya atau majikannya yang sering menganggap juragannya baik dan suka menolong akan tetapi hal ini masih jadi pertanyaan sebab ternyata banyak buruh pengrajin yang kesulitan menyekolahkan anak-anaknya sementara mereka memberikan nilai lebih pada barang yang diproduksi untuk juragannya sangat besar.

bersifat ideologi dan kebudayaan maupun pengaruh dari kekuasaan yang penuh dominasi. Borjuasi lokal terdiri dari beberapa varian yang mengkiplatkan pada Geertz yaitu Abangan, Priyayi dan Santri.

Di Kotagede, masyarakat mempunyai persepsi bahwa orang kaya atau pedagang kaya yang berhak memimpin mereka dan karena posisi ekonomi yang mapan dengan didukung oleh jaringan dan pengetahuan agama maka seorang pedagang kaya sangat mudah meletakkan statusnya untuk memberikan pengaruh kepada khalayak. Ini yang disebut borjuis lokal dengan kedaulatan ekonomi yang relatif kuat meski dalam banyak hal ternyata sangat rentan terhadap faktor eksternal.

Dalam konteks *state and nation building* dalam negara sedang membangun (negara dunia ketiga) terdapat kecenderungan untuk memperkuat peran Negara dalam tanggung jawab terhadap rakyatnya dengan memperkuat lembaga politik-kekuasaan. Kebijakan ekonomi yang protektif menjadi pilihan karena kelemahan aktor pribumi melawan ekspansi kapitalisme asing. Hal ini nampak demokrasi ekonomi digerakkan Soekarno meski banyak kalangan menilai tidak banyak mencapai keberhasilan dalam pembangunan politik karena sentralisasi kekuasaan mengarah pada personalisasi otoritas.²⁹⁰

Kelemahan terjadi manakala orang-orang pribumi yang menerima hak istimewa sebagian besar buka golongan yang mempunyai keahlian wirausaha, mereka hanyalah orang yang diuntungkan karena koneksi dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam birokrasi dan yang menguasai distribusi lisensi dan kredit.²⁹¹

Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Pasca kebijakan benteng yang memberikan *support* kepada pengusaha pribumi kini bergeser menjadi sistem etatisme atau sosialisme ala Indonesia yang menjadikan elit militer menjadi pusat patronase yang baru.²⁹² Periode ini

²⁹⁰ Pada era Orde Lama ini kapitalisme diwujudkan dalam dua periode penting yaitu, Pertama periode demokrasi parlementer (1950-1959) yang ditandai oleh Kebijakan Benteng dan Ali Baba (Rencana Urgensi Perekonomian). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan inovasi-inovasi penting yang mendorong suatu proses pertumbuhan kelas ekonomi pribumi yang kuat, dilaksanakan dengan memberikan bantuan kredit, modal, dan hak-hak istimewa khusus kepada pengusaha-pengusaha Pribumi. Orang-orang yang terlibat dalam kebijakan ini didominasi oleh orang-orang partai politik. Implikasi yang jelas dari program ini adalah perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang asing atau warga negara Indonesia keturunan asing atau peranakan. Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta : LP3ES, 1999), hlm. 152-154

²⁹¹ Ibid., hlm. 157.

²⁹² Kekuatan militer terjadi pergeseran aktor dari kelompok Wilopo dan Ali Sastroamidjono kepada pusingan baru: Soekarno, Soebandrio yang non partai dan beraliran kiri. Menguatnya elit baru militer selain mendapatkan sumber lisensi dan bantuan modal militer juga berpotensi untuk melakukan nasionalisasi perusahaan asing menjadi perusahaan negara. Baca. Yahya A. Muhaimin, hlm. 172

menggunakan sistem Baba-Ali yaitu pengusaha Cina bekerja dengan modal yang ditanam oleh para pemodal pribumi yang mempunyai kekuasaan.

Tentang nasionalisme yang berujung pada nasionalisasi berbagai perusahaan asing dan kemudian memunculkan ragam elite baru yang bertengger di tampuk kekuasaan politik dan ekonomi nasional.

Fukuyama (2004) memberikan semacam kritikan bahwa nasionalisme tidak selamanya rasional, terkadang hanya memberikan pengakuan kepada etnik tertentu yang terberi sebagai bentuk legitimasi yang lebih demokratis daripada monarki yang jelas bersifat kekeluargaan.²⁹³ Hal ini juga akan berdampak konflik antar kepentingan kelompok yang sama-sama ingin diakui dan diberikan fasilitas oleh negara. Oleh karena itu lanjut Fukuyama bahwa gerakan-gerakan nasionalis tidak dengan serta merta diasosiasikan dengan gerakan-gerakan demokratis semenjak Revolusi Perancis.²⁹⁴

Setelah tahun 1966 yang menandai akhir periode Orde Lama suatu perubahan besar dalam struktur kekuasaan politik sementara pihak militer cepat tampil ke depan untuk menguasai situasi, kekuasaan presiden Soekarno dan PNI yang mempunyai banyak klien merosot dengan cepat. Pada oktober 1965, ekonomi Indonesia bisa dikatakan lumpuh karena terjadi inflasi yang mencapai 20-30% per bulan, kelumpuhan infrastruktur mengakibatkan kekacauan komunikasi, distribusi, menurunnya produksi sektor industri dan ekspor. Perusahaan negara gagal mendorong tumbuhnya pengusaha asli untuk bersaing dengan perusahaan asing dan Cina di bidang investasi dan perusahaan besar.²⁹⁵

²⁹³ Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, (Yogyakarta: qalam, 2004)., hlm. 399

²⁹⁴ Fukuyama. *ibid.*, hlm. 340-341

²⁹⁵ Yahya. A. Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 187. catatan Robison mengenai kehidupan politik di Indonesia kemudian membuat kategori yang ada di dalam fraksi kapital dominan yang membentuk struktur ekonomi-politik Indonesia pada 1980-an. Pertama, kapital internasional melalui utang (IGGI, IBRD, G to G loans) dan *foreign direct investment* (Jepang, AS, Taiwan, Hong Kong, Eropa). Kedua, kapital BUMN. Ketiga, kapital ABRI (sekarang TN/Polri). Keempat, kapital konglomerasi pribumi dan nonpribumi. Sekarang fraksi kapital dominan tetap serupa walaupun ada pemain di dalam fraksi kapital itu yang berubah atau berganti nama, misalnya IGGI menjadi CGI, dan ditopang IMF. Kelas borjuis pribumi yang menjadi politikus merangkap pengusaha banyak yang dibesarkan Orde Baru. Pada 1980-an, fraksi kapital yang bermuara ke Soeharto dan keluarga unggul juga ditopang oleh fraksi kapital ABRI. Sekarang yang unggul fraksi kapital konglomerasi pribumi semi-Soeharto dan semi-ABRI. Perubahan pada 1998, dengan mundurnya Soeharto, hingga terbentuknya negara-dagang (*merchant-state*) sekarang harus dilihat dalam perspektif, pertama, pertarungan antarfraksi dominan kapital Orde Baru. Kedua, terjadinya hambatan internal dalam akumulasi kapital akibat tekanan eksternal berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, pertarungan kepentingan kapital dengan tenaga kerja, antara tuntutan keuntungan pengusaha dan tuntutan normatif kaum pekerja.

Kebijakan depolitisasi Orde Baru²⁹⁶ yang dikemas dalam jargon Demokrasi Pancasila yang mengajarkan kepatuhan menemukan paradoks, pembangunan ekonomi menjadi sangat penting dengan membuka gerbang pasar bebas dan investor sebagai dampak liberalisasi ekonomi dunia, dalam waktu yang bersamaan hak-hak rakyat dirampas. Pembangunan yang mengimani *trickle down effect* ini ternyata membuka jurang lebar kesenjangan sosial antara *the haves* and *the haves not*. Dampak ikutannya kemudian adalah maraknya kerusuhan sosial dan krisis multidimensional selama hampir 30 tahun. Harapan Orde Baru untuk menumbuhkan golongan menengah gagal akibat borjuasi yang lahir tidak mandiri dan bersembunyi di balik ketiak penguasa. Kontribusi terhadap demokrasi nyaris sulit ditemukan signifikansinya.²⁹⁷

Pasca Orde Baru atau Era Reformasi yang ditandai dengan derasnya arus demokratisasi yang ditunggangi liberalisasi politik dan ekonomi menjadikan Negara harus mengurangi banyak peranan dan intervensi dalam masyarakat. Kelompok yang pro-kapitalis yang mengimani *the invisible hand* yang menghendaki Negara pensiun dari intervensi ekon. Kejadian ini mempunyai persamaan ketika orang Kalang Yogyakarta banyak memberikan bantuan kepada keraton Yogyakarta untuk melindungi kelompok ini dari bencana yang diakibatkan kerusuhan sosial dan politik.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai asal-usul kelompok masyarakat di Kotagede kemudian membangun basis ekonomi yang dicerminkan dari beberapa kelompok yang oleh Geertz disebut sebagai pembagian masyarakat yang bersifat sejajar yaitu priyayi, abangan, dan santri.

²⁹⁶ Eric Hiarié menuliskan, terdapat tiga pendekatan dalam melihat orde baru yaitu pertama, pendekatan modernisasi yang menekankan pada pembangunan teknokratik. Kedua, pendekatan historis yang berusaha memahami struktur sosial masa lalu dalam memahami politik Indonesia kontemporer. Ketiga, pendekatan struktural dengan pendekatan marxis dalam melihat ekonomi politik yang memfokuskan perhatian pada peran-peran kapitalisme negara, kelas-kelas sosial dan basis ekonomi rezim Orde Baru. (baca: buku Eric Hiarié, *Materialisme-Sejarah Kejatuhan Soeharto*). hlm. 2

²⁹⁷ Ketika era Orde baru berada dalam puncak kekuasaan liberalisasi politik tidak serta merta diikuti dengan liberalisasi ekonomi. Artinya pintu ekonomi liberal dibuka lebar-lebar untuk kepentingan borjuasi dan konglomerat negara. Kebebasan politik dibungkam dan organisasi masyarakat dan profesi dikooptasi sedemikian kuat. Selain itu, kemunculan “mavia berkelay” menjadi alat untuk menopang kebijakan pemerintah dalam liberalisasi ekonomi. Periode ini menghasilkan banyak pengusaha atau elit yang difasilitasi negara semisal Ibnu Sutowo, kemudian mendorong Siswono Yudi Husodo, lalu munculnya pengusaha lainnya seperti Abdul Latief, Fahmi Idris, Suryadhar, Thahir, Ponco Nugro Susilo, dan lain-lain. Ibid., hlm.260

A. Genealogis Orang-Orang Kotagede

Asal usul orang-orang Kotagede sebenarnya tidak berasal dari banyak ras atau etnis sebab dilihat dari asal-usul pembentukan Kotagede bisa dan mungkin hanya berasal dari beberapa keluarga saja yang sangat terbatas lalu berkembang dan beranak-pinak. Mungkin faktor keberhasilan dalam ekonomi kemudian secara alamiah membentuk semacam kelas sosial atau struktur sosial yang berbeda antara *the haves* dan *the haves not*, antara keluarga borjuis dan keluarga buruh.

Penduduk asli Kotagede terdiri dari tiga jenis, yaitu abdi dalem kerajaan dan keturunannya, pendatang, dan komunitas kalang.²⁹⁸ Meski dalam masyarakat banyak perdebatan mengenai keberadaan komunitas kalang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah sosial Kotagede. Kalaupun komunitas kalang dianggap pendatang mereka menetap di sana dalam waktu lama. Sementara konsekuensi sebagai kota dagang sangat membuka peluang pendatang tinggal di sana; kecuali etnis Cina tidak diperbolehkan masuk Kotagede.²⁹⁹

Untuk lebih jelasnya pembahasan berikut akan memetakan bahwa Kotagede memang kota genealogis yang sifat kekeluargaan dan kekerabatan sangat kuat. (hal ini akan berimplikasi pada struktur pekerja dan majikan, atau buruh dan juragan sangat akrab dan merupakan keluarga, hal akan dibahas dalam bab 4).

3.a. Keluarga Abdi Dalem

Abdi dalem sebagai keluarga kerajaan atau yang dianggap keluarga yang jabatannya sangat ditentukan oleh jauh dekatnya hubungan darah dengan raja. Keluarga abdi dalem dalam zaman kerajaan feodal menempati posisi sosial yang mapan dengan hak-hak yang istimewa misalnya *abdi dalem bekel*, *pengulu*, *dondong*, dan sebagainya.

Di dalam lingkungan Kotagede terdapat dua macam *abdi dalem* yaitu dari Keraton Surakarta, dan Ngayogyakarta. Di sana terdapat pembagian yang jelas mana wilayah Surakarta mana wilayah Yogyakarta dengan pembagian *abdi dalem* yang telah dipatenkan. Artinya, abdi dalem dari kedua belah pihak sama-sama punya kewajiban merawat peninggalan Mataram tersebut.

²⁹⁸ Eksiklopedia Kotagede, hlm. 6

²⁹⁹ Pelacakan data mengenai pelarangan Cina masuk Kotagede belum dapat diketahui secara pasti akan tetapi kebanyakan responden yang menjawab karena alasan melindungi perekonomian masyarakat dari ekspansi Cina.

Perpindahan pusat kerajaan Mataram dari Kotagede telah menjadikan salah satu kota yang dibangun dalam konsep lokal itu berubah identitas menjadi kota para abdi dalem yang bertugas menjaga makam dan masjid kerajaan. Walaupun para *abdi dalem* itu masih menikmati penghormatan karena posisi mereka sebagai penjaga tempat-tempat suci, dalam kenyataannya proses pergeseran loyalitas dari ikatan *patronase* ke hubungan ekonomi yang lebih rasional mulai terjadi di Kotagede. Para *abdi dalem* mulai lebih dianggap hanya sebagai simbol budaya dalam hubungan antara Kotagede dengan keraton daripada status sosial yang tinggi di dalam masyarakatnya sendiri.³⁰⁰

Kehidupan *abdi dalem* pada zaman pasca kolonial sudah berubah, bahkan sejak lama posisi sosialnya telah bergeser oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan perdagangan yang makin bebas. Kebanyakan keluarga *abdi dalem* tertinggal dalam pendidikan dan hanya menekuni pekerjaan yang secara finansial tidak terlalu menguntungkan.³⁰¹ Di Kotagede *abdi dalem* dan keturunannya (belum tentu menjadi *abdi dalem*, harus magang terlebih dahulu) kini banyak yang bekerja sebagai pekerja serabutan, tukang bangunan, dan becak. Memang zaman sudah berubah, dan memang sangat tepat bahwa tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri.

3.b. Para Pendatang

Dugaan penulis dan sumber-sumber lain menyatakan bahwa konsekuensi sebagai Ibu Kota Perdagangan atau Kota Bisnis yang besar (masa itu, sebesar Pasar Beringharjo sekarang)³⁰² adalah ramainya pendatang ke kota tersebut meski tidak semua pendatang tinggal dan menetap di sana. Akan tetapi wajar pula kalau pendatang tersebut akhirnya berkeluarga dan menetap di sekitar Kotagede.

Pada saat Sultan Agung meninggalkan Kotagede menuju Pleret banyak pendatang, pedagang atau pekerja berdatangan ke Kotagede, sebagian mereka berasal dari Bantul dan Gunungkidul. Akan tetapi dari keluarga Kotagede juga ada yang melakukan migrasi ke daerah lain yang disebabkan oleh kegiatan bisnis-perdagangannya, baik di daerah sekitar Kotagede

³⁰⁰ Bambang Purwanto, *Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada Saat Transisi: Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan*. Makalah disampaikan pada seminar "Kota-kota di Indonesia dalam Perubahan" yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Surabaya 22-25 Agustus 2004. Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM.

³⁰¹ Baca juga "Pengabdi-pengabdi Tahta Mataram", dalam Iman Budi Santoso, Profesi Wong Cilik, *Spiritualisme Pekerja Tradisional di Jawa*, (Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, 1999), hlm. 171

³⁰² Sumber yang tertulis memang tidak penulis dapatkan akan tetapi pada waktu itu satu-satunya pasar yang ramai, sebelum ada pasar Kepatihan/Danurejan yang juga orang Kotagede yang menjadi pedagangnya. Dalam perjalanan kemudian orang Kotagede juga banyak mengembangkan bisnis di Beringharjo sebagai penyuplai konveksi juga.

atau daerah lain seperti Klaten, Madiun, Blitar, Batavia (Jakarta) dan Surabaya (kini jua ada yang menetap di Bali).³⁰³

Selain itu ada yang berpendapat bahwa tidak ada penduduk asli di Kotagede, semua adalah pendatang kalau dilihat dari genealogis Kotagede yang dahulunya adalah merupakan Alas Mentaok yang dibuka menjadi sebuah perkampungan sederhana.

3.c. Wong Kalang

Cerita mengenai asal-usul *wong kalang* memang penuh misteri yang sangat kompleks. Berbagai perspektif muncul dan spekulasi banyak ditemui dalam beberapa literatur baik karangan orang Kotagede sampai peneliti dari belahan bumi Eropa.

Dalam sejarah lisan banyak versi yang menyatakan tentang *keberadaan wong kalang* ada yang mengatakan *wong kalang* sebagai penduduk asli, salah satu nama *abdi dalem* kerajaan yang dikucilkan akibat pelanggaran terhadap “norma”, juga ada yang mengatakan memang orang kalang ini pendatang yang eksklusif dan tidak cair di dalam masyarakat bahkan melakukan perkawinan endogami agar harta tidak berpindah ke komunitas lainnya.³⁰⁴

Pada zaman Sultan Agung Mataram dulu terdapat tiga golongan masyarakat yang status sosialnya dianggap sebagai kelas rendah yaitu: Golongan Pinggir, Golongan Gajah, dan Golongan Kalang.³⁰⁵

Lambat laun, Orang Kalang atau suku Kalang banyak tersebar di Pulau Jawa.³⁰⁶ Terutama di pinggiran pegunungan selatan Jawa Tengah, seperti di daerah Cilacap, Adipala,

³⁰³ Disarikan dari beberapa sumber, baik wawancara selama bulan Agustus-November 2007 juga berasal dari referensi yang beragam.

³⁰⁴ Dalam versi ini bahwa orang kalang merupakan keturunan abdi dalem kalang Joko Seno dengan Ambarlurung, Putri Sultan Agung yang terkenal ahli membuat kain, selendang, sarung dan barang tenun lainnya yang kemudian diusir oleh Sultan Agung akibat selingkuh dengan salah satu selirnya kemudian tinggal di Tegalendu (luar Kotagede). Baca Mutiah Amini, *Ibid.*, hlm 1

³⁰⁵ Anggota masyarakat yang masuk golongan itu dipaksa membanting-tulang untuk mengerjakan pekerjaan yang berat dan dianggap kurang pantas apabila dikenakan golongan masyarakat kelas atas. Orang Kalang juga dimanfaatkan terutama untuk pengerahan tenaga kerja/buruh. Golongan Pinggir mempunyai status sebagai masyarakat biasa. Golongan Gajah ialah orang-orang dari daerah Blambangan Jawa Timur yang dipaksa pindah dari Jawa Tengah yang jumlahnya cukup banyak. Golongan pada umumnya Golongan Gajah mempunyai keberanian dalam peperangan sehingga banyak yang dipilih menjadi pasukan khusus yang disebut Prajurit Blambangan. Golongan Kalang sendiri menurut cerita ialah penghuni alas yang mempunyai kebiasaan merampok di desa-desa yang pada akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Sultan Agung. Setelah itu, Sultan Agung membuat keputusan kepada mereka harus tinggal di desa-desa yang dikalangi (dikelilingi) tembok mereka dilarang bergaul dengan masyarakat biasa. mereka ini umumnya pembuat pelana dan pemintal yang mahir, juga terkenal sebagai ahli konstruksi kayu. Tugas Orang-orang Kalang terutama untuk eksploitasi hutan dan pengangkutan. http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Wong_Kalang

³⁰⁶ Muhammad Ruslan Hadi, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Perkawinan dan Waris pada Masyarakat Orang Kalang di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Perubahan dan Perkembangannya*. 1983, (Skripsi Fakultas Hukum UGM. Tidak diterbitkan), hlm 17 pada Bab III tentang Orang Kalang

Gombang, Ambal, Petanahan, Kebumen, Bagelen sampai ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Persebaran orang kalang di D.I Yogyakarta yang terpetakan di antaranya adalah: (1) Desa Purbosari, Wonosari Gunung Kidul. (2) Desa Alun-alun dan Tegalgendu, Kotagede, Kota Yogyakarta. (3) Desa Ngotho, Sewon, Kabupaten Bantul. (4) Desa Kutu, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.³⁰⁷

Pada masa depresi jumlah orang kalang di Kotagede tidak banyak, tidak lebih dari 20 keluarga yang masing-masing mempunyai kurang lebih enam anak. Orang kalang secara fisik sama dengan orang Jawa pada umumnya, menggunakan bahasa Jawa, hanya sikap eksklusivitasnya yang membedakan dengan lainnya.

Untuk mendapatkan pengertian yang komprehensif dengan mengumpulkan beberapa literatur yang membahas keberadaan orang kalang maka dapat penulis sampaikan beberapa pendapat perihal asal-usul orang kalang: Ruslan (1983) menuliskan setidaknya-tidaknya ada empat pendapat dari masyarakat yang berbeda dan juga beberapa ilmuwan asing.³⁰⁸

Dari pendapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat mengenai asal-usul orang Kalang. *Pertama*, bahwa orang Kalang berasal dari luar Jawa; *kedua*, orang kalang berasal dari penduduk suku Jawa. Akan tetapi bukti yang sangat kuat adalah bahwa orang kalang adalah Orang Jawa yang mempunyai karakteristik sedikit berbeda dalam kehidupan.³⁰⁹

B. Profil Borjuasi Kotagede

Mengacu pada kategori atau variasi Borjuasi yang berasal dari latar belakang sosio kultural Kotagede yang disebut dalam ensiklopedia Kotagede bahwa Kotagede terdiri dari dua macam penduduk; yaitu *pertama* berasal dari keluarga *abdi dalem* (representasi priyayi).

³⁰⁷ 307 Ibid., hlm 17.

³⁰⁸ Pertama, adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang kalang berasal dari daratan India, dari keturunan Suku Keling yang melarikan diri dari India karena terjadi konflik. Mereka meninggalkan negerinya sampai ke Pulau Jawa. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa orang kalang berasal dari keturunan Raden Kalanglaya yang memerintah Keraton Baka, yaitu di daerah selatan Kalasan, Sleman. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa orang kalang ini berasal dari Kerajaan Kalingga, di Jawa Tengah pada zaman mataram Hindu. Orang kalang diyakini sebagai pemeluk agama Hindu. Keempat adalah pendapat beberapa pengamat asing dalam beberapa literatur menyebutkan; A.B. Mayer misalnya berpendapat bahwa Orang Kalang berasal dari Philipina, sekeluarga dengan Suku Negritto, Suku Semang dari Semenanjung Melayu atau penduduk di Kepulauan Andaman; G.P. Rauffur, yang dikutip P.J. Veth dalam buku Java Jilid VI yang menuliskan bahwa nenek moyang orang-orang kalang berasal dari tawanan perang yaitu orang-orang kalang, kedah dan pegu yang dibawah orang Hindu ke pulau Jawa. Sementara menurut F. Ketjen, pada hakekatnya orang kalang bukan merupakan suku yang berbeda dari Suku Jawa. Hanya pada zaman kejayaan Hindu mereka digolongkan sebagai kasta terendah (paria). Pendapat senada juga dari H. ten Kate dan Van Bigg. Ruslan, ibid., hlm 24-25

³⁰⁹ Beberapa pendapat yang menguatkan pernyataan ini dapat dilihat dalam buku ensiklopedia Kotagede, penelitian Mutiah Amini, dan beberapa karya ilmuwan asing seperti Van Mook dan buku Panggung Sejarah.

Kedua, berasal dari komunitas Kalang (Abangan, sebagian adalah keturunan Priyayi). *Ketiga*, para pendatang (santri). Ketiga kelompok ini kemudian berkontestasi secara damai dalam kegiatan perekonomian di Kotagede dan melahirkan masing-masing elit ekonomi yang kuat yang dalam hal ini disebut Borjuasi lokal.

Trikotomi borjuasi ini bukan tanpa persoalan apabila dirunut akar historisnya (ada tumpang tindih dan kompleksitas dalam realitasnya). Namun kepentingan penulis adalah ingin mengatakan bahwa ada dua komunitas yang berbeda dan ada dua karakteristik pedagang yang berbeda baik secara ideologi, asal-usul, dan kegiatan ekonomi dan politiknya. Meski yang disebutkan dalam kelompok Borjuasi Abangan lebih pada penerusan jenis usaha dan tempat tinggal namun hal ini penting untuk melihat genealogi yang berakhir pada dua kemungkinan yaitu kontinuitas (keberlanjutan) dan diskontinuitas (ketidakberlanjutan alias mengalami kemandegan sebuah proses sejarah).

Oleh karena itu, dikotomi di bawah ini dimaksudkan untuk membuat klasifikasi dari mana asalnya dan memberikan tipologi yang jelas apakah berasal dari pedagang muslim yang taat, dari kelompok abangan yang “terkontaminasi” oleh ritual Hindu, atau berasal dari lar kedua kelompok tersebut yang mengalami proses internalisasi nilai-nilai yang dibangun masyarakat. Misalnya, seorang abangan yang juga dermawan karena kedermawanan menjadi ukuran masyarakat untuk menilai baik dan buruknya seseorang dan sebagainya.

Di bawah ini sekelumit profil borjuasi Kotagede direpresentasikan oleh keturunan Orang Kalang dan juga keturunan keluarga haji atau santri yang muncul diakhir kekuasaan Mataram Islam yang makin surut.

1. Borjuasi Kalang

Terdapat banyak ragam pendapat mengenai keberadaan orang kalang. Beberapa versi sudah dibahas dalam bab 2. Salah satu versi yang banyak dianut oleh orang Kotagede adalah bahwa Kalang adalah nama *abdi dalem* yang diduga berasal dari orang Jawa. Salah satu *abdi dalem* yang menduduki posisi strategis adalah *abdi dalem* Kalang yang bernama Joko Seno yang kemudian diusir oleh Sultan Agung dari Kotagede ke Tegalendu. Dari sinilah mulai ramai Tegalendu menjadi pemukiman komunitas Kalang yang terkucilkan tersebut.³¹⁰

Kompleksitas kemunculan Borjuasi di Nusantara sangat dipengaruhi oleh kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa ke Indonesia. Kaum pedagang muncul dengan aneka wajah baik yang ekspansif, monopolistis maupun yang misionaris. Hal ini kemudian memunculkan tipologi borjuasi baik borjuasi lokal, nasional, borjuasi China, Arab, dan Belanda. Di Kotagede

³¹⁰ Wawancara dengan Charis Zubair, tanggal 29 September 2007

pun terdapat apa yang pernah disebut sebagai borjuasi Belanda karena faktor kedekatan komunitas tersebut dengan Belanda. Borjuasi ini adalah salah satu pembesar wong kalang.

Pada umumnya kehidupan orang Kalang sangat teratur dan makmur, gaya hidupnya hemat, dan tidak berfoya-foya, ulet, banyak keturunannya yang sukses menjadi pengusaha.³¹¹ Ini dapat dijelaskan dari beberapa uraian berikut.

Orang kalang sepanjang sejarah memperlihatkan jiwa wirausahaan yang oleh orang Barat selalu dikaitkan dengan minoritas asing (Tionghoa, Khoja, Arab, dan lainnya). Di Kotagede, kita juga menemui golongan yang sekaligus disegani dan dianggap hina, yaitu Orang Kalang, mereka dianggap mempunyai adat istiadat ganjil menjadi kaya melalui cara yang tidak biasa, bahkan mempunyai sebuah ekor.³¹²

Beberapa profil borjuis Kalang dari generasi ke generasi dan juga penerus aktivitas ekonomi komunitas tersebut.³¹³

a. Mertowongso

Nama ini sangat penting untuk memulai sebuah perjalanan keluarga yang dikenal sebagai pengembara atau hidup tidak menetap. Dalam catatan Guillot (1989) mengungkapkan bahwa nama nenek moyang orang Kalang yang dapat disebutkan Namanya adalah Mertowongso yang menjalankan aktivitas mengembara sebagaimana leluhur sebelumnya. Mertowongso akhirnya menetap di Bagelen, Gombang, Jawa Tengah pada abad 18. Pada waktu itu beberapa catatan yang disampaikan kembali oleh Guillot tentang penggambaran tentang jumlah orang Kalang yang telah menetap mencapai 6.000 orang yang tersebar di pulau Jawa,³¹⁴ dan yang terpenting adalah mengenai kesuksesan keluarga Kalang di Kotagede yang dianggap luar biasa.

Mertowongso merupakan pemilik perusahaan dagang dan pegadaian, Orang kalang mempunyai aktivitas ekonomi cukup beragam pada awalnya mulai dari petani, bekerja dalam pegadaian yang meminta bunga 4-5% sebulan.³¹⁵ Laki-laki dan perempuan dalam kultur

³¹¹ Dari banyak sumber menerangkan karakteristik komunitas kalang ini bisa dibaca dari penelitian Mutiah Amini yang berjudul dari *Poro* sampai *Paketik, aktivitas ekonomi Wong Kalang*, FIB, tidak dibukukan. Bisa dibaca juga catatan Van Mook dalam Kuta Gede.

³¹² Claude Guillot, *Orang Kalang di Pulau Jawa Juru Angkut dan Pegadaian*, dalam buku *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Denys Lombard* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 323

³¹³ Profil Keluarga Kalang di awal abad 15-18 banyak dikutip dari tulisan Claude Gullot, dalam buku *Persembahan Kepada Denys Lombard* (Jakarta: Gramedia. 1999), hlm 323

³¹⁴ Berdasarkan dokumen pada abad 18 dan 19, tampaklah tempat itu terletak diatas dua garis: satu di utara menyusur pesisir dari Pasuruan ke Tegal, dan yang lain di selatan bersambung dari Banyumas ke bagian selatan Kediri. Kedua garis tersebut menuju Sungai Brantas dan mungkin sekali merupakan kedua jalur perjalanan mereka pada zaman itu. Guillot, *ibid.*, hlm. 328

³¹⁵ Aktivitas dagang kemudian mulai ditinggalkan oleh orang Kalang, *ibid.*, hlm. 329

orang Kalang sama-sama mencari nafkah dan menjadi pedagang atau juru gadai Dan Mertowongso adalah orang yang paling kaya pada saat itu.

Pada akhir abad 18, keluarga Mertowongso hijrah ke Kotagede. Pilihan ini bukan kebetulan: Kotagede sebagai ibu kota kuno tempat yang masih terletak makam para raja, sejak dahulu menjadi sebuah pusat perdagangan penting dan lama dinamakan Pasar Gede. Letaknya juga sangat menguntungkan. Kotagede hanya lima kilometer dari Kota Yogyakarta, namun karena kotanya terbelah dua pada waktu pembagian kerajaan pada pertengahan abad 18 (Giyanti), sebagian masuk Yogyakarta dan sebagian masuk Surakarta, maka keuntungannya adalah bukan saja penduduknya dapat dengan mudah menghubungi kedua pusat kerajaan tersebut, melainkan dapat memanfaatkan pemerintah yang paling menguntungkan dengan pindah kampung saja.³¹⁶

b. Mertosetiko

Kita boleh memperkirakan meskipun tidak ada data dalam hal ini bahwa generasi kedua, bernama Mertosetiko. Ia ikut diuntungkan oleh kemajuan ekonomi Kotagede pada masa perang Diponegoro (1825-1830), waktu kota itu menjadi pusat pembuatan senjata. Bagaimanapun juga, pada akhir perang mereka telah memperoleh sebuah kedudukan terpandang dalam masyarakat Kalang dan sekitar tahun 1850 anaknya, Brojosemito, diangkat oleh keraton Yogyakarta sebagai demang, sebuah gelar terus disandang oleh keluarga itu sampai dihapus pada akhir abad 20.

c. Mulyosuwarno dan Fatimah

Mereka adalah pasangan suami istri yang dihasilkan oleh sistem endogami, mereka berdua adalah sepupu. Kedua orang ini mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi meski dengan keterbatasan dalam membaca dan menulis. Fatimah sendiri adalah anak Demang Kalang yang masuk Islam sedangkan Mulyosuwarno tetap tidak islam. Dan justru memperkuat hubungan dengan Istana, terutama istana Yogyakarta. Ikatan yang dijalin dengan bangsawan sangat akrab dengan kegiatan perantara dalam meminjamkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh pamannya.

Rumah Mulyosuwarno dan Fatimah dijadikan tempat perdagangan segala macam barang mulai kain batik, beras dalam jumlah besar. Selain aktivitas meminjamkan uang dan jual emas menjadi kegiatan utama. Fatimah membuat batang emas menjadi kegiatan utama. Fatimah membuat batang emas murni dari peleburan dan penyulingan emas kemudian ia jual

³¹⁶ Claudio Guillot, *Orang Kalang di Pulau Jawa...* Ibid. hlm. 329

ke *Javasche Bank* di Batavia. Hal ini menjadikan status ekonominya sangat tinggi di masyarakat. Pada tahun 1873 lahirlah anaknya yang diberi nama Prawirosuwarno yang akan diuraikan berikut.

d. Prawiro Suwarno

Nama lainnya adalah Tembong. Generasi ketiga dari Orang Kalang yang masih menunjukkan konsistensi dalam aktivitas ekonomi sebagaimana leluhurnya (warisan), Prawirosuwarno adalah cucu Mertowongso atau Mertosetiko, anak dari pasangan Mulyosuwarno dan Fatimah. Perkawinan yang mulai terjadi percampuran antar tradisi Kalang Sejati dengan keturunan Islam. Akan tetapi dalam praktik keseharian pasangan menerapkan ritual Kalang dan bagi keluarga yang terpenting adalah aktivitas ekonomi bukan ritual semata.

Semua orang tahu kebesaran Tembong sebagai raja gadai yang diberikan hak monopoli dari Belanda juga keraton (boneka Belanda). Karena dukungan Belanda ini pula dia disebut sebagai borjuis Belanda. Karena keuletan dan kegigihannya kelompok Kalang ini menjadi komunitas yang eksklusif, kaya dengan bantuan hak monopoli Belanda. Golongan Kalang ini mempunyai hak monopoli untuk perdagangan Berlian, Candu, dan Monopoli Pegadaian. Di saat zaman depresi Keluarga Prawiro Suwarno memiliki rumah gadai lebih dari tiga buah yaitu di Klaten, Delanggu, dan Banyudono. Kehidupan yang mencolok dari keluarga yang disebut raja gadai ini adalah ketika masyarakat melihat Tembong ketika pulang ke Tegal Gendukotagede dengan membawa berbagai hasil gadai. Selain itu kebiasaan keluarga ini adalah membuat acara kesenian di rumah dan para pengunjung pun melihat secara langsung kekayaan yang dimilikinya baik berupa emas berbentuk pisang, gula Jawa, dan barang-barang lainnya. Beberapa sumber cerita juga mengatakan keluarga Prawiro berencana mengganti lantai rumahnya dengan uang golden lalu tidak disetujui oleh keraton maupun pemerintahan Belanda. Kalau pun keraton menyetujui posisi uang harus miring sehingga tidak kelihatan bahwa lantai itu terbuat dari uang.

Keluarga Prawiro Suwarno adalah termasuk orang yang memanfaatkan lisensi keraton dengan membeli banyak tanah di Kotagede dan membangun rumah yang megah dan membangun bisnis yang menguntungkan berupa transportasi. Dalam menjalankan usahanya Prawiro Suwarno di bantu oleh anak-anaknya yang berjumlah delapan orang, Mereka adalah Hadi Nuriyah, Prawiro Sumito, Haji Sirat, Prawiro Suprpto, Prawiro Suharjo, Prawiro Pratono, Prawira Suwito, Prawiro Darsono. Selain itu, keluarga Tembong memanfaatkan tenaga lokal untuk dipekerjakan di rumah gadai di Klaten, Delanggu, dan Banyudono. Ia tidak sulit-sulit membawa pekerja dari Kotagede karena bisa jadi tidak efektif dan lebih mahal.

Selain keluarga Prawiro Suwarno, di Kotagede terdapat keluarga kalang lainnya yang kira-kira jumlahnya dua puluhan keluarga saja, tinggal di sebelah timur atau belakang rumah Prawiro Suwarno. Mereka juga cukup memiliki basis ekonomi mapan seperti keluarga Proyodrono, H. Bakri, Joyo (kecuk), Mulyo Sudarso, Mangunprawiro, Mulyo Prayitno, Mbak Senik, Mulyosudarso, Mulyo Pranoto.³¹⁷

Secara ekonomi mereka menjalankan aktivitas yang bermacam-macam akan tetapi terdapat hubungan dengan profesi rumah gadai misalnya ada yang menjadi pengembang dan poro, makelar, pembuatan dan penjualan kerajinan dan batik.

Perubahan terjadi ketika agresi militer Belanda kedua (1948-1949) dengan memasuki Yogyakarta, Tegalgendu sebagai kongsi tentara nasional maka ketakutan Tembong kemudian meninggalkan rumah besarnya dan diduga terjadi penjarahan harta yang konon ceritanya kemudian banyak orang Kotagede kaya mendadak, ada orang kaya baru, buruh yang naik kelas menjadi juragan kecil, menengah, dan besar. Mereka juga membeli rumah-rumah Kalang yang besar, ada awalnya disewakan kemudian dijual. Rumah kalang juga kemudian disulap menjadi restoran mewah dan besar.

Orang Kalang kini tinggal sejarahnya, penyebaran orang Kalang sudah sulit untuk dilacak mungkin ada beberapa pengusaha hotel dan agen minyak tanah yang konon masih ditekuni keturunan Kalang akan tetapi identitas Kalang sudah tidak seperti pada masa kejayaannya sebagai borjuis pribumi yang telah mengembara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Perubahan zaman, kadang tidak terelakkan dan Kalang pun berubah.

e. Para Penerus Kalang

Para penerus aktivitas ekonomi orang Kalang sebenarnya juga penduduk Kotagede akan tetapi belum jelas apakah mereka dari priyayi, santri, atau aktor baru yang disebut dengan kelompok Orang Kaya baru yang dicurigai banyak kalangan di Kotagede.³¹⁸

Ada beberapa nama yang meneruskan aktivitas ekonomi atau menggunakan bangunan Orang Kalang selagai tempat menjalankan aktivitas ekonomi. *Pertama*, Teguh Suyatin yang mempunyai Anshor Silver dan membeli rumah orang Kalang di Tegalgendu. Akan tetapi tidak mudah mendapatkan profil yang lengkap mengenai pengusaha di Kotagede termasuk Suyatin yang sekarang menjadi pemilik perusahaan perak terbesar di Kotagede.

³¹⁷ Ibid., hlm.18

³¹⁸ Beberapa informan mengatakan ada banyak Orang Kaya Baru yang menonjol setelah peristiwa gedor yaitu penjarahan harta keluarga kalang pada tahun 1949 (revolusi, agresi militer Belanda ke-2)

Beberapa informan menyampaikan bahwa Suyatin adalah keturunan pedagang kaya. Pasca geger Revolusi yang berakibat pada perginya komunitas Kalang dari Kotagede-Tegalendu maka Suyatin membeli rumah raja gadai, Tembong yang kini terlihat sangat megah di jalan Tegal Gendu yang berpapan nama “Anshor Silver” dan juga sebagai usaha restoran.

Konon Suyatin ini mendapatkan keuntungan yang besar dari pembelian rumah sebab di dalam tanahnya masih banyak terdapat harta kekayaan keluarga Tembong yang melarikan diri saat Belanda melakukan pengkhianatan terhadap perjanjiannya dan melakukan agresi Belanda kedua yang salah satunya adalah menjadikan rumah raja gadai sebagai tangsi Belanda. Pada masa ini pula terjadi penjarahan harta kekayaan Tembong yang memunculkan orang kaya mendadak atau orang kaya baru di Kotagede.

Teguh Suyatin juga menjadi anggota Muhammadiyah dan memberikan kontribusi kepada kegiatan sosial Muhammadiyah ataupun “Aisyiyah” di Kotagede. Mungkin kita menganggap Suyatin adalah orang Kalang, karena rumahnya, akan tetapi Suyatin adalah salah satu borjuis yang menempati rumah kalang meski secara keagamaan tidak melakukan ritual sebagaimana orang kalang yang abangan dengan ritual Hindu-Jawa.

Kedua, pemilik Toms Silver. Soal asal-usul pemilik perusahaan ini penulis juga tidak memperoleh kejelasan dari mana asal-usulnya. Akan tetapi ada sumber yang mengatakan bahwa tidak semua pengusaha kaya yang mempekerjakan puluhan buruh ini berasal dari keturunan Kalang. Akan tetapi modal usaha bisa jadi berasal dari penjarahan yang terjadi saat peristiwa gedor yang mengambil harta keluarga Tembong.

Seperti yang terjadi pada umumnya bahwa perdagangan kerajinan Perak di Kotagede semakin melemah seiring pergantian zaman. Zaman keemasan perak adalah tahun 1920-1930-an yang menjadikan industri perak berkembang, pengrajin semakin banyak, dan distributor atau pedagang juga marak. Ketidakmampuan pengrajin memasarkan hasil kerajinannya sendiri melahirkan kelompok dagang yang banyak yang tanpa modal menyalurkan barang kerajinan dan mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan tersebut.

Informasi terakhir perusahaan ini sudah tidak dikelola oleh orang Kotagede akan tetapi sudah jatuh kepada keturunan dari istrinya yang berasal dari Lampung dan konon perusahaan ini mengalami kemunduran akibat salah urus (mis manajerial) dari para keturunan

Ketiga, Supriyadi. Ia merupakan pemilik perusahaan perak yang sangat besar sampai sekarang yaitu HS Silver. Perusahaan ini berkembang pesat dan juga usaha restoran yang disebut omah dhuwur sampai sekarang meski tidak begitu jelas apakah Supriyadi keturunan Kalang, Beberapa wawancara menyatakan bukan keturunan Kalang akan tetapi menempati bangunan yang menjadi simbol kebesaran komunitas kalang di Kotagede. Bangunan model

Indies ini menjadi tempat wisata tersendiri bagi pelancong dan juga tempat jual beli kerajinan perak dan emas.

Ayahnya Supriadi bukanlah orang kalang sebagaimana bangunannya. Akan tetapi orang Kotagede yang membeli rumah Kalang (sama halnya dengan pemilik Anshor Silver). Supriyadi adalah generasi kedua setelah ayahnya yang juga merupakan pedagang berlian dan perak juga menjadi anggota Muhammadiyah meski tidak secara struktural akan tetapi memberikan kontribusi kepada Muhammadiyah dalam kegiatan sosial dan pendidikan.

2. Borjuasi Santri Kota

Sebelum jauh pembahasan ada beberapa kata yang perlu dijelaskan mengenai keberadaan borjuasi Santri³¹⁹ atau Santri Kota yang bergelut dalam dunia usaha atau perdagangan. Mereka berasal dari keturunan Jawa makanya disebut borjuasi pribumi atau saudagar Jawa. Karena ketaatan pada agama Islam dan ditunjukkan dengan pengorbanan atas biaya yang tinggi demi mencapai gelar Haji. Ukuran kekayaan dan kehormatan serta ketaatan beragama bisa terukur dari status sosial baru yang bernama “haji”. Dan ini diterapkan secara sungguh-sungguh dalam keluarga dagang yang kaya. Sebagai salah satu contohnya adalah keluarga Haji Mukmin yang secara turun temurun menjadi keluarga yang berstatus terhormat dengan menyandang nama depan Haji.

Ada beberapa profil singkat untuk memperlihatkan dinamika elite dan borjuasi Kotagede yang disimpulkan oleh beberapa keluarga kaya dari kalangan Santri dan abangan. Abangan menjadi penting karena ini akan mendekonstruksikan bahwa hanya orang santri yang mempunyai etos kerja tinggi memperjuangkan hidup. Profil ini banyak didapatkan dari cerita lisan dan juga beberapa selebaran yang dikeluarkan oleh lembaga di Kotagede sebagai upaya *reinventing* kejayaan masa lalu Kotagede yang penuh heroisme dan keteladanan serta kedermawanan orang kaya. Dalam profil sederhana ini juga menampakkan sistem kekeluargaan yang kuat yang dimanifestasikan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial lainnya. Artinya, genealogis kelas menengah atau elit di Kotagede terjadi dalam beberapa keluarga yang sangat berpengaruh baik di lokal Kotagede-Yogyakarta atau Nasional.

Dari rahim Kotagede, dari keluarga pedagang kaya telah lahir tokoh-tokoh Islam besar kaliber lokal maupun nasional. Penggagas, pencipta dan penggerak organisasi keislaman

³¹⁹ Penggunaan gabungan antara kata Jawa dan Eropa dalam “borjuasi santri” tidak menjadi persoalan karena memang kontak dagang mereka, pedagang Jawa tidak terlepas dari keberadaan pedagang Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung karena kolonialisme memunculkan banyak status kelas dan gelar baru dalam masyarakat yang feodal.

modern. Mereka Jalal Sayuti, Haji Masyhudi, Kiai Amir, Ahmad Kasmat Bahuwinangun, Abdul Kahar Mudzakkir, HM. Rasyidi, As'ad Humam, dan Muhammad Chirzin.³²⁰ Sebenarnya selain keluarga santri kaya di Kotagede yang mempunyai basis pedagang dan santri ada juga terdapat kelompok kaya yang menurut konsep Sosiologis ala Geerts dapat disebut golongan abangan yang terkenal sebagai *wong kalang* atau Orang Kalang.

Gambaran kehidupan mereka berikut ini adalah berdasarkan uraian singkat riwayat hidup, yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber dokumentasi dan cerita masyarakat atau penerbitan lokal lainnya dan wawancara dengan orang-orang yang relevan sebagai narasumber, dengan keturunan keluarga Haji Mukmin atau orang-orang Kotagede.

1. Bani Haji Mukmin

Haji Mukmin, adalah pedagang besar bahan katun dan kain untuk batik. Dia mempunyai toko di Danurejan, salah satu daerah perdagangan utama di kota Yogyakarta. Kakek Mukmin, Kyai Baghowi, pindah ke Kotagede dari daerah Kauman Pijenan di Bantul sebelum Perang Diponegoro (1825-1830). Ayah Haji Mukmin bernama Kyai Syafi. Jadi Haji Masyudi adalah generasi keempat dari sebuah keluarga yang berpindah dari daerah pedalaman Kotagede, tetapi dia dan yang lain-lainnya menganggap dirinya asli Kotagede, atau orang Kotagede asli. Haji Mukmin kawin dua kali. Dari perkawinan pertamanya dia memperoleh lima anak (empat laki-laki dan satu perempuan), dari semuanya Haji Masyudi paling muda. Semua anak laki-laki Haji Mukmin tumbuh dewasa menjadi pedagang yang sukses dengan cara mereka sendiri dan satu-satunya anak perempuannya juga kawin dengan seseorang pedagang di Kotagede. Dia kemudian menjanda tetapi kemudian kawin lagi dengan Haji Mudzakir seorang pedagang terhormat (ayah Profesor Abdul Kahar Mudzakir). Perkawinan Haji Mukmin yang kedua adalah dengan seorang wanita dari kampung Gedongkuning, suatu kampung yang terletak sekitar dua kilometer tepat ke arah utara Kotagede, dari perkawinannya lahirlah tiga anak laki-laki yang semuanya kemudian berdagang. Haji Mukmin wafat pada tahun 1920. Dia orang yang saleh dan menggunakan sejumlah besar uangnya untuk pendidikan agama anak-anaknya. Dia pergi haji dan juga mengirim semua anak laki-laki dan perempuannya untuk ibadah haji ke Makkah ketika mereka masih muda. Semua anak-anaknya kemudian terlibat dalam gerakan Muhammadiyah dalam berbagai hal. Anak cucunya sekarang secara resmi terorganisasi ke dalam sebuah organisasi keluarga, Bani Mukmin (keturunan Mukmin), dan mereka menganggap dia sebagai pemrakarsa rasa keagamaan yang kuat di antara mereka.

³²⁰ Trias Setiawati, *op.cit*, hlm.7

Haji Mukmin menurut beberapa sumber cerita adalah orang yang datang ke Kotagede ketika Sultan Agung meninggalkan Kotagede menuju Pleret. Daerah asalnya adalah Pijenan-Bantul. Para pendatang kemudian membuat rumah di berbagai sudut kota, alun-alun, dan sekitar benteng Keraton yang masih sepi.

Salah satu pedagang kaya yang ada di Kotagede adalah Haji Mukmin yang melahirkan banyak tokoh di Kotagede. Dia menikah dua kali, dengan putra sebanyak delapan orang. Dari istri pertama lahir Yasin, Muhsin, Khadijah, Masyudi, dan Masduki. Dari istri kedua lahir Masruri, Asmuni, dan Badriyah.³²¹ Di antara anak-anak dari hasil perkawinan pertamanya yang paling aktif beragama adalah anak kedua. Muchsin, dan yang termuda, Masyudi.

Haji Mukmin adalah pedagang besar bahan katun dan kembang serta memiliki toko besar di Danurejan (Kepatihan), daerah perdagangan utama Yogya. Konon beliau ini mendapatkan hak monopoli untuk kegiatan perdagangan ini dari pemerintah kolonial Belanda yaitu monopoli atas perdagangan Berlian, Mori, dan Batik.³²² Hak istimewa ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya.

Kini, keluarga Haji Mukmin masih menjadi keluarga yang disegani, dihormati tidak hanya karena keturunan akan tetapi karena konsistensi menjalankan peran dan fungsi dalam masyarakat. Kalau dahulu keluarga Haji Mukmin sampai generasi kedua dipenuhi oleh keberhasilan dalam dunia perdagangan dan pergerakan, kini generasi keempat-kedelapan dipenuhi oleh kelompok terdidik, profesi, dan pegawai negeri yang tetap menjadi bagian dari kelas menengah modern yang sangat berpengaruh.

Semenjak kehadiran generasi kedua dari Haji Mukmin lalu didirikanlah perkumpulan keluarga yang disebut Bani Mukmin yang diketuai oleh Ahmad Charis Zubair (cucu Haji Mukmin). Dari kegiatan yang bersifat kekeluargaan ini identitas *ukhuwah* bani Mukmin dibangun, Dalam satu kesempatan Charis Zubair memberikan tausiyah di depan ratusan anggota bani Mukmin.³²³

“Setiap tahun kita sebagai Bani Mukmin mengadakan Syawalan, silaturahmi antara keluarga keturunan Haji Mukmin. Banyak manfaat yang seharusnya dapat dipetik dari kegiatan ini. Pertama, mengingat silsilah keluarga. Bani mukmin adalah

³²¹ Wawancara dengan Charis Zubair, 26 November 2007, di Fakultas Filsafat UGM, dimuat juga dalam brosur AMM edisi 43/1425 H/2004, hlm. 52-63

³²² Wawancara dengan Ibu Hazid dan ibu, keturunan pedagang yang orang tuanya hidup sezaman dengan Haji Mukmin. Wawancara dilakukan tanggal 21 Oktober 2007

³²³ Pidato Charis Zubair dalam Syawalan Bani Mukmin, diadakan di Rumah H.Mukmin yang berbentuk Joglo tua nan kokoh, yang hadir sekitar 200-300 orang. Diambil pada tanggal 12 Oktober 2007 bertepatan dengan 1 Syawal 1428 H.

keluarga yang terbuka, tidak eksklusif menjaga jarak dengan masyarakat lainnya. Kedua, perlunya solidaritas sesama Bani Mukmin yang kini berjumlah 1400 orang (terdaftar) yang tersebar di banyak Kota. Kita bisa saling menolong sesama keluarga, memberikan bantuan pendidikan untuk keluarga yang kurang mampu...”

Dari Bani Mukmin inilah kemudian muncul berbagai tokoh di Kotagede dan memberikan banyak karya peninggalan. Termasuk yang terpenting adalah gerakan Muhammadiyah Kotagede, Masjid Perak dan Ma' had Islam Kotagede. Maka wajar dinasti ini lalu menjadi kelompok borjuasi yang cukup penting di Kotagede dan berkontribusi atas terwujudnya kedewasaan pemikiran masyarakat, menerima perbedaan, tidak melakukan kekerasan, dan juga membangun image Kotagede sangat pluralis dan demokratis melalui peningkatan pendidikan masyarakat. Tanpa pendidikan yang baik, sulit mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan harmoni sosial.

Selain Bani Mukmin juga terdapat berbagai bani sebagai perkumpulan keluarga yang juga sebagai fitrah manusia itu ingin berkumpul, membangun identitas yang sama antara keluarga. Pembentukan Bani/Trah ini selain kultur Arab juga Jawa sehingga tidak hanya terdapat di Kotagede akan tetapi kota dan daerah lain juga ada.³²⁴

Berdasarkan catatan silsilah Bani Mukmin, seluruh anak dan cucu Haji Mukmin yang berjumlah 49 (sampai dengan 1976) telah dirinci ke dalam tiga kategori: yaitu pengusaha, tenaga profesional, dan lain-lainnya sebagai berikut:³²⁵

Tabel IV.5 Pekerjaan Keturunan Haji Mukmin

No	Generasi Haji Mukmin	Pengusaha/Pedagang	Tenaga profesional	Lain-lain	Jumlah
1	Anak	8	-	-	8
2	Cucu	19	19	3	41

Sumber: Silsilah Bani Mukmin dan keterangan lainnya.

³²⁴ Dari beberapa dokumen yang penulis dapatkan motivasi dari pembentukan Bani atau Trah banyak terdorong oleh motivasi keagamaan, bahwa silaturahmi memberikan kemuliaan bagi manusia di mata Allah, menolong sesama adalah kewajiban apalagi keluarga harus didahulukan. Di dalam buku tersebut juga dituliskan landasan Al-quran dan hadist mengenai perlunya silaturahmi dan ikatan persaudaraan (buku Trah silsilah Bani Kromowijaya, dll).

³²⁵ Dikutip dari Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Muncul dan Balik Pohon Beringin*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), hlm. 151-152

Semua anak Haji Mukmin yang berjumlah delapan orang adalah pengusaha. Sebanyak 41 cucunya hampir sama besarnya terbagi menjadi pengusaha dan tenaga profesional dengan masing-masing 19 orang, sisanya tiga orang yang masuk kategori lain-lain terdiri dari dua mahasiswa dan satu petani. Jadi, anak cucu bani Mukmin menunjukkan tingkat profesional yang sangat mencolok pada waktu itu. Dan di beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang besar akan tetapi tidak begitu mencolok sebab pendidikan sudah dapat diakses oleh banyak keluarga di Kotagede seiring dengan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan.

a. Haji Muchsin

Di antara anak Haji Mukmin yang paling berhasil dan kaya dari perdagangan adalah Haji Muchsin. Ia disebut raja dagang di Kotagede sebelum perang. Ia mendapat hak monopoli dari pemerintah Hindia Belanda untuk mengimpor kembang dari Jepang untuk kebutuhan seluruh Jawa Tengah. Pada awal abad 20-an ia menjadi ketua urusan wakaf sekaligus penyumbang dana terbesar bagi *hoofdbestuur* Muhammadiyah.³²⁶

Seperti halnya ayahnya, kekayaan itu dimanfaatkan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai di Mesir dan naik haji, hartanya dirupakan dengan membeli banyak tanah yang akan dimanfaatkan untuk perjuangan keagamaan dan juga pergerakan sosial lainnya.

Keberadaannya sebagai pedagang kaya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah Kolonial Belanda sehingga hal ini menjadikan tipologi borjuasi Jawa atau Pribumi adalah kelompok-kelompok kaya yang diciptakan oleh kolonialisme dan sebagai upaya menolong pribumi untuk membangun basis ekonomi yang secara tidak langsung akan mengurangi kekuasaan feodal kerajaan yang konservatif. Bisa jadi ini menjadi praktik politik pecah belah (*divide at empera*) yang dibangun oleh Belanda.

Haji Muchsin kawin empat kali (termasuk yang disebutkan di atas) dia meninggal pada tahun 1948. Istri pertamanya adalah saudara perempuannya Atmosudigdo raja dagang Kotagede; yang lain yang salah satu anaknya ialah profesor M. Rasjidi. Dia meninggal di Makkah ketika suami istri ini sedang menunaikan ibadah haji. Dari tiga istri berikutnya (satu yang disebut di atas kemenakan Kyai Haji Ahmad Dahlan, lainnya dari Semarang dan terakhir Kauman Yogyakarta), sejumlah generasi kedua pemimpin Muhammadiyah Kotagede lahir. Dia juga membantu keuangan dua kemenakan laki-laknya (anak saudara perempuannya) untuk belajar di Kairo pada tahun dua puluhan dan tiga puluhan, salah satunya kemudian dikenal

³²⁶ Artinya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baca Brosur AMM, edisi 43/1425H/2004.

sebagai profesor Abdul Kahar Mudzakkir, satu lagi pemimpin Muhammadiyah terkenal secara nasional. Dia kemudian mengawinkan anak putrinya dengan Abdul Kahar sekembalinya dari Kairo. Anak putri saudara perempuannya Haji Muchsin kawin dengan Kyai Amir. Anak ketiga Haji Mukmin, Haji Masduki, seorang pedagang yang sukses, kawin empat kali dan mempunyai banyak anak, kebanyakan berpendidikan tinggi dan kemudian menjadi atau kawin dengan, para ahli yang mempunyai kedudukan seperti satu ahli hukum, dua dokter, satu professor dan dua guru, termasuk anak putrinya yang menjadi istri Professor A. Mukti Ali, Menteri Agama, Institut Agama Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Haji Muchsin menjadi salah seorang pedagang paling kaya di Kotagede sebelum perang, seorang raja dagang, menurut laporan karena kenyataan bahwa dia diberi hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk mengimpor kambrik (kain katun yang halus untuk batik) dari Jepang ke seluruh daerah Yogyakarta. Kemudian pada pertengahan tahun tiga puluhan, Haji Muchsin mewakili importir-importir tekstil di Jawa pada konferensi pedagang Belanda saat itu. Muchsin, lahir di Kauman Yogyakarta, adalah kemenakan Kyai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Perkawinan ini berlangsung pada akhir tahun 1910-an dan hubungan yang dekat ini tampaknya merupakan sarana dalam menarik Haji Muchsin ke dalam gerakan Muhammadiyah. Namanya mulai muncul dalam pimpinan Pusat Muhammadiyah pada awal tahun dua puluhan, sebagai seorang ketua yang mengurus yayasan agama (bidang wakaf) bagi Muhammadiyah. Dia sendiri disebut sebagai salah seorang penyokong keuangan Muhammadiyah yang besar, menyumbang berbagai jumlah dengan setiap tahun paling sedikit 500 gulden diberikan pada keuangan Muhammadiyah Pusat.

b. Haji Masyhudi

Haji Masyhudi lahir di Kampung Boharen Kotagede pada tahun 1888. Nama kecilnya adalah Rusdi tetapi sekembalinya dari naik haji di Makkah dia mengganti nama menjadi Masyudi. Tanggal kelahirannya tidak ada kejelasan karena tidak ada dokumen tertulis. Nakamura perlu menjelaskan pernah menanyakan apakah dia ingat hari kelahirannya menurut kalender Jawa, dia menjawab: "Saya telah lupa, hal itu tidak penting". Mungkin dia mengetahui tanggal kelahirannya, tetapi yang jelas nampaknya dia tidak ingin berpikir banyak tentang hal itu. Ketika dia wafat pada tanggal 28 Februari 1972, ketika itu saya masih berada di Kotagede, suatu uraian singkat tentang riwayat hidupnya disusun oleh Pimpinan Muhammadiyah cabang Kotagede dan dibacakan pada saat penguburannya: menurut sumber ini, pada saat wafatnya pak Haji Masyhudi berumur 84 tahun.

Haji Masyhudi, selain seorang ahli *fiqh*, *tafsir*, *tasawuf*, dan *ushluddin* beliau adalah pedagang kaya di Kotagede anak Haji Mukmin. Haji Masyhudi dikenal sebagai pendiri *Syarekatul Mubtadi* dan *Krida Mataram*. Ia juga menjadi penggerak utama Muhammadiyah Kotagede, dan menduduki Ketua Cabang Muhammadiyah. Haji Masyhudi lahir di Kampung Boharen, tahun 1888. Nama kecilnya Rusdi. Pendidikan dimulai dengan masuk sekolah rakyat *angka loro* di Keputran, Yogyakarta. Sekolah ini khusus untuk anak-anak priyayi

Pada pertengahan 1910an, Masyhudi memprakarsai berdirinya *Syarekatul Mubtadi* dan *Krida Mataram*. Bersama sahabatnya, Kiai Amir memainkan peranan penting dalam perkembangan gerakan Muhammadiyah di Kotagede selama 30 tahun, Mashudi menjabat sebagai *voorzitler* (ketua) Muhammadiyah Cabang Kotagede. Sementara, Kiai Amir, menjadi Kepala Sekolah Muhammadiyah di Kotagede sampai usai perang, Pada tahun 1930 Haji Masyhudi, Kiai Amir, Kiai Haji Muhsin, dan Kiai Mudakir (Ayah Abdul Kahar Mudzakkir) menjadi pelopor mendirikan masjid baru yakni Masjid Perak di Kotagede, dan sekaligus menjadi khatib di masjid itu.³²⁷

Masyhudi memimpin Masyumi selama pendudukan Jepang. Selama revolusi fisik 1945-1949 aktif mengurus Hizbullah. Menjadi anggota tarjih (dewan ulama) Muhammadiyah setempat yang memikirkan penafsiran pelaksanaan hukum (syariat) Islam dalam konteks lokal juga bertindak sebagai penasihat bagi orang-orang Kotagede dalam masalah agama dan etika selama masa hidupnya.

Haji Masyhudi mempunyai rumah besar pada salah satu jalan utama di Kotagede, jalan yang menuju ke utara dari pasar, Rumahnya tampak jelas berbeda dengan rumah-rumah tua di Kotagede karena tidak sesuai dengan bangunan rumah tradisional. Sebagai ganti pendapa, terdapat kamar tamu luas yang dilengkapi dengan banyak perabot kayu jati yang halus dari Jepara. Kamar tamu terletak di muka sebelah timur rumah. Dalam bangunan rumah tradisional, pendapa diletakkan di sebelah selatan bangunan rumah utama. Dengan demikian seluruh rumah dibangun menghadap ke selatan. Orang-orang setempat mengatakan bahwa rumah-rumah harus menghadap ke selatan untuk menghormati Nyai Roro Kidul Ratu Pelindung Mataram. Rumah Haji Masyudi dibangun pada akhir tahun dua puluhan ketika keuangannya tidak bergantung lagi pada ayahnya. Ketika saya menunjukkan hal yang tidak menurut aturan tentang rumahnya dia tersenyum senang dan memberikan penjelasan bahwa dia sendirilah yang menggambar

³²⁷ Masjid perak Kotagede adalah markas Hiztullah/Sabilliah pada zaman revolusi fisik untuk menghalau serdadu NICA yang ingin kembali menjajah Indonesia. Masjid ini menjadi pusat penggemblengan anak muda dan pembekalan anak muda yang mau berjuang. Pada akhir keruntuhan orde lama masjid ini juga dimanfaatkan untuk pembekalan ilmu beladiri untuk menggempur faham dan Partai Komunis Indonesia. Lebih lanjut baca buku Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press,1099) hlm. 186-187

rencana bangunan rumah dan mengabaikan tradisi. Satu-satunya pertimbangan yang ia miliki, menurut dia, adalah bisa dengan enak menampung orang yang datang ke rumahnya untuk pertemuan keagamaan sewaktu-waktu tanpa terganggu oleh cuaca buruk atau suara-suara dari luar. Semula rumahnya mempunyai sebuah garasi yang luas untuk mobil-mobil yang dalam tahun-tahun belakangan ini digunakan untuk Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kotagede dengan sewa dengan sangat murah. Di rumah ini, dia tinggal bersama istri, ketiga anak perempuan dari perkawinannya yang kedua dan suaminya, anak-anak dari pasangan suami istri tadi, seorang pembantu dan seorang pelayan rumah.

Haji Masyudi mempunyai toko yang berdekatan sekali dengan Kantor Pos Kotagede di sebelah timurnya di pinggir jalan menuju ke Plered. Toko itu, semula dibangun bersamaan waktunya dengan rumah yang dibangun pada tahun dua puluhan, dibakar oleh Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1948 sebagai taktik bumi hangus dan sejak itu telah dibangun kembali. Barang dagangan yang dijumpai di tokonya mempunyai macam yang aneh: alat dapur, lampu minyak tanah dan kompor, buku dan brosur agama, buku tulis, dan alat tulis, bermacam-macam paku dan kawat dan bahkan alat-alat pertanian. Pendeknya toko umum dalam versi sangat kecil. Di Kotagede ada beberapa toko umum yang mempunyai lebih banyak macam barang dagangannya dibanding milik Haji Masyudi bila bersaing dalam kualitas dan harga. Tetapi nampaknya Haji Masyudi mempunyai sejumlah langganan tetap yang memungkinkannya untuk mempertahankan tokonya berjalan. Setiap pagi hari jam delapan sampai tengah hari Haji Masyudi sendiri, yang kesehatannya masih baik walaupun usianya lebih dari delapan puluh tahun, bekerja di kebanyakan toko lain di Kotagede tutup dan dibuka kembali antara jam empat dan jam enam sore. Pada siang hari anaknya dan menantunya yang pulang dari kantor, kantor Wilayah Departemen Agama di Yogyakarta, bekerja di toko sedangkan mbah haji menerima tamu-tamu dirumah.

Pada saat bekerja Haji Masyudi memakai baju putih, sarong, kopiah putih bulat di kepalanya. Pada kesempatan resmi dia mengenakan setelah drill, sarung, dan surban, ikat kepala model Arab, di kepalanya. Dari pakaiannya yang sederhana dan tokonya yang kelihatan agak sederhana, sulit membayangkan bahwa dia masih merupakan salah seorang pedagang paling kaya di Kotagede. Tetapi kenyataannya memang begitu. Satu petunjuk tentang kejayaannya yaitu bahwa 2,7% dari semua tanah kediaman di R.K. Prenggan dan R.K. Basen di Kotagede tercatat atas namanya atau anggota keluarganya terdekat, menurut buku catatan tanah kantor Kecamatan Kotagede, dua bidang tanah untuk rumah dan tokonya, sebidang tanah yang luas untuk Mushalla (masjid wanita). Sisanya terdiri dari toko-toko dan rumah-rumah yang disewakan dan tanah terbuka. Dia adalah donatur tetap keuangan Muhammadiyah

setempat sampai wafatnya. Uraian singkat riwayat hidupnya yang dipersiapkan untuk penguburannya menggambarkan kehidupannya sebagai ulama alim guru, pemimpin dan pejuang di dalam gerakan agama dan nasional. Dia juga disebut juga seorang “kyai pedagang dan sukses”.

Pendidikan formal Haji Masyudi dimulai dengan masuk sekolah dasar kelas kedua (sekolah rakyat angka loro) di Keputran Yogyakarta. Sekolah ini khusus melayani anak-anak priyayi Yogyakarta. Saya gagal mendapatkan penjelasan bagaimana Rusdi muda, yang nampaknya berasal dari keluarga biasa, bisa masuk sekolah istimewa ini. Tidak terdengar kejadian lain semacam ini diantara orang-orang Kotagede. Mungkin karena ayahnya sangat kaya dan dekatnya hubungan dagang dengan kalangan keraton. Kesan dekatnya keluarga Mukmin dengan keraton Yogyakarta karena sebenarnya istri kedua Haji Masyudi ialah bahwa dia jelas tidak menggunakan secara efektif hubungannya dengan keraton Yogyakarta. Agaknya jalan hidupnya mengurangi hubungan ini dan mengutamakan komitmennya dengan Muhammadiyah.

Ia menggunakan waktunya untuk belajar bahasa Arab Qur'an tingkat dasar di Pondok Wonokromo dan Pondok Kanggotan, keduanya dekat Kotagede, dan Pondok Punduh, Magelang. Dia ingin mencari pengetahuan lebih lanjut dan memutuskan belajar pada Kyai Zainudin, orang alim terkenal saat itu, di Pondok Cepoko, Nganjuk di kaki Gunung Willis di daratan Kediri, Jawa Timur. Disana dia menghabiskan waktu lima tahun, setelah beberapa tahun lagi di Pondok Mojodari dan pondok Termas, keduanya di Jawa Timur, dia pergi haji ke Makkah sekitar tahun 1910, disana dia belajar pada Kyai Muhtaram dan Kyai Mahfuz, guru yang paling dihormati dari masyarakat “Jawah” (Melayu Indonesia) di Makkah. Melalui belajar di dalam dan di luar negeri ini, Haji Masyudi menjadi dalam *figh* (hukum Islam), tafsir *ushuluddin* (theologi). Dia kembali ke Jawa tidak lama sebelum pecahnya Perang Dunia I kemudian menetap di Kotagede.

Pada tahun 1891 Haji Masyudi yang masih muda mewakili bisnis batik keluarganya di Pasar Malam Kolonial yang diadakan di Semarang dengan sekelompok wakil-wakil pedagang dan ara pengusaha dari Kotagede. Penerbitan resmi dari Pasar Malam itu menyebutkan bahwa Haji Masyudi dari Yogyakarta memamerkan batik di Paviliun Yogyakarta dan memperoleh medali perunggu sebagai penghargaan.

Haji Masyudi selama hidupnya kawin tiga kali secara berturut-turut. Istri pertamanya adalah putri setempat dan memberi dia seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi dokter. Sesudah istri pertamanya meninggal dia kawin dengan seorang wanita dari berasal dari dalam batang yaitu Keraton Yogyakarta sebagaimana disebutkan di atas. Dia nampaknya seorang putri

keraton tetapi saya tidak berhasil memperoleh keterangan tentang bagaimana secara tepat putri tadi mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Yogyakarta saat ini. Sang putri meninggal sebelum Perang Dunia I dengan meninggalkan seorang anak. Sesudah perang, dia kawin untuk ketiga kalinya dengan seorang wanita dari Wonosobo. Sebagaimana kita lihat di muka, pada pertengahan tahun 1910-an Haji Masyudi memprakarsai pendirian dua organisasi pembaharu lokal, Syarekatul Mubtadi dan Krido Mataram. Pada waktu yang hampir bersamaan Kyai Amir pindah ke Kotagede dan menjadi teman terdekat Haji Masyudi. Selama tiga puluh tahun kemudian kedua haji itu memainkan peranan penting dalam perkembangan gerakan Muhammadiyah Kotagede. Haji Masyudi menduduki jabatan voorzitter (ketua) Muhammadiyah cabang Kotagede ama sampai masa sesudah perang, sementara Kyai Amir menjadi kepala sekolah Muhammadiyah di Kotagede selama masa yang hampir bersamaan.

Laporan kongres nasional Muhammadiyah tahun 1923 berisi keterangan bahwa Muhammadiyah cabang Kotagede telah mendirikan sekolah dasar empat tahun kelas kedua (sekolah rakyat angka loro) dan pengajian-pengajian untuk orang tua baik laki-laki maupun wanita diadakan secara teratur disana. Pada kongres nasional Muhammadiyah tahun 1932 yang diadakan di Makassar, Sulawesi cabang Kotagede diwakili dua haji. Masyudi dan Amir (Peringatan Kongres Muhammadiyah, 192). Pada akhir tahun 1930-an, sebagaimana akan lihat nanti, kedua haji itu merupakan organisator utama dalam usaha untuk mendirikan sebuah masjid baru. Masjid Perak, di Kotagede, dan mereka juga bertindak sebagai khatib masjid itu.

Ketika Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) didirikan sebagai federasi yang mencakup semua organisasi Islam selama masa pendudukan Jepang. Haji Masyudi mengepalai cabang menjadi kepala organisasi militer Islam Sabillilah (jalan Allah) dan juga duduk dalam dewan pengurus organisasi pemuda militer Hizbulah. Dia kemudian berhenti dari berperan aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah Kotagede tetapi tetap sebagai sesepuh. Dia juga menjadi anggota Tarjih Muhammadiyah setempat yang memikirkan penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam dalam konteks lokal dan bertindak sebagai penasehat bagi orang-orang Kotagede dalam masalah agama dan etika selama sisa hidupnya.

Pada saat dia meninggal dalam bulan Februari tahun 1972, pemakamannya dihadiri oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, seorang utusan dari keraton Yogyakarta, pejabat kantor Departemen Agama seluruh Yogyakarta, sejumlah besar pemimpin dan ulama-ulama Islam dari berbagai kota di Jawa Tengah, dan sebetulnya seluruh penduduk dewasa Kotagede.

Sementara Haji Masyudi menekuni segi organisasi Muhammadiyah Kotagede, Kyai Amir, yang Riwayat hidupnya akan diuraikan di bawah, menekuni bidang pendidikan dan

memimpin sekolah Muhammadiyah setempat sejak akhir tahun 1910-an sampai datangnya Jepang pada tahun 1942.³²⁸

c. Abdul Kahar Muzzakkir

Kahar lahir di Kampung Gading, terletak di sebelah selatan Alun-alun selatan Kota Yogyakarta dengan nama Dalhar. Tetapi masa kecil dan dewasa serta pada usia tua hingga wafatnya, tinggal di Kotagede Yogyakarta.³²⁹ Dari garis ayahnya, ia adalah putra dari Kyai Mudzakkir bin Kyai Abdullah Rosyad bin Kyai Hasan Basyari.³³⁰

Kyai Mudzakir, adalah guru agama di Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Salah seorang adik Kyai Mudzakir adalah Kyai Munawir, pendiri dan pemimpin pesantren Krapyak. Kyai Mudzakir menjalin persahabatan dengan Kyai Dahlan, pendiri persyarikatan Muhammadiyah.³³¹

Kahar sebagai aktivis selalu aktif dalam pergerakan dakwah. Sejak berstatus mahasiswa, di Mesir, dan lebih setelah pulang kembali ke Indonesia, tahun 1937. Banyak terlibat aktif di berbagai organisasi keagamaan Islam baik tingkat nasional maupun internasional. Di Muhammadiyah Kahar tercatat sebagai Pimpinan Pusat Bagian Pemuda dan PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem). Kahar juga penganjur dan pendiri, sekaligus direktur pertama (1958-1960), Akademi Tabligh Muhammadiyah.³³²

Akan halnya Abdul Kahar Mudzakkir, adalah putra Haji Mudzakkir, seorang pedagang terhormat di Kotagede. Dari garis ibunya³³³, Kahar adalah anak Siti Khadijah binti Mukmin.³³⁴

³²⁸ Informasi berikut diambil di dalam brosur Muhammadiyah Kotagede yang terbit tahun 1969 dan dari hasil wawancara

³²⁹ Achmad Charis Zubair, *Riwayat Singkat dari Prof. Abdul Qahhar Mudzadir (1907-1973)*. Dalam "Brosur Lebaran No 43 Tahun XLII/1425-2004", h.52-54

³³⁰ Mengenai Hasan Basyari ia adalah pemimpin lokal tarekat Syattariyah pada permulaan abad 19. Sebuah tarekat yang berasal dari India dan didirikan oleh Syekh Abdullah Syattar. Ia juga merupakan salah seorang panglima pasukan Diponegoro yang kemudian tertangkap bersamanya dan diasingkan hingga wafat di Tondano, Sulawesi.

³³¹ Dari persahabatan ini nantinya akan dikenal istilahnya pusat Muhammadiyah di 3 kecamatan yaitu 3K (Kotagede Kauman, Karangakajen). Lebih lanjut baca buku : Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*, Yogyakarta, Terawang, 2000.

³³² Buku Panduan Tahun Akademik 2005/2006 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 45. ATM, Perguruan tinggi yang merupakan cikal-bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³³³ *ibid*

³³⁴ Ibunda Abdul Kahar adalah puteri satu-satunya dari lima bersaudara keluarga Haji Mukmin.

Dari perkawinan Mudzakir dengan Khadjjah lahir Dalhar dan Danuri. Nyai Khadjjah adalah pedagang dan Kyai Mudzakir seorang guru agama.

Abdul Kahar Mudzakir - bersama Kiai Amir, Haji Masyhudi, dan Kyai Irfan- merintis berdirinya *Ma'had Islamy*. Yayasan Pesantren ini bertujuan untuk memberikan pelajaran Agama Islam dan akhlak dengan kitab-kitab para ulama salaf.³³⁵

Kahar kemudian menjadi tokoh Kotagede, tokoh intelektual dan politik nasional yang dibesarkan dari pendidikan Muhammadiyah. Lahir di Kotagede tahun 1907, ia adalah putra dari Haji Muzakir, seorang pedagang terhormat di Kotagede, menantu dari Haji Mukmin. Kahar hidup dan dibesarkan dalam lingkungan tokoh agama dan masyarakat yang taat agama sehingga kepribadian Kahar terbentuk kuat.³³⁶

Kahar mendapatkan pendidikan dimulai dari SD Muhammadiyah Selokraman, Kotagede sembari memperdalam ilmu agama di beberapa pondok pesantren. Pada tahun 1924, menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan melanjutkan pendidikan disana dan melanjutkan lagi ke Universitas Al-Azhar dan Darul Ulum, Kairo tahun 1925 dan 1927. Di negeri inilah pengorganisasian pelajar Indonesia disiapkan menyongsong kemerdekaan Indonesia.

Keberhasilan pendidikan Kahar tidak terlepas dari peranan Masyhudi dan Haji Muchsin (paman) yang sangat mendukungnya dalam memperdalam ilmu pengetahuan meski harus banyak biaya.³³⁷

Dalam lingkungan sinkretis Kahar lahir dan dibesarkan serta berinteraksi. Kotagede memang beranjak berubah dari kondisi “di bawah pohon beringin” alias kejawen menjadi “tercerahkan” oleh sinar bulan sabit, yaitu paham Islam, melalui organisasi Muhammadiyah. Tentang Kotagede, yang berproses sinkretis ini Kahar memberi kesaksian:

“Orang-orang di Kotagede sini takut kepada kekuatan yang hidup serta yang mati. Mereka takut kepada Gubernur dan Residen Belanda di Yogyakarta, Sultan Yogyakarta dan Bupati, Wedana dan pegawai-pegawai lainnya. Mantri Polisi,

³³⁵ Setelah berdiri, pesantren dikembangkan oleh para penerusnya, seperti Almarhum KH Ja'far Amir, Kiai Bakri Amir, Kiai Wardan Amir, dan Kiai Slamet Ahmad. Amal usaha Yayasan yang kini diketuai Drs. Asj'ari Hd, MBA dan penasihat Prof. Asyuni Abdurrahman ini adalah pesantren Fauzul Muslimin di Karang, Prenggan; dan Madrasah Tsanawiyah Ma'had Islamy di Mandarakan, serta Madrasah Ibtidaiyah, SLTP Ma'had Islamiyah dan TK Raudhatul Athfal Ma'had Islamy di kompleks pendidikan Boharen. Kotagede. Baca Ensiklopedia Kotagede, op.cit, hlm.130

³³⁶ Eksiklopedia Kotagede, hlm.

³³⁷ Ibid., hlm.3

abdi dalem, juru kunci setempat dan bahkan bekel. Mereka takut kepada Senapati dan keluarganya yang telah meninggal tetapi yang mereka percayai mempunyai kekuatan mistik yang mempengaruhi kepada yang hidup. Mereka takut kepada pohon tertentu, kuburan, batu, rumah kuno, dan bahkan kepada benda buatan manusia seperti patung perunggu di muka kediaman Gubernur di Yogyakarta. Mereka takut kepada berbagai macam hantu yang berisik, memakan sisa makanan, muncul di persimpangan jalan, atau yang bergentayangan di pasar setelah gelap dan bayak yang lain. Tetapi sesungguhnya ajaran Islam yang benar menganjurkan kepada kita bahwa hendaknya tidak seorang pun takut kepada apa saja atau siapapun kecuali Allah yang Maha Kuasa.”³³⁸

Dalam belitan sejarah yang demikianlah jiwa Dalhar kecil, yang kemudian nama lengkapnya Abdul Kahar Mudzakkir, berkembang. Sebagai lazimnya anak muda Kotagede, semua pendidikan bermula dari keluarga.

Dalam usia yang masih belia, 24 tahun, pemuda Kahar hadir dalam forum internasional di Baitul Makdis, Yerusalem, Palestina. Peristiwa terjadi tahun 1931. Forum itu adalah Muktamar Alam Islami yang pertama, sebuah forum persaudaraan yang diadakan oleh utusan berbagai negara - yang notabene Islam- yang tengah manapaki “masa perjuangan kemerdekaan,” yaitu berjuang melepaskan diri dari penjajah dan meraih kemerdekaan. Termasuk untuk negara Palestina

Sebuah sumber menyebut, Kahar diundang dan hadir pada forum tersebut bersama seorang pemuda Malaya (kelak menjadi negara Malaysia), yang sama-sama sedang belajar di Kairo, Mesir, yaitu Abubakar Al Asy’ari³³⁹. Bersama ratusan pemuda dari semenanjung Melayu (“Djawah” ketika itu), keduanya aktif dalam Seksi Arab organisasi *al Djam’iyah al Chairiyah Al Azhariyah al Djawiyah*. Pergerakan mahasiswa Al Azhar Kairo yang berasal dari kedua negara ini memang sejak 1925 mengobarkan semangat anti penjajahan dan kemerdekaan untuk Indonesia dan Malaya.

³³⁸ Mitsuo Nakamura. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, hlm, 40.

³³⁹ Muhammad Zein Hasan. Sekelumit Tentang Perjuangan Kemerdekaan pemuda Islam di Luar Negeri di Majalah *Pandji Masyarakat* 63 IV September 1970, h.19 Hasan menyebut tahun 1929

Sumber lain menyebut³⁴⁰, Kahar adalah Wakil umat Islam Indonesia pada Kongres Dunia Islam di Baitul Maqdis (Palestina) tersebut. Jika Cokroaminoto dan KH Mas Mansyur telah mewakili umat Islam Indonesia dalam konferensi yang dilakukan oleh Raja Abdul Aziz bin Saud pada tahun 1926, maka pemuda Abdul Kahar Mudzakkir dengan inisiatif sendiri menghubungi Partai Syarikat Islam Indonesia dan berhasil mewakili (umat Islam) Indonesia dalam Mukhtar di Palestina.³⁴¹

d. Drs. Achmad Charis Zubair (ACZ)

Achmad Charis Zubair lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 1952 dari keluarga Kotagede yang terpandang. Termasuk cucu Haji Mukmin, sebagai ketua Bani Mukmin yang juga sebagai kelompok intelektual yang mendapatkan pendidikan pasca kolonial. Ia juga aktif di beberapa pergerakan PII (Pelajar Islam Indonesia) dan Muhammadiyah Cabang Kotagede³⁴², wilayah DIY, serta beberapa aktivitas yang menyerempet politik. Selain aktivitas keagamaan ia bersama Darwis Khudori menjadi pendiri Yayasan Pusat Studi Dokumentasi dan Pengembangan Budaya Kotagede (Pusdok), menjadi dewan penyantun Living Museum Kerajinan Kotagede. Sebagian besar waktunya untuk mengurus persoalan kebudayaan. Dan pekerjaan utamanya adalah sebagai dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.³⁴³

Selain itu, ACZ juga mengumpulkan beberapa penghargaan. Antara lain adalah tahun 1999 memperoleh penghargaan Pengembangan Pariwisata dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta, tahun 1999 penghargaan Warisan Budaya dari Gubernur D.I. Yogyakarta, dan tahun 2005 penghargaan Indonesia Development Award dari Kharisma International Foundation. Karir politiknya memang tidak sedahsyat Abdul Kahar Mudzakkir, akan tetapi aktivitas politik lebih pada fungsi *check and balance* dalam hal demokrasi. Misalnya, sempat akan dicalonkan sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta pada Pilkada tahun 2006, atau dicalonkan sebagai anggota legislatif dari beberapa partai politik pada pemilu legislatif tahun 2004 atau tahun 2009 yang akan datang.

³⁴⁰ Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara RI, 1995. Lampiran, Biodata Anggota BPUPKI dan Anggota PPKI, tanpa halaman

³⁴¹ Rasjidi, Prof. Dr. H. berjudul "Mengenang Almarhum Prof. Abdul Kahar Mudzakkir 40 Tahun Persahabatan" dalam majalah Panji Masyarakat, No.142 - Tahun XVI, 1 Januari 1974, h.30

³⁴² Jabatan terakhir sebagai penasehat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede tahun 2005-2010, beberapa tahun sebelumnya juga aktif di kepengurusan Muhammadiyah Propinsi D.I. Yogyakarta

³⁴³ Kolom perbincangan yang dimuat dalam SKH Kedaulatan Rakyat 2 Desember 2007, dengan judul "Yogyakarta, di antara Sentuhan Tradisional dan Modern".

Selain itu terdapat beberapa kelompok yang mempunyai peranan cukup penting dalam fase awal perubahan Kotagede yaitu kelompok Islam yang menjalankan aktivitas perdagangan di Kotagede dan Kota lainnya. Nama-nama tersebut antara lain:

1. Kiai Amir

Kiai Amir.³⁴⁴ Seorang pedagang dan tokoh pendiri Muhammadiyah cabang Kotagede. Nama kecilnya Samanhudi. Ia lahir sekitar 1892 di desa Mlingsen, Kulon Progo. Ayahnya Jalal Sayuti seperti telah disebut, seorang alim terkenal yang pernah tinggal di Mekah, menjadi salah satu guru KH Ahmad Dahlan. Samanhudi muda mulai gemar belajar bahasa Arab dan dasar-dasar ajaran Islam dari ayahnya. Ia berminat kuat untuk belajar Shahihul Bukhari, dan meneruskan pendidikan agama di berbagai pondok pesantren di Jawa.

Melalui dunia perdagangan, ia mulai berhubungan dengan pedagang-pedagang asal Kotagede. Perkawinan kedua dengan cucu Haji Mukmin di Kotagede membawa dia ke tengah-tengah kalangan pedagang Yogyakarta. Ibu mertuanya, Nyai Chatijah, banyak membantu dalam usaha perdagangannya. Dalam perkembangan kehidupan keluarganya, Haji Amir terkenal sebagai orang Kotagede. Kiai Amir banyak menyumbang bagi kemajuan reformasi Islam. Tahun 1910, ia bersama Haji Masyhudi mendirikan dan memimpin Sekolah Muhammadiyah. Selain itu keduanya mendirikan *Syarekatul Mubtadi*.³⁴⁵ Usaha ini berkembang menjadi sekolah rakyat *angka loro* Muhammadiyah.³⁴⁶ Dan berkembang menjadi *HIS met de Quran* (Hollandsch Inlandsche School)³⁴⁷ dan yang kedua menjadi Pendidikan Guru Agama Islam Ma'had Islamy. Kiai Amir juga merupakan salah seorang pendiri Masjid Perak pada akhir tahun 1930-an.

Kegiatan Kiai Amir tidak terbatas di Kotagede, tapi sampai Kota Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebelum pembentukan Majelis Tarjih (Dewa Ulama) Muhammadiyah pada 1927,

³⁴⁴ Lihat Tedjo Soesilo. *Perkembangan Perusahaan Perak di Kotagede*, Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1970. Terutama pada Kesimpulan, hlm.78

³⁴⁵ Adalah Organisasi yang menangani kepentingan pendidikan orang dewasa di Kotagede. Pada waktu bersamaan dia mulai mengajar anak-anak dan pemuda-pemuda di rumahnya Kampung Selokraman, Alun-alun Kotagede.

³⁴⁶ Sekolah Ongko Loro lama belajarnya empat tahun dengan pelajaran pengetahuan umum dan agama. Selain itu didirikan sebuah madrasah (hanya pelajaran agama yang diajarkan terutama untuk murid-murid sekolah rakyat angka loro negeri)

³⁴⁷ Sekolah Dasar Belanda ditambah dengan pelajaran tentang islam

Kiai ini menjadi tuan rumah konferensi ulama-ulama terkemuka yang diadakan di Kotagede.³⁴⁸ Konferensi ini membicarakan persoalan-persoalan agama dan hukum, dalam arti hukum Islam yang penting pada saat itu dan memberi fatwa kepada masyarakat Islam di Jawa. Sebagai hasil konferensi diterbitkan sebuah jurnal yang bernama *Ummat Islam*, dengan Kiai Amir sebagai ketua redaksinya.³⁴⁹

Kyai Amir bukan orang asli Kotagede, dia lahir sekitar tahun 1892 di desa Mlangsem, Kulon Progo, sebagai anak kedua Kyai Jalal Sayuthi, seorang alim yang terkenal. Semula Kyai Jalal tinggal di Mekkah sebagai guru dan ulama selama sekitar sepuluh tahun, KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah salah seorang muridnya disana.

Nama kecil Kyai Amir ialah Samanhudi, ketika Samanhudi masih muda keluarganya pindah Kota Purworejo, Kedu Jawa tengah. Disana dia tumbuh dewasa dan kawin dengan anak perempuan Kyai Amin, lurah (kepala) desa Bokongan, Purworejo. Dari perkawinan ini, Samanhudi memperoleh seorang anak tetapi baik anak maupun ibunya meninggal segera sesudahnya. Bertahun-tahun kemudian, sekitar 1918, Samanhudi yang mengganti namanya menjadi Amir sekembalinya dari naik haji ke Mekkah dengan titel Haji, kawin dengan cucu Haji Mukmin di Kotagede Kyai Amir kemudian tinggal di Kampung Selokraman Kotagede dan memelopori sistem pendidikan Muhammadiyah di situ.

Pendidikan Samanhudi muda mulai dengan belajar bahasa Arab dan dasar-dasar ajaran Islam dari ayahnya Kyai Jalal. Ketika dia mencapai umur belasan tahun dia telah menunjukkan minat yang kuat pada Shihul Bukhari, hadits yang dihimpun oleh al Bukhari (194-256 H/810-870 M). Dia meneruskan pendidikan agama di berbagai pondok pesantren di Jawa, yang sebagian dibiayai oleh mertuanya yang pertama, Kyai Amin. Dia belajar dan memperoleh sertifikat penguasaan hafal Al Quran (Hafidz) dari KH Munawir dari Pondok Krapyak, Yogyakarta, sebuah pesantren yang terkenal karena mendidik siswa dalam menghafal Al quran. Dia juga mempelajari buku-buku agama yang lain dengan Kyai Nawawi dari Pasuruan, Jawa Timur. Dia belajar ilmu nahwu (tata bahasa Arab) dan Kyai Ibrahim di Nglirap, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah.

³⁴⁸ Pesertanya KH Hajid (Kauman Yogyakarta), KH Mawardi (Surakarta), KH Masyhud (Keprabon, Surakarta), KH Abdul Aziz (Wonokromo), KH Abdul Mukti (Jombang), KH Hamim (Ngadiwinatan), KH Iman (Kedungbanteng), KH Masykur (Jejeran), KH Abu Amar (Jamsaren, Surakarta), KH Muhammad Hamam (Purworejo), KH Fekih (Kauman, Yogyakarta), KH Siraj (Pakualaman), dan beberapa penghulu.

³⁴⁹ Ensiklopedi Kotagede. Op.cit., h.214. juga kata pengantar buku Nakamura. *Bulan Muncul dari Balik Pohon Beringin*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1983, hlm.xi

Adalah di Pondok Tebuireng yang terkenal di Jombang Jawa Timur, dia mengalami saat yang menentukan karirnya sebagai santri. Disana dia menjadi salah seorang murid kyai Hasyim Asyari, orang alim “tradisional dan konservatif” yang paling dihormati saat itu kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Samanhudi berada di pondok selama empat belas bulan, kebanyakan mempelajari karya Bukhari. Segera Kyai Hasyim Asyari mengakui kecerdasan dan kesungguhan Samanhudi yang luar biasa. KH Hasyim Asyari menyarankan bahwa Samanhudi sebaiknya pergi ke Mekkah dan meneruskan belajar pada orang yang ahli (spesialis) masalah Bukhari di Kota Suci. Samanhudi muda begitu gembira atas pengakuan dan dorongan gurunya sehingga dia langsung meninggalkan tanpa memperoleh persetujuan keluarganya. Kemudian karena tidak ada bantuan dari keluarga, Samanhudi kehabisan uang untuk mengadakan perjalanan selanjutnya ke Mekkah. Karena itu sebagaimana kebanyakan pemuda lain yang mempunyai semangat agama tetapi miskin pada saat itu, dia menggunakan waktunya di Singapura untuk mencari uang guna membiayai perjalanannya lebih lanjut ke Mekkah lalu di Singapura dia bekerja di perusahaan penerbit milik Sayyid.

Kyai Amir juga diangkat sebagai hakim ketika sebelum penyerahan Hindia Timur kepada Jepang, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta. Badan pengadilan Islam tertinggi untuk Jawa dan Madura Amir ditunjuk sebagai salah seorang hakimnya. Selama hayatnya Kiai Amir banyak menulis dan mengedit banyak buku; sebagian besar penjelasan tentang Al Quran dan Hadist. Kiai Amir meninggal 1948, dalam usia 56, dan dimakamkan di Boharen, Kotagede, dekat dengan Haji Mukmin (kakek mertuanya) dan Haji Muhsin (kawan dan paman mertuanya).

2. Ahmad Kasmat Bahuwinangun

Kasmat adalah anak Bahuwinangun, keluarga dagang yang kaya dengan menjual berlian.³⁵⁰ Tokoh ini sezaman dengan Kahar Muzakir yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Indonesia sehingga kedua tokoh ini layak menjadi tokoh nasional. Kasmat lahir pada tanggal 15 Mei 1908, meninggal pada tahun 1996. Ayahnya seorang *abdi dalem* keraton Yogyakarta dan ibunya adalah pengusaha emas dan intan yang terkenal di Kotagede. Pendidikan agama didapatkan dari pendidikan kultural oleh Kyai Ibrahim, selain itu dia juga mengenyam pendidikan di Sekolah Kristen milik Belanda sebelum akhirnya masuk Sekolah Kehakiman di Jakarta. Setelah itu ia bekerja sebagai panitera di Pengadilan Negeri dan kemudian melanjutkan Pendidikan berikutnya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta dan

³⁵⁰ Brosur AMM Kotagede, edisi No.43/2004, hlm. 53

meneruskan di Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda sampai mendapatkan Mr (*mister in de rechten*) tahun 1943.

Kiprahnya sangat luas dalam percaturan gerakan politik sosial-agama dan, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PSSI, anggota pengurus besar Muhammadiyah, pengurus besar Partai Islam Indonesia. Selain itu ia menjadi anggota delegasi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) di Jepang. Kemudian karir politiknya dibabat oleh Belanda bersama teman lainnya yaitu Kahar Muzakir dan Faried Ma'roef. Mereka ditangkap Belanda pada masa perang Dunia II antara tahun 1937-1939.³⁵¹

Atas jasa-jasanya pemerintah Indonesia memberikan penghargaan sebagai salah seorang perintis kemerdekaan. Sejak 1960 sampai 1963 Kasmat menjadi Rektor UII, setelah sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UII.

3. Prof. Dr. H.M. Rasyidi

Dari beberapa sumber dinyatakan bahwa latar belakang keluarga Rasyidi³⁵² atau nama kecilnya Saridi, anak dari Atmosudigdo, seorang raja dagang di Kotagede kelahiran tahun 1910. Kekayaan Mas Atmosudigdo digunakan untuk membiayai pendidikan Rasyidi di Kairo, Mesir. Sekembali dari Kairo, ia dikenal sebagai salah seorang penganjur paling aktif paham pembaharuan Islam Mesir yang dipelopori Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Indonesia, menjadi tokoh nasional dan tokoh pergerakan Muhammadiyah.³⁵³ Pada tahun awal kemerdekaan, Prof.Dr.HM. Rasyidi ditunjuk sebagai Menteri Negara pada tahun 1945 pada Kabinet Syahrir yang pertama, sedangkan pada 1946 menjadi Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama.

Secara genealogis keluarga ini masih terhubung dengan keluarga Haji Muchsin (anak Haji Mukmin) yaitu hubungan perbesanan. Sehingga pada waktu menempuh pendidikan di luar negeri kebanyakan orang Kotagede yang berasal dari satu keluarga yaitu dengan kesadaran kelompok borjuasi yang sangat kuat untuk mendapatkan pendidikan yang bagus dengan *high cost*, tentu ini tidak bisa didapatkan semua orang Kotagede. Mereka, keluarga kaya yang

³⁵¹ Karena dituduh mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah pada waktu itu. Mereka bertiga dijatuhi hukuman mati, tapi berhasil selamat karena pemerintahan Belanda dijatuhkan oleh Jepang, sumber: *Ensiklopedi Kotagede*, op.cit., hlm. 4

³⁵² *Ensiklopedi Kotagede*, op.cit. hlm. 136

³⁵³ *Ensiklopedi Kotagede*, op.cit. hlm. 98. Juga Nakamura, op.cit.hlm. 120

menempuh pendidikan di Mesir dan Eropa antara lain Abdul Qahhar (keponakan haji Muchsin, cucu Haji Mukmin), Makmur (kakak Qohhar lain ayah), Zubair dan Jalan (anak Haji Muchsin), Rasyidi ke Perancis, Kasmat dan Jalal belajar ke Belanda. Selain belajar ke Mesir pastilah naik haji sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ritual golongan kaya ini.

4. Asa'd Human

Tokoh yang tak kalah penting adalah As'ad Humam.³⁵⁴ Tokoh komponis penggagas/pembuat “irama” Iqro' di Indonesia ini memelopori gerakan belajar Al Qur' an dengan metode Iqro' sehingga gemanya nyaris ke seluruh dunia. Melalui lembaga Angkatan Muda Masjid dan Mushola (AMM) mempunyai misi membina dan mengembangkan gerakan Dakwah Al Qur'an yang meliputi membaca, menulis dan memahami Al Qur'an (M3A) bagi seluruh umat Islam di manapun, dengan membawa misi inilah kegiatan tim tadarus AMM dilaksanakan. Beralamat di Selokraman. Di samping ada misi-misi khusus yang dilaksanakan; yaitu kegiatan rutin pengelolaan TKA-TPA-TPQ, kursus *tartil* Quran, kursus bahasa Arab metode Fasih, majelis ta'lim malam Kamis, forum studi *ulumul qur'an*, penataran metodologi *Iqro* dan manajemen TRA-TPA-TPQ serta tempat studi banding para pengelola, ustadz, dan santri TKA, TPA-TPQ di seluruh Indonesia.

5. Drs. Muhammad Chirzin M.Ag

Tokoh yang masih bertahan adalah Muhammad Chirzin.³⁵⁵ Tokoh Muhammadiyah Kotagede ini pada zamannya pernah menjabat Sekretaris Masyumi di bawah kepemimpinan Haji Masyudi. M Chirzin memberi pengaruh yang besar dalam pengembangan Islam di Kotagede dalam kedudukannya sebagai pimpinan Takmir Masjid Perak pada 1958, selama 10 tahun. Pada 1949 M Chirzin menggiatkan pengajian menjelang berbuka puasa. Kemudian membentuk majelis lajnah dengan dukungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede, bersama H. Ridha dan Zuhri Hasyim, menyeragamkan doa-doa yang sebelumnya bermacam-macam, menjadi bacaan doa yang sama untuk masyarakat Muslim Kotagede.

Ada satu kesimpulan juga *lesson learn* dari bab ini adalah semakin membenarkan bahwa Kotagede merupakan kota yang sangat genealogis tidak hanya dalam hal profesi dan status sosial akan tetapi juga genealogis secara biologi ada proses pewarisan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh kaum borjuasi meski asumsinya adalah para pedagang

³⁵⁴ *Ensiklopedi Kotagede*, op.cit. hlm.18

³⁵⁵ *Ensiklopedi Kotagede*, op.cit. hlm.46. Baca juga Brosur Lebaran 43 Tahun XLII/1425-2004, hlm.61

kaya ini menyiasati kemungkinan terburuk dari melemahnya sektor perdagangan mereka kemudian melakukan reproduksi borjuasi dalam bentuk lainnya yaitu kelas profesi, intelektual dan sebagainya.

Hal ini bisa dilihat sebagaimana genealogi berikut. Beberapa kelompok borjuis di Kotagede jika dilakukan pelacakan terhadap keturunan nenek moyangnya dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari beberapa keluarga saja yaitu dari keturunan haji mukmin yang melahirkan beberapa tokoh dan pedagang besar seperti Haji Masyhudi, Haji Muchsin, Kahar, dan sebagainya yang berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia; Kasmat Bahuwinangun (Mesir), Abdul Kahar Mudzakkir (jebolan Mesir), Prof. Rasyidi (lulusan Perancis) adalah kelompok pembaruan dalam kelembagaan sosial, keberagamaan, dan pemikiran baru Islam Indonesia; As'ad Humam adalah komponis pencipta "lagu-irama" Iqro' di Indonesia; Muhammad Chirzin adalah tokoh agama Kotagede. Selain itu juga sudah muncul beberapa tokoh intelektual baru yang tersebar di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta dan menjadi tokoh dan elit lokal maupun nasional seperti Drs. Habib Chirzin (Ketua Association of Moeslem Asian Network), Dr. Siti Syamsiyatun, MA, (dosen UIN Sunan Kalijaga, pengurus PP 'Aisyiah), Yusron Asrafi, MA (Dosen UIN dan aktivis PP Muhammadiyah), Drs. Chariz Zubair (ketua Dewan Kebudayaan Yogyakarta), Dr. Khoiruddin Bashori (Rektor Universitas Muhammadiyah), Arif Nurhartanto, SIP (Ketua DPRD Kota Yogyakarta), Herry Nurhartanto, SIP (Ketua DPRD Kota Yogyakarta), Herry Zudianto, SE.Akt, MM (Wali Kota Yogyakarta), Dra. Hj.Siti Wardanah Muhadi, SH (Ketua Pimpinan Pusat Aisyiah dan mantan hakim tinggi PTA DIY), dan lain- lain. Juga generasi intelektual kelas menengah yang tinggal di Eropa seperti Darwis Khudori (Perancis), Jalal Zubair (Belanda), dan generasi baru yang masih tersebar di berbagai universitas dan lembaga Pendidikan. Mereka berasal dari satu dua keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan secara genetik.

Dan yang lain adalah penemuan bahwa selain bergerak di bidang pendidikan juga masih berjalan aktivitas ekonomi yang turun-temurun dan berbentuk kekeluargaan yang tersebar di Kota Yogyakarta khususnya. Tentu saja skala lebih sempit dari aktivitas membangun basis ekonomi nenek moyangnya terdahulu yang melampaui batas teritorial Yogyakarta bahkan lintas negara pada saat itu, di tahun 1900-an atau abad ke-18.

BAGIAN 5

Masa Depan Politik Indonesia: Kepemimpinan Elit Dagang?

Kelompok borjuasi, oleh kalangan ilmuwan Barat seringkali diidentikkan dengan demokrasi dalam konteks pengalaman Negara Eropa dimana borjuasi menjadi kekuatan yang sangat penting dalam demokratisasi. Di Kotagede kapitalisme borjuasi yang didorong oleh kekuatan yang beragam baik karena akomodasi terhadap teknologi dan kekuatan politik penguasa, kelompok borjuasi Jawa yang ada di Kotagede justru melalui fase yang sangat berbeda dengan Eropa yaitu kemunculannya diawali dari kelompok pertukangan, perdagangan, kemudian fase berikutnya industrialisasi dengan lahirnya lembaga pendidikan dan politik sebagai lahan baru bagi borjuasi untuk *survival of the fittest*.

Pergeseran peta politik dan ekonomi dapat dilihat dari timbul dan tenggelamnya kelompok elit ekonomi yang disebut dengan borjuasi. Borjuasi bila dimaknai sebagai kekuatan baru mereka bekerja keras untuk mengambil alih kekuasaan ekonomi dan kemudian merambah ke wilayah politik.³⁵⁶ Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia atau negara lainnya, bahkan zaman Mataram Islam di Kotagede pun kelompok yang mempunyai kekuasaan ekonomi juga mengambil alih kekuasaan dalam bentuk lain misalnya keraton dengan membuat ketergantungan ekonomi, pimpinan agama dan kelompok aliran lainnya. Kecenderungan itu terlihat dari semakin banyaknya kelompok dagang merambah partai politik dan kemudian parlemen atau kepala daerah.³⁵⁷

³⁵⁶ Dalam penggalan sejarah lainnya seperti halnya dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam upaya merebut kedaulatan ekonomi dengan menggunakan berbagai strategi untuk mendesak pengaruh dan kontrolnya kepada masyarakat. Mereka memulai terlibat dalam bisnis saham, mencapai golongan-golongan politik dan borjuis. Untuk mencapai cita-cita tersebut bangsa Yahudi menyadari jalan keluarnya adalah dengan menggabungkan golongan borjuis. Selain itu mereka memperkuat kekuatan dengan membangun opini publik melalui penguasaan pers. Dengan basis ekonomi mereka berusaha menguasai dunia. Baca, Adolf Hitler. *Mein Kampf*, volume 1, (Yogyakarta: Narasi, 2007), hlm. 336-338

³⁵⁷ Sebenarnya kelompok saudagar bukanlah yang pertama kali merambah jagat politik. Pada tahun 1950-1965-an banyak aktivis juga merangkap pedagang seperti aktivis pergerakan Muhammadiyah yang tergabung dalam Masyumi, Partai Sarikat Islam.

Bercermin dari Kotagede untuk melihat politik Indonesia kontemporer cukup memberikan argumentasi bahwa perjalanan kelompok borjuasi untuk *survive* di tengah masyarakat yang berubah mengalami pasang naik dan pasang surut serta kontestasi dan negosiasi yang sangat kompleks dengan pembelahan sosial yang sangat rumit. Beberapa indikator ini dapat menjelaskan proses historis kelompok pedagang kaya di Indonesia yaitu *pertama*, bagaimana borjuis lahir. *Kedua*, bagaimana mereka bertahan di tengah masyarakat. *Ketiga*, mengapa kelompok ini mengalami kemunduran yang cukup dramatis.

Persoalan optimis atau pesimisme mengenai peranan borjuasi dalam demokrasi yang ada di Kotagede maupun Indonesia sebenarnya tidak seindah yang dibayangkan oleh para pengkaji teori klasik mengenai keberadaan borjuasi di Eropa, akan tetapi juga tidak terlalu terjal sebagaimana bayangan kelompok yang melihat sifat semu borjuasi Jawa yang hanya besar oleh intervensi negara. Dalam beberapa hal borjuasi yang lahir juga merespon perkembangan teknologi dan revolusi sebagaimana yang terjadi di Eropa. Jadi masih ada nilai-nilai borjuasi yang sangat orisinal di Jawa meski pada mulanya dilakukan oleh para priyayi. Hanya saja beberapa pendapat yang menilai priyayi tidak suka berdagang.³⁵⁸

Pertama, dalam kajian teori klasik seperti yang digagas oleh Bottomore bahwa keberadaan borjuasi mutlak diperlukan untuk menopang proses demokrasi atau menjadi pilar yang penting dalam pendemokrasian sebuah sistem politik kenegaraan. Di Kotagede, borjuasi tidak mutlak hanya dimunculkan oleh negara karena dalam realitasnya terjadi revolusi teknologi yang bersifat mikro yaitu revolusi yang terjadi dalam beberapa tahap yang dibahas dalam bab sebelumnya yaitu bagaimana perubahan struktur ekonomi dan kekuasaan yang terjadi di Kotagede. Hal ini bisa dilihat dari perubahan basis ekonomi yang dimiliki oleh para priyayi menjadi dimiliki oleh kekuatan independen yang dibayangkan oleh orang Barat sebagai kekuatan baru yang akan memberikan kontribusi kepada demokrasi sebab tidak ada ikatan patronase yang kuat antara mereka.

Sayang sekali anggapan mengenai borjuasi di Kotagede tidak selalu dapat dipersamakan atau disandingkan dengan pengalaman Eropa yang memang borjuasi-nya menjadi kelompok kelas tersendiri yang independen, menjadi kekuatan baru yang mampu menggeser kelompok elit penguasa lama yang diwarnai oleh komunitas agama dan ideologi. Borjuasi muncul dengan semangat kapitalisme sejati yang tidak menjadi subordinat dari kepentingan ideologi lainnya seperti agama atau afiliasi politik aliran.

³⁵⁸ Darmanto Jatman, *Perilaku Kelas Menengah Indonesia*, (Yogyakarta: Bentang, 1996).

Di Kotagede, borjuasi tidak lahir sebagai kekuatan yang mengusung kesadaran kelas para pemodal yang akan menjadi kekuatan tandingan baru bagi penguasa yang sedang memimpin yaitu keraton. Secara sederhana penyebab kegagalan borjuasi di Kotagede ini antara lain diakibatkan oleh; *pertama*, borjuasi tidak berjalan sebagaimana pemahaman bahwa borjuasi merupakan suatu kelas sosial sendiri yang berhadapan dengan kekuatan lainnya misalnya kekuatan bangsawan atau agamawan. Borjuasi justru merespon politik dengan mengedepankan ideologi sebagai kekuatan, dalam hal ini ada yang menggunakan Islam dan Muhammadiyah sebagai basis untuk mendapatkan dukungan dari massa untuk merespon situasi yang berkembang terkait dengan masalah ekonomi dan politik. Artinya, perjuangan kelas tidak ditemukan dan yang ditemukan adalah pertarungan antara ideologi yang ada baik Islam, Nasionalis atau para bangsawan yang menganut Islam Jawa. Kondisi demikian bisa dilihat dari pertarungan kekuatan yang ada di panggung nasional bagaimana kekuatan borjuasi terfragmentasi dalam berbagai kekuatan dalam partai politik, parlemen dan pemerintahan. Mereka tidak pernah bersatu sebagai sebuah kelas, akan tetapi berkontestasi dengan kelompok borjuasi lainnya misalnya antara Jusuf Kalla dengan Aburizal bakrie atau kelompok pengusaha lainnya yang tergabung dalam berbagai partai.³⁵⁹

Selain kekuatan borjuasi di Kotagede menjadi *secondary* dari perjuangan ideologi atau agama, karakteristik borjuasi di Kotagede yang berada dalam perubahan yang disebabkan industrialisasi dan perdagangan ternyata masih mengedepankan kekuatan paguyuban sebagai tipologi dalam mempertahankan eksistensi dan kekayaannya. Hal ini bisa dilihat dari tradisi berkerumun dalam bani atau ikatan kekeluargaan atau patronase yang seperti dilakukan nenek moyangnya pada peradaban agraris (*gemeinschaft*) masa-masa sebelumnya.

Hal ini bisa dilihat dari model perkawinan kerabat atau sistem endogami agar harta dan kekayaan tidak lari ke keluarga lainnya. Lahirnya berbagai bani di Kotagede ini juga menimbulkan kontestasi dalam perdagangan sehingga borjuasi sekali lagi semakin memecah-mecah diri dalam berbagai kekuatan belum lagi dalam afiliasi politik kontemporer yang sangat beragam. Partai kekeluargaan kemudian menjadi bagian yang

³⁵⁹ Ketidakjelasan karakter borjuasi nasional inilah yang kemudian oleh Akbar Tanjung dalam disertasinya dikatakan bahwa kepemimpinan politik ke depan sangat berbahaya apabila berada di tangan para saudagar Hal ini dikarenakan saudagar bukan menjadi kekuatan baru yang pro demokrasi akan tetapi menjadi kekuatan ideologi yang mengedepankan patronase dan atas prinsip *like and dislike* dalam politik. Mereka, para pemodal ini tidak dilandasi sebagai kelompok kelas yang akan mengambil peran dalam demokrasi sebagaimana gambaran Bottomore yang mengimpikan kekuatan borjuasi ala Barat juga bisa terjadi Asia Tenggara.

tidak terpisahkan misalnya keluarga PPP di Kauman akan diikuti keluarga di Kotagede atau Karangjajen untuk berafiliasi ke PAN atau PPP dan sebaliknya karena ikatan kekeluargaan begitu juga afiliasi kepada ormas baik Muhammadiyah, NU, Ma'had Islam, atau ormas lainnya di Kotagede.

Dalam pandangan Geertz model berkerumun dalam aktivitas ekonomi ini tidak memungkinkan untuk mengabadikan kekayaan dalam jangka waktu yang lama terlebih para pengusaha Jawa memang tidak memiliki perusahaan sebagai basis penopang kegiatan ekonomi sehingga terbukti para borjuasi pedagang hanya bertahan secara kuat hanya satu sampai tiga periode saja.³⁶⁰

Kedua, melihat kelahiran borjuasi dari sudut pandang kesejarahan yang cukup diwarnai oleh intervensi dari beberapa kelompok yang menentukan. Dalam hal ini akan melihat borjuasi di Kotagede yang muncul disebabkan oleh dua faktor utama dan beberapa faktor pendukung. Pertama, Kehadiran kerajaan Mataram tahun 1889 sebagai pusat kerajaan yang memang juga menjadi pusat perdagangan. Sebagai kerajaan non-Maritim harus berusaha menumbuhkan sektor pertanian dan terutama perdagangan. Selain itu kerajaan memang membutuhkan pengrajin untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada kerajaan lain di Nusantara. Kedua, penjajahan kolonial. Hal yang paling menonjol adalah diberikannya hak istimewa kepada komunitas pedagang dan orang kalang untuk memonopoli pengelolaan dan penyediaan barang kerajinan dari emas dan perak. Faktor pendukung kemudian adalah akibat kolonialisme Belanda yang mempunyai hak politik atas negara boneka Mataram kemudian berkorelasi kepada permintaan pasar dan perkembangan bisnis perdagangan yang melahirkan beberapa golongan borjuis dengan memberikan beberapa hak monopoli terhadap barang komoditas tertentu. Semenjak zaman Mataram terdapat distribusi hasil kerajinan dan perdagangan menjadi sangat bergairah dan roda perekonomian berputar di zaman kolonial sampai sekarang ini dengan beberapa perubahan karakteristik atau mengalami apa yang disebut transformasi dari sistem ekonomi kolonial menuju ekonomi modern atau ekonomi kapitalistik.³⁶¹

³⁶⁰ Bani Mukmin hanya sampai keturunan kedua sebagai pedagang besar dan hal ini dipengaruhi oleh lisensi dan stabilitas negara baik Mataram, Keraton Yogyakarta maupun Kolonial Belanda. Borjuasi Kalang sebenarnya yang mempunyai perusahaan yang kuat sebagai penopang kegiatan ekonomi. Namun keberadaan pegadaian dan perusahaan transportasi orang Kalang akan tetapi komunitas Kalang sangat rentan secara politik sebab karakteristiknya yang apolitik.

³⁶¹ Kenapa kesadaran borjuasi untuk mengendalikan negara dengan menjadi politikus-pengusaha baru muncul tidak diikuti dengan kesadaran untuk memberikan kontribusi terhadap demokrasi? Realitas ekonomi-politik ini harus ditelusuri akarnya secara historis ke masa akumulasi kapital Orde Baru, bahkan ke masa kolonial Belanda. Richard Robison (1986) dalam Indonesia: *The Rise of Capital* yang mengkaji fraksi kapital di bawah Orde Baru, sejarah perkembangannya, juga peranannya dalam dinamika pembentukan

Dari pemaparan sederhana di atas penulis mencoba membuat perbedaan kategorisasi borjuasi lokal dengan membandingkan dengan karakteristik borjuasi lokal dengan konteks Eropa atau Amerika. Beberapa kategorisasi ini muncul dari pembacaan terhadap kondisi lokal dan beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti.

Berikut tabel kesimpulannya.

Tabel 5.1. Borjuasi Kotagede dan Eropa: Persamaan & Perbedaan

Uraian	Kotagede	Eropa
Asal-usul	Borjuasi lahir dari revolusi mikro atau lebih pas disebut dari evolusi masyarakat	Borjuasi lahir dari revolusi yang sangat radikal setelah terjadi penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
Ideologi Borjuasi	Kapitalisme dan borjuasi sebagai <i>secondary</i> dari kekuatan ideologi dan kekeluargaan yang bersifat patronase	Kapitalisme sebagai ideologi untuk akumulasi kapital/ <i>spirit of capitalism</i>
Peran negara dalam	Sebagian dibesarkan sebagai “anak kandung” negara (Mataram, Surakarta, Yogyakarta,	Akibat revolusi industri tahun 1688

politik totalitarianisme Orde Baru. Ia menerangkan bahwa kekuatan revolusioner paling bekerja di Dunia Ketiga adalah kapitalisme. Bentuk khusus yang revolusi kapitalis dikondisikan oleh faktor-faktor beragam yang kompleks, dampak dari kolonialisme terhadap masyarakat dan ekonomi, formasi dari kelas-kelas di bawah penguasa kolonial, kodrat konflik politik pada periode pasca kolonial, hubungan negara dengan ekonomi internasional, dan perluasan sumber-sumber nasionalnya. Bisnis Politik di lakukan tidak saja pada zaman Orde Baru atau reformasi akan tetapi semenjak Orde Lama banyak kalangan terlibat dalam kongsi bisnis dalam politik baik Militer, Sipil, dan Pengusaha Asing. Baca juga buku *Bisnis Dan Politik* (Yahya A. Muhaimin, tanpa Tahun), *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Yoshihara Kunio Tanpa tahun), buku tiga seri *Nusa Jawa, Silang Budaya* Karya Denny Lombard (1996). Banyak ilmuwan membangun teoritisasi terhadap karakter kekuasaan negara. Negara yang berada dalam sistem kapitalis, akan cenderung berpihak pada kepentingan borjuis. Karena pembiayaan negara itu datang dari pajak. Pajak itu dari pengusaha, kelas borjuis, karena itu secara struktural pemerintah harus membesarkan pengusaha dan melindunginya sebagai bentuk loyalitas patronase. Di Indonesia, pemerintah jadi pengusaha, dengan relasi nepotisme dan sebagainya. Sehingga bukan saja koalisi antara kelas kapitalis negara, negaranya sendiri sudah terlibat dalam dunia bisnis.

pembentukan borjuasi	Belanda) dan juga sebagai respon atas perkembangan pengetahuan dan teknologi. Borjuasi santri juga menjadi simbol resistensi atas dominasi keraton	
Kesadaran kelas	Borjuasi lahir sebagai kekuatan ideologi dan agama bukan digerakkan oleh kesadaran perjuangan kelas	
Respon negara atas borjuasi	Borjuasi direspon oleh negara sebagai kekuatan negara kecuali negara kolonial Belanda yang menganggap para pedagang sebagai kekuatan alternatif	Negara menyadari bahwa borjuasi sebagai kekuatan kelas sosial yang sangat penting
Sebutan yang lazim untuk pemilik modal	Juragan, majikan, bos, pengusaha, pedagang	Bourgeoisie
Kelas menengah	Pedagang, kelas/kelompok menengah	<i>Petty borjuasi, middle class</i>
Kultur	Dari satu kultur feodalistik yaitu bangsawan/raja dan abdi dalem sebagai bentuk patron-klien	Dari revolusi industri yang menghargai pengetahuan/penemuan dan inovasi

Tipologi masyarakat	Industri-kapital dengan penekanan pada tenaga manusia/pengrajin	Industrial-kapitalis dengan teknologi
Tipologi karakter masyarakat	Individualis, egois, materialis, agamis	Individualis, egois, materialis
Agama	Agama Jawa dan aliran modernis (abangan dan santri)	Menolak hierarki gereja, kebebasan memahami agama
Sistem ekonomi	Pasar, dan sistem kekeluargaan	Borjuis-proletar
Kelas sosial	Juragan-buruh dan pedagang yang berada diantara kedua kelas tersebut	Borjuis-proletar
Organisasi buruh	Tidak diorganisir	Diorganisir dan menggerakkan
Kondisi sosial	Ada kesenjangan sosial tanpa kerusuhan berarti	Ada kesenjangan sosial
Keberadaan koperasi	Keberadaan kurang atau tidak fungsional untuk mengurangi kesenjangan. Hanya menjadi paguyuban pengusaha dan pedagang kaya	Keberadaan koperasi sangat fungsional dan membantu anggota untuk lebih sejahtera
Peran dalam demokratisasi	Tidak berperan sebab kultur yang ada dan terbangun masih sangat feodal. Kehadiran borjuasi hanya semakin	Sangat mendukung dengan memunculkan kekuatan baru sebagai <i>check and balances</i> dalam pemerintahan-kekuasaan yang awalnya hanya politis

	memperumit pembelahan sosial	menjadi kekuasaan dalam bidang ekonomi (tidak dikuasai oleh Negara)
--	------------------------------	---

Selain itu juga terdapat pembeda antara borjuasi santri dan abangan di Kotagede. *Pertama*, kelompok borjuasi santri jauh sukses melakukan regenerasi dan lebih lama, bisa sampai pada 4-8 generasi sekarang. Sementara borjuasi dari kelompok kalang nyaris kehilangan genealogis secara alami sebagai pewaris perdagangan, namun jenis usahanya tetap dilanjutkan oleh masyarakat. *Kedua*, orientasi hidup ketika kejayaan borjuis, kaum borjuis santri mengedepankan pendidikan ke Timur Tengah dan Eropa. Sebagian digerakkan oleh nilai selain memiliki harta juga hasrat ingin mendapatkan gelar sebagai muslim yang taat dengan predikat “Haji”. Sementara golongan kalang senang membangun rumah yang megah, besar dan *Indies* sebagai simbol keberhasilan atas ekonomi.

Kemunculan dua kerajaan baru pasca perjanjian Giyanti juga memberikan kontribusi yang besar terhadap keberadaan para borjuasi dengan memberikan lisensi tertentu kepada mereka seperti yang dilakukan Kerajaan Surakarta yang memberikan kemudahan dalam pendirian rumah dan bisnis pegadaian orang Kalang. Berbeda dengan keraton Yogyakarta yang justru melakukan sedikit penghambatan aktivitas pedagang atau kelas borjuasi dengan kebijakan pembersihan mantan aktivis partai Masyumi dan PKI yang kebanyakan para pedagang.

Torquist (1990) berpendapat bahwa kemunculan kapitalisme di Indonesia tidak melalui jalur konvensional seperti yang diterangkan Marxisme, baik melalui jalan ideal dari bawah yang dipelopori oleh para borjuis yang sudah terbebaskan, maupun lewat cara Prusia yang menempatkan negara sebagai agen pembangunan yang menjalankan komando dari atas.³⁶² Dalam konteks Indonesia hampir serupa mengenai bagaimana keterlibatan aktor yang bernama negara³⁶³ turut melahirkan borjuasi di Indonesia. Pembacaan terhadap kelas borjuasi juga dapat dilacak dari keberadaan kelas pedagang kaya Indonesia atau Asia Tenggara secara lebih luas.

Apabila ditelusuri proses transformasi masyarakat karena perkembangan interaksi diantara golongan elit penguasa baik dari keraton maupun pemerintah kolonial dengan massa,

³⁶² Torquist, *Rent Capitalisme, State and Democracy*, (1990), yang dikutip Eric Hiarij dalam *Materialisme-Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan Kebangkitan Kapitalisme Orde Baru*, hlm.13-14

³⁶³ Negara diartikan secara luas tidak hanya Negara Modern yang seperti Indonesia dalam konteks ini juga dipahami sebagai pemerintah (kerajaan, kolonial) yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan yang melahirkan kelas-kelas sosial.

maka dapatlah dikenali kehadiran kelas borjuis secara berangsur tapi pasti.³⁶⁴ Para kelas borjuis ini memanfaatkan negara untuk upaya akumulasi modal dan memperoleh kehormatan di tengah masyarakat. Negara baik yang berbentuk kerajaan atau pemerintah kolonial atau sebuah rezim berpotensi untuk membentuk memusnahkan keberadaan kelompok dagang, pebisnis politik, dan konglomerat sebagai kelas borjuasi yang pernah ada di Nusantara. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemerintah Kolonial turut membentuk golongan pedagang kaya sebagai *partner* untuk melestarikan kekuasaannya baik secara langsung maupun tidak. Golongan-golongan ini terbentuk juga dimanfaatkan untuk membuat poros kekuatan baru yang akan berhadapan dengan para ningrat atau raja. Bisa dikatakan ini adalah bagian dari politik *divide et impera* (pecah belah). Golongan diluar ningrat ini diberikan banyak hak keistimewaan dalam perdagangan dan akan membentuk golongan yang kuat, mandiri secara ekonomi dan politik dari negara. Inilah yang disebut dengan karakteristik kapitalisme semu di Asia tenggara.³⁶⁵ Yang kemudian tidak memungkinkan golongan ini independen dalam mengatasi persoalan politik dan kekuasaan.

Sebelum merdeka, sepanjang abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 kekuatan ekonomi di Indonesia tumbuh dari komunitas Jawa, Sunda, Bugis, Minangkabau yang berbasis etnis dan religius. Bagaimanapun keterangan-keterangan ini, meski terbatas, memungkinkan kita untuk mengerti sedini mungkin, betapa besar pengaruh-pengaruh pedagang Jawa, tidak hanya di daerah pesisir tapi juga di pedalaman semisal di Kotagede yang berpusat di Pasar Gede, bekas ibukota Kerajaan Mataram menjadi ibu kota perdagangan yang sangat penting.³⁶⁶ Hal ini juga disebabkan oleh kesadaran sebagai daerah pedalaman maka munculah motivasi yang kuat untuk mengembangkan perekonomian pedalaman.

Sebenarnya jawaban atas pertanyaan bagaimana kelompok Borjuasi Jawa di Kotagede bertahan telah dibahas dalam bab terdahulu. Untuk *survive* dari kepunahan banyak strategi yang

³⁶⁴ Hal ini dapat dilihat dari perkembangan konglomerasi yang berakibat kesenjangan sosial dan ekonomi lalu menghasilkan program yang mengupayakan pemerataan. Baca Arbi Sanit dalam Demokratisasi: Politik Golongan Menengah Indonesia, jurnal UNISIA edisi 34/XIX/II/1997

³⁶⁵ Penjelasan mengenai keterlibatan negara membentuk golongan borjuis dapat ditunjukkan dengan beberapa contoh misalnya keterlibatan seorang Ibnu Sutowo dari karier dokter, militer, kemudian menjadi orang yang paling kaya karena perusahaan minyak negara (Permina tahun 1957, sekarang Pertamina). Ia hidup di beberapa rezim (Orde Lama dan Orde Baru) yang mana hukum dapat diperjualbelikan. Namun, ada kesuksesan pengusaha lainnya yang secara finansial lebih mandiri akan tetapi menggunakan legitimasi penguasa untuk menjamin keamanan usahanya yaitu Acum Kasum, anak seorang petani kaya di Jawa Tengah dan pengusaha kaca mata. Baca, Denny Lombard. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia, 2005)., hlm. 122-123.

³⁶⁶ Lombard., *Nusa Jawa, Jaringan Asia*, hlm. 112-113

dilakukan oleh borjuasi golongan pedagang dan keturunannya antara lain yaitu pemanfaatan lembaga pendidikan modern baik dalam maupun luar negeri. Kepemilikan terhadap basis ekonomi yang kuat menjadikan kelompok ini cukup mampu membiayai pendidikan meski ini bukanlah karakteristik borjuasi yang utama. Borjuasi sebagaimana yang ada di Barat mempunyai gaya hidup yang sangat tinggi, high consumption, dan dalam hal kebudayaan borjuis di Kotagede banyak diterapkan oleh kelompok Kalang. Pada akhir kekuasaan Mataram para golongan haji mengirim anaknya untuk sekolah di luar negeri, di Mesir dan Mekkah juga ke negara Eropa. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan zaman yang semakin cepat sementara kelompok ini harus bertahan sebagai komunitas yang berstatus tinggi di masyarakat. Di Indonesia para borjuis mengadaptasikan kelompok dengan kebutuhan zaman misalnya memanfaatkan pendidikan untuk membentuk kelas baru yaitu kelas profesional, dosen, guru, hakim, birokrat dan pada prinsipnya kelompok terdidik ini merupakan metamorfosis dari kelompok dagang yang diharapkan akan mengisi posisi kelas baru: kelas borjuasi modern.

Strategi kedua adalah, terlibat dalam politik pergerakan. Para keturunan borjuis Kotagede diluar Kalang aktif terlibat dalam politik pergerakan untuk membangun jaringan kelompoknya agar tidak mudah dipatahkan oleh aktor lokal sehingga perlu membangun sekutu di luar daerahnya termasuk dalam hal ini adalah sekutu bisnisnya. Meskipun orang Cina tidak boleh tinggal di Kotagede akan tetapi aktivitas ekonomi diluar selalu bertemu dengan pedagang kaya dari Kotagede sebagai implikasi dari perdagangan yang luas. Untuk mempertahankan kemenangan dan menjamin kelangsungan akumulasi kapital di masa depan, para pengusaha fraksi kapital pribumi itu berlomba menjadi politikus-pengusaha dengan merebut kursi lembaga eksekutif/legislatif negara. Jalan termudah adalah memasuki partai politik berbasis massa besar agar pasti memenangi pemilu. Inilah alasan utama kenapa partai-partai besar sekarang dicari dan diperebutkan borjuasi.³⁶⁷

Strategi ketiga, adalah pembentukan dinasti keluarga “Bani” sebagai penopang dalam aktivitas merebut dan mempertahankan basis ekonomi. Mempunyai jumlah anggota keluarga besar adalah satu kehormatan tersendiri bahkan dengan menikah lebih dari satu sebagai upaya

³⁶⁷ Pertarungan fraksi kapital dominan pada era orde Baru ditangan kroni Soeharto dan ABRI bakal sulit membongkar semua bisnis besar itu berbau KKN, rente, serta terkait dengan bisnis keluarga Soeharto dan ABRI. Mereka juga meneruskan karakter komprador terhadap fraksi kapital asing. Dalam perspektif ini, jelaslah bahwa politikus-pengusaha yang mengendalikan negara sekarang berasal dari fraksi kapital konglomerasi pribumi, mengatasi fraksi kapital konglomerasi Soeharto, nonpribumi, dan ABRI. Tapi mereka tetap menjaga fraksi kapital BUMN dan internasional sebagai sumber dan jaringan kapital untuk menopang perkembangan akumulasi kapital mereka.

pembentukan kekuatan keluarga. Mereka berkumpul dalam perkumpulan keluarga ibarat masyarakat tani sementara mereka adalah pedagang. Mereka memang dilahirkan secara genealogis yang sama. Kotagede sebagai Kota Genealogis mendapatkan justifikasi melakukan pelacakan terhadap dinasti ekonomi semenjak zaman kolonial, kemerdekaan, dan kondisi mutakhir yang terdiri dari beberapa keluarga saja (kesamaan asal-usul keturunan) yang mempunyai dampak terhadap karakteristik sosial dan politik masyarakat Kotagede. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa pengusaha di Kotagede pada umumnya muncul karena proses pewarisan secara turun-temurun yang mengarahkan sistem ekonomi yang bersifat kekeluargaan. Oleh karena itu, kegiatan usaha di Kotagede yang mampu bersaing dan menguasai pasar berasal dari kelompok tertentu yang mempunyai hubungan kekeluargaan misalnya Anshor Silver, LA Silver, Toms Silver, Swalayan WS, Swalayan Maga, perusahaan konveksi, bisnis perhotelan dan transportasi, dan lain-lain yang turun temurun. Keluarga pebisnis konveksi atau batik juga tidak jauh berbeda yang berasal dari keluarga besar pedagang 3K (Kauman, Kotagede, Karangakjen), yang secara turun temurun menggeluti usaha dan bisnis perdagangan. Model genealogis ini juga berlaku dalam afiliasi gerakan sosial dan juga gerakan politik praktis.³⁶⁸

Ketiga, Mengapa terjadi kemunduran kelas borjuasi di Kotagede dan Nusantara? Di Kotagede kelompok dagang besar sudah hilang semenjak awal kemerdekaan dan strategi yang mereka gunakan mungkin kurang pas sehingga jiwa kapitalisme tidak abadi dalam kepemilikan harta kekayaan. Apakah ini yang disebut kapitalisme semu yang rentan dengan situasi sosial dan politik di luar dirinya ataukah memang kapitalisme sejati tidak ditemukan di negeri ini. Hal ini juga akan dipertanyakan peranan borjuasi dalam demokrasi yang hanya samar-samar dan hanya menjadi pintu masuk untuk upaya mengabadikan kekayaan atau ketakutan terhadap kemunduran finansial.

Keterlibatan kelompok profesional non bisnis dari keturunan para pedagang ini kemudian memberikan kontribusi atas melemahnya kelompok borjuasi termasuk juga dikarenakan sikap guyub yang sangat bertentangan dengan karakteristik kapitalis yang sangat kuat untuk akumulasi modal sebagaimana di Eropa. Hal ini juga ditopang oleh semangat ideologisasi yang sangat dominan dalam perjalanan kelompok borjuasi sehingga borjuasi

³⁶⁸ Untuk memperkuat basis argumentasi di atas ada satu bukti pelacakan tokoh yang bisa dipastikan dari sumber sumur yang sama (satu genealogis), Meskipun generalisasi problematik karena ada beberapa aktor atau tokoh yang mempunyai peran penting diluar keluarga Haji Mukmin, misalnya keluarga Jalal Suyuti, Bahuwinangun dan Atmosudigdo

sebagai kelas tidak nampak di Kotagede, mereka hanya menjadi simbol orang kaya di tengah masyarakat yang masih mengedepankan model masyarakat agraris-pedalaman.

Kondisi di Kotagede tersebut dapat dijadikan cermin jika melihat borjuasi nasional yang tidak jauh berbeda. Mereka tidak dianggap atau tidak menganggap sebagai kelas sosial tersendiri. Mereka berdagang dan menduduki jabatan politik bukan untuk atau atas kesadaran kelas melainkan untuk memperjuangkan ideologi meski hal ini mulai bergeser kepada ideologi keuangan yang maha esa atau kapitalis. Salah satu pertanyaan untuk borjuasi, dimanakah kaum borjuasi ketika negara ini dihantam oleh krisis ekonomi 1940-1970, dan tahun 1997-sekarang? Dimanakah kelas borjuis ketika negara didera oleh persoalan sosial dan politik yang cukup mengancam sendi-sendi demokrasi dan perekonomian rakyat? Pada situasi sulit seperti sekarang dimana peran para pengusaha besar, mengapa mereka tidak kelihatan peduli?. Kita semua tahu bahwa pengusaha besar itulah yang menikmati fasilitas negara, mereka yang menikmati kebijakan proteksi, subsidi, monopoli, dan penguasaan hutan dan sebagainya. Mereka yang mendapatkan pinjaman uang paling besar dari bank, mereka yang membeli tanah rakyat dengan harga murah karena ditopang oleh birokrasi.³⁶⁹

Tidak adanya kesadaran kelas borjuis inilah yang memberikan kontribusi kegagalan paling besar kenapa kelas ini tidak sungguh-sungguh dalam memerankan diri sebagai aktor perubahan, mengawal transformasi sebagaimana yang digambarkan dalam pengalaman Barat. Kelas borjuasi di Jawa atau di Nusantara dianggap hanya semakin memperumit dan menambah kompleksitas dalam pembelahan sosial karena borjuasi lahir diatas bangunan ideologi dan patronase yang sangat rentan dengan gejolak dan krisis yang terjadi di luar dirinya. Dan ke depan demokrasi tanpa dibangun oleh pilar kekuatan kelas borjuis yang mapan akan rentan dengan kemunculan elit penguasa dengan baju militer atau para spekulan politi atas nama saudagar yang mandiri sekalipun jika tanpa didukung oleh semangat partai yang berbasis kelas borjuis yang pro demokrasi maka impian Bottomore bahwa demokrasi akan kuat apabila adanya peran borjuasi yang kuat tidak akan terwujud.³⁷⁰

³⁶⁹ Pandangan fraksi PPP dalam musyawarah MPR dengan judul "Tuntutan Sejarah Pasti Berhasil", yang terangkum dalam buku Menuju Reformasi Politik, Ekonomi, dan Hukum, Perjuangan fraksi PPP dalam Sidang Umum MPR tahun 1998, Jakarta, Fraksi PPP, hlm. 573

³⁷⁰ Prasyarat demokrasi politik adalah terpenuhinya hak hidup, hak berbicara atau berpendapat, hak berorganisasi. Sementara kekuatan kritis masyarakat sipil selama ini diberangus dan dikooptasi kekuatan negara untuk mengendalikan seluruh aktivitas masyarakat di bawah negara korporatis Orde Baru. Kritisisme dan gerakan politik nilai (*values political movement*) mahasiswa merupakan jantung terakhir demokrasi, itulah yang ditakuti gerakan politik kekuasaan (*power political movement*) dari negara korporasi Orba. Kebijakan konglomerasi dilindungi oleh slogan kapitalisme *trickle down effect* yang melazimkan ketimpangan sosial ekonomi antara borjuis dan proletar. Padahal yang terjadi mimpi *trickle up effect* hanya merampas hak sosial, hak ekonomi, hak budaya masyarakat kebanyakan. Kebijakan yang memacu tumbuhnya puluhan juta wiraswasta, mikro, kecil, dan

Kesadaran kelas saudagar itu barangkali yang Jusuf Kalla mencoba mewacanakan dengan beberapa pernyataan bahwa Saudagar mempunyai prospek untuk menduduki kepemimpinan bangsa Indonesia ke depan³⁷¹ yang kemudian dibalas oleh beberapa *counter* dari kekuatan yang berseberangan. Bagi Kalla misalnya melihat banyak kepala daerah dan para saudagar berada di elit kekuasaan politik baik parlemen atau partai politik. Namun hal ini tidak lantas menemukan pembenaran bahkan sangat sulit sebab kekuatan borjuasi Indonesia tersebar di berbagai partai yang konon ideologis. Tidak diketemukannya partai sosial demokrat yang cukup kuat sebagai representasi perjuangan kelas atau hasrat kelas borjuasi untuk mentransformasikan politik aliran menjadi politik kelas sangat kecil. Jika ada kesadaran kelas itu ada maka corak perpolitikan Indonesia akan lebih sederhana dengan sistem berpartai sebagaimana yang ada di Inggris atau Amerika karena hakikatnya politik borjuasi adalah politik parlementer.

Fenomena yang muncul kemudian adalah lahirnya dwifungsi baru, yakni peran ganda para pengusaha atau sebagian menyebutnya kelas menengah yang merambah jabatan politik. Tapi, kondisi itu bukanlah sebuah tren baru. Sejatinya pribadi ganda para pengusaha sebagai penguasa juga sudah terjadi sejak lama, Di Orde Lama dan Orde Baru, sejumlah pengusaha menduduki jabatan publik akibat hubungan kroni kapitalis. Sejumlah pengusaha menikmati rente dari penguasa dengan memberikan imbalan finansial serta dukungan politik.³⁷²

menengah yang bakal menjadi basis pengembangan kelas menengah akan tetapi ini menghadapi ambivalensi manakala negara menciptakan peluang munculnya konglomerasi, oligarki modal nasional. Kebijakan pembangunan inilah sumber malapetaka krisis ekonomi yang berujung dengan tergulingnya rezim Soeharto pada Mei 1998. William Liddle, *Demokratisasi dan Kelas Menengah*, Majalah Tempo, 2004.

³⁷¹ Perang wacana terjadi antara aktor borjuasi yang berebut posisi *ruling elite*. Akan tetapi lebih menguat pasca terpilihnya Jusuf Kalla sebagai ketua Golkar, nyaris di tubuh partai beringin ini terjadi fraksi yang cukup ramai dikonsumsi media. Bagi kubu yang mendukung saudagar akan semakin merapatkan barisan dan bagi kubu lainnya seperti militer dan aktivis semakin menyerang kubu pedagang dengan beberapa argumentasi yang dibangun sebagai bentuk resistensi terhadap ekspansi borjuasi ke ranah politik. Perang wacana Akbar Tanjung (2007) dalam disertasinya yang berjudul "Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respon" yang menyinggung kepemimpinan saudagar dalam partai politik yang dinilai kurang pas karena logika yang dipakai seperti pedagang yakni mendapat keuntungan yang besar dengan pengorbanan yang kecil. Kutipan Akbar dari Dirk Tomas yang menuliskan bahwa "Terpilihnya Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2004 menunjukkan. Partai Golkar masih sangat dipenuhi oleh orang-orang yang sangat berorientasi kekuasaan". Tidak hanya dalam tubuh Partai Golkar terjadi akan tetapi juga dalam partai lain seperti PDIP, PPP, dan PAN dan sebagainya. Politik borjuasi itu akan berupaya mendapatkan kekuasaan untuk melindungi dan mempertahankan basis ekonomi kelompoknya.

³⁷² Dalam kasus Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra memulai bisnis sebagai perwira polisi yang memasok peralatan komputer dan alat tulis kantor bagi institusi polisi pada 1983 lewat Shinawatra Computer. Pada awal 1990an, perusahaan milik keluarganya, Shin Corporation mendapat konsesi cable TV, telekomunikasi. Konsesi ini didapat konon karena kedekatan Thaksin dengan pemerintah Thailand saat itu. Anonim, "Mewaspadaai peran ganda pejabat-pengusaha" <http://www.seputardonesia.com/edicaretak/perskop/mewaspadaai-peran-ganda-pengusaha-pejabat.html>

Tentu tidak sukar menyebut puluhan pengusaha lain dari beragam partai politik yang duduk di legislatif dan eksekutif dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal ini bisa dilihat pada tabel 3.1-3.3 (lihat daftar tabel). Ini yang memberikan satu gambaran bagaimana ekspansi borjuasi dalam ranah politik kekuasaan nasional (lebih jelas bisa dilihat tabel dalam lampiran halaman).³⁷³

Pada umumnya politik borjuasi menggunakan negara sebagai kendaraan untuk akumulasi kapital dan sumber daya ekonomi produktif. Tapi telaah kita menunjukkan borjuasi pribumi Indonesia sekarang menjadi politikus-pengusaha, langsung merepresentasikan kepentingannya sebagai eksekutif-legislatif negara dengan istilah pembentukan negara-dagang. Fajrul (2005), mengkritik cukup tajam :

“...Bila konsolidasi negara-dagang mencapai puncaknya, penulis meragukan kemungkinan menyelaraskan kepentingan akumulasi kapital dengan kepentingan publik dalam memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, gender, dan budaya. Bila tak selaras, setiap pertentangan kepentingan antara publik dan politikus-pengusaha akan disetarakan sebagai pertentangan negara versus masyarakat sipil yang berujung pada represi negara. Negara Orde Baru sering disebut sebagai negara Bonapartis--negara yang mengatasi kelas-kelas sosial—tapi negara-dagang adalah negara yang dikuasai pengusaha, pemilik kapital.”³⁷⁴

Sebagai respon atas konsolidasi politik borjuis, Jusuf Kalla (2006) membuat pernyataan di media massa bahwa:

“...reformasi di Indonesia telah membuka peluang bagi pengusaha atau kelompok pengusaha untuk mengisi lowongan kepemimpinan dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pemilu membutuhkan figur, intelektual, dan biaya. Kecenderungan tersebut sangat wajar ketika selama ini terdapat larangan bagi pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri berpolitik dan semenjak era reformasi peluang itu kemudian didorong untuk dapat dimanfaatkan. Diperkirakan jumlah pengusaha yang akan menjadi penguasa semakin besar pada masa-masa mendatang.”³⁷⁵

Bagi Kristiadi pernyataan tersebut dimaknai; Pertama, pengakuan bahwa pengusaha merupakan kelas sosial masyarakat yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan publik yang pada

³⁷³ Sumber: Majalah Gatra. edisi 13-19 September 2007, hlm 97

³⁷⁴ Ibid, <http://www.korantempo.com/news/2005/2/15/Opini/64.html>

³⁷⁵ Kompas, berita 28 November, 2006.

masa lalu ditempati PNS, TNI, dan Polri. Kedua, kalangan pengusaha dianggap lebih mempunyai peluang dan kemampuan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya untuk merebut dukungan politik maupun dalam mengelola penyelenggaraan negara. Ketiga, masa depan politik di Indonesia akan lebih diwarnai peran pengusaha.³⁷⁶ Disini etika “berbisnis politik” yang sehat sangat penting, terutama pengusaha yang menjadi pejabat publik yang mudah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk membangun imperium bisnisnya.³⁷⁷

Kecenderungan migrasi pengusaha³⁷⁸ dalam dunia politik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Pertama, tipologi rezim penguasa.³⁷⁹ Kedua kemandirian partai politik.³⁸⁰ Ketidakmandirian partai politik inilah yang memicu masuknya kelas borjuis ke ranah partai politik sebagai jawaban atas pentingnya finansial dalam menjalankan roda partai politik. Maka tidak salah kalau Jusuf Kalla yang didukung kekuatan kapital dapat merebut posisi ketua umum Golkar, begitu juga Sutrisno Bachir sebagai Ketua Umum PAN.³⁸¹ Kelompok borjuasi lainnya yang kemudian melakukan ekspansi ke dunia politik praktis sebagai akibat dari ketiga faktor diatas.³⁸²

³⁷⁶ J. Kristiadi. Fenomena dwifungsi pengusaha-penguasa. opini Kompas. 28 November 2006, hlm.8

³⁷⁷ J. Kristiadi, *Ibid*, hlm.8

³⁷⁸ Pengusaha juga diartikan dengan saudagar atau pebisnis yang kemudian disebut kelompok borjuasi.

³⁷⁹ Sebagaimana telah ditulis di awal bahwa rezim sangat berpengaruh atas pilihan kelompok borjuis Kelompok borjuis yang kebanyakan dari saudagar selalu membuat kalkulasi kapan politik menguntungkan dan kapan mengancam. Pilihan terjun di dunia politik sangat terlihat bila kita mengamati secara cermat pada masa Orde Baru dan Reformasi

³⁸⁰ Kedua, logika partai yang tidak lagi mandiri. Riswanda Imawan (2005) dalam Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik UGM menyatakan bahwa momentum reformasi gagal dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan revitalisasi, membangun kemandirian dan otonomi dari negara sehingga partai politik dan parlemen diharapkan objektif dalam menilai kinerja pemerintah tanpa terjebak pada dukungan partai kepada penguasa yang memang membiayai partai politik selama ini. Kegagalan partai politik ini mengakibatkan reformasi tidak pernah menyentuh substansi. Masih cukup banyak bukti bahwa parlemen menjadi alat stempel golongan borjuis. Lihat. Riswanda Imawan. *Pergulatan Setengah Hati Partai Politik Mencari Jati Diri* (naskah pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik UGM), hlm 11

³⁸¹ Jusuf Kalla pemilik Grup Bukaka, Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Presiden Republik Indonesia, sementara Sutrisno Bachir adalah pemilik Group Ika Muda.

³⁸² Diantaranya kita bisa melihat beberapa pemilik kapital yang memegang jabatan dalam partai politik seperti: Surya Paloh (Grup Media/Metro TV, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar), Arifin Panigoro (Grup Medco, fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Sementara pemilik kapital yang menduduki rangkap jabatan di partai politik, pemerintahan jauh lebih banyak yaitu; Agung Laksono (Grup Hasmuda, mantan Presiden Direktur ANTV, Ketua DPR, Wakil Ketua Partai Golkar), Aburizal Bakrie (Grup Bakrie dan Bumi Resources, Menteri Kesejahteraan Sosial, Mantan menteri Koordinator Perekonomian), Fahmi Idris (Grup Kodel, Ketua Partai Golkar, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Yusuf Asy'ari (kader Partai Keadilan Sejahtera. mantan eksekutif RCTI, mantan Menteri Perumahan Rakyat). Sugiharto (mantan Direktur Keuangan Grup Medco, kader Partai Persatuan Pembangunan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara). Baca M. Fadjoel Rachman, *Bangkitnya Negara-Dagang*, Koran Tempo edisi Selasa. 15 Februari 2005 atau bisa dibaca di <http://www.korantempo.com/news/2005/2/15/Opini/64.html>

Dengan demikian, karakter pragmatis yang melekat pada pengusaha apabila bersekongkol dengan pelaku politik pragmatis, dikhawatirkan akan semakin menjauhkan kelompok borjuasi dengan rakyat kebanyakan. Akibatnya, demokrasi bagi rakyat hanya sekadar seremoni politik golongan borjuis yang mempunyai jabatan untuk menghibur rakyat dengan program karikatif.

Samsudin Haris (2007) menilai bahwa kemunculan pengusaha ke pentas politik dan pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari kecenderungan pembangunan ekonomi yang sangat neoliberal meski fenomena demikian bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini bisa dianalisa dari keberadaan Syariat Islam yang banyak dipelopori oleh kaum saudagar kaya seperti pendirinya sendiri H.Samanhudi. Hanya perbedaannya saudagar tempo dulu tidak terjerat oleh mekanisme kapitalisme global. Jusuf Kalla juga membenarkan hal ini bahwa pada awalnya banyak partai politik yang dipelopori oleh saudagar.³⁸³ Sementara Facry (2007) berpendapat bahwa terjunnya saudagar ke ranah politik sebagai hasil perubahan struktur sistem kekuasaan di negeri ini pasca tumbangannya sistem lama saat Reformasi 1998.

Tesis yang mengatakan bahwa demokrasi bakal tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi. Beberapa pengusaha minyak ini kebenaran doktrin Moore tersebut dan akhirnya mereka memutuskan untuk terjun berpolitik.³⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran peta politik yang cukup signifikan yaitu para pengusaha yang awalnya berdiri di belakang politisi militer atau aktivis, kini para saudagar sedang menunjukkan jati dirinya bahwa mereka bisa mengendalikan politik secara langsung. Kelompok ini mencoba mengambil alih kekuasaan politik dan mencoba memberikan peranan yang lebih vital dalam jagat politik sebagai elemen yang mapan secara ekonomi. Ekspansi politik borjuasi ini bukan tanpa perlawanan sebab di tengah borjuasi Indonesia yang remang-remang terdapat kekuatan kaum marginal, buruh, petani dan nelayan yang juga punya *power* untuk melakukan perubahan secara radikal maupun kompromistis.³⁸⁵ Dengan kesadaran kelas

³⁸³ Peranan kaum saudagar dalam Sarikat Islam maupun Sarikat Dagang Islam sangat jelas menurut Jusuf Kalla seperti yang dilakukan oleh H. Samanhudi, pedagang batik asal Solo. Pernyataan ini sebagai jawaban atas *discourse* yang terjadi pasca presentasi disertasi Akbar Tanjung yang mengandung pro dan kontra. (Jusuf Kalla dalam wawancara yang dimuat dalam Gatra Edisi 13 September 2007, hlm, 98)

³⁸⁴ Boleh jadi, ini pula yang mendasari pemerintah Orde Baru ketika menerapkan dwifungsi ABRI. Yaitu sejumlah pejabat militer menduduki jabatan sipil atau berposisi strategis di dunia usaha. Pasca-Soeharto tumbang pada 1998, lewat gerakan reformasi mahasiswa, peran dwifungsi ABRI dihapuskan. Militer kembali ke barak

³⁸⁵ Borjuasi sudah menguasai jaringan media baik cetak-maupun elektronik. Kaum borjuis ternyata sudah jauh hari menyiapkan segala instrumen untuk maju dan terjun dalam pusaran politik praktis. Dengan kekuatan kapital, semua bisa diatasi. Negara butuh pengusaha untuk membiayai negara dan pemilik modal adalah satu-satunya kelompok yang bisa mengendalikan negara

tentunya, dengan terbentuknya kekuatan partai yang berbasiskan kelas untuk memberikan perubahan yang lebih radikal dengan berakhirnya politik aliran.

Sementara borjuasi Indonesia yang lahir dan dihidupi oleh rezim ini menghadapi tantangan yang berupa perang wacana dalam perebutan kekuasaan politik. Wacana yang diproduksi oleh kekuatan diluar borjuasi yaitu kubu militer dan kubu aktivis.³⁸⁶

Beberapa hal yang menjadikan golongan borjuis ini tetap mempunyai tempat dan peluang yang besar dalam kancah politik nasional mempunyai dampak baik dan buruk bagi demokrasi. Salah satu keburukannya adalah bahwa kecenderungan berkuasanya kelompok-kelompok saudagar yang bersifat ideologis hanya menjadi persekutuan bisnis politik untuk akumulasi kapital golongannya dan menutup saluran politik kelompok *civil society* yang lain yang kritis seperti kelompok intelektual. Golongan borjuasi seperti ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan demokrasi sebagaimana Eropa. Akan tetapi di Indonesia borjuis tidak menunjukkan peranan tersebut dan cenderung hanya menjadi simbol golongan kaya. Salah satu sisi positif kepemimpinan kaum saudagar adalah sebagaimana cita-cita ideal adalah terwujudnya *good and clean goverment*, tidak korupsi karena diasumsikan kaum borjuis ini telah memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dan partai politiknya.³⁸⁷ Namun semua ini masih perlu diuji kebenarannya.

Dalam konteks kehidupan politik semacam itu rakyat berharap tampilnya kaum borjuis sebagai penguasa yang mempunyai kemampuan dan daya tahan terhadap godaan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan hanya mencurahkan perhatian untuk melayani publik. Fungsi ganda pengusaha merangkap sebagai penguasa tanpa disertai dengan basis ekonomi mapan dan ketahanan terhadap gejolak ekonomi global dikhawatirkan akan berakhir dengan tragis sebagaimana yang pernah terjadi di Kotagede yaitu keruntuhan borjuasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal akibat fundamen ekonomi yang sangat lemah

Kombinasi politisi dan borjuasi juga dikhawatirkan akan memproduksi pelaku politik yang haus kekuasaan, dan oleh sebab itu akan menyedot kekayaan negara guna membangun dinasti bisnis bagi kelompoknya. Skenario akan semakin buruk kalau akumulasi kapital juga

³⁸⁶ Kedua kelompok ini dianggap yang berani dan vokal meneriakkan perlawanan kelompok borjuasi. Kubu elit militer juga sedang berlomba-lomba memasuki kendaraan yang bernama partai politik untuk dijadikan media agregasi kepentingan. Banyak jenderal purnawirawan berada di pucuk pimpinan partai politik sampai menjelang pemilu 2009. Salah satu titik kelemahan kaum borjuasi adalah tradisi wacana dan pemikiran dalam opini media. Hal ini menjadi kelebihan kelompok intelektual dan aktivis. Kelompok akademisi membuat jaringan berbagai LSM, pusat studi atau konsultan politik yang sering melakukan berbagai macam survei atau polling dengan tingkat pengaruh yang cukup signifikan.

³⁸⁷ Di Bahasakan oleh penulis dari pendapat yang dikemukakan oleh pengamat politik Samsudin Haris dan Facry Ali dalam Tempo edisi 13-19 September 2007, hlm. 97

melibatkan sumber yang berasal proses pencucian uang bisnis ilegal, dan sebagainya. Selain itu menghindarkan konflik kepentingan antara dunia usaha dan dunia pengabdian sebagai pejabat publik sangatlah sulit.³⁸⁸

Sebagai catatan akhir yang bercermin dari Kotagede bahwa apabila partai politik dan aktor politik menggerogoti negara untuk membiayai kegiatan politiknya, ini bisa menjadi awal kemunduran ekonomi dan demokrasi. Mancur Olson menggambarkan secara jelas dalam buku klasiknya, *The Rise and Decline Of Nations*. Kolaborasi diantara elite berpengaruh (politikus, birokrat, borjuasi) dalam memanfaatkan keuangan atau aset negara untuk kepentingan mereka sendiri akan menghancurkan perekonomian negara dan berujung pada kemunduran sebuah bangsa.³⁸⁹ Maka kepemimpinan politik di tangan saudagar perlu diwaspadai dan terus dilakukan upaya negosiasi agar kedaulatan rakyat dan demokrasi tetap terjaga demi terciptanya kehidupan yang adil secara politik dan sosial. Dan kita masih berharap ada kekuatan borjuasi yang independen dan menjadi representasi kelas sosial yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial.

BAGIAN 6

Epilog : Agenda Riset Lanjutan

Ada dua kelemahan yang menjadikan riset ini perlu dan harus dilanjutkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih kaya dengan analisa yang lebih kritis. *Pertama*, waktu penelitian yang sangat singkat, hanya berkisar antara 5-6 bulan saja dirasa kurang mampu merekam jejak-jejak perubahan sosial di tengah masyarakat terutama yang menyangkut kesadaran dan karakter individual. Ada baiknya kalau diadakan penelitian yang lebih serius lagi dengan tema kajian ekonomi-politik di Kotagede khususnya dan di beberapa kota tua, peninggalan kerajaan. Kedua, literatur yang mendokumentasikan perubahan sosial yang ada di Kotagede sebenarnya cukup tersedia akan tetapi penulisan dan abstraksi yang kurang menjadikan analisa sangat tidak tajam. Ada beberapa literatur yang ditemui dalam bahasa Belanda dan juga tidak tersedia dalam perpustakaan di lingkungan universitas. Banyak karya

³⁸⁸ Majalah Tempo edisi 27 November-3 Desember 2006

³⁸⁹ Anies Baswedan, *Semangat Partisan Menjelang 2009*, Majalah Tempo, Tokoh 2004 Pilihan Tempo, edisi khusus 27 Desember 2004-2 Januari 2005, hlm. 83

orang Belanda yang ditemui dalam daftar pustaka buku-buku klasik tentang Yogyakarta di masa yang lalu.

Dan akhirnya kembali penulis sampaikan pentingnya melanjutkan penelitian dengan tema borjuasi lokal dengan melihat perkembangan ekonomi politik *post* dan pasca Kolonialisme di tanah Jawa dengan spektrum kajian yang lebih luas dengan pisau analisis yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya masih banyak hal yang belum terjawab dari riset ini terutama mengenai bagaimana kontestasi pengusaha Jawa baik internal maupun dengan kekuatan eksternal. Makanya, bagi penulis kritik, saran, dan gugatan atas hasil penelitian ini menjadi penting bagi penulis untuk perbaikan di kemudian hari baik untuk penulis buku ini atau untuk keperluan penelitian berikutnya dengan tema yang serupa. Semoga membawa kemanfaatan yang luas untuk kepentingan riset berikutnya karena penulis menganggap penelitian genealogis mengenai borjuasi Jawa, golongan kaya pribumi di masa lalu, masih belum banyak tersedia.

Makanya menjadi penting menengok kembali peranan kolonialisme zaman kolonial dan mengenai pasang surut borjuasi Nusantara (*the decline of bourgeoisie*) dengan skala perspektif yang lebih luas. Perbedaan respon negara atas eksistensi borjuasi sebagai kelas sosial merupakan hal yang belum banyak dikaji dalam penelitian ini. Namun secara umum pendapat-pendapat umum telah disampaikan meskipun tidak detail. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Prasetyantoko, (1999), *Kaum Profesional Menentang Rezim Otoriter*, Jakarta, Graziado.
- AAGN Ari Dwipayana, (2001), *Kelas Kasta, Pergulatan Kelas Menengah Bali*, Yogyakarta, Lapera
- _____, (2004), *Bangsawan dan Kuasa, Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*, Yogyakarta, IRE
- Abdul Baqir Zein, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia* (1999), Jakarta: Gema Insani Press
- Abdul Munir Mulkhan, (1999), *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, Yogyakarta, SIPRESS

Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, 2000.

Abidin Kusno, (2007), *Penjaga Memori; Gardu di Pedesaan Jawa*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.

Adolf Hitler, (2007), *Mein Kampf, volume 1*, Yogyakarta, Narasi.

Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman Menguk Identitas Kampung Muhammadiyah*, (2001) Yogyakarta, Terawang

Aji Deni, (2000), *Konsolidasi Demokrasi, Menuju Keberlanjutan Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Yogyakarta, Kibar Press-UMMU Press

Akira Nagazumi, (1986), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Alfian, (1986), *Transformasi Sosial Budaya dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Jakarta, UI Press

Alwi Shihab, (1997), *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung, Mizan.

Anders Uhlin, (1998), *Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indonesia*, Bandung, Mizan

Anoninan Yermakova, Valentina Ratnikov, (2002), *Kelas dan Perjuangan Kelas*, (terj), Yogyakarta, Sumbu

Anonim, *Saudagar-saudagar Utang*, (1994), Jakarta, Jurnalindo Aksara Grafika, Kumpulan tulisan Bisnis Indonesia

Anonim, *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006*, Pemerintah Kota Yogyakarta

Anonim, *Buku Saku Kota Yogyakarta, 1995-1999*, Pemerintah Kota Yogyakarta

Anonim, (2002), *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta*, Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia.

Atmakusumah, *Sri Rumiati Atmakusumah (peny), Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya seri 2*, (1997), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Ayu Windy Kinasih, (2005), *Politik Identitas, Studi Penelitian Deskriptif Pergulatan Etnis Tionghoa Mempertahankan Eksistensi Identitasnya di Kota Solo*, (skripsi), Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Azhar Arsyad, (2003), *Perilaku Politik Elit Agama di Sulawesi Selatan, Kasus Enam Partai Politik peserta Pemilu 1999*, Sulawesi Selatan, Padat daya.
- Anonim, (2001), *Kecamatan Kotagede dalam Angka Tahun 2001*, Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta.
- Anonim, *Saudagar-saudagar Utang*, (1994), Jakarta, Jurnalindo Aksara Grafika, Kumpulan tulisan Bisnis Indonesia
- Bambang Purwanto, *Kekerasan dan Kriminalitas di Kota Pada Saat Transisi: Kotagede, Yogyakarta Pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan*, Makalah, 2004.
- Bambang Purwanto, (2001), *Reality and Myth Contemporary Indonesian History, Humaniora, XIII, 2*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Casper Schuurin, (2002), Roeslan Abdulgani, *Tokoh Segala Zaman*, Jakarta, PT Grasindo (anggota Ikapi).
- Chamamah Soeratno, Michael Vatikiotis, Djoko Suryo, C.Bakdi Soemanto, and GBPH H. Joyokusumo (eds.). *Keraton Jogja: The History and Cultural Heritage*. Jakarta: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat and Indonesian Marketing Association (IMA), 2002.
- Chen Guidi, Wu Chuntao, (2007), *China Undercover, Rahasia Dibalik Kemajuan China* (terj), Jakarta, Ufuk
- Clifford Geertz, terj., Aswab Mahasin, (1983), *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Pustaka Jaya
- _____ (1977), *Penjaja dan Raja. Perubahan Sosial Modernisasi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Darmanto Jatman, (1996), *Perilaku Kelas Menengah Indonesia*, Yogyakarta, Bentang
- Darwis Khudori, (2000), *Orang-Orang Kotagede*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya.
- Daryono, (2007), *Etos Dagang Orang Jawa, Pengalaman Raja Mangkunegara IV*, Yogyakarta, Pustaka Relajar-Pasca Sarjana IAIN Walisongo
- Denny Lombard, (2005), *Nusa Jawa Silang Budaya, Jaringan Asia*, Yogyakarta, Gramedia Pustaka Utama

- Dhamar Lestari, Kota Yogyakarta: *Ibukota Republik Indonesia dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1946-1949)*, Skripsi S1 yang tidak diterbitkan, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1997.
- Didik J. Rachbini, (2001), *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Grasindo-Gramedia Widia Sarana.
- _____ (2001), *Politik Ekonomi Baru, Menuju Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Djokosutono, Harun Al Rasid, (1982), *Ilmu Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Doyle Paul Johnson, (1988), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*, (Terj), Jakarta, Gramedia.
- _____ (1988) Robert M.Z. Lawang (alih bahasa), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1*, (Terj), Jakarta, Gramedia.
- Eric Hiari, (tanpa tahun), *Materialisme-Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, Yogyakarta, IRE
- Erich Fromm, (2004), *Konsep Manusia Menurut Marx*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fadel Muhammad, (2000), *Saya Pilih Jadi Pengusaha*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Firmanzah, (2007), *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Frans Magnis Suseno, (1992), *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta, Gramedia
- Francis Wahono, (2001), *Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta, Insist Press-Pustaka Pelajar-Cindelaras.
- Freek Colombijn dkk (ed), (2005), *Kota Lama, Kota Baru, Sejarah Kota-Kota Di Indonesia* (ter), Yogyakarta, Ombak
- Geoff Forester, (2002), *Indonesia Pasca Soeharto*, Yogyakarta, Tajidu Press
- Hadi Prayitno, Budi Santosa, (1996), *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Haryanto, *Kekuasaan Elite, Suatu Bahasan Pengantar*, (2005), Yogyakarta, PLOD-JIP UGM
- Haryatmoko, (2003), *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Kompas

- Henri Cambert-Loir, Hasan Muarif Ambary (ed.), (1999), *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Denys Lombard*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia-The Ford Foundation.
- Irwan Abdullah, (1994), *The Muslim Busnissmen of Jatinom, Religious Reform and Economic Modernization in a Central Javanese Town*, Universiteit Van Amsterdam,
- Kadar, (2005), *Pembelaan Al Quran kepada kaum tertindas*, Jakarta, Amzah
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa, Seri Etnografi Indonesia 2*, (1994), Jakarta, Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo, (1997), *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung Mizan-majalah Ummat.
- _____ (2001), *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang
- Kwik Kian Gie, (1999), *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Langgeng Sulistyio Budi, *Permasalahan Perkotaan pada Periode Revolusi: Kriminalitas di Yogyakarta, 1946-1948*, Lembaran Sejarah, 1, 2, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1997/1998
- Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia*, (2002), Jakarta, LP3ES-CPS SSS
- Lexy J. Moleong (2004), *Metode Penelitian Kualitatif (revisi)*, Bandung Remaja Rosda Karya.
- Max Lane, (2007), *Bangsa Yang Belum Selesai, Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto*, Jakarta, Reform institute
- M. Masyhur Amin, dkk, (1988), *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita dan YIIS
- M.C. Ricklefs, (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Penerbit Serambi
- Margaret George, (1986), *Australia dan Revolusi Indonesia*, Jakarta, PT Pantja Simpati
- Mitsuo Nakamura (terj), (1993), *The Crescent Arises over the Banyan Tree*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- _____ (1983), *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, (terj) Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

- Mohtar Mas'oe'd, (2003), *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Relajar
- MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, (1990), Surakarta, Institute Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan.
- Mubyarto, (1987), *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta, LP3ES.
- Muhammad Ruslan Hadi, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Perkawinan dan Hukum Waris pada Masyarakat Orang Kalang di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Perubahan-Perubahan dan Perkembangannya*, 1983, (Skripsi Fakultas Hukum UGM, tidak diterbitkan)
- Mutiah Amini, *Buruh Perak dan Perkembangan Politik Kotagede Tahun 1960-1965*, Skripsi S1 tidak diterbitkan, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1994
- Nur Khalik Ridwan, (2002), *Pluralisme Borjuis, Kritik Atas Nalar Pluralismo Cak Nur*, Yogyakarta, Galang Press
- Nur Syam, (2007), *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta, Lkis-IAIN Sunan Amper Press,
- Nurul Mubin, (2006), *Gagap Politik Kaum Santri*, Yogyakarta, Rumah Mistico
- Peter Carey, (2004), *Asal Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*, Yogyakarta, LKis
- Piotr Sztompka, (2004), *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, Prenada
- Priyono Tjiptoherijanto,(1983), *Ekonomi Indonesia Hubungan dan Ketergantungan*, Jakarta, Yayasan Media Bakti Nusantara.
- Rendra, *Memberi Makna Pada Hidup yang Fana*, (1999), Yogyakarta: Pebelan Jayakarta.
- Revianto Budi Santosa, Bambang Tri Atmojo, *Kotagede, Life Between Walls*, Jakarta, Gramedia, 2007.
- Revrisond Baswir, (1999), *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Relajar dan Idea
- Richard Tanter. *Kenneth Young*, Nur Iman Subono, dkk (ed), (1996) *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta, LP3ES

- Ruth Mc Vey, (ed), (1998), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ryadi Gunawan, *Jagoan dalam Revolusi Kita*, Prisma, No.8, Jakarta: LP3ES Agustus, 1981
- Saiful Mujani, (2007), *Muslim Demokrat, Islam Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Samuel P. Huntington, (1997), *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (terf), Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti
- Sarjana Sigit Wahyudi, (2000), *Dampak Agro Industri di Daerah Persawahan di Jawa*, Semarang, Mimbar-lkapi dan Ford Foundation
- Syarifuddin Jurdi, (2006), *Islam dan Politik Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Cendekia Press
- Sartono Kartodirdjo et al., ed., *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Depdikbud, 1976
- Selo Soemardjan, (1981), *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Selo Soemarjan (peng), *Migrasi, Kolonisasi, Perubahan Sosial*, Jakarta, Pustaka Grafika Kita.
- Sjahrir, (1994), *Pikiran Politik*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (2001), Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Sulardjo Pontjosutirto, *Beberapa Hal Tentang Orang Kalang*, Tesis Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1966
- Sutoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia, Runtuhnya Rezim Orde Baru*, (2003), Yogyakarta, APMD Press.
- Syahrir, (1994), *Ekonom Enak dibaca dan Perlu*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti
- T.B. Bottomore, M Alfan Alfian M (ed), (2006), *Elit dan Masyarakat* (terj), Jakarta, Akbar Tanjung Institute.
- Titi Surti Nastiti, (2003), *Pasar Di Jawa, Masa Mataram Kuno*, abad VIII-XI Masehi, Yogyakarta, Pustaka Jaya

Trias Setiawati, (2007), *Biografi Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir, Mutiara Nusantara dari Yogyakarta*, Yogyakarta, diterbitkan oleh Badan Wakaf Uii

Ucu Martanto, (2002), *Politik Perburuhan Pasca Orde Baru, Studi Pergeseran Model Akomodasi Antara Negara Modal, dan Buruh Dari Masa Orde Baru hingga Pasca Orde Baru Melalui Pendekatan teori Strukturasi*, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.

Uka Tjandrasasmita (ed), *Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Vedi R Hadiz, (2006), *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Orde Baru*, LP3ES, Jakarta.

Zainuddin Maliki, (2004), *Agama Priyayi, Makna Agama di tangan Elite Penguasa*, Yogyakarta, Pustaka Marwa.

Majalah/Jurnal

Agama dan Politik di Era Reformasi, Jurnal Penelitian Agama, vol. XIV, No. 2, Mei-Agustus 2005

Brosur AMM Kotagede, No.42 tahun XLII/1424-2003

Brosur AMM Kotagede, No.43 tahun XLII/1425-2004

Brosur AMM Kotagede, No.44 tahun XLIV/1426-2005

Brosur AMM Kotagede, No.45 tahun XLV/1427-2006

Brosur Idul Fitri, Angkatan Muda Muhammadiyah Kotagede, tahun 1428H/2007

Brosur, edisi No.46 Tahun XLV/1428/2007

Buku silsilah keluarga Anwar Rofii Nglodok, disusun oleh Arsjad bin Abdullah Umar, 2007/1428H

Buku silsilah keluarga, Buku Kenangan 50 Tahun Pernikahan H. Hadjid Muthohar dengan Hj Humana Rofi'ei, 2004

Buletin Idul Adhah, Fukopa, Kotagede, tahun 2005

David Efendi, *Konflik Pasca Pilkada dan Pendewasaan Demokrasi*, (makalah), naskah
Lomba penulisan essay Pilkada 2006, Fisipol UGM

Demokrasi atau kenapa demokrasi itu Buruk?, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, edisi 18,
tahun VI/2005, Insist, Yogyakarta

Demokrasi dan Formasi Sosial, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UNIASIA*, edisi
No.34/XIX/II/1997

Film “Profil Muhammadiyah dalam Muktamar Malang tahun 2005”, Pimpinan Pusat
Muhammadiyah

Film dokumenter Globalisasi di Indonesia, “The New Ruller”, Ursula Rilay (researcher)

Koran harian Kedaulatan Rakyat, Wawancara Charis Zubair, Minggu, tanggal 2 Desember
2007

Majalah GATRA, Membongkar Politik Saudagar, edisi 12 September 2007.

Majalah Prisma, Peran BUMN dalam Ekonomi Kapitalis, Demokrasi dan Kelas Menengah,
edisi No. 2, Tahun XXI, 1992.

Majalah Tempo, edisi 3 tahun pemerintahan SBY-JK, edisi 29 Oktober-4 November 2007

Majalah Tempo, Tokoh 2004 Pilihan Tempo, edisi khusus 27 Desember 2004-2 Januari
2005.

Priyambudi Sulistiyanto, Muhammadiyah, Local politic and Local Identity in Kotagede,
Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21, 2006

Website/Internet

http://trulyjogja.com/index.php?action-news.detail&cat_id=1&enews_id=825

www.google.co.id/search?hl=id&q=santri+kota+gede&btnG=telusuri&meta=

<http://www.mediaindo.co.id/resensi/details.asp?id=97>

<http://www.media-indonesia.com/resensi/details.asp?id=537>

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=61171&kat_id=166&kat_id1=&kat_id2=

<http://www.yogyas.com/id/yogyakarta-tourism-object/places-of-interest/kotagede/>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/06/0805.htm>

www.kompas.com

<http://kompas.com/kompas-cetak/0403/30/opini/933930.htm>

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_4.htm-_ftnrefl

www.google.co.id/search?hl=id&q=santri+kota+gede&btnG=telusuri&meta=

www.republika.co.id

www.muhammadiyah.or.id

www.marxist.com

<http://students.ukdw.ac.id/~22023053/Kotagede.htm>

<http://www.tembi.org/mataram/mataram01.htm>

<http://jogja.mediacenter.or.id/?dir=news&file=detail&id=1499>

<http://www.tembi.org/mataram/mataram08.htm>

PROFIL SINGKAT PENULIS

DAVID EFENDI, Lahir di Lamongan pada 23 Februari 1983, masa kecil dihabiskan di tengah komunitas buruh, tani, dan pekerja di selatan Pantura Lamongan, di tepi Bengawan Solo. Semenjak masih SMP sudah mengagumi karya-karya Pramoedya Ananta Toer seperti Tetralogi, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Sewaktu kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM aktif di Komap dan persma Balairung serta aktif di NGO, Parwi Foundation dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Aktivitas menulis di media massa seperti Kedaulatan Rakyat, Media Indonesia, Kompas, Jawa Pos, di Majalah Kuntum dan Suara hismag. Menjadi kontributor penulisan beberapa buku jurnalistik dan motivator serta terlibat di beberapa riset

akademis. Lulus dari UGM pada tahun 2008 dan sekarang sedang menempuh sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Sampai kini masih menekuni aktivitas sebagai direktur di LaPSI (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Insani) Yogyakarta. Sejak dua tahun terakhir ini menekuni dunia kefasilitatoran, *training* untuk pemberdayaan masyarakat atau komunitas. Pernah menjadi trainer salah satu program USAID di DIY dan Jawa Tengah selama kurang lebih dua tahun, Idealisme yang masih diperjuangkan adalah untuk menimba ilmu ke negeri jauh dan bisa mengaplikasikan ke dunia nyata di kampung, negaranya. Salah satu cita-citanya adalah mendirikan sekolah calon pemimpin, *youth political leadership school* yang akan memberikan pembelajaran bagaimana menjadi pemimpin yang tangguh dan pro rakyat. Kini tinggal di Lereng merapi, Rejodani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta bersama istri tercintanya Rifatul Anwiyah dan anak pertamanya Derrida Hafiz Hanafi. Bisa koresponden via email masdavid_4all@yahoo.com